



Katalog: 4104001
ISSN 2086-1036

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2025

Volume 22, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4104001
ISSN 2086-1036

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2025

Volume 22, 2025

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2025

Volume 22, 2025

Katalog : 4104001
ISSN : 2086-1036
Nomor Publikasi : 04200.25027

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xxxii+250 halaman

Penyusun Naskah:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pembuat Kover:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:
unsplash.com; freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2025

Volume 22, 2025

Pengarah: Ateng Hartono

Penanggung Jawab: Ahmad Avenzora

Penyunting: Budi Santoso

Penulis Naskah: Andry Poltak Lasriado Girsang
Nindya Riana Sari
Freshy Windy Rosmala Dewi
Kurniawan Tri Yulianto

Pengolah Data: Freshy Windy Rosmala Dewi
Dwi Trisnani
Elfrida Zoraya
Ari Purbowati
Heykal
Daniel Bastian Lubis

Penata Letak: Nindya Riana Sari

KATA PENGANTAR

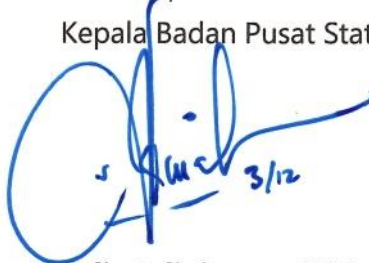
Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan di berbagai aspek kehidupan. Program pembangunan kelanjutusiaan seyogianya didasarkan pada data yang konkret dan komprehensif yang menggambarkan kondisi serta potensi penduduk lanjut usia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS menyusun Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025.

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 merupakan publikasi tahunan yang memuat informasi makro mengenai kondisi lansia dari aspek demografi, status pendidikan, kondisi kesehatan, potensi ekonomi, keadaan sosial, dan akses lansia terhadap berbagai fasilitas perlindungan sosial serta pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidupnya. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020, dan dilengkapi dengan data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

Publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai acuan untuk mengoptimalkan potensi lansia sebagai bagian dari kekuatan pembangunan dan kami harap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik masyarakat, akademisi, maupun penyusun kebijakan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga sehingga publikasi ini dapat selesai. Semoga hasil karya ini memberi manfaat sebesar-besarnya untuk dunia kelanjutusiaan Indonesia.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti



RINGKASAN

Sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, penduduk lanjut usia (lansia) terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, telah berpengaruh pada meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya angka kematian.

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki fase struktur penduduk tua (*ageing population*), di mana sekitar 1 dari 10 penduduk adalah lansia. Fenomena *ageing population* bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara (Heryanah, 2015). Akan tetapi, lansia dapat menjadi tantangan pembangunan ketika tidak produktif dan menjadi bagian dari penduduk rentan.

Berdasarkan aspek demografi, sebesar 11,93 persen penduduk Indonesia pada tahun 2025 adalah lansia dengan rasio ketergantungan lansia sebesar 11,00. Lansia lebih banyak berjenis kelamin perempuan dan tergolong lansia muda (60–69 tahun). DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan proporsi lansia terbesar yaitu 17,78 persen. Sekitar 53,98 persen lansia sebagai kepala rumah tangga. Sebanyak 67,15 persen lansia masih memiliki pasangan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, lansia yang berstatus kawin didominasi oleh lansia laki-laki (86,18 persen) dibandingkan lansia perempuan (49,66 persen), sedangkan lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh lansia perempuan (46,71 persen) dibandingkan lansia laki-laki (12,15 persen). Mayoritas lansia tinggal dalam rumah tangga yang berisi tiga generasi (33,44 persen) dan bersama keluarga inti (36,08 persen).

Menurut tingkat keaksaraan penduduk yang diwakili oleh indikator angka melek huruf (AMH), sebanyak 86,77 persen lansia dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf lansia laki-laki lebih besar daripada perempuan (92,09 persen berbanding 81,89 persen). Lansia yang tinggal di perkotaan memiliki AMH lebih besar daripada perdesaan (90,77 persen berbanding 81,55 persen). Selain itu, lansia dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi memiliki kemampuan membaca dan menulis yang jauh lebih baik. Sekitar separuh dari

jumlah lansia memiliki tingkat pendidikan tamat SD sederajat (34,13 persen) atau tidak tamat SD sederajat (27,28 persen), dengan angka rata-rata lama sekolah sebesar 6,03 tahun. Rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih besar daripada perempuan (6,84 tahun berbanding 5,29 tahun), lansia di perkotaan lebih besar daripada perdesaan (7,14 tahun berbanding 4,58 tahun), serta lansia dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik memiliki pengalaman bersekolah yang jauh lebih lama.

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan lansia untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga dan memberikan kesempatan untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Susenas 2025, akses lansia terhadap teknologi informasi dan komunikasi didapatkan dari informasi apakah masyarakat tersebut menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan komputer, dan menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Separuh (52,23 persen) lansia yang menggunakan telepon seluler dan sekitar satu dari tiga (34,13 persen) lansia mengakses internet. Menurut jenis kelamin, sekitar 59,91 persen lansia laki-laki dan 45,17 persen lansia perempuan memiliki akses ke telepon seluler. Kemudahan akses telepon seluler dan internet lebih dinikmati oleh lansia pada lansia laki-laki, lansia di perkotaan, serta lansia yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Indikator kesehatan lansia menurut Susenas mencakup persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan, yang diukur berdasarkan pengakuan responden atas gangguan fisik maupun psikis selama sebulan terakhir. Keluhan kesehatan mencakup penyakit umum, akut, akibat kecelakaan, atau kriminalitas, sementara angka kesakitan menunjukkan gangguan aktivitas harian akibat keluhan tersebut. Data Susenas Maret 2025 menunjukkan bahwa setelah tren penurunan dari 2018 hingga 2023, kondisi kesehatan lansia memburuk sejak 2024, dengan peningkatan keluhan kesehatan menjadi 44,02 persen dan angka kesakitan mencapai 21,21 persen pada 2025, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Sebagian besar lansia yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan, baik secara mandiri maupun melalui layanan rawat jalan, meskipun ada yang tidak berobat karena keterbatasan biaya atau merasa keluhannya ringan. Sekitar 77 persen lansia memilih berobat sendiri, dan hanya

47 persen yang menjalani rawat jalan, umumnya ke praktik dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Rawat inap dialami oleh 7–8 persen lansia dalam setahun terakhir, lebih banyak pada kelompok berpengeluaran tinggi dan yang tinggal di perkotaan, dengan rumah sakit pemerintah dan swasta sebagai tempat utama. Rata-rata lama rawat inap adalah sekitar 5–6 hari, dan cenderung lebih lama pada lansia dengan pengeluaran tinggi serta yang tinggal di kota.

Sakit pada lansia adalah hal yang wajar, sehingga penting bagi mereka memiliki jaminan kesehatan yang dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan. Pemanfaatan jaminan ini terlihat dari perilaku lansia saat menjalani rawat jalan maupun rawat inap, di mana sekitar 60,89 persen lansia menggunakan jaminan kesehatan saat rawat jalan dan 87 persen saat rawat inap. Lansia dengan pengeluaran lebih tinggi cenderung lebih banyak memanfaatkan jaminan kesehatan, terutama untuk rawat jalan. BPJS PBI menjadi jenis jaminan yang paling banyak digunakan, baik untuk rawat jalan (65,13 persen) maupun rawat inap (63,53 persen), karena iurannya ditanggung pemerintah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu, BPJS Non-PBI juga cukup banyak dimanfaatkan oleh lansia yang membayar premi secara mandiri atau melalui instansi tempat mereka bekerja.

Active ageing dapat didukung dengan pola hidup sehat seperti olahraga, menjaga pola makan, dan tidak merokok. Data Susenas Maret 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar lansia, sekitar tiga per empat, tidak pernah merokok. Namun, masih ada 21,09 persen lansia yang merokok setiap hari dan 2,21 persen yang merokok sesekali dalam sebulan terakhir, termasuk rokok tembakau dan rokok elektrik.

Berdasarkan data Sakernas tahun 2025, lebih dari separuh penduduk lansia (54,21 persen) bekerja. Persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih besar daripada lansia perempuan, yaitu 67,23 persen berbanding 42,27 persen. Ditinjau menurut klasifikasi desa, persentase lansia di perdesaan yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan lansia di perkotaan, yaitu 64,69 persen berbanding 47,72 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka persentase lansia yang bekerja cenderung semakin rendah. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 52,22 persen. Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaan utama,

sebanyak 32,76 persen lansia bekerja dengan status berusaha sendiri, 27,35 persen berusaha dengan bantuan buruh tidak dibayar, dan 5,36 persen dibantu buruh dibayar. Sementara itu, berdasarkan status jam kerja berlebih (*excessive hours*), sebanyak 20,05 persen pekerja lansia bekerja lebih dari 48 jam dalam seminggu.

Semakin rendah tingkat kesejahteraan, semakin meningkat pula proporsi lansia dalam populasi. Hal itu terlihat dari data Susenas Maret 2025, dimana persentase lansia di Indonesia yang berada di rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 20 persen teratas sebesar 20,68 persen, 40 persen menengah sebesar 37,57 persen, dan 40 persen terbawah sebesar 41,75 persen. Sebesar 82,96 persen rumah tangga lansia memenuhi kebutuhan hidupnya dari penghasilan anggota rumah tangga yang bekerja, kemudian dari kiriman pihak lain (11,12 persen), dan dari uang pensiun (5,43 persen). Masih sedikit lansia yang memiliki perlindungan finansial dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan maupun investasi.

Pada tahun 2025, mayoritas lansia tinggal di rumah dengan status milik sendiri atau milik anggota rumah tangga yang lain (93,15 persen), sisanya tinggal di rumah bebas sewa (5,09 persen), dan kontrak atau sewa (1,63 persen). Selain dukungan ekonomi, lansia membutuhkan dukungan sosial untuk menjaga kualitas hidupnya. Susenas Maret 2025 mencatat 20 dari 100 lansia pernah bepergian dalam setahun terakhir, terutama untuk mengunjungi teman atau keluarga (54,92 persen). Namun demikian, masih ada sekitar 1 dari 100 lansia pernah menjadi korban kejahatan.

Lansia merupakan salah satu dari kelompok rentan. Keberadaan program kesejahteraan lansia menjadi penting agar lansia terjamin masa tuanya. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, persentase rumah tangga lansia yang menjadi penerima PKH semakin meningkat. Pada tahun 2025, terdapat 16,19 persen rumah tangga lansia yang tercatat sebagai penerima PKH. Selanjutnya, persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapat BPNT/program sembako sebesar 22,74 persen dan sekitar 80,78 persen lansia telah tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

DAFTAR ISI

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2025

Volume 22, 2025

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xxi
PETUNJUK TEKNIS	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Penuaan Penduduk (<i>Ageing Population</i>)	3
1.2 Tantangan Penduduk Lanjut Usia	5
1.3 Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia	8
1.4 Ketersediaan Data	9
BAB II DEMOGRAFI	11
2.1 Komposisi Penduduk Lanjut Usia	13
2.2 Lansia di Rumah Tangga	16
2.3 Status Tinggal Bersama Lansia	18
BAB III PENDIDIKAN	39
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	41
3.2 Tingkat Pendidikan	44
3.3 Akses Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	49
BAB IV KESEHATAN	69
4.1 Kondisi Kesehatan	71
4.2 Tindakan Pengobatan	73
4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan	79
4.4 Kebiasaan Merokok	81

BAB V KETENAGAKERJAAN	107
5.1 Lansia Bekerja.....	109
5.2 Karakteristik Pekerja Lansia.....	112
5.3 Jam Kerja Lansia	114
BAB VI SOSIAL EKONOMI	141
6.1 Kesejahteraan Lansia	143
6.2 Rumah Layak Bagi Lansia.....	147
6.3 Kehidupan Sosial Lansia	149
BAB VII PROGRAM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.....	183
7.1 Strategi Nasional Kelanjutusiaan	185
7.2 Program Kesejahteraan Lanjut Usia.....	188
7.3 Program Kesejahteraan Lainnya.....	194
DAFTAR PUSTAKA	209
LAMPIRAN	217
Lampiran 1 Kuesioner Susenas Maret 2025.....	219
Lampiran 2 Metadata	245

DAFTAR TABEL

DEMOGRAFI

Halaman

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2025	21
Tabel 2.2	Persentase Lansia Menurut Kelompok Umur, 2025	22
Tabel 2.3	Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2025	23
Tabel 2.4	Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2025	24
Tabel 2.5	Persentase Lansia Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025	25
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	26
Tabel 2.7	Persentase Lansia Menurut Provinsi, dan Jenis Kelamin, 2025	27
Tabel 2.8	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	28
Tabel 2.9	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2025	29
Tabel 2.10	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	30
Tabel 2.11	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025	31
Tabel 2.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2025	32
Tabel 2.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	34
Tabel 2.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025	36

PENDIDIKAN

Tabel 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	52
Tabel 3.2	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	53
Tabel 3.3	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	54

Tabel 3.4	Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Karakteristik dan Jenis Fasilitas, 2025	55
Tabel 3.5	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025	56
Tabel 3.6	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025.....	57
Tabel 3.7	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025	58
Tabel 3.8	Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025	59
Tabel 3.9	Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025	60
Tabel 3.10	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	61
Tabel 3.11	<i>Sampling Error</i> Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia (Tahun) Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2025..	63
Tabel 3.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025	65
Tabel 3.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025	67

KESEHATAN

Tabel 4.1	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia Menurut Karakteristik, 2025	82
Tabel 4.2	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tindakan Pengobatan, 2025.....	83
Tabel 4.3	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir dan Rata-Rata Lama Rawat Inap Menurut Karakteristik, 2025	84
Tabel 4.4	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Lamanya Rawat Inap, 2025	85
Tabel 4.5	Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Untuk Rawat Jalan atau Rawat Inap Menurut Karakteristik, 2025	86

Tabel 4.6	Persentase Lansia yang Pernah Rawat Jalan dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025	87
Tabel 4.7	Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025	88
Tabel 4.8	Persentase Lansia menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025	89
Tabel 4.9	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	90
Tabel 4.10	Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.	91
Tabel 4.11	Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	92
Tabel 4.12	Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	93
Tabel 4.13	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	94
Tabel 4.14	Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan, 2025	95
Tabel 4.15	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok, 2025..	96
Tabel 4.16	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	97
Tabel 4.17	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	98
Tabel 4.18	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	99
Tabel 4.19	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	100
Tabel 4.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	101
Tabel 4.21	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025	102

Tabel 4.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2025	103
Tabel 4.23	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2025	104

KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2025.....	116
Tabel 5.2	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2025	117
Tabel 5.3	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2025	118
Tabel 5.4	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2025	120
Tabel 5.5	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025	121
Tabel 5.6	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2025	122
Tabel 5.7	Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	123
Tabel 5.8	Persentase Lansia Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	124
Tabel 5.9	Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2025	125
Tabel 5.10	Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2025	126
Tabel 5.11	Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal Menurut Provinsi, dan Karakteristik, 2025	128
Tabel 5.12	Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025	129
Tabel 5.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2025	130
Tabel 5.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	132

Tabel 5.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2025.....	134
Tabel 5.16	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2025.....	136
Tabel 5.17	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025.....	138

SOSIAL EKONOMI

Tabel 6.1	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025	153
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Karakteristik dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2025	154
Tabel 6.3	Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025.....	155
Tabel 6.4	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2025.....	156
Tabel 6.5	Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	157
Tabel 6.6	Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	158
Tabel 6.7	Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Maksud Utama Bepergian, 2025	159
Tabel 6.8	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	161
Tabel 6.9	Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025	162
Tabel 6.10	Persentase Lansia di Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025	163
Tabel 6.11	Persentase Lansia Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025	164
Tabel 6.12	Persentase Lansia Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025	165
Tabel 6.13	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025.....	166
Tabel 6.14	Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	167

Tabel 6.15	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025.....	168
Tabel 6.16	Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025	169
Tabel 6.17	Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	170
Tabel 6.18	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025.....	171
Tabel 6.19	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025.....	172
Tabel 6.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025.....	173
Tabel 6.21	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025.....	175
Tabel 6.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025.....	177
Tabel 6.23	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025	179
Tabel 6.24	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025	181

PERLINDUNGAN SOSIAL

Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Jenis Bantuan Sosial yang Diterima, 2025.....	198
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Jenis Kredit dan Klasifikasi Desa, 2025	199
Tabel 7.3	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2025	200
Tabel 7.4	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis, 2025.....	201
Tabel 7.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	202
Tabel 7.6	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima BPNT/Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025.....	203

Tabel 7.7	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025.....	204
Tabel 7.8	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	205
Tabel 7.9	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	206
Tabel 7.10	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima BPNT/Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	207
Tabel 7.11	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	208

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

PENDAHULUAN

Halaman

Gambar 1.1	Persentase Lansia Indonesia, 2020–2025	4
------------	--	---

DEMOGRAFI

Gambar 2.1	Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2050	14
Gambar 2.2	Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020–2025	15
Gambar 2.3	Persentase Lansia Menurut Karakteristik, 2025	15
Gambar 2.4	Persentase Lansia Menurut Provinsi, 2025	16
Gambar 2.5	Tren Persentase Rumah Tangga Lansia, 2020–2025	17
Gambar 2.6	Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2025	17
Gambar 2.7	Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2025	18
Gambar 2.8	Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2025	19
Gambar 2.9	Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Dalam Rumah Tangga, 2025	20

PENDIDIKAN

Gambar 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Jenis Kelamin (persen), 2021–2025	42
Gambar 3.2	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik, 2025 ...	43
Gambar 3.3	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi (persen), 2025	44
Gambar 3.4	Persentase Lansia Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025	45
Gambar 3.5	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2025	46
Gambar 3.6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Lansia (tahun), 2021–2025	46
Gambar 3.7	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik, 2025	47

Gambar 3.8	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi (tahun), 2025.	48
Gambar 3.9	Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Jenis Fasilitas, 2021–2025	50
Gambar 3.10	Persentase Lansia Terhadap Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Karakteristik, 2025	51

KESEHATAN

Gambar 4.1	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Lansia, 2018–2025.....	72
Gambar 4.2	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tindakan Pengobatan dan Distribusi Pengeluaran, 2025	73
Gambar 4.3	Persentase Lansia yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025	74
Gambar 4.4	Persentase Lansia yang Rawat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, 2025	75
Gambar 4.5	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2025.....	76
Gambar 4.6	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan, 2025.....	77
Gambar 4.7	Rata-Rata Lama Rawat Inap dari Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2025	78
Gambar 4.8	Persentase Lansia Menurut Durasi Rawat Inap dan Karakteristik, 2025	78
Gambar 4.9	Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan, 2025.....	79
Gambar 4.10	Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	80
Gambar 4.11	Persentase Lansia Menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2025.....	81

KETENAGAKERJAAN

Gambar 5.1	Persentase Lansia Bekerja, 2021–2025	110
Gambar 5.2	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik, 2025.....	111

Gambar 5.3	Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025	112
Gambar 5.4	Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Karakteristik, 2025.....	113
Gambar 5.5	Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025	114
Gambar 5.6	Persentase Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025	115

SOSIAL EKONOMI

Gambar 6.1	Persentase Lansia Menurut Distribusi Pengeluaran per Kapita dan Klasifikasi Desa, 2025.....	144
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa, 2025	145
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Berdasarkan Kepemilikan Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Karakteristik, 2025.....	146
Gambar 6.4	Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Klasifikasi Desa, 2025.....	147
Gambar 6.5	Persentase Lansia yang Berdasarkan Status Kelayakan Rumah Huni Huni Menurut Karakteristik, 2025	148
Gambar 6.6	Persentase Lansia Berdasarkan Status Berpergian Menurut Karakteristik, 2025.....	150
Gambar 6.7	Persentase Lansia yang Berpergian Menurut Tujuan Utama Berpergian, 2025	151
Gambar 6.8	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik, 2025	152

PERLINDUNGAN SOSIAL

Gambar 7.1	Capaian Indikator Visi Strategi Nasional Kelanjutusiaan	186
Gambar 7.2	Tingkat Kemiskinan Lansia Menurut Karakteristik, 2025.....	187
Gambar 7.3	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima PKH Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2025	190

Gambar 7.4	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BPNT/Program Sembako Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2025.....	195
Gambar 7.5	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menurut Kelompok Umur, 2025	196

<https://www.bps.go.id>

PETUNJUK TEKNIS

Metodologi

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang dilaksanakan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September.

Susenas Maret Tahun 2025 menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (BPS 2025). Namun pada publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai dengan level provinsi. Unit observasi Susenas adalah rumah tangga, sedangkan yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga dan individu. Selain mengumpulkan karakteristik rumah tangga, Susenas juga mengumpulkan karakteristik individu.

Jumlah sampel Susenas Maret tahun 2025 mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia (BPS 2024). Pada setiap blok sensus yang dipilih secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 rumah tangga dengan *systematic sampling* sehingga jumlah sampel blok sensus untuk Susenas Maret sebanyak 34.500 blok sensus. Stratifikasi dilakukan pada level blok sensus dan pada level rumah tangga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan *representative sample*. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (seluruh populasi blok sensus biasa Sensus Penduduk 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan), sedangkan *implicit stratification* dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Relative Standard Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2025 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *nonsampling error* dan *sampling error*. *Nonsampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2025 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$. Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas.

Konsep Definisi

Akses lansia terhadap teknologi informasi adalah persentase penduduk lanjut usia yang pernah memiliki akses dan menggunakan fasilitas teknologi informasi dalam tiga bulan terakhir, termasuk menggunakan fasilitas telepon seluler, komputer, atau jaringan internet.

Angka/Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka kesakitan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan terganggu aktivitas sehari-harinya akibat dari keluhan kesehatan tersebut.

Angka melek huruf lansia adalah kemampuan seseorang penduduk lanjut usia untuk bisa membaca dan menulis kata-kata atau kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan ekonomi.

Bepergian adalah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar kabupaten/kota tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam dapat merupakan kumulatif beberapa tempat/tujuan, namun tidak termasuk waktu perjalanan.

Distribusi Pengeluaran merupakan *share* pengeluaran dari masing-masing kelompok distribusi pengeluaran (40% penduduk dengan pendapatan rendah; 40% penduduk dengan pendapatan sedang; dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.) terhadap total pengeluaran.

Fasilitas kesehatan merupakan tempat penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berinteraksi dengan tenaga kesehatan dan menerima pelayanan

kesehatan berupa berobat jalan atau rawat inap. Fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, praktik dokter, klinik, puskesmas, pengobatan tradisional, dan fasilitas lainnya.

Jam kerja lansia adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan penduduk lanjut usia untuk bekerja, sebagai ukuran tingkat kelayakan waktu kerja. Klasifikasi jam kerja termasuk bekerja secara berlebihan (lebih dari 48 jam seminggu), bekerja secara penuh (35-48 jam seminggu), setengah pengangguran (kurang dari 35 jam seminggu), atau setengah pengangguran kritis (kurang dari 15 jam seminggu).

Jaminan kesehatan adalah fasilitas perlindungan untuk pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi penerima manfaat jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Termasuk jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS PBI, BPJS non-PBI, Jamkesda, asuransi swasta, maupun fasilitas dari tempatnya bekerja.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan bisa berasal dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI), non-PBI, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), asuransi swasta, dan jaminan kesehatan dari perusahaan tempatnya bekerja.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Jenis kelamin dicatat berdasarkan informasi pada dokumen kependudukan resmi yang dimiliki (KTP/KK), atau berdasarkan pengakuan penduduk.

Kebiasaan merokok lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang pernah atau masih merokok dalam sebulan terakhir, termasuk yang merokok setiap hari, tidak setiap hari, atau pernah merokok lebih dari sebulan terakhir.

Kelompok pengeluaran rumah tangga lansia merupakan pengelompokan rumah tangga lansia berdasarkan besaran nilai konsumsi dan pengeluaran rumah tangga per bulan, yang terdiri atas kelompok 40% persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Keluhan kesehatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikis dalam sebulan terakhir, baik karena penyakit yang biasa dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit

kepala, maupun karena penyakit akut atau kronis (meskipun tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya.

Kepala rumah tangga adalah salah seorang anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Klasifikasi Desa menggambarkan kelompok desa/kelurahan tertentu yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan, berdasarkan indikator komposit yang dibangun dari tiga variabel; kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum.

Korban Kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Kredit usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha, yang berasal dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari perbankan umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, perusahaan leasing, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), badan usaha milik desa (BUMDES), atau sumber kredit usaha lainnya.

Lansia bekerja adalah penduduk lanjut usia yang bekerja atau sementara tidak bekerja dalam seminggu terakhir.

Lansia bepergian adalah penduduk lanjut usia yang pernah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar kabupaten/kota tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam dapat merupakan kumulatif beberapa tempat/tujuan, namun tidak termasuk waktu perjalanan.

Lansia korban kejahatan adalah seseorang lansia atau harta bendanya yang dalam setahun terakhir pernah mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha percobaan tindak kejahatan, terdiri atas korban pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.

Lansia mengurus rumah tangga adalah penduduk lanjut usia yang dalam seminggu terakhir melakukan kegiatan lokal mengurus rumah tangga.

Lansia pengangguran adalah penduduk lanjut usia yang dalam seminggu terakhir tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan

suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Lansia tinggal bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau Bersama orangtua/mertua dalam satu rumah tangga.

Lansia tinggal bersama tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga.

Lapangan usaha pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang bekerja, mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dan dapat dikelompokkan menjadi sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa.

Penduduk lanjut usia atau lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas, terdiri atas lansia muda (umur 60–69 tahun), lansia madya (umur 70–79 tahun), dan lansia tua (umur 80 tahun ke atas).

Penghasilan lansia bekerja adalah rata-rata penghasilan dari penduduk lanjut usia yang bekerja, mencakup upah, gaji, dan pendapatan lainnya dalam sebulan. Upah Rendah adalah penghasilan yang kurang dari dua per tiga ($2/3$) nilai median penghasilan lansia bekerja.

Precarious Employment adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, yang mencakup bantuan sosial untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia yang berasal dari keluarga miskin.

Rasio ketergantungan lansia adalah perbandingan jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–59 tahun).

Rata-rata lama sekolah lansia adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk lanjut usia untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Rumah layak huni dihitung menggunakan pendekatan fasilitas dan bangunan tempat tinggal dengan kriteria kecukupan luas lantai minimal 7,2 meter persegi per kapita; memiliki akses air minum layak; memiliki sanitasi layak; dan memenuhi kriteria ketahanan bangunan (jenis atap, dinding, dan lantai).

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu bangunan tempat tinggal dengan pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu.

Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

Status disabilitas adalah status gangguan fungsional yang dialami oleh seorang penduduk, terdiri atas sebagai penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Termasuk penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Status ekonomi lansia merupakan pengelompokan penduduk lanjut usia berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangganya, yang terbagi atas 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Status kepemilikan tempat tinggal adalah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, dan status kepemilikan lainnya.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh dibayar, sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Status perkawinan adalah status perkawinan seorang penduduk berdasarkan catatan resmi yang sah secara hukum, termasuk sah secara adat, agama, atau pengakuan masyarakat sekitar. Status perkawinan terdiri atas belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

Status tinggal bersama (*living arrangements*) lansia adalah status anggota rumah tangga yang tinggal bersama lansia dalam suatu rumah tangga lansia, yang terdiri atas lansia tinggal sendiri, bersama pasangan (suami atau isteri), bersama keluarga (suami/isteri dan anak), tiga generasi (bersama anak/menantu dan cucu), dan lainnya.

Sumber penghasilan lansia diperkirakan melalui sumber pembiayaan rumah tangga lansia, yaitu sumber utama atau sumber penghasilan terbesar yang digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga lansia, yang terdiri atas anggota rumah tangga yang bekerja, kiriman uang atau barang, pensiunan, dan investasi.

Tindakan pengobatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan melakukan tindakan pengobatan, termasuk mengobati sendiri, berobat jalan kepada tenaga kesehatan, atau rawat inap di fasilitas kesehatan.

Tingkat pendidikan lansia adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk lanjut usia, terdiri atas tidak pernah sekolah, tidak tamat SD sederajat, tamat SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, dan tamat pendidikan tinggi (termasuk diploma, sarjana, dan/atau pasca sarjana).

Tujuan utama bepergian merupakan motif atau yang menjadi sebab utama terjadinya perjalanan/bepergian ke tempat/tujuan utama.

<https://www.bps.go.id>



BAB 1

PENDAHULUAN

<https://www.bimbel.id>



PENDAHULUAN

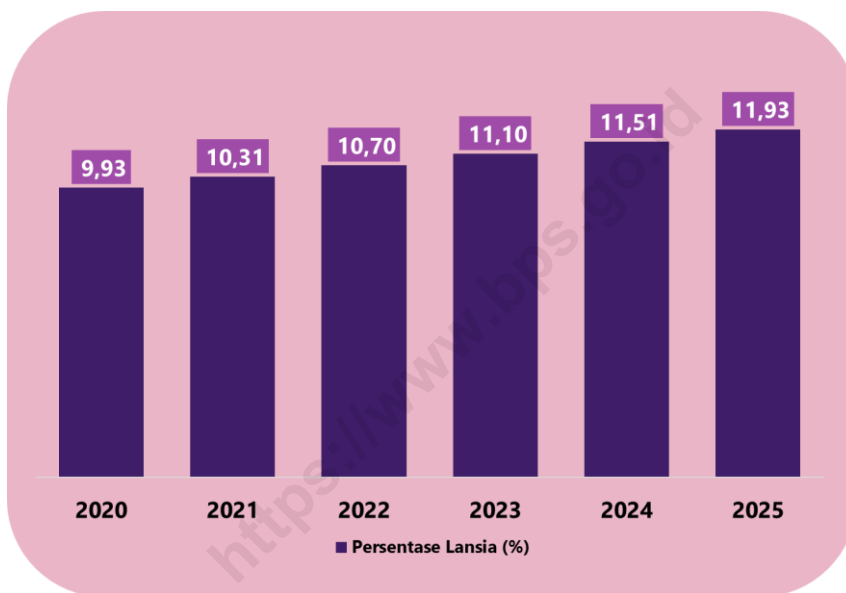
Fenomena penuaan penduduk atau *ageing population* menjadi isu penting yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat fertilitas telah mendorong bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia dari tahun ke tahun. Kondisi ini berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup, kemandirian, serta peran aktif lansia dalam pembangunan. Kehadiran regulasi tersebut menjadi dasar hukum penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan lanjut usia tidak hanya dilihat dari aspek pemeliharaan kesehatan, tetapi juga dari dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang layak. Dengan demikian, kebijakan yang responsif terhadap penduduk lansia diperlukan agar proses penuaan penduduk tidak menjadi beban, melainkan dapat menjadi potensi dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, data kelanjutusiaan memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pemetaan dan pengembangan strategi kebijakan yang tepat guna mencapai kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

1.1 Penuaan Penduduk (*Ageing Population*)

Fenomena *ageing population* atau penuaan penduduk menjadi salah satu isu demografi penting yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Peningkatan harapan hidup akibat kemajuan di bidang kesehatan, gizi, dan teknologi, serta penurunan angka kelahiran secara global, menyebabkan proporsi penduduk lanjut usia terus bertambah. Data WHO (2024) mencatat bahwa Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas di seluruh dunia diproyeksikan meningkat dari 1,1 miliar pada tahun 2023 menjadi 1,4 miliar pada tahun 2030. Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi, jumlah populasi

penduduk berusia 60 tahun ke atas di dunia kembali mengalami peningkatan dua kali lipat (2,1 miliar) pada tahun 2050 (WHO, 2024).

Struktur penduduk dapat dikatakan penduduk tua apabila proporsi lansia 60 tahun ke atas telah mencapai 10 persen atau lebih (Adioetomo 2018). Berdasarkan kriteria tersebut, Indonesia saat ini telah berada pada struktur penduduk tua (*ageing population*), tepatnya Indonesia telah memasuki *ageing population* sejak tahun 2021 silam. Selama lima tahun terakhir (2020–2025) persentase lansia Indonesia mengalami peningkatan dari 9,93 persen pada tahun 2020 menjadi 11,93 persen pada tahun 2025.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 1.1 Persentase Lansia Indonesia, 2020–2025

Perubahan struktur penduduk ini membawa konsekuensi besar, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga menuntut perhatian serius melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan lansia. Kondisi ini menandai bahwa Indonesia telah memasuki fase *ageing society* yang menuntut adanya strategi kebijakan yang komprehensif, terutama dalam aspek kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan, agar kelompok lanjut usia dapat tetap produktif dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan

pada tahun 2050, penduduk lansia diproyeksikan akan berjumlah 72,03 juta atau mencapai 20,90 persen dari total penduduk (BPS 2023).

Jika penduduk lansia tetap sehat dan produktif, Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengalami bonus demografi kedua. Menurut Bloom, Canning, dan Malaney (1999) dalam Hakim (2020) besarnya populasi lansia tersebut menciptakan peluang untuk bonus demografi kedua. Bonus demografi adalah sebuah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia nonproduktif. Sementara itu, bonus demografi kedua menggambarkan keadaan suatu negara atau wilayah ketika proporsi dari penduduk yang berusia tua semakin besar, namun masih tetap produktif dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara (Heryanah 2015). Perbedaan antara masa bonus demografi pertama dan kedua terletak pada aktor utamanya. Pada masa bonus demografi pertama, peran utama pembangunan dilakukan oleh penduduk usia produktif, sedangkan pada masa bonus demografi kedua, peran tersebut dipegang oleh penduduk usia nonproduktif yaitu lansia (Rapih 2019) dalam Hakim (2020).

Peningkatan penduduk lanjut usia yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari mengingat jumlah mereka yang berusia produktif saat ini berlimpah, namun beberapa tahun yang akan datang mereka akan memasuki usia lanjut atau pensiun.

1.2 Tantangan Penduduk Lanjut Usia

Seperti dua sisi mata uang, jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat di satu sisi merupakan prestasi pembangunan, namun di sisi lain juga merupakan tantangan. Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dapat memberikan dampak positif jika penduduk lanjut usia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Namun demikian, penuaan penduduk tersebut juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi, baik oleh lansia itu sendiri, keluarga lansia, masyarakat, dan pemerintah. Tantangan utama saat ini yakni bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia, mengingat bertambahnya usia umumnya disertai dengan penurunan kemampuan fisik dan penurunan

status kesehatan yang berakibat pada penurunan kapabilitas bekerja. Selain itu, penuaan penduduk juga diiringi dengan bertambahnya penyakit degeneratif dan disabilitas yang meningkatkan kebutuhan untuk pendampingan dan perawatan jangka panjang bagi lansia (Adioetomo 2018, 295). Jika Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut *ageing population*, dikhawatirkan negara akan menanggung beban biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menyiapkan generasi produktif saat ini dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Lansia seringkali digambarkan sebagai kelompok penduduk yang rentan. Menurut Bloom, dkk. (2011) dalam TNP2K (2020), terdapat tiga faktor utama yang menjadikan lansia rentan, yaitu tidak lagi produktif secara ekonomi, masalah kesehatan, dan kebutuhan pendamping sebagai pengasuh (*caregiver*). Permasalahan lanjut usia pada umumnya terjadi dengan menurunnya derajat kesehatan dan fungsi-fungsi motorik. Seiring bertambahnya usia, lansia secara alamiah mengalami penurunan fungsi fisiologis dan kognitif yang membuat mereka rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Menurut WHO (2012), beban kesehatan lansia di berbagai negara berpenghasilan rendah dan menengah umumnya berasal dari berbagai penyakit seperti jantung, stroke, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi peningkatan lansia adalah memastikan angka harapan hidup sehat turut mengalami peningkatan.

Selain kesehatan, tantangan lain bagi lansia yakni kemandirian finansial. Dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia, maka angka beban ketergantungan penduduk kelompok usia tidak produktif terhadap kelompok usia produktif juga akan meningkat (Infodatin Kemenkes 2014). Lansia umumnya sudah tidak produktif dan seringkali tidak memiliki kemandirian secara finansial. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 8,88 pada tahun 2020 menjadi 11,00 pada tahun 2025. Tingginya rasio ketergantungan lansia dapat diperparah dengan ketidaksiapan kondisi finansial lansia mengingat tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang

mampu menopang kebutuhan mereka. Banyak lansia yang tidak mempersiapkan kondisi finansial secara matang untuk hari tua, sehingga dalam satu struktur keluarga, lansia sering kali menggantungkan kebutuhan ekonominya pada anak atau anggota keluarga yang lebih muda.

Fenomena *ageing population* sebenarnya dapat berpotensi menjadi bonus demografi kedua apabila penduduk lansia masih dalam kondisi produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, salah satunya dengan mencapai penuaan aktif (*active ageing*). Penuaan aktif (*active ageing*) merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh WHO, yang memandang usia tua sebagai kesempatan untuk menjadi sehat, berpartisipasi di masyarakat, dan aman (termasuk aman secara ekonomi) (Amir 2022). Konsep *active ageing* diharapkan dapat memaksimalkan potensi lansia yang bertujuan menciptakan lansia yang mandiri baik secara fisik maupun finansial dan pada akhirnya meningkatkan jumlah lansia produktif di masa depan. Dorongan untuk menjaga produktivitas lansia sesuai dengan kapasitasnya, terutama melalui integrasi teknologi dan kebijakan demografi, diharapkan dapat menghindarkan penduduk lansia dari menjadi beban keluarga dan masyarakat dan sebaliknya justru dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain memberikan manfaat secara ekonomi, pemberdayaan lansia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU Nomor 13 Tahun 1998). Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan pola kebijakan penuaan penduduk yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembaruan paradigma yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kreativitas, dan intelektualitas penduduk lansia serta didukung oleh kolaborasi lintas sektor seyogianya dikedepankan sebelum jendela bonus demografi benar-benar tertutup rapat.

1.3 Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia

Penuaan penduduk merupakan suatu proses alamiah yang saat ini menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan pemangku kebijakan harus memberikan perhatian khusus kepada warga lansia mengingat penduduk lansia di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tantangan ke depan tentunya tidak mudah terutama dalam mempersiapkan agar para lansia tidak menjadi beban, namun harus menjadi potensi yang berkontribusi. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sebagai antisipasi dini diperlukan agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia senja mereka.

Pemerintah telah merespon tren penuaan penduduk (*ageing population*) baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun program pembangunan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat lansia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Sebagai konsekuensinya, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Nomor 13 Tahun 1998) dan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Permensos Nomor 5 Tahun 2018) juga telah disahkan guna memastikan lansia sejahtera dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial mengatur berbagai upaya dalam memperbaiki kesejahteraan lansia antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Pelayanan kesempatan kerja;
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; serta
7. Bantuan sosial.

Jumlah penduduk lansia yang terus bertambah memberikan tantangan tersendiri yang perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah telah menetapkan bahwa warga lansia harus diberi peluang untuk berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Kelanjutusiaan), pemerintah telah menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam menghadapi fase *ageing population*. Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, pemerintah pusat hingga daerah dapat menetapkan langkah yang sama untuk memastikan agar lanjut usia bisa tetap mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi target pembangunan daerah terkait kelanjutusiaan, antara lain: (1) peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; (2) peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia; (3) pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia; (4) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; dan (5) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia.

1.4 Ketersediaan Data

Dalam rangka pemetaan situasi dan kondisi terkini lansia di Indonesia, serta untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan dan program kesejahteraan lanjut usia, diperlukan data dan informasi terkait kelanjutusiaan,

baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk menyikapi kondisi tersebut, BPS menyusun data dan informasi terkait penduduk lanjut usia dan mengemasnya menjadi suatu bentuk buku publikasi “Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025”. Publikasi ini memuat informasi lansia yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan program kesejahteraan lanjut usia yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang lansia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kelanjutusiaan. Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP), dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga terkait. Publikasi ini disusun secara sistematis menjadi tujuh bagian. Ringkasan di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dari keseluruhan isi publikasi. Metodologi dan penjelasan teknis serta konsep definisi variabel dan indikator yang digunakan pada publikasi dirinci pada bagian awal publikasi. Penyajian data lansia menurut topik disajikan dalam bab-bab.

Bagian pertama (Bab 1) menyajikan bagaimana perjalanan penuaan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu dan tantangan yang akan dihadapi serta kebijakan pemerintah terkait kelanjutusiaan. Selanjutnya, Bab 2 membahas potret lansia Indonesia dari sudut pandang demografi. Sementara itu, Bab 3 membahas pendidikan lansia yang di dalamnya mengupas bahwa lansia juga memiliki potensi yang dapat diberdayakan guna menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya, Bab 4 membahas kesehatan lansia, pola pengobatan, kepemilikan jaminan kesehatan serta perilaku merokok lansia. Keterlibatan lansia secara nyata dalam menggerakkan perekonomian negeri dibahas pada Bab 5 Ketenagakerjaan. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lansia dijabarkan pada Bab 6. Terakhir, program-program kesejahteraan lanjut usia termasuk perlindungan sosial yang sudah diterima oleh rumah tangga lansia disajikan pada Bab 7.



BAB 2

DEMOGRAFI

<https://www.bimbel.id>

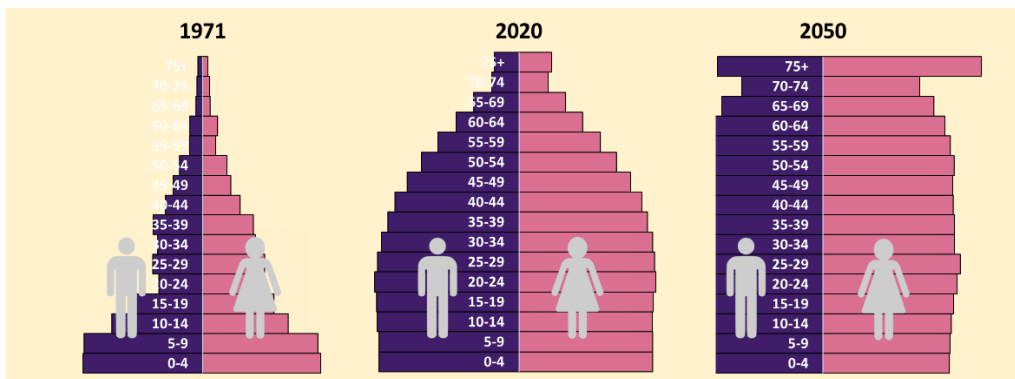


DEMOGRAFI

Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus meningkat. Selain jumlah, persentase penduduk lansia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Lonjakan ini dipicu oleh menurunnya angka kelahiran dan kematian, serta kemajuan di bidang kesehatan yang memperpanjang umur harapan hidup. Semua kondisi ini menandai transisi demografi menuju struktur penduduk tua. Tingginya jumlah lansia akan menjadi tantangan pembangunan karena dapat memberi dampak positif, tetapi bisa juga berdampak negatif. Jika penduduk lansia sehat dan produktif, maka hal tersebut bisa menjadi bonus demografi yang kedua bagi Indonesia (Wahyudi 2019). Oleh karena itu, jumlah penduduk lansia yang besar itu harus disikapi secara bijak untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.

2.1 Komposisi Penduduk Lanjut Usia

Indonesia sedang mengalami perubahan demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, sebagai dampak dari meningkatnya harapan hidup dan menurunnya angka kelahiran. Transformasi ini terlihat jelas dalam bentuk piramida penduduk yang berubah dari dominasi usia muda pada tahun 1971 menjadi struktur yang lebih seimbang pada tahun 2020, dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan pada kelompok usia dewasa dan lansia. Proyeksi tahun 2050 menunjukkan bahwa bagian atas pada piramida, kelompok usia tua, akan semakin melebar, menandakan bahwa Indonesia akan memasuki era penuaan penduduk (*ageing population*). Perubahan ini menuntut kebijakan yang adaptif di bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi untuk menjawab kebutuhan populasi lansia yang semakin besar.

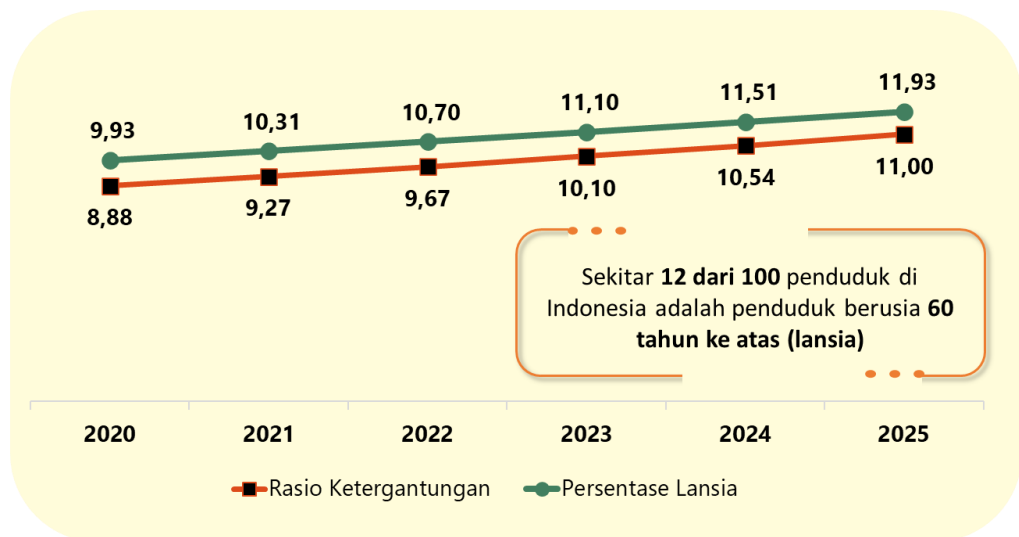


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk 2050

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2050

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, kelompok lansia mencakup 11,93 persen dari total populasi (Gambar 2.2), menandakan bahwa Indonesia telah memasuki tahap struktur demografi menua. Ciri utama dari fase ini adalah proporsi penduduk lansia yang telah melampaui ambang batas 10 persen (Cicih 2018).

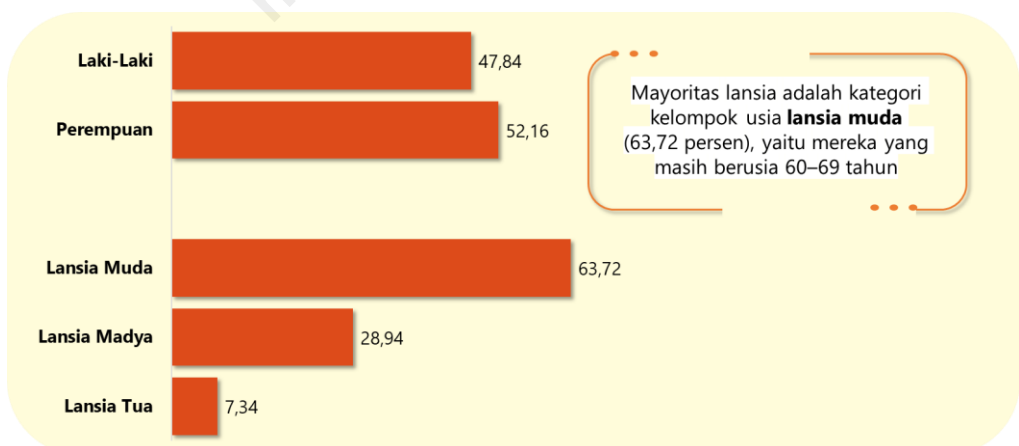
Salah satu permasalahan dari peningkatan jumlah lansia adalah peningkatan rasio ketergantungan lansia. Banyak yang beranggapan bahwa lansia merupakan beban tanggungan bagi anggota rumah tangga yang masih produktif secara ekonomi. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan persentase lansia, rasio ketergantungan lansia juga mengalami peningkatan. Ketergantungan lansia ini juga menandakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk lansia akan menambah beban ekonomi penduduk usia produktif. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan lansia sebesar 11,00. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15–59 tahun) harus menanggung setidaknya 11 penduduk lansia. Kondisi ini mengalami peningkatan sekitar 0,46 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.2 Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020–2025

Dilihat persebarannya (Gambar 2.3), tampak bahwa persentase lansia perempuan lebih besar dibanding laki-laki, yakni 52,16 persen berbanding 47,84 persen. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan umur, komposisi lansia paling besar adalah lansia kelompok umur muda, yakni penduduk yang berumur 60–69 tahun, dengan persentase sebesar 63,72 persen, diikuti oleh lansia madya sebesar 28,94 persen, dan lansia tua sebesar 7,34 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.3 Persentase Lansia Menurut Karakteristik, 2025

Jika dilihat berdasarkan penyebarannya pada level provinsi, setidaknya ada 16 provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua karena persentase penduduk lansia yang sudah di atas 10 persen. Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi teratas dengan persentase lansia sebesar 17,78 persen. Jawa Timur menyusul dengan persentase lansia sebesar 15,40 persen, diikuti oleh Bali dengan persentase lansia sekitar 15,03 persen. Sedangkan provinsi dengan proporsi penduduk lansia terendah yakni Provinsi Papua Tengah sebesar 6,69 persen.

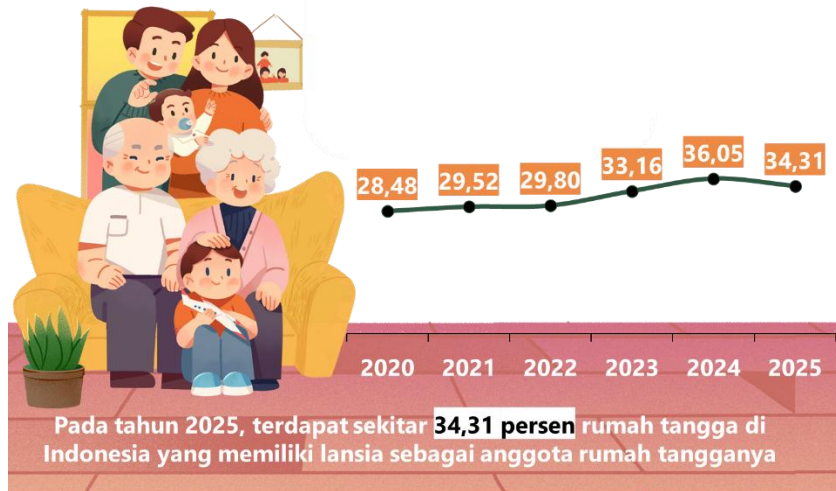


Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi, 2025

2.2 Lansia di Rumah Tangga

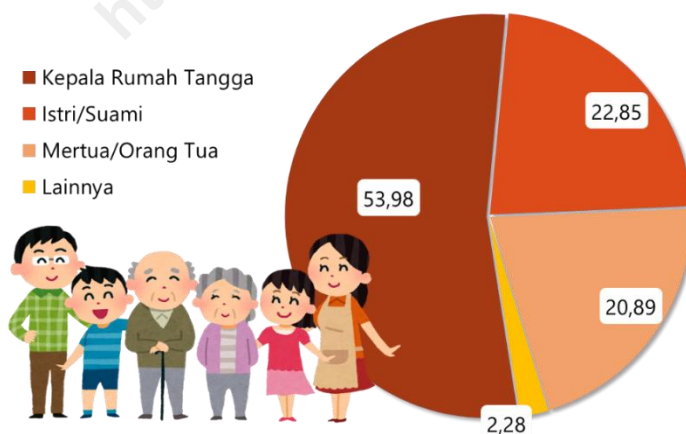
Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang memiliki penduduk lanjut usia sebagai anggota keluarganya, baik sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai anggota rumah tangga. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga lansia meningkat secara konsisten dari tahun 2020 (28,48 persen) hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 (36,05 persen). Pada tahun 2025, terjadi sedikit penurunan menjadi 34,31 persen. Angka ini masih belum bisa menggambarkan bagaimana kondisi rumah tangga lansia, apa peran lansia dalam rumah tangga tersebut, dan dengan siapa para lansia ini tinggal dalam rumah tangga tersebut. Analisa-analisa tersebut terjelaskan berikutnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025

Gambar 2.5 Tren Persentase Rumah Tangga Lansia, 2020–2025

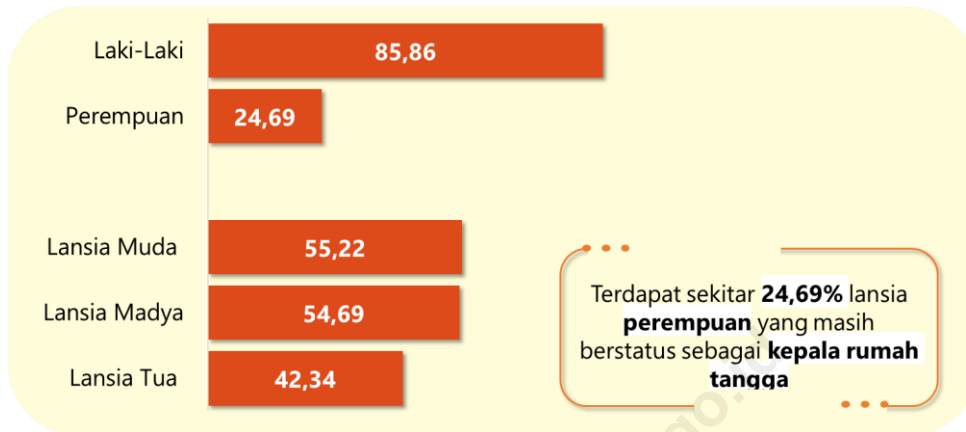
Peranan di dalam rumah tangga dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga (KRT) yang sangat besar dari sisi psikologis maupun ekonomis, ternyata masih banyak diemban oleh penduduk lansia yang seharusnya menikmati hari tua tanpa beban berat (Andini et al. 2013). Pada tahun 2025, sekitar 53,98 persen lansia merupakan kepala rumah tangga (KRT). Sementara itu, sisanya merupakan anggota rumah tangga yang meliputi pasangan KRT, mertua/orang tua dari KRT, dan anggota rumah tangga lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.6 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2025

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terjadi ketimpangan yang sangat signifikan, dimana lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga jauh lebih besar dibanding lansia perempuan (85,86 persen berbanding 24,69 persen). Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur, semakin tua umur seorang lansia, maka peluangnya untuk menjadi kepala rumah tangga semakin kecil.

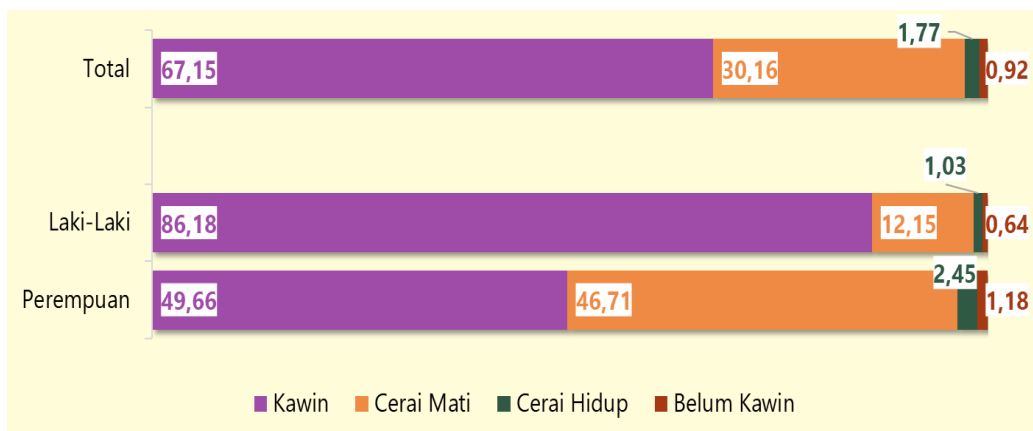


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.7 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2025

2.3 Status Tinggal Bersama Lansia

Proses penuaan pada lansia yang merupakan tahapan lanjut dari situasi proses kehidupan, dapat membuat kualitas hidup lansia semakin menurun. Oleh karenanya lansia memerlukan dukungan sehingga dapat meningkatkan kondisi lansia menjadi lebih baik. Dukungan dari pasangan atau keluarga utama akan sangat berarti dibandingkan dengan dukungan dari orang lain yang tidak menjalin hubungan apapun. Pasangan hidup lansia yang selalu berada disampingnya, membuat lansia memiliki teman bicara untuk berkeluh kesah tentang kebahagiaan maupun kesedihan, sehingga dengan dukungan positif dari pasangan akan meningkatkan kualitas hidup lansia (Astuti 2019).

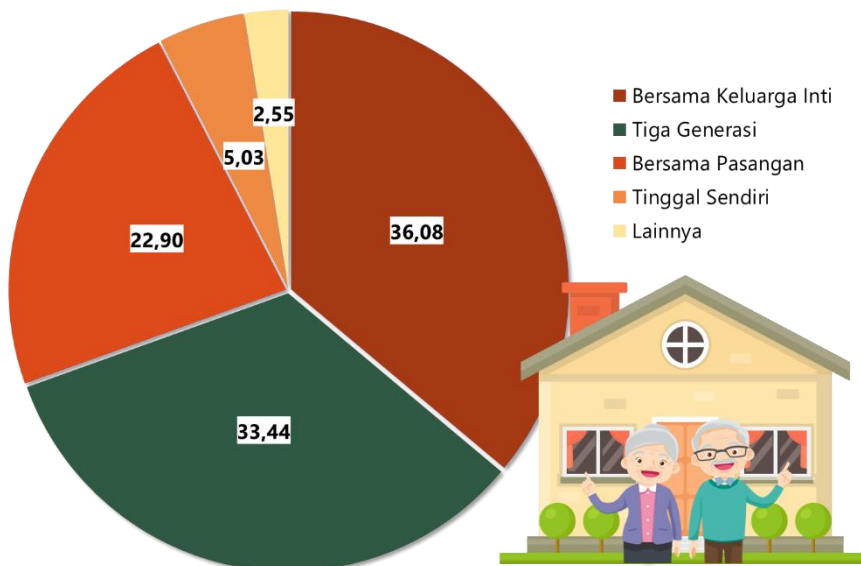


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.8 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2025

Sebagian besar lansia masih memiliki pasangan atau berstatus kawin (67,15 persen), sedangkan sisanya tidak memiliki pasangan baik karena cerai mati (30,16 persen), cerai hidup (1,77 persen), maupun belum kawin (0,92 persen). Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pola status perkawinan lansia laki-laki berbeda dengan perempuan, lansia yang berstatus kawin didominasi oleh lansia laki-laki (86,18 persen) dibandingkan lansia perempuan (49,66 persen), sedangkan lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh lansia perempuan (46,71 persen) dibandingkan lansia laki-laki (12,15 persen).

Pada sebuah tatanan keluarga besar, bertemunya tiga atau bahkan empat generasi dalam satu waktu merupakan hal yang lazim terjadi. Termasuk di dalamnya adalah generasi lansia (Nugroho 2019). Dilihat dari status tempat tinggal dan struktur rumah tangga, lansia lebih banyak tinggal dalam rumah tangga yang berisi tiga generasi yaitu sebesar 33,44 persen. Selain itu, sebesar 36,08 persen lansia tinggal bersama keluarga inti. Meskipun demikian masih ada lansia yang tinggal sendiri dengan persentase sebesar 5,03 persen.



- Catatan: 1) Bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau bersama orang tua/mertua dalam satu rumah tangga
- 2) Tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.9 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Dalam Rumah Tangga, 2025

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	<45 tahun	Pra-Lansia (45–59 Tahun)	Lansia (60 Tahun +)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	69,64	18,42	11,93	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	70,48	18,21	11,31	100,00
Perempuan	68,79	18,65	12,57	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.2 Persentase Lansia Menurut Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur Lansia			Jumlah
	Lansia Muda (60-69 Tahun)	Lansia Madya (70-79 Tahun)	Lansia Tua (80 Tahun +)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	63,72	28,94	7,34	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	65,24	28,52	6,25	100,00
Perempuan	62,32	29,32	8,35	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.3 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2025

Karakteristik	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Pasangan KRT	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	53,98	22,85	20,89	2,28	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	85,86	0,68	12,25	1,21	100,00
Perempuan	24,69	43,22	28,82	3,27	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69 Tahun)	55,22	28,60	14,35	1,83	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	54,69	15,27	27,61	2,43	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	42,34	5,36	47,14	5,15	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	54,47	22,54	20,78	2,21	100,00
Perdesaan	53,34	23,26	21,03	2,37	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.4 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2025

Karakteristik	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	0,92	67,15	1,77	30,16	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	0,64	86,18	1,03	12,15	100,00
Perempuan	1,18	49,66	2,45	46,71	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	1,00	66,22	1,93	30,85	100,00
Perdesaan	0,80	68,37	1,57	29,26	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

<https://www.bps.go.id>

Tabel 2.5 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025

Karakteristik	Status Tinggal dalam Rumah Tangga					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga Inti ¹	Tiga Generasi ²	Lain-nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	5,03	22,90	36,08	33,44	2,55	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	1,96	26,86	41,24	28,66	1,28	100,00
Perempuan	7,85	19,25	31,34	37,84	3,72	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60-69 Tahun)	3,07	22,44	42,13	30,40	1,96	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	8,06	25,83	25,93	37,22	2,96	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	9,44	16,43	24,99	43,49	5,65	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	4,73	20,99	39,64	32,10	2,54	100,00
Perdesaan	5,41	25,38	31,43	35,20	2,57	100,00

Catatan: 1) Bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau bersama orang tua/mertua dalam satu rumah tangga

2) Tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.6 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	<45 tahun	Pra-Lansia (45–59 Tahun)	Lansia (60 Tahun +)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	74,13	16,34	9,53	100,00
Sumatera Utara	73,29	16,49	10,22	100,00
Sumatera Barat	71,14	16,88	11,98	100,00
Riau	74,15	17,22	8,62	100,00
Jambi	72,15	17,92	9,93	100,00
Sumatera Selatan	71,74	17,64	10,62	100,00
Bengkulu	72,13	17,65	10,22	100,00
Lampung	70,56	18,08	11,36	100,00
Kep. Bangka Belitung	71,76	18,01	10,23	100,00
Kepulauan Riau	73,86	18,09	8,05	100,00
DKI Jakarta	67,56	20,47	11,97	100,00
Jawa Barat	69,93	18,59	11,48	100,00
Jawa Tengah	66,14	19,47	14,39	100,00
DI Yogyakarta	61,96	20,26	17,78	100,00
Jawa Timur	64,23	20,37	15,40	100,00
Banten	72,34	18,18	9,48	100,00
Bali	64,67	20,30	15,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	73,11	17,20	9,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	75,37	14,72	9,91	100,00
Kalimantan Barat	72,90	17,25	9,85	100,00
Kalimantan Tengah	73,21	17,60	9,19	100,00
Kalimantan Selatan	71,59	18,18	10,23	100,00
Kalimantan Timur	73,53	17,44	9,03	100,00
Kalimantan Utara	73,93	17,32	8,74	100,00
Sulawesi Utara	66,86	19,06	14,08	100,00
Sulawesi Tengah	73,06	17,04	9,90	100,00
Sulawesi Selatan	71,00	17,33	11,67	100,00
Sulawesi Tenggara	75,53	15,64	8,83	100,00
Gorontalo	72,20	17,35	10,45	100,00
Sulawesi Barat	75,82	15,40	8,78	100,00
Maluku	75,02	15,44	9,54	100,00
Maluku Utara	75,46	15,99	8,55	100,00
Papua Barat	77,39	15,87	6,75	100,00
Papua Barat Daya	76,36	15,81	7,82	100,00
Papua	77,98	14,07	7,95	100,00
Papua Selatan	80,63	12,59	6,78	100,00
Papua Tengah	75,32	17,99	6,69	100,00
Papua Pegunungan	71,70	19,67	8,63	100,00
Indonesia	69,64	18,42	11,93	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.7 Persentase Lansia Menurut Provinsi, dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	8,72	10,34	9,53
Sumatera Utara	9,25	11,20	10,22
Sumatera Barat	10,82	13,15	11,98
Riau	8,59	8,66	8,62
Jambi	9,81	10,06	9,93
Sumatera Selatan	10,20	11,05	10,62
Bengkulu	10,00	10,45	10,22
Lampung	11,26	11,46	11,36
Kep. Bangka Belitung	9,88	10,60	10,23
Kepulauan Riau	8,12	7,97	8,05
DKI Jakarta	11,33	12,62	11,97
Jawa Barat	11,08	11,89	11,48
Jawa Tengah	13,50	15,29	14,39
DI Yogyakarta	16,43	19,09	17,78
Jawa Timur	14,39	16,41	15,40
Banten	9,24	9,73	9,48
Bali	14,19	15,86	15,03
Nusa Tenggara Barat	9,17	10,21	9,69
Nusa Tenggara Timur	9,45	10,37	9,91
Kalimantan Barat	9,52	10,20	9,85
Kalimantan Tengah	9,19	9,19	9,19
Kalimantan Selatan	9,67	10,80	10,23
Kalimantan Timur	9,10	8,95	9,03
Kalimantan Utara	8,90	8,56	8,74
Sulawesi Utara	13,36	14,83	14,08
Sulawesi Tengah	9,70	10,11	9,90
Sulawesi Selatan	10,58	12,75	11,67
Sulawesi Tenggara	8,50	9,17	8,83
Gorontalo	9,82	11,10	10,45
Sulawesi Barat	8,36	9,21	8,78
Maluku	9,07	10,02	9,54
Maluku Utara	8,34	8,77	8,55
Papua Barat	6,89	6,60	6,75
Papua Barat Daya	7,84	7,80	7,82
Papua	7,90	8,01	7,95
Papua Selatan	6,74	6,83	6,78
Papua Tengah	7,31	5,99	6,69
Papua Pegunungan	9,28	7,88	8,63
Indonesia	11,31	12,57	11,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.8 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Lansia Muda (60–69 tahun)	Lansia Madya (70–79 tahun)	Lansia Tua (80+ tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	63,90	28,36	7,74	100,00
Sumatera Utara	65,33	28,55	6,13	100,00
Sumatera Barat	62,07	29,93	8,00	100,00
Riau	69,94	25,18	4,87	100,00
Jambi	67,26	26,84	5,90	100,00
Sumatera Selatan	64,73	28,51	6,75	100,00
Bengkulu	66,02	27,82	6,17	100,00
Lampung	63,38	28,82	7,80	100,00
Kep. Bangka Belitung	65,67	28,46	5,87	100,00
Kepulauan Riau	69,02	25,16	5,82	100,00
DKI Jakarta	67,02	26,73	6,25	100,00
Jawa Barat	65,10	28,57	6,33	100,00
Jawa Tengah	61,90	30,18	7,93	100,00
DI Yogyakarta	57,16	31,61	11,22	100,00
Jawa Timur	61,35	30,20	8,45	100,00
Banten	69,21	25,57	5,22	100,00
Bali	60,56	30,06	9,38	100,00
Nusa Tenggara Barat	64,77	28,22	7,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,08	30,31	8,61	100,00
Kalimantan Barat	65,42	27,81	6,77	100,00
Kalimantan Tengah	66,56	26,91	6,54	100,00
Kalimantan Selatan	67,57	26,61	5,82	100,00
Kalimantan Timur	67,02	26,74	6,24	100,00
Kalimantan Utara	66,96	26,59	6,45	100,00
Sulawesi Utara	61,01	30,12	8,87	100,00
Sulawesi Tengah	65,55	28,07	6,37	100,00
Sulawesi Selatan	61,19	29,79	9,02	100,00
Sulawesi Tenggara	64,57	28,40	7,03	100,00
Gorontalo	64,85	28,15	6,99	100,00
Sulawesi Barat	64,02	28,54	7,44	100,00
Maluku	62,71	29,45	7,85	100,00
Maluku Utara	66,50	27,72	5,77	100,00
Papua Barat	72,05	24,25	3,70	100,00
Papua Barat Daya	67,90	27,36	4,74	100,00
Papua	65,30	27,94	6,77	100,00
Papua Selatan	65,29	28,13	6,58	100,00
Papua Tengah	72,05	23,68	4,27	100,00
Papua Pegunungan	75,15	21,79	3,05	100,00
Indonesia	63,72	28,94	7,34	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.9 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	64,76	20,82	13,50	0,92	100,00
Sumatera Utara	56,66	25,60	16,38	1,36	100,00
Sumatera Barat	52,30	21,76	23,57	2,37	100,00
Riau	58,02	23,68	17,45	0,85 ¹	100,00
Jambi	56,26	23,10	19,09	1,55	100,00
Sumatera Selatan	51,77	24,17	22,48	1,57	100,00
Bengkulu	52,07	24,01	22,51	1,40	100,00
Lampung	51,60	23,32	23,94	1,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	55,51	22,97	19,83	1,70 ¹	100,00
Kepulauan Riau	55,57	21,95	20,69	1,79 ¹	100,00
DKI Jakarta	62,05	25,95	10,10	1,89	100,00
Jawa Barat	58,52	24,57	15,66	1,26	100,00
Jawa Tengah	50,01	21,87	25,49	2,64	100,00
DI Yogyakarta	51,79	22,80	23,38	2,04	100,00
Jawa Timur	50,71	20,83	25,25	3,21	100,00
Banten	59,53	23,95	14,95	1,57 ¹	100,00
Bali	37,86	19,63	37,56	4,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	55,99	24,29	18,03	1,70	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,91	21,86	20,10	4,13	100,00
Kalimantan Barat	50,45	21,11	25,89	2,55	100,00
Kalimantan Tengah	57,29	25,04	16,13	1,54 ¹	100,00
Kalimantan Selatan	60,32	21,21	16,84	1,63	100,00
Kalimantan Timur	56,47	24,15	18,16	1,22 ¹	100,00
Kalimantan Utara	54,38	22,77	21,49	1,36 ¹	100,00
Sulawesi Utara	51,10	26,97	19,39	2,54	100,00
Sulawesi Tengah	56,64	22,03	18,33	3,00	100,00
Sulawesi Selatan	50,05	21,08	23,75	5,12	100,00
Sulawesi Tenggara	59,55	22,40	17,03	1,03	100,00
Gorontalo	48,85	24,30	24,45	2,39	100,00
Sulawesi Barat	56,70	19,93	17,74	5,63	100,00
Maluku	51,90	25,14	19,92	3,03 ¹	100,00
Maluku Utara	51,45	25,45	20,87	2,23	100,00
Papua Barat	64,75	24,97	8,08 ¹	2,20 ¹	100,00
Papua Barat Daya	59,10	25,56	12,47	2,87 ¹	100,00
Papua	64,67	28,94	5,59	0,80 ¹	100,00
Papua Selatan	66,26	25,12	7,90 ¹	NA	100,00
Papua Tengah	65,05	26,26	7,87	NA	100,00
Papua Pegunungan	67,96	28,39	1,26 ¹	NA	100,00
Indonesia	53,98	22,85	20,89	2,28	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.10 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,49	64,27	1,54	33,70	100,00
Sumatera Utara	1,04	68,79	1,07	29,10	100,00
Sumatera Barat	0,26 ¹	65,21	3,06	31,47	100,00
Riau	0,66 ¹	71,07	1,26	27,00	100,00
Jambi	0,77 ¹	69,63	1,74	27,86	100,00
Sumatera Selatan	0,89 ¹	71,83	0,93	26,36	100,00
Bengkulu	0,42 ¹	73,69	1,67	24,21	100,00
Lampung	0,23 ¹	70,97	1,12	27,67	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,47 ¹	69,12	2,29	27,12	100,00
Kepulauan Riau	0,79 ¹	69,76	1,63 ¹	27,83	100,00
DKI Jakarta	1,61 ¹	70,73	1,50	26,17	100,00
Jawa Barat	0,30 ¹	69,65	1,88	28,17	100,00
Jawa Tengah	0,62	65,93	1,68	31,76	100,00
DI Yogyakarta	1,98	63,48	2,56	31,99	100,00
Jawa Timur	0,75	63,04	2,04	34,16	100,00
Banten	0,79 ¹	70,31	1,59 ¹	27,30	100,00
Bali	3,05	68,00	1,40	27,55	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,57 ¹	67,72	2,14	29,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,06	65,95	1,39	29,61	100,00
Kalimantan Barat	1,52	66,65	1,30	30,53	100,00
Kalimantan Tengah	NA	73,72	1,43	24,04	100,00
Kalimantan Selatan	1,25	63,43	3,30	32,02	100,00
Kalimantan Timur	1,18 ¹	71,85	1,93	25,05	100,00
Kalimantan Utara	0,66 ¹	70,85	1,23 ¹	27,27	100,00
Sulawesi Utara	1,94	69,25	1,30	27,51	100,00
Sulawesi Tengah	1,30	65,75	1,43	31,51	100,00
Sulawesi Selatan	3,13	62,46	2,02	32,39	100,00
Sulawesi Tenggara	0,85 ¹	66,79	1,83	30,53	100,00
Gorontalo	1,65 ¹	66,50	1,91 ¹	29,93	100,00
Sulawesi Barat	3,95	60,54	1,83 ¹	33,69	100,00
Maluku	1,59 ¹	68,92	1,76 ¹	27,74	100,00
Maluku Utara	1,15 ¹	71,48	2,03	25,34	100,00
Papua Barat	0,37 ¹	72,17	NA	25,86	100,00
Papua Barat Daya	0,51 ¹	69,73	2,20 ¹	27,56	100,00
Papua	0,76 ¹	75,04	1,69 ¹	22,52	100,00
Papua Selatan	NA	70,70	NA	27,52	100,00
Papua Tengah	NA	77,71	1,16 ¹	21,07	100,00
Papua Pegunungan	NA	85,87	NA	12,50	100,00
Indonesia	0,92	67,15	1,77	30,16	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.11 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Status Tinggal dalam Rumah Tangga				
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga Inti	Tiga Generasi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,44	17,43	50,26	23,71	1,16
Sumatera Utara	4,24	24,81	43,45	25,78	1,71
Sumatera Barat	4,94	16,93	35,12	40,56	2,45
Riau	4,23	21,49	44,02	29,36	0,89 ¹
Jambi	3,42	25,44	39,63	29,63	1,87
Sumatera Selatan	2,79	20,92	36,99	37,54	1,76
Bengkulu	3,33	26,44	34,24	34,37	1,62
Lampung	2,43	22,45	36,92	36,98	1,21
Kep. Bangka Belitung	3,72	24,76	41,78	27,72	2,02 ¹
Kepulauan Riau	3,25	20,41	44,36	29,83	2,15 ¹
DKI Jakarta	3,76	25,03	51,93	16,09	3,19
Jawa Barat	5,70	28,32	40,58	24,01	1,38
Jawa Tengah	5,88	21,46	29,98	39,93	2,75
DI Yogyakarta	9,99	22,65	29,92	35,16	2,28
Jawa Timur	5,87	23,66	27,32	39,72	3,44
Banten	3,05	18,65	49,71	26,63	1,96 ¹
Bali	3,40	19,14	26,53	45,88	5,05
Nusa Tenggara Barat	7,01	24,09	38,54	28,84	1,52
Nusa Tenggara Timur	2,51	9,13	36,46	46,94	4,97
Kalimantan Barat	2,39	16,04	38,89	39,99	2,70
Kalimantan Tengah	4,55	31,96	38,90	22,80	1,80 ¹
Kalimantan Selatan	10,00	27,85	38,31	21,70	2,15
Kalimantan Timur	3,21	28,66	40,47	25,94	1,72 ¹
Kalimantan Utara	2,82	19,67	38,20	37,64	1,67 ¹
Sulawesi Utara	3,12	29,16	31,54	32,80	3,37
Sulawesi Tengah	4,93	21,14	36,63	33,99	3,32
Sulawesi Selatan	2,51	14,75	35,09	41,80	5,85
Sulawesi Tenggara	4,83	20,00	37,31	36,52	1,34
Gorontalo	2,32	19,19	37,19	37,97	3,32
Sulawesi Barat	3,07	11,80	35,60	42,75	6,77
Maluku	1,30	8,76	35,50	50,92	3,52
Maluku Utara	2,15	11,96	34,14	49,28	2,47
Papua Barat	4,79	20,17	47,87	24,61	2,56 ¹
Papua Barat Daya	2,78	13,05	45,08	36,14	2,96 ¹
Papua	3,14	25,23	48,83	21,98	0,82 ¹
Papua Selatan	7,90	25,91	50,06	15,41	NA
Papua Tengah	5,41	21,58	61,07	10,62	1,33 ¹
Papua Pegunungan	5,09 ¹	23,13	66,40	NA	NA
Indonesia	5,03	22,90	36,08	33,44	2,55

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.12 Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Kepala Rumah Tangga				Istri/Suami			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	64,76	63,21	66,32	1,23	20,82	19,46	22,17	3,33
Sumatera Utara	56,66	55,15	58,18	1,36	25,60	24,35	26,85	2,49
Sumatera Barat	52,30	50,68	53,92	1,58	21,76	20,48	23,04	3,00
Riau	58,02	55,92	60,12	1,85	23,68	21,93	25,43	3,76
Jambi	56,26	54,21	58,31	1,86	23,10	21,46	24,74	3,62
Sumatera Selatan	51,77	50,03	53,51	1,72	24,17	22,77	25,58	2,97
Bengkulu	52,07	49,89	54,25	2,14	24,01	22,22	25,80	3,80
Lampung	51,60	49,85	53,35	1,73	23,32	21,92	24,72	3,06
Kepulauan Bangka Belitung	55,51	52,68	58,34	2,60	22,97	20,74	25,19	4,95
Kepulauan Riau	55,57	51,30	59,85	3,93	21,95	18,66	25,25	7,65
DKI Jakarta	62,05	59,68	64,43	1,95	25,95	23,91	28,00	4,02
Jawa Barat	58,52	57,41	59,63	0,97	24,57	23,64	25,50	1,94
Jawa Tengah	50,01	49,16	50,86	0,87	21,87	21,20	22,54	1,56
DI Yogyakarta	51,79	49,74	53,84	2,02	22,80	21,19	24,40	3,60
Jawa Timur	50,71	49,88	51,55	0,84	20,83	20,17	21,48	1,60
Banten	59,53	57,15	61,90	2,04	23,95	22,05	25,85	4,04
Bali	37,86	36,09	39,63	2,38	19,63	18,27	20,98	3,53
Nusa Tenggara Barat	55,99	53,85	58,13	1,95	24,29	22,47	26,10	3,82
Nusa Tenggara Timur	53,91	52,44	55,37	1,39	21,86	20,66	23,07	2,81
Kalimantan Barat	50,45	48,44	52,46	2,04	21,11	19,59	22,63	3,68
Kalimantan Tengah	57,29	55,10	59,48	1,95	25,04	23,19	26,88	3,76
Kalimantan Selatan	60,32	58,38	62,26	1,64	21,21	19,63	22,78	3,79
Kalimantan Timur	56,47	54,01	58,92	2,22	24,15	22,01	26,29	4,52
Kalimantan Utara	54,38	50,54	58,22	3,60	22,77	19,57	25,97	7,18
Sulawesi Utara	51,10	49,49	52,71	1,61	26,97	25,60	28,34	2,60
Sulawesi Tengah	56,64	54,45	58,82	1,97	22,03	20,37	23,69	3,85
Sulawesi Selatan	50,05	48,68	51,43	1,40	21,08	19,98	22,18	2,66
Sulawesi Tenggara	59,55	57,50	61,60	1,76	22,40	20,77	24,02	3,70
Gorontalo	48,85	46,00	51,71	2,98	24,30	21,93	26,67	4,97
Sulawesi Barat	56,70	53,49	59,92	2,89	19,93	17,36	22,50	6,58
Maluku	51,90	49,54	54,26	2,32	25,14	23,12	27,17	4,11
Maluku Utara	51,45	48,86	54,03	2,56	25,45	23,33	27,58	4,26
Papua Barat	64,75	60,51	68,99	3,34	24,97	21,40	28,54	7,30
Papua Barat Daya	59,10	54,95	63,26	3,59	25,56	21,98	29,14	7,15
Papua	64,67	62,01	67,33	2,10	28,94	26,45	31,42	4,38
Papua Selatan	66,26	61,66	70,85	3,54	25,12	20,92	29,32	8,53
Papua Tengah	65,05	61,10	69,00	3,10	26,26	22,88	29,64	6,57
Papua Pegunungan	67,96	63,62	72,30	3,26	28,39	24,07	32,70	7,75
Indonesia	53,98	53,63	54,33	0,33	22,85	22,56	23,14	0,64

Lanjutan Tabel 2.12

Provinsi	Mertua/Orang Tua				Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	13,50	11,96	15,05	5,82	0,92	0,52	1,31	21,90
Sumatera Utara	16,38	14,57	18,18	5,63	1,36	0,91	1,80	16,72
Sumatera Barat	23,57	21,57	25,56	4,32	2,37	1,73	3,01	13,77
Riau	17,45	14,98	19,92	7,21	0,85	0,38	1,31	27,92
Jambi	19,09	16,61	21,56	6,61	1,55	0,81	2,29	24,30
Sumatera Selatan	22,48	20,21	24,76	5,17	1,57	0,94	2,20	20,53
Bengkulu	22,51	19,62	25,41	6,56	1,40	0,74	2,06	24,05
Lampung	23,94	21,63	26,25	4,92	1,14	0,67	1,62	21,19
Kepulauan Bangka Belitung	19,83	16,31	23,34	9,04	1,70	0,80	2,60	27,05
Kepulauan Riau	20,69	15,90	25,48	11,81	1,79	0,59	2,98	34,09
DKI Jakarta	10,10	7,53	12,67	12,98	1,89	1,05	2,74	22,82
Jawa Barat	15,66	14,38	16,93	4,16	1,26	0,88	1,63	15,11
Jawa Tengah	25,49	24,40	26,57	2,18	2,64	2,24	3,04	7,72
DI Yogyakarta	23,38	20,80	25,96	5,64	2,04	1,30	2,77	18,35
Jawa Timur	25,25	24,19	26,31	2,14	3,21	2,79	3,63	6,61
Banten	14,95	12,36	17,55	8,84	1,57	0,60	2,54	31,47
Bali	37,56	35,06	40,05	3,39	4,95	3,95	5,96	10,35
Nusa Tenggara Barat	18,03	15,53	20,53	7,06	1,70	1,03	2,36	20,03
Nusa Tenggara Timur	20,10	18,41	21,78	4,28	4,13	3,41	4,85	8,86
Kalimantan Barat	25,89	23,35	28,43	5,00	2,55	1,72	3,39	16,75
Kalimantan Tengah	16,13	13,63	18,64	7,93	1,54	0,59	2,49	31,51
Kalimantan Selatan	16,84	14,66	19,03	6,62	1,63	0,95	2,31	21,38
Kalimantan Timur	18,16	15,18	21,14	8,38	1,22	0,50	1,95	30,20
Kalimantan Utara	21,49	16,67	26,32	11,45	1,36	0,26	2,45	41,23
Sulawesi Utara	19,39	17,35	21,42	5,35	2,54	1,82	3,27	14,57
Sulawesi Tengah	18,33	15,78	20,89	7,11	3,00	2,09	3,92	15,55
Sulawesi Selatan	23,75	22,00	25,49	3,75	5,12	4,27	5,96	8,43
Sulawesi Tenggara	17,03	14,67	19,39	7,06	1,03	0,54	1,51	24,14
Gorontalo	24,45	20,65	28,26	7,94	2,39	1,23	3,56	24,83
Sulawesi Barat	17,74	14,26	21,21	9,99	5,63	3,47	7,79	19,54
Maluku	19,92	16,97	22,88	7,57	3,03	1,42	4,65	27,11
Maluku Utara	20,87	17,52	24,22	8,20	2,23	1,23	3,23	22,95
Papua Barat	8,08	4,07	12,09	25,31	2,20	0,15	4,25	47,44
Papua Barat Daya	12,47	8,39	16,55	16,71	2,87	0,81	4,93	36,67
Papua	5,59	3,67	7,51	17,54	0,80	0,09	1,51	45,10
Papua Selatan	7,90	3,85	11,96	26,20	NA	NA	NA	98,69
Papua Tengah	7,87	4,54	11,20	21,58	NA	NA	NA	68,17
Papua Pegunungan	1,26	0,09	2,43	47,47	NA	NA	NA	52,05
Indonesia	20,89	20,46	21,31	1,04	2,28	2,14	2,43	3,24

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.13 Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Belum Kawin				Kawin			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,49	0,26	0,72	24,03	64,27	62,03	66,50	1,77
Sumatera Utara	1,04	0,57	1,50	22,96	68,79	66,76	70,82	1,51
Sumatera Barat	0,26	0,11	0,42	29,80	65,21	63,06	67,35	1,68
Riau	0,66	0,20	1,11	35,22	71,07	68,37	73,78	1,94
Jambi	0,77	0,33	1,21	29,01	69,63	67,01	72,25	1,92
Sumatera Selatan	0,89	0,44	1,35	26,08	71,83	69,63	74,02	1,56
Bengkulu	0,42	0,11	0,73	37,72	73,69	71,04	76,35	1,84
Lampung	0,23	0,07	0,39	34,71	70,97	68,81	73,14	1,56
Kepulauan Bangka Belitung	1,47	0,71	2,23	26,23	69,12	65,64	72,61	2,57
Kepulauan Riau	0,79	0,20	1,38	38,31	69,76	64,11	75,40	4,13
DKI Jakarta	1,61	0,77	2,45	26,74	70,73	67,50	73,95	2,33
Jawa Barat	0,30	0,14	0,46	26,66	69,65	68,15	71,15	1,10
Jawa Tengah	0,62	0,46	0,79	13,31	65,93	64,82	67,04	0,86
DI Yogyakarta	1,98	1,31	2,65	17,31	63,48	60,77	66,18	2,17
Jawa Timur	0,75	0,57	0,94	12,64	63,04	61,93	64,15	0,90
Banten	0,79	0,04	1,55	48,61	70,31	67,30	73,32	2,18
Bali	3,05	2,30	3,80	12,53	68,00	65,71	70,29	1,72
Nusa Tenggara Barat	0,57	0,26	0,89	28,06	67,72	64,76	70,68	2,23
Nusa Tenggara Timur	3,06	2,41	3,71	10,82	65,95	63,99	67,90	1,51
Kalimantan Barat	1,52	0,93	2,10	19,72	66,65	64,14	69,16	1,92
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	52,24	73,72	70,92	76,52	1,94
Kalimantan Selatan	1,25	0,67	1,84	23,84	63,43	60,81	66,05	2,11
Kalimantan Timur	1,18	0,43	1,93	32,51	71,85	68,70	74,99	2,23
Kalimantan Utara	0,66	0,03	1,28	48,39	70,85	66,01	75,68	3,48
Sulawesi Utara	1,94	1,32	2,56	16,36	69,25	67,06	71,44	1,61
Sulawesi Tengah	1,30	0,72	1,88	22,70	65,75	62,94	68,56	2,18
Sulawesi Selatan	3,13	2,46	3,80	10,88	62,46	60,58	64,34	1,54
Sulawesi Tenggara	0,85	0,36	1,33	29,14	66,79	64,14	69,44	2,02
Gorontalo	1,65	0,71	2,59	28,94	66,50	62,52	70,49	3,06
Sulawesi Barat	3,95	2,12	5,78	23,61	60,54	56,15	64,92	3,70
Maluku	1,59	0,65	2,52	30,09	68,92	65,48	72,35	2,54
Maluku Utara	1,15	0,43	1,87	32,08	71,48	68,27	74,70	2,29
Papua Barat	0,37	0,06	0,68	43,08	72,17	66,90	77,44	3,73
Papua Barat Daya	0,51	0,03	0,99	48,09	69,73	64,03	75,43	4,17
Papua	0,76	0,08	1,43	45,85	75,04	71,39	78,68	2,48
Papua Selatan	NA	NA	NA	100,25	70,70	64,19	77,21	4,70
Papua Tengah	NA	NA	NA	70,60	77,71	73,14	82,29	3,00
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	99,88	85,87	81,08	90,67	2,85
Indonesia	0,92	0,83	1,00	4,58	67,15	66,68	67,62	0,36

Lanjutan Tabel 2.13

Provinsi	Cerai Hidup				Cerai Mati			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	1,54	1,04	2,04	16,50	33,70	31,51	35,88	3,31
Sumatera Utara	1,07	0,77	1,38	14,32	29,10	27,13	31,07	3,45
Sumatera Barat	3,06	2,34	3,78	11,98	31,47	29,42	33,51	3,32
Riau	1,26	0,70	1,83	22,88	27,00	24,38	29,62	4,95
Jambi	1,74	1,12	2,36	18,23	27,86	25,31	30,41	4,67
Sumatera Selatan	0,93	0,49	1,37	24,04	26,36	24,26	28,45	4,05
Bengkulu	1,67	0,94	2,40	22,29	24,21	21,67	26,76	5,36
Lampung	1,12	0,72	1,53	18,47	27,67	25,55	29,80	3,92
Kepulauan Bangka Belitung	2,29	1,29	3,29	22,34	27,12	23,81	30,43	6,23
Kepulauan Riau	1,63	0,62	2,64	31,72	27,83	22,17	33,48	10,37
DKI Jakarta	1,50	0,78	2,22	24,51	26,17	23,10	29,23	5,98
Jawa Barat	1,88	1,50	2,26	10,28	28,17	26,71	29,62	2,63
Jawa Tengah	1,68	1,42	1,95	8,06	31,76	30,69	32,84	1,73
DI Yogyakarta	2,56	1,75	3,38	16,24	31,99	29,41	34,56	4,11
Jawa Timur	2,04	1,74	2,34	7,48	34,16	33,09	35,24	1,61
Banten	1,59	0,80	2,39	25,47	27,30	24,50	30,11	5,25
Bali	1,40	0,84	1,95	20,24	27,55	25,42	29,69	3,95
Nusa Tenggara Barat	2,14	1,40	2,88	17,62	29,57	26,69	32,44	4,96
Nusa Tenggara Timur	1,39	0,98	1,80	15,05	29,61	27,77	31,44	3,17
Kalimantan Barat	1,30	0,80	1,80	19,64	30,53	28,08	32,99	4,11
Kalimantan Tengah	1,43	0,78	2,07	23,22	24,04	21,38	26,70	5,65
Kalimantan Selatan	3,30	2,45	4,15	13,18	32,02	29,58	34,47	3,90
Kalimantan Timur	1,93	1,11	2,75	21,66	25,05	22,09	28,01	6,03
Kalimantan Utara	1,23	0,06	2,40	48,38	27,27	22,56	31,97	8,80
Sulawesi Utara	1,30	0,81	1,79	19,11	27,51	25,42	29,60	3,88
Sulawesi Tengah	1,43	0,91	1,96	18,61	31,51	28,76	34,27	4,46
Sulawesi Selatan	2,02	1,58	2,45	10,99	32,39	30,65	34,14	2,75
Sulawesi Tenggara	1,83	1,15	2,52	19,15	30,53	27,97	33,09	4,28
Gorontalo	1,91	0,87	2,96	27,79	29,93	26,18	33,69	6,40
Sulawesi Barat	1,83	0,88	2,78	26,50	33,69	29,51	37,86	6,32
Maluku	1,76	0,86	2,66	26,09	27,74	24,63	30,84	5,71
Maluku Utara	2,03	1,06	3,01	24,47	25,34	22,26	28,41	6,20
Papua Barat	NA	NA	NA	50,53	25,86	20,80	30,93	9,99
Papua Barat Daya	2,20	0,55	3,86	38,32	27,56	22,09	33,02	10,11
Papua	1,69	0,77	2,62	27,76	22,52	19,02	26,01	7,93
Papua Selatan	NA	NA	NA	83,01	27,52	21,35	33,68	11,43
Papua Tengah	1,16	0,10	2,22	46,63	21,07	16,57	25,57	10,89
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	63,06	12,50	8,00	16,99	18,37
Indonesia	1,77	1,65	1,89	3,34	30,16	29,71	30,61	0,76

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

**Tabel 2.14 Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status
Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025**

Provinsi	Tinggal Sendiri				Bersama Pasangan				Bersama Keluarga Inti			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Kepercayaan				Kepercayaan				Kepercayaan		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	7,44	6,55	8,33	6,11	17,43	15,50	19,36	5,64	50,26	47,69	52,83	2,61
Sumatera Utara	4,24	3,73	4,76	6,15	24,81	22,81	26,81	4,11	43,45	41,01	45,89	2,87
Sumatera Barat	4,94	4,32	5,57	6,45	16,93	15,28	18,58	4,98	35,12	32,74	37,49	3,45
Riau	4,23	3,43	5,03	9,65	21,49	18,94	24,05	6,07	44,02	40,67	47,38	3,89
Jambi	3,42	2,69	4,16	10,99	25,44	22,81	28,07	5,27	39,63	36,51	42,75	4,01
Sumatera Selatan	2,79	2,36	3,22	7,84	20,92	19,02	22,81	4,62	36,99	34,36	39,63	3,63
Bengkulu	3,33	2,64	4,02	10,57	26,44	23,45	29,42	5,77	34,24	30,89	37,58	4,98
Lampung	2,43	2,03	2,84	8,55	22,45	20,26	24,65	5,00	36,92	34,33	39,51	3,58
Kepulauan Bangka Belitung	3,72	2,83	4,61	12,20	24,76	21,08	28,43	7,58	41,78	37,52	46,05	5,21
Kepulauan Riau	3,25	2,07	4,42	18,41	20,41	16,04	24,78	10,92	44,36	38,06	50,66	7,25
DKI Jakarta	3,76	2,86	4,66	12,19	25,03	21,56	28,51	7,08	51,93	47,89	55,96	3,96
Jawa Barat	5,70	5,16	6,24	4,84	28,32	26,73	29,91	2,87	40,58	38,78	42,39	2,27
Jawa Tengah	5,88	5,48	6,28	3,46	21,46	20,42	22,49	2,46	29,98	28,79	31,17	2,03
DI Yogyakarta	9,99	8,55	11,42	7,33	22,65	20,09	25,21	5,76	29,92	27,14	32,71	4,75
Jawa Timur	5,87	5,50	6,25	3,25	23,66	22,62	24,69	2,24	27,32	26,18	28,45	2,12
Banten	3,05	2,36	3,74	11,55	18,65	15,84	21,45	7,67	49,71	46,08	53,34	3,72
Bali	3,40	2,74	4,06	9,86	19,14	17,27	21,01	4,99	26,53	24,04	29,02	4,79
Nusa Tenggara Barat	7,01	5,69	8,33	9,62	24,09	20,92	27,26	6,71	38,54	35,06	42,02	4,61
Nusa Tenggara Timur	2,51	2,04	2,98	9,48	9,13	7,90	10,36	6,88	36,46	34,29	38,62	3,03
Kalimantan Barat	2,39	1,76	3,01	13,42	16,04	14,08	18,00	6,25	38,89	36,05	41,73	3,73
Kalimantan Tengah	4,55	3,56	5,53	11,03	31,96	28,69	35,22	5,21	38,90	35,42	42,37	4,56
Kalimantan Selatan	10,00	8,75	11,24	6,35	27,85	25,17	30,52	4,90	38,31	35,38	41,24	3,90
Kalimantan Timur	3,21	2,39	4,03	13,05	28,66	24,95	32,38	6,61	40,47	36,48	44,45	5,03
Kalimantan Utara	2,82	1,60	4,03	21,96	19,67	14,67	24,68	12,98	38,20	32,53	43,88	7,58
Sulawesi Utara	3,12	2,62	3,62	8,19	29,16	26,75	31,57	4,21	31,54	28,90	34,19	4,28
Sulawesi Tengah	4,93	4,01	5,84	9,46	21,14	18,70	23,57	5,88	36,63	33,58	39,68	4,25
Sulawesi Selatan	2,51	2,13	2,89	7,78	14,75	13,50	16,00	4,34	35,09	33,05	37,14	2,97
Sulawesi Tenggara	4,83	3,95	5,72	9,37	20,00	17,64	22,35	6,00	37,31	34,35	40,27	4,05
Gorontalo	2,32	1,49	3,15	18,30	19,19	15,98	22,39	8,51	37,19	32,69	41,70	6,18
Sulawesi Barat	3,07	2,03	4,12	17,27	11,80	9,17	14,44	11,39	35,60	31,26	39,94	6,22
Maluku	1,30	0,88	1,72	16,51	8,76	6,85	10,68	11,17	35,50	31,84	39,15	5,25
Maluku Utara	2,15	1,41	2,88	17,38	11,96	9,61	14,32	10,05	34,14	30,34	37,94	5,68
Papua Barat	4,79	3,28	6,29	16,02	20,17	13,87	26,47	15,94	47,87	41,13	54,62	7,19
Papua Barat Daya	2,78	1,92	3,64	15,81	13,05	8,61	17,49	17,36	45,08	37,90	52,25	8,12
Papua	3,14	2,23	4,05	14,78	25,23	20,76	29,70	9,04	48,83	43,95	53,71	5,10
Papua Selatan	7,90	4,93	10,88	19,19	25,91	18,72	33,09	14,15	50,06	42,01	58,12	8,21
Papua Tengah	5,41	3,34	7,48	19,53	21,58	16,60	26,55	11,76	61,07	55,08	67,06	5,00
Papua Pegunungan	5,09	2,60	7,59	25,01	23,13	16,51	29,75	14,61	66,40	58,81	74,00	5,84
Indonesia	5,03	4,87	5,18	1,57	22,90	22,44	23,36	1,02	36,08	35,54	36,62	0,76

Lanjutan Tabel 2.14

Provinsi	Tiga Generasi				Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	23,71	21,51	25,91	4,74	1,16	0,70	1,62	20,26
Sumatera Utara	25,78	23,58	27,99	4,37	1,71	1,14	2,28	17,07
Sumatera Barat	40,56	38,09	43,03	3,11	2,45	1,81	3,09	13,41
Riau	29,36	26,23	32,49	5,44	0,89	0,36	1,43	30,59
Jambi	29,63	26,57	32,70	5,28	1,87	1,04	2,69	22,52
Sumatera Selatan	37,54	34,79	40,29	3,74	1,76	1,09	2,43	19,53
Bengkulu	34,37	31,02	37,73	4,97	1,62	0,92	2,32	22,05
Lampung	36,98	34,31	39,65	3,69	1,21	0,72	1,70	20,60
Kepulauan Bangka Belitung	27,72	23,69	31,75	7,41	2,02	0,98	3,06	26,31
Kepulauan Riau	29,83	23,92	35,74	10,11	2,15	0,88	3,43	30,12
DKI Jakarta	16,09	12,88	19,30	10,17	3,19	1,96	4,41	19,59
Jawa Barat	24,01	22,39	25,63	3,44	1,38	0,99	1,78	14,59
Jawa Tengah	39,93	38,64	41,22	1,65	2,75	2,33	3,16	7,69
DI Yogyakarta	35,16	32,04	38,28	4,52	2,28	1,46	3,09	18,27
Jawa Timur	39,72	38,47	40,97	1,61	3,44	2,99	3,88	6,60
Banten	26,63	23,34	29,92	6,31	1,96	0,61	3,30	35,04
Bali	45,88	43,25	48,51	2,92	5,05	4,00	6,10	10,57
Nusa Tenggara Barat	28,84	25,63	32,06	5,68	1,52	0,95	2,09	19,22
Nusa Tenggara Timur	46,94	44,73	49,15	2,40	4,97	4,15	5,78	8,36
Kalimantan Barat	39,99	37,09	42,88	3,69	2,70	1,80	3,60	17,02
Kalimantan Tengah	22,80	19,73	25,86	6,85	1,80	0,68	2,93	31,87
Kalimantan Selatan	21,70	19,15	24,24	5,98	2,15	1,29	3,00	20,38
Kalimantan Timur	25,94	22,16	29,72	7,44	1,72	0,81	2,64	27,13
Kalimantan Utara	37,64	31,57	43,70	8,23	1,67	0,52	2,82	35,24
Sulawesi Utara	32,80	30,17	35,44	4,10	3,37	2,49	4,26	13,40
Sulawesi Tengah	33,99	30,85	37,13	4,72	3,32	2,26	4,37	16,26
Sulawesi Selatan	41,80	39,71	43,89	2,55	5,85	4,89	6,82	8,40
Sulawesi Tenggara	36,52	33,54	39,51	4,17	1,34	0,77	1,91	21,70
Gorontalo	37,97	33,47	42,48	6,06	3,32	1,89	4,76	22,02
Sulawesi Barat	42,75	37,96	47,53	5,71	6,77	4,31	9,23	18,52
Maluku	50,92	46,93	54,90	3,99	3,52	1,87	5,17	23,90
Maluku Utara	49,28	45,16	53,40	4,27	2,47	1,44	3,49	21,18
Papua Barat	24,61	18,96	30,25	11,70	2,56	0,45	4,68	42,10
Papua Barat Daya	36,14	29,45	42,82	9,44	2,96	0,86	5,05	36,20
Papua	21,98	18,15	25,82	8,90	0,82	0,12	1,52	43,66
Papua Selatan	15,41	8,91	21,90	21,51	NA	NA	NA	98,69
Papua Tengah	10,62	6,59	14,65	19,38	1,33	0,04	2,61	49,31
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	56,85	NA	NA	NA	52,27
Indonesia	33,44	32,92	33,97	0,80	2,55	2,39	2,71	3,23

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



BAB 3

PENDIDIKAN

<https://www.bukuindo.id>

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia, termasuk bagi kelompok penduduk lanjut usia. Tingkat pendidikan yang dimiliki lansia mencerminkan hasil pembangunan pendidikan pada masa sebelumnya, sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas mereka dalam mengakses informasi, layanan kesehatan, dan peluang sosial ekonomi. Analisis terhadap karakteristik pendidikan penduduk lanjut usia memberikan gambaran tentang dinamika sosial yang terbentuk dari perbedaan kesempatan pendidikan antargenerasi. Bab ini menyajikan data mengenai kemampuan baca-tulis, tingkat pendidikan lansia, akses teknologi informasi dan telekomunikasi, serta distribusinya menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal, distribusi pengeluaran, dan provinsi. Informasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan memperkuat ketahanan sosial di masyarakat.

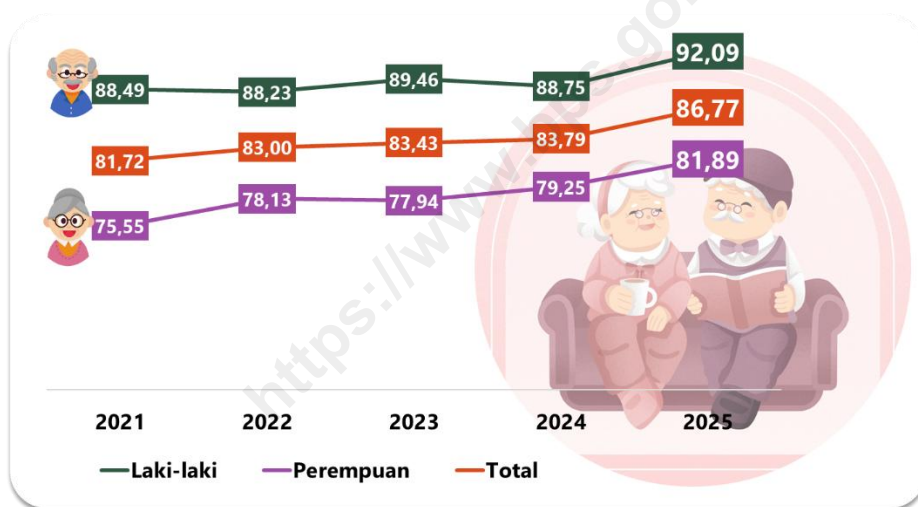
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis adalah keterampilan dasar yang menjadi fondasi dalam kehidupan. Bagi penduduk lanjut usia, kemampuan ini bukan hanya soal mengenali huruf atau menulis kata, tetapi juga kunci untuk tetap mandiri dan terhubung dengan lingkungan sekitar. Keaksaraan atau melek aksara didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Syukri 2008).

Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat diukur melalui tingkat keaksaraan penduduknya (Rosadi 2017). Indikator keaksaraan tersebut dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) pada Susenas. Perbedaan kemampuan baca tulis di kalangan lansia dapat mencerminkan ketimpangan akses pendidikan di masa lalu. Dengan memahami kondisi ini, kita

dapat melihat seberapa jauh upaya pembangunan pendidikan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil Susenas, terlihat bahwa AMH penduduk lanjut usia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan capaian AMH nasional sebesar 86,77 persen pada tahun 2025. Tren AMH yang meningkat tersebut juga terlihat pada penduduk lanjut usia laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, Gambar 3.1 menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar dalam AMH menurut jenis kelamin ditandai dengan AMH penduduk lanjut usia laki-laki lebih jauh lebih tinggi dibandingkan AMH penduduk lanjut usia perempuan (92,09 persen berbanding 81,89 persen).

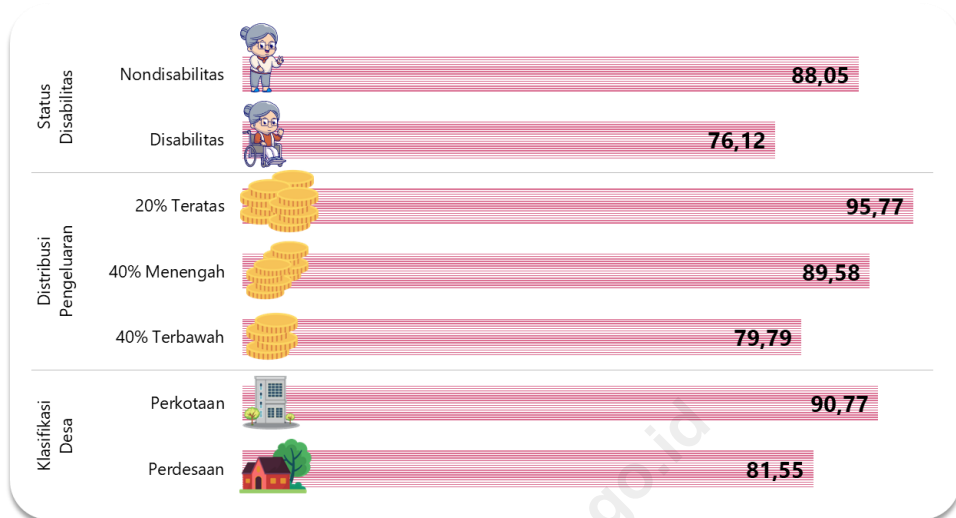


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2025

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Jenis Kelamin (persen), 2021–2025

Selanjutnya, pada Gambar 3.2 disajikan informasi mengenai kemampuan baca tulis lansia berdasarkan beberapa karakteristik. Dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan kemampuan baca tulis lansia yang ditunjukkan dengan AMH lansia yang bukan penyandang disabilitas lebih tinggi dibandingkan lansia penyandang disabilitas, yakni 88,05 persen berbanding 76,12 persen.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fisik yang dialami lansia penyandang disabilitas dapat menghambat akses terhadap pendidikan dan informasi, baik pada masa lalu maupun saat ini.

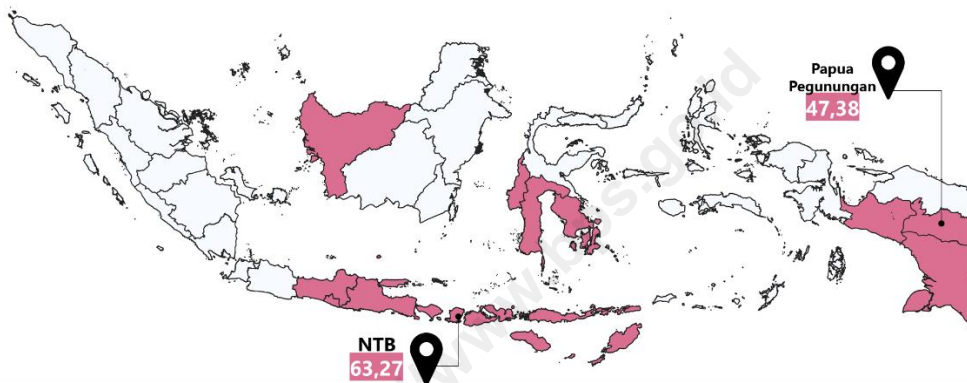


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.2 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik, 2025

Kondisi ekonomi rumah tangga lansia pada Susenas 2025 diukur menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan. Semakin tinggi pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan mengindikasikan kondisi ekonomi yang semakin baik. Pada Gambar 3.2 terlihat bahwa capaian AMH lansia pada rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas (95,77 persen) lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah (89,58 persen) dan 40 persen kelompok pengeluaran terbawah (79,79 persen). Sementara itu, jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, AMH lansia di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan (90,77 persen berbanding 81,55 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dan informasi di wilayah perkotaan relatif lebih baik dibandingkan perdesaan. Kesenjangan ini juga mencerminkan masih adanya perbedaan kesempatan belajar di masa lalu, yang berpengaruh terhadap tingkat literasi lansia saat ini.

Gambar 3.3 merepresentasikan AMH lansia menurut provinsi di Indonesia. Warna merah muda menunjukkan nilai AMH lansia yang berada di bawah AMH lansia secara nasional (86,77 persen) sehingga perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Hasilnya, terdapat 13 provinsi yang memiliki capaian di bawah AMH lansia nasional. Pulau Jawa yang selama ini dipandang sebagai wilayah yang paling lengkap infrastrukturnya, ternyata memiliki capaian AMH lansia yang di bawah angka nasional, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Adapun dua provinsi dengan capaian AMH lansia terendah yaitu Papua Pegunungan (47,38 persen) dan NTB (63,27 persen).



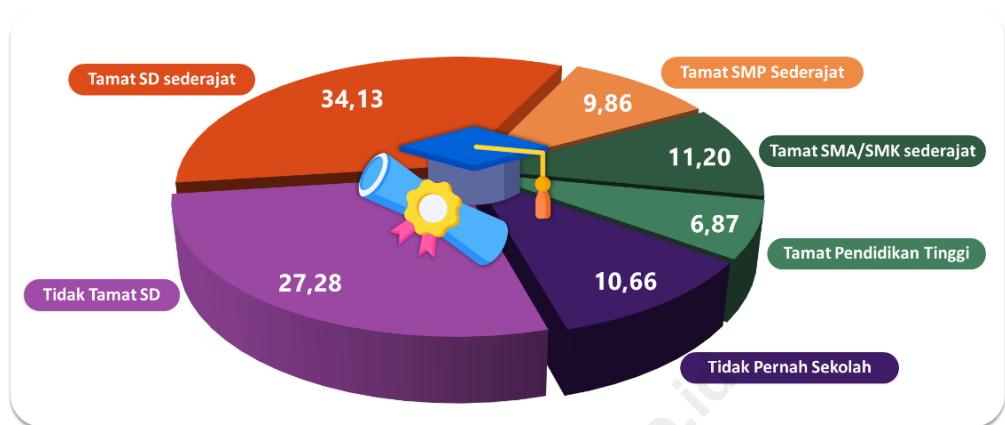
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.3 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi (persen), 2025

3.2 Tingkat Pendidikan

Investasi modal manusia sangat penting karena dengan pendidikan yang tinggi, produktivitas tenaga kerja akan naik dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan individu. Hal tersebut sejalan dengan teori *human capital* yakni setiap tahun yang digunakan seseorang untuk bersekolah (peningkatan lama sekolah) akan meningkatkan upah yang diterimanya (Mankiw dkk. 2012). Peningkatan upah pada waktunya akan mendorong tingkat kesejahteraan seseorang dan menjauhkannya dari jerat kemiskinan. Namun sayangnya hal tersebut mungkin kurang menguntungkan bagi lansia mengingat akses terhadap fasilitas pendidikan di masa lalu yang masih terbatas. Saat ini, lansia di Indonesia masih didominasi oleh kelompok lansia yang memiliki latar

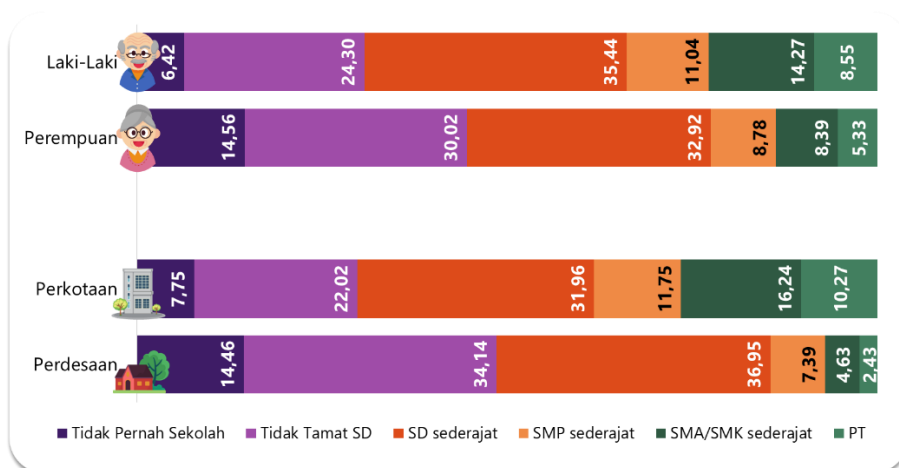
pendidikan rendah yakni 27,28 persen tidak tamat SD dan sebanyak 10,66 persen lansia tidak pernah sekolah. Sementara itu, hanya ada sekitar 18 persen lansia yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sederajat atau pendidikan tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.4 Persentase Lansia Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025

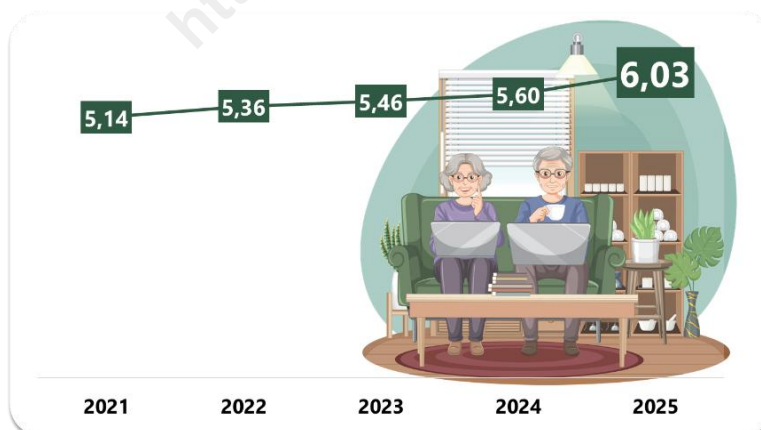
Berdasarkan Gambar 3.5, terlihat bahwa terdapat kesenjangan tingkat pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan yang cukup lebar. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sejak usia muda berkontribusi pada kesenjangan di usia lansia (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010). Hal ini tercermin dari persentase lansia perempuan tidak pernah sekolah yang besarnya lebih dari dua kali lipat persentase lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah (14,56 persen berbanding 6,42 persen). Di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, persentase lansia laki-laki yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sederajat dan pendidikan tinggi (14,27 persen dan 8,55 persen) juga jauh lebih besar daripada lansia perempuan (8,39 persen dan 5,33 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.5 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2025

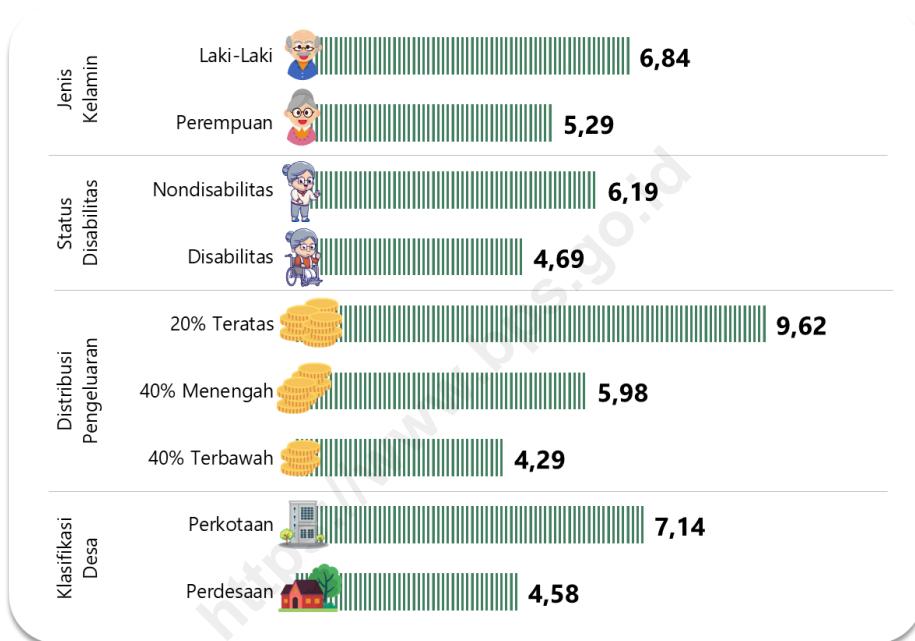
Pola keterkaitan juga terlihat antara karakteristik wilayah tempat tinggal dan tingkat pendidikan lansia. Lansia yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik daripada mereka yang tinggal di perdesaan (Gambar 3.5). Di perkotaan, 26,51 persen lansia menamatkan pendidikan SMA/SMK sederajat dan pendidikan tinggi. Angka tersebut tiga kali lebih besar dari capaian lansia di perdesaan, yang mana hanya sebesar 7,06 persen lansia di perdesaan yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2025

Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Lansia (tahun), 2021–2025

Masih dominannya penduduk lansia dengan pendidikan rendah berimplikasi pada rendahnya rata-rata lama sekolah lansia (Gambar 3.6). Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah lansia mengalami peningkatan dari 5,14 tahun pada tahun 2021 menjadi 6,03 tahun pada tahun 2025. Artinya secara rata-rata, lansia pernah bersekolah hanya sampai tamat SD sederajat. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan pendidikan lansia berjalan positif, namun masih menyisakan tantangan dalam pemerataan akses pendidikan pada generasi terdahulu.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.7 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik, 2025

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat adanya ketimpangan angka rata-rata lama sekolah lansia. Rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, yaitu 6,84 tahun berbanding 5,29 tahun. Adapun menurut status disabilitas, lansia bukan penyandang disabilitas memiliki rata-rata lama sekolah lebih lama dibandingkan lansia penyandang disabilitas, yaitu 6,19 tahun berbanding 4,69 tahun. Kondisi ini menunjukkan akses dan kesempatan pendidikan di masa lalu masih belum sepenuhnya merata di seluruh kelompok penduduk.

Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat adanya pola antara tingkat pendidikan dan status ekonomi lansia. Menurut Becker, G. S. (1993), pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan hasil Susenas tahun 2025 yang menunjukkan bahwa lansia yang berada pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki rata-rata lama sekolah yang paling tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lain, yakni 9,62 tahun atau setara tamat SMP sederajat. Sementara itu, rata-rata lama sekolah lansia yang berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah hanya 4,29 tahun atau setara dengan SD sederajat kelas 4.

Capaian pendidikan lansia juga menunjukkan perbedaan yang cukup terlihat berdasarkan klasifikasi desa atau kota tempat tinggal. Lansia yang tinggal di perkotaan cenderung mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan, yaitu 7,14 tahun berbanding 4,58 tahun. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses dan kesempatan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di masa lalu, yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup lansia di masa kini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.8 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi (tahun), 2025

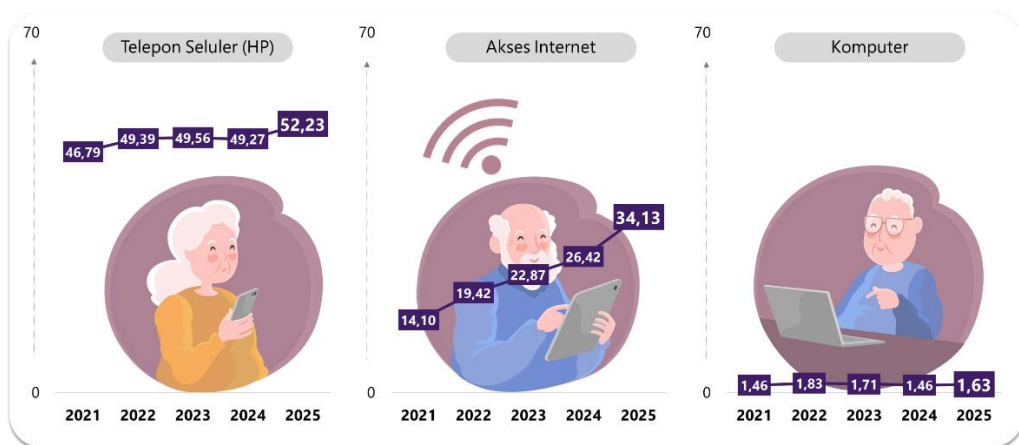
Analisis lebih mendalam berdasarkan letak geografis terlihat pada Gambar 3.8, warna hijau gelap menunjukkan capaian rata-rata lama sekolah lansia yang di bawah capaian nasional, sementara warna hijau muda

menunjukkan capaian rata-rata lama sekolah lansia yang di atas capaian nasional. Dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah lansia masih tidak merata di wilayah Indonesia. DKI Jakarta memiliki angka rata rata lama sekolah lansia yang tertinggi yakni 10,01 tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata lansia mampu bersekolah sampai dengan kelas 1 SMA/SMK sederajat. Sebaliknya, nilai rata-rata lama sekolah yang paling rendah berada di Provinsi Papua Pegunungan dengan rata-rata lama sekolah penduduk lansia hanya 2,53 tahun atau tidak sampai tamat SD sederajat. Perbedaan tersebut menggarisbawahi masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan di masa lalu, terutama di wilayah Pulau Papua.

3.3 Akses Teknologi Informasi dan Telekomunikasi

Pola interaksi dan kehidupan masyarakat kini telah bergeser ke era digital, termasuk di kalangan lansia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat berbagai aktivitas sehari-hari—seperti berbelanja, berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga mengakses layanan publik—semakin bergantung pada perangkat digital. Lansia yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini cenderung lebih mudah menjaga konektivitas sosial, memperoleh informasi yang relevan, dan memanfaatkan layanan daring untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam Susenas 2025, akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi didapatkan dari informasi apakah masyarakat tersebut menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan internet, dan menggunakan komputer dalam tiga bulan terakhir. Dari ketiga akses teknologi informasi dan komunikasi tersebut, telepon seluler (HP) menjadi hal yang paling sering digunakan. Lebih dari separuh lansia (52,23 persen lansia) menggunakan telepon seluler, dan angka ini menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir.

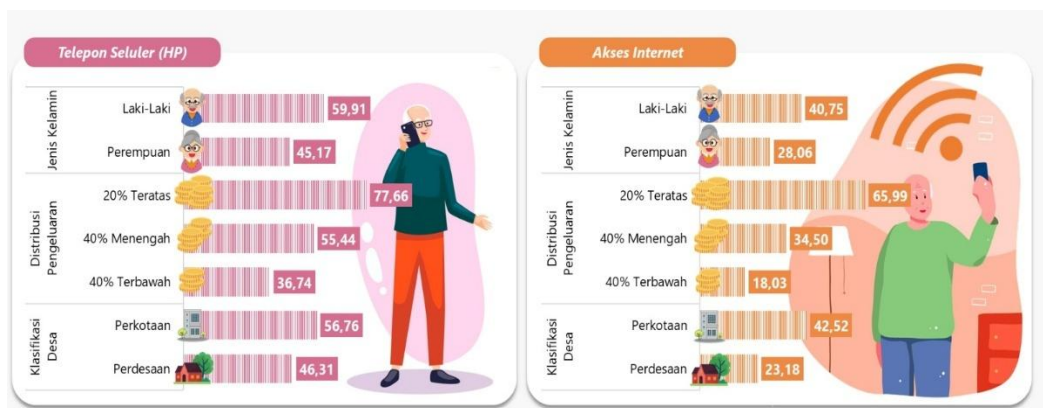


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2025

Gambar 3.9 Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Jenis Fasilitas, 2021–2025

Selanjutnya, akses internet oleh lansia juga menunjukkan tren yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, sebesar 34,13 persen lansia pernah mengakses internet. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun 2021 yang hanya terdapat sebesar 14,10 persen lansia yang mengakses internet. Sementara itu, penggunaan komputer oleh lansia relatif stabil dalam lima tahun terakhir, yakni tidak lebih dari dua persen.

Gambar 3.10 memberikan gambaran akses lansia terhadap telepon seluler (HP) dan internet yang dilihat berdasarkan beberapa karakteristik. Secara umum, pola penggunaan telepon seluler dan internet di kalangan lansia menunjukkan kecenderungan yang serupa jika dilihat menurut jenis kelamin, distribusi pengeluaran, maupun wilayah tempat tinggal. Berdasarkan jenis kelamin, lansia laki-laki cenderung lebih banyak menggunakan telepon seluler dan mengakses internet dibandingkan dengan lansia perempuan. Sementara jika dilihat menurut wilayah tempat tinggalnya, lansia di perkotaan lebih banyak yang menggunakan telepon seluler maupun mengakses internet dibandingkan lansia di perdesaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas komunikasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.10 Persentase Lansia Terhadap Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Karakteristik, 2025

Status ekonomi dan akses teknologi informasi dan komunikasi lansia menunjukkan suatu pola, baik itu dalam penggunaan telepon seluler maupun akses internet. Hanya sekitar 36,74 persen lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menggunakan telepon seluler, sementara lansia pada rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang menggunakan telepon seluler telah mencapai 77,66 persen. Lebih lanjut, persentase lansia yang mengakses internet pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas mencapai tiga kali lebih besar dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (65,99 persen berbanding 18,03 persen).

Secara umum, persentase lansia yang menggunakan telepon seluler lebih tinggi dibandingkan persentase lansia yang mengakses internet. Artinya, meskipun penggunaan telepon seluler sudah relatif umum, pemanfaatan internet masih terbatas, terutama di kelompok perempuan, kelompok pengeluaran rendah, dan untuk mereka yang tinggal di wilayah perdesaan.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	90,77	81,55	86,77
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	94,98	88,34	92,09
Perempuan	86,93	75,27	81,89
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	93,63	85,81	90,28
Lansia Madya (70–79 tahun)	88,26	78,50	84,00
Lansia Tua (80+ tahun)	76,78	61,96	69,87
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	91,84	83,07	88,05
Disabilitas	81,65	69,24	76,12
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	97,90	89,06	94,26
40% Menengah	93,30	84,32	89,35
40% Terbawah	84,60	75,39	80,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.2 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Karakteristik	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/ SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	10,66	27,28	34,13	9,86	11,20	6,87	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	6,42	24,30	35,44	11,04	14,27	8,55	100,00
Perempuan	14,56	30,02	32,92	8,78	8,39	5,33	100,00
Kelompok Umur							
Lansia Muda (60–69 tahun)	7,83	25,05	35,34	10,90	12,73	8,15	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	12,82	30,50	33,45	8,80	9,37	5,07	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	24,53	33,09	27,35	5,61	6,01	3,41	100,00
Status Disabilitas							
Nondisabilitas	9,66	26,76	34,56	10,16	11,60	7,27	100,00
Disabilitas	19,02	31,65	30,47	7,35	7,93	3,58	100,00
Distribusi Pengeluaran							
20% Teratas	4,49	12,43	23,30	12,51	24,10	23,17	100,00
40% Menengah	8,76	26,55	37,15	11,59	11,61	4,34	100,00
40% Terbawah	15,43	35,29	36,76	6,99	4,45	1,08	100,00
Klasifikasi Desa							
Perkotaan	7,75	22,02	31,96	11,75	16,24	10,27	100,00
Perdesaan	14,46	34,14	36,95	7,39	4,63	2,43	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	7,14	4,58	6,03
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	8,01	5,32	6,84
Perempuan	6,35	3,89	5,29
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	7,72	5,04	6,57
Lansia Madya (70–79 tahun)	6,44	4,09	5,41
Lansia Tua (80+ tahun)	5,02	2,92	4,04
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	7,33	4,69	6,19
Disabilitas	5,52	3,65	4,69
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	11,05	6,12	9,02
40% Menengah	7,24	4,68	6,12
40% Terbawah	4,94	3,73	4,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.4 Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Karakteristik dan Jenis Fasilitas, 2025

Karakteristik	Jenis Fasilitas		
	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Menggunakan Komputer	Akses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	52,23	1,63	34,13
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	59,91	2,48	40,75
Perempuan	45,17	0,86	28,06
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	60,07	2,24	41,45
Lansia Madya (70–79 tahun)	42,78	0,62	24,40
Lansia Tua (80+ tahun)	25,37	0,52	12,17
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	55,09	1,78	36,51
Disabilitas	28,32	0,36	14,30
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	77,66	6,40	65,99
40% Menengah	55,44	0,71	34,50
40% Terbawah	36,74	0,10	18,03
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	56,76	2,59	42,52
Perdesaan	46,31	0,39	23,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.5 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	97,22	91,08	97,14	92,38	93,97
Sumatera Utara	97,38	93,70	97,76	92,39	95,41
Sumatera Barat	97,15	93,51	96,56	93,89	95,21
Riau	96,46	91,03	96,12	92,25	93,74
Jambi	95,11	81,27	92,36	86,03	88,15
Sumatera Selatan	97,10	91,82	96,74	93,00	94,39
Bengkulu	94,51	83,45	94,50	86,75	89,00
Lampung	93,93	84,66	94,24	86,93	89,29
Kep. Bangka Belitung	95,53	88,68	95,44	87,16	92,20
Kepulauan Riau	98,61	93,53	97,92	85,36	96,13
DKI Jakarta	99,01	97,89	98,43	–	98,43
Jawa Barat	96,83	90,86	94,21	92,39	93,77
Jawa Tengah	87,88	73,22	83,64	76,32	80,11
DI Yogyakarta	91,34	75,73	86,70	74,90	82,90
Jawa Timur	87,27	72,26	86,11	71,18	79,25
Banten	96,54	89,81	94,26	89,33	93,18
Bali	90,05	74,78	85,48	74,81	81,99
Nusa Tenggara Barat	76,96	51,67	68,68	57,21	63,27
Nusa Tenggara Timur	87,50	80,52	89,59	82,01	83,78
Kalimantan Barat	86,18	71,71	84,97	74,98	78,89
Kalimantan Tengah	97,64	92,36	95,59	94,95	95,23
Kalimantan Selatan	93,21	83,76	93,17	83,70	88,34
Kalimantan Timur	96,38	90,92	94,36	92,54	93,76
Kalimantan Utara	92,40	86,93	93,70	84,76	89,87
Sulawesi Utara	99,35	99,28	99,25	99,40	99,32
Sulawesi Tengah	95,85	91,22	97,33	91,88	93,52
Sulawesi Selatan	85,19	77,37	88,65	75,03	80,90
Sulawesi Tenggara	91,94	76,50	89,47	81,12	83,88
Gorontalo	95,77	95,33	98,49	93,04	95,54
Sulawesi Barat	85,81	73,76	88,76	76,84	79,46
Maluku	98,85	96,56	99,57	96,21	97,66
Maluku Utara	97,09	91,10	97,98	92,59	94,08
Papua Barat	95,08	92,18	98,85	91,43	93,74
Papua Barat Daya	95,11	90,10	98,60	86,11	92,72
Papua	96,24	91,55	96,23	90,54	93,95
Papua Selatan	88,81	80,15	95,00	79,45	84,77
Papua Tengah	73,43	73,26	94,99	64,85	73,36
Papua Pegunungan	52,06	38,61	72,43	44,14	47,38
Indonesia	92,09	81,89	90,77	81,55	86,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.6 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/ SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,03	20,46	44,67	15,93	9,16	6,75	100,00
Sumatera Utara	3,36	19,91	35,73	16,37	17,88	6,75	100,00
Sumatera Barat	2,26	29,39	27,47	16,37	15,64	8,87	100,00
Riau	8,05	23,95	38,24	14,67	10,27	4,81	100,00
Jambi	10,32	30,56	32,32	10,01	12,86	3,94	100,00
Sumatera Selatan	5,81	29,68	40,54	8,25	10,29	5,44	100,00
Bengkulu	6,41	33,02	30,63	9,24	13,90	6,80	100,00
Lampung	5,83	41,11	32,05	8,44	7,64	4,95	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,68	30,14	37,46	11,59	11,59	3,55	100,00
Kepulauan Riau	3,71	21,80	34,68	12,21	20,95	6,65	100,00
DKI Jakarta	1,83	7,28	24,37	19,04	27,26	20,22	100,00
Jawa Barat	6,33	24,10	43,59	7,47	11,74	6,78	100,00
Jawa Tengah	13,65	33,74	31,98	7,74	8,05	4,85	100,00
DI Yogyakarta	12,10	30,71	25,31	11,02	12,31	8,54	100,00
Jawa Timur	16,66	29,93	30,56	8,60	7,86	6,38	100,00
Banten	9,01	20,34	37,14	10,79	14,40	8,33	100,00
Bali	17,40	17,21	34,81	7,74	12,63	10,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,54	32,44	18,68	5,14	6,79	5,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,49	32,20	34,55	6,82	9,48	5,45	100,00
Kalimantan Barat	18,14	32,05	25,06	11,45	8,72	4,60	100,00
Kalimantan Tengah	3,86	19,13	42,08	13,57	11,10	10,25	100,00
Kalimantan Selatan	3,43	34,33	32,44	9,12	11,17	9,51	100,00
Kalimantan Timur	4,08	27,02	36,63	14,31	13,82	4,14	100,00
Kalimantan Utara	6,03	24,73	29,47	20,74	15,93	3,10 ¹	100,00
Sulawesi Utara	1,75	22,42	31,98	16,18	21,11	6,57	100,00
Sulawesi Tengah	7,89	14,87	41,53	13,87	14,02	7,83	100,00
Sulawesi Selatan	15,32	27,50	27,74	9,23	11,49	8,72	100,00
Sulawesi Tenggara	12,41	25,43	36,85	9,13	8,37	7,82	100,00
Gorontalo	5,56	44,61	31,17	7,27	6,88	4,50	100,00
Sulawesi Barat	13,68	24,97	34,59	7,41	10,25	9,10	100,00
Maluku	3,20	19,14	41,08	15,99	16,47	4,11	100,00
Maluku Utara	4,09	27,72	38,79	12,26	12,91	4,23	100,00
Papua Barat	9,17	25,73	29,75	12,57	14,91	7,86	100,00
Papua Barat Daya	8,99	17,14	30,37	15,30	21,73	6,48	100,00
Papua	16,77	9,50	28,16	22,01	13,13	10,44	100,00
Papua Selatan	26,03	19,95	27,25	16,22	7,54	3,02 ¹	100,00
Papua Tengah	37,92	7,50	27,36	13,09	10,91	3,22 ¹	100,00
Papua Pegunungan	69,57	5,57 ¹	8,99	6,58 ¹	6,88 ¹	NA	100,00
Indonesia	10,66	27,28	34,13	9,86	11,20	6,87	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.7 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,36	6,16	8,27	5,95	6,73
Sumatera Utara	8,12	6,74	8,36	6,12	7,38
Sumatera Barat	7,67	6,84	8,39	6,09	7,23
Riau	6,74	5,60	7,93	5,07	6,17
Jambi	6,56	4,82	7,85	4,59	5,68
Sumatera Selatan	6,66	5,30	8,17	4,66	5,96
Bengkulu	7,18	5,24	9,09	5,04	6,22
Lampung	6,03	4,66	6,93	4,58	5,34
Kep. Bangka Belitung	6,50	5,17	6,99	4,07	5,85
Kepulauan Riau	8,17	6,22	7,71	4,27	7,22
DKI Jakarta	10,70	9,37	10,01	–	10,01
Jawa Barat	7,08	5,73	6,88	4,87	6,39
Jawa Tengah	5,97	4,31	5,92	4,21	5,09
DI Yogyakarta	7,11	5,24	7,06	4,06	6,10
Jawa Timur	6,12	4,52	6,51	3,80	5,27
Banten	7,64	5,72	7,31	4,46	6,68
Bali	7,63	5,27	7,08	4,96	6,38
Nusa Tenggara Barat	5,22	2,91	4,89	2,94	3,97
Nusa Tenggara Timur	6,26	4,71	8,06	4,63	5,43
Kalimantan Barat	5,92	3,98	6,45	3,97	4,94
Kalimantan Tengah	7,87	6,48	8,72	6,12	7,24
Kalimantan Selatan	7,35	5,68	8,19	4,86	6,49
Kalimantan Timur	7,39	5,45	7,14	5,06	6,46
Kalimantan Utara	7,29	5,83	7,35	5,63	6,61
Sulawesi Utara	7,92	7,46	8,73	6,43	7,68
Sulawesi Tengah	7,77	6,43	9,29	6,15	7,09
Sulawesi Selatan	6,79	5,25	7,85	4,50	5,94
Sulawesi Tenggara	7,18	4,67	7,94	4,85	5,87
Gorontalo	4,98	5,61	6,54	4,27	5,31
Sulawesi Barat	6,63	5,56	8,01	5,52	6,07
Maluku	7,30	6,83	8,70	5,81	7,06
Maluku Utara	7,04	5,89	9,11	5,45	6,46
Papua Barat	8,13	6,41	9,30	6,44	7,34
Papua Barat Daya	8,05	6,46	9,05	5,31	7,29
Papua	8,34	6,48	8,88	5,25	7,43
Papua Selatan	6,47	4,23	8,34	3,91	5,43
Papua Tengah	5,00	4,45	8,69	3,25	4,78
Papua Pegunungan	3,13	1,42 ¹	8,00 ¹	1,83	2,53
Indonesia	6,84	5,29	7,14	4,58	6,03

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.8 Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	66,75	47,23	65,78	51,72	56,43
Sumatera Utara	80,07	67,82	74,83	71,82	73,52
Sumatera Barat	77,38	69,82	77,00	69,77	73,35
Riau	81,66	60,74	80,68	65,25	71,17
Jambi	69,16	46,32	64,98	54,00	57,68
Sumatera Selatan	67,58	49,99	66,66	53,77	58,56
Bengkulu	64,27	44,52	70,03	48,04	54,44
Lampung	65,98	50,53	63,63	55,69	58,26
Kep. Bangka Belitung	67,85	56,74	70,06	50,59	62,43
Kepulauan Riau	83,00	73,37	80,83	63,04	78,29
DKI Jakarta	82,99	75,42	79,07	–	79,07
Jawa Barat	57,63	42,62	51,75	44,26	49,94
Jawa Tengah	46,13	34,33	44,26	35,18	39,88
DI Yogyakarta	53,08	41,12	48,65	42,31	46,61
Jawa Timur	51,35	34,63	48,25	35,55	42,41
Banten	54,55	36,31	50,91	25,93	45,46
Bali	59,63	36,41	51,58	38,74	47,38
Nusa Tenggara Barat	66,66	52,13	61,56	55,70	58,80
Nusa Tenggara Timur	67,50	54,52	71,93	57,14	60,60
Kalimantan Barat	59,67	39,80	68,10	37,78	49,66
Kalimantan Tengah	71,59	53,32	73,46	55,56	63,24
Kalimantan Selatan	69,62	46,67	65,05	50,80	57,77
Kalimantan Timur	84,04	66,04	77,09	72,00	75,43
Kalimantan Utara	77,01	72,24	76,29	72,82	74,80
Sulawesi Utara	63,00	58,17	68,52	50,97	60,51
Sulawesi Tengah	59,74	45,74	63,04	48,24	52,70
Sulawesi Selatan	68,03	59,87	70,46	58,33	63,55
Sulawesi Tenggara	76,17	65,34	76,82	67,40	70,52
Gorontalo	63,51	56,46	62,03	57,91	59,80
Sulawesi Barat	69,19	51,68	61,23	59,60	59,96
Maluku	72,33	67,38	81,43	60,90	69,76
Maluku Utara	62,31	47,14	80,07	45,01	54,68
Papua Barat	65,60	49,79	74,25	51,06	58,30
Papua Barat Daya	73,04	56,86	74,48	55,03	65,32
Papua	71,87	53,06	69,42	52,63	62,70
Papua Selatan	54,48	35,56	67,73	34,18	45,67
Papua Tengah	44,51	39,67	90,13	23,88	42,58
Papua Pegunungan	27,63	8,78 ¹	68,69 ¹	14,91	21,07
Indonesia	59,91	45,17	56,76	46,31	52,23

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.9 Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	29,43	17,72	37,78	15,92	23,24
Sumatera Utara	50,50	38,69	48,99	37,98	44,18
Sumatera Barat	44,70	35,21	49,42	30,06	39,64
Riau	48,72	30,84	54,94	30,29	39,75
Jambi	38,48	22,19	43,83	23,46	30,29
Sumatera Selatan	38,36	26,55	47,54	23,29	32,30
Bengkulu	38,13	24,53	51,21	23,22	31,36
Lampung	41,25	29,90	44,79	31,17	35,57
Kep. Bangka Belitung	38,96	29,59	42,62	21,62	34,39
Kepulauan Riau	69,55	54,62	67,16	32,72	62,25
DKI Jakarta	77,55	68,25	72,73	–	72,73
Jawa Barat	43,25	30,88	40,42	25,91	36,91
Jawa Tengah	34,10	22,80	33,17	22,69	28,12
DI Yogyakarta	43,56	29,40	41,35	24,43	35,90
Jawa Timur	35,03	21,43	35,50	18,67	27,76
Banten	48,13	29,82	45,61	15,33	39,01
Bali	44,40	24,19	37,79	25,39	33,74
Nusa Tenggara Barat	28,18	20,31	27,67	19,71	23,92
Nusa Tenggara Timur	28,35	18,62	47,90	15,64	23,18
Kalimantan Barat	42,96	27,32	53,26	23,38	35,09
Kalimantan Tengah	51,23	33,86	57,94	32,30	43,29
Kalimantan Selatan	46,94	27,15	47,84	26,08	36,73
Kalimantan Timur	56,00	42,48	57,00	34,12	49,53
Kalimantan Utara	45,67	40,18	47,42	37,41	43,14
Sulawesi Utara	33,25	31,47	42,74	19,94	32,33
Sulawesi Tengah	28,51	19,58	39,03	17,54	24,02
Sulawesi Selatan	39,10	29,75	47,90	23,44	33,97
Sulawesi Tenggara	32,02	20,02	35,03	21,17	25,76
Gorontalo	24,82	19,74	31,33	14,38	22,15
Sulawesi Barat	28,84	19,41	38,14	19,85	23,87
Maluku	36,42	30,61	52,02	19,26	33,40
Maluku Utara	29,38	17,07	51,62	12,36	23,19
Papua Barat	43,97	25,27	41,12	32,70	35,33
Papua Barat Daya	37,72	32,39	49,50	19,07	35,18
Papua	44,54	31,78	49,98	20,86	38,32
Papua Selatan	40,47	19,46	54,44	18,32	30,68
Papua Tengah	22,26	18,67	46,58	10,70	20,83
Papua Pegunungan	19,58	NA	68,69 ¹	8,11 ¹	15,06
Indonesia	40,75	28,06	42,52	23,18	34,13

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.10 *Sampling Error* Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak pernah sekolah				Tidak tamat SD				Tamat SD sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	3,03	2,27	3,79	12,80	20,46	18,71	22,21	4,37	44,67	42,44	46,90	2,55
Sumatera Utara	3,36	2,71	4,01	9,91	19,91	18,37	21,46	3,96	35,73	33,64	37,83	2,99
Sumatera Barat	2,26	1,70	2,82	12,63	29,39	27,46	31,32	3,35	27,47	25,59	29,34	3,48
Riau	8,05	6,53	9,56	9,61	23,95	21,33	26,58	5,60	38,24	35,29	41,19	3,94
Jambi	10,32	8,65	11,99	8,24	30,56	28,04	33,07	4,20	32,32	29,58	35,05	4,31
Sumatera Selatan	5,81	4,59	7,02	10,68	29,68	27,54	31,82	3,68	40,54	38,17	42,91	2,98
Bengkulu	6,41	5,01	7,82	11,18	33,02	30,16	35,87	4,41	30,63	27,96	33,30	4,45
Lampung	5,83	4,66	6,99	10,17	41,11	38,73	43,48	2,95	32,05	29,75	34,35	3,66
Kep. Bangka Belitung	5,68	4,11	7,25	14,10	30,14	26,65	33,63	5,91	37,46	33,85	41,07	4,92
Kepulauan Riau	3,71	2,13	5,28	21,65	21,80	17,82	25,77	9,31	34,68	29,54	39,82	7,56
DKI Jakarta	1,83	0,96	2,69	24,24	7,28	5,43	9,12	12,94	24,37	21,26	27,48	6,51
Jawa Barat	6,33	5,42	7,24	7,34	24,10	22,66	25,53	3,04	43,59	41,97	45,20	1,89
Jawa Tengah	13,65	12,85	14,46	3,02	33,74	32,63	34,84	1,67	31,98	30,89	33,06	1,73
DI Yogyakarta	12,10	10,35	13,86	7,39	30,71	28,15	33,27	4,25	25,31	23,03	27,60	4,60
Jawa Timur	16,66	15,82	17,51	2,59	29,93	28,92	30,95	1,73	30,56	29,54	31,58	1,70
Banten	9,01	7,02	10,99	11,23	20,34	17,66	23,01	6,71	37,14	33,77	40,51	4,63
Bali	17,40	15,64	19,15	5,14	17,21	15,44	18,97	5,22	34,81	32,62	37,00	3,21
Nusa Tenggara Barat	31,54	28,47	34,60	4,96	32,44	29,45	35,44	4,71	18,68	16,44	20,93	6,13
Nusa Tenggara Timur	11,49	10,30	12,69	5,29	32,20	30,34	34,06	2,94	34,55	32,62	36,48	2,85
Kalimantan Barat	18,14	16,18	20,09	5,49	32,05	29,62	34,48	3,87	25,06	22,81	27,30	4,57
Kalimantan Tengah	3,86	2,58	5,14	16,87	19,13	16,72	21,54	6,42	42,08	39,07	45,10	3,66
Kalimantan Selatan	3,43	2,41	4,45	15,20	34,33	31,84	36,82	3,70	32,44	30,09	34,78	3,69
Kalimantan Timur	4,08	2,80	5,36	15,98	27,02	23,69	30,35	6,28	36,63	33,11	40,14	4,89
Kalimantan Utara	6,03	3,83	8,23	18,62	24,73	20,36	29,11	9,03	29,47	25,09	33,84	7,57
Sulawesi Utara	1,75	1,25	2,24	14,51	22,42	20,44	24,40	4,50	31,98	29,81	34,15	3,46
Sulawesi Tengah	7,89	6,29	9,49	10,33	14,87	12,89	16,84	6,78	41,53	38,73	44,32	3,43
Sulawesi Selatan	15,32	13,97	16,67	4,50	27,50	25,86	29,14	3,05	27,74	26,07	29,42	3,08
Sulawesi Tenggara	12,41	10,74	14,07	6,85	25,43	23,04	27,81	4,79	36,85	34,20	39,50	3,66
Gorontalo	5,56	3,89	7,24	15,37	44,61	40,45	48,78	4,76	31,17	27,32	35,02	6,30
Sulawesi Barat	13,68	10,67	16,68	11,21	24,97	21,25	28,70	7,61	34,59	30,77	38,41	5,64
Maluku	3,20	2,19	4,21	16,13	19,14	16,59	21,69	6,80	41,08	37,67	44,49	4,24
Maluku Utara	4,09	2,68	5,50	17,58	27,72	24,36	31,07	6,18	38,79	35,29	42,29	4,60
Papua Barat	9,17	6,12	12,23	17,00	25,73	19,71	31,75	11,93	29,75	24,40	35,10	9,17
Papua Barat Daya	8,99	6,70	11,27	12,97	17,14	12,77	21,51	13,01	30,37	25,07	35,66	8,89
Papua	16,77	13,75	19,78	9,16	9,50	7,19	11,81	12,40	28,16	24,37	31,94	6,86
Papua Selatan	26,03	20,47	31,58	10,89	19,95	14,67	25,22	13,50	27,25	20,72	33,79	12,23
Papua Tengah	37,92	32,89	42,96	6,77	7,50	4,66	10,33	19,32	27,36	21,85	32,88	10,28
Papua Pegunungan	69,57	62,56	76,59	5,15	5,57	2,03	9,11	32,41	8,99	5,99	11,99	17,04
Indonesia	10,66	10,35	10,96	1,46	27,28	26,85	27,71	0,81	34,13	33,65	34,60	0,71

Lanjutan Tabel 3.10

Provinsi	Tamat SMP sederajat				Tamat SMA/SMK sederajat				Tamat Pendidikan Tinggi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	15,93	14,30	17,56	5,23	9,16	7,91	10,40	6,96	6,75	5,58	7,92	8,84
Sumatera Utara	16,37	14,75	17,98	5,04	17,88	15,87	19,89	5,73	6,75	5,69	7,80	8,00
Sumatera Barat	16,37	14,81	17,94	4,88	15,64	14,05	17,22	5,17	8,87	7,60	10,15	7,34
Riau	14,67	12,71	16,63	6,82	10,27	8,45	12,10	9,08	4,81	3,48	6,15	14,19
Jambi	10,01	8,38	11,64	8,30	12,86	10,99	14,72	7,42	3,94	2,81	5,08	14,70
Sumatera Selatan	8,25	6,90	9,59	8,33	10,29	8,77	11,80	7,54	5,44	4,16	6,72	12,01
Bengkulu	9,24	7,53	10,95	9,44	13,90	11,89	15,90	7,36	6,80	5,09	8,50	12,79
Lampung	8,44	7,17	9,70	7,64	7,64	6,41	8,86	8,18	4,95	3,89	6,00	10,88
Kep. Bangka Belitung	11,59	9,17	14,00	10,65	11,59	9,28	13,89	10,14	3,55	2,20	4,90	19,42
Kepulauan Riau	12,21	8,01	16,42	17,56	20,95	15,94	25,97	12,22	6,65	3,74	9,56	22,34
DKI Jakarta	19,04	16,14	21,94	7,77	27,26	24,17	30,35	5,78	20,22	17,01	23,43	8,11
Jawa Barat	7,47	6,64	8,29	5,63	11,74	10,66	12,82	4,68	6,78	5,96	7,60	6,17
Jawa Tengah	7,74	7,17	8,30	3,72	8,05	7,47	8,63	3,68	4,85	4,38	5,31	4,89
DI Yogyakarta	11,02	9,48	12,56	7,13	12,31	10,64	13,98	6,92	8,54	6,92	10,16	9,67
Jawa Timur	8,60	8,03	9,17	3,37	7,86	7,25	8,46	3,94	6,38	5,84	6,93	4,35
Banten	10,79	8,97	12,60	8,59	14,40	12,16	16,64	7,94	8,33	6,70	9,96	9,99
Bali	7,74	6,58	8,89	7,61	12,63	10,96	14,29	6,73	10,23	8,67	11,79	7,80
Nusa Tenggara Barat	5,14	3,95	6,33	11,80	6,79	5,40	8,19	10,45	5,41	4,09	6,72	12,44
Nusa Tenggara Timur	6,82	5,80	7,83	7,60	9,48	8,23	10,74	6,74	5,45	4,49	6,42	9,05
Kalimantan Barat	11,45	9,88	13,01	6,96	8,72	7,24	10,20	8,66	4,60	3,53	5,66	11,79
Kalimantan Tengah	13,57	11,71	15,44	7,00	11,10	9,18	13,02	8,81	10,25	8,34	12,15	9,48
Kalimantan Selatan	9,12	7,74	10,50	7,73	11,17	9,61	12,72	7,10	9,51	8,02	11,01	8,03
Kalimantan Timur	14,31	11,89	16,72	8,61	13,82	11,38	16,27	9,04	4,14	2,87	5,42	15,73
Kalimantan Utara	20,74	16,00	25,48	11,67	15,93	12,10	19,77	12,28	3,10	1,40	4,80	28,01
Sulawesi Utara	16,18	14,42	17,93	5,53	21,11	19,07	23,14	4,92	6,57	5,38	7,76	9,25
Sulawesi Tengah	13,87	11,99	15,74	6,89	14,02	12,01	16,03	7,31	7,83	6,34	9,33	9,72
Sulawesi Selatan	9,23	8,16	10,30	5,92	11,49	10,21	12,76	5,65	8,72	7,54	9,90	6,88
Sulawesi Tenggara	9,13	7,53	10,73	8,97	8,37	6,89	9,86	9,05	7,82	6,36	9,27	9,52
Gorontalo	7,27	5,30	9,23	13,78	6,88	4,93	8,83	14,45	4,50	2,64	6,37	21,16
Sulawesi Barat	7,41	5,25	9,58	14,88	10,25	7,95	12,54	11,42	9,10	6,76	11,44	13,13
Maluku	15,99	13,39	18,58	8,28	16,47	13,60	19,35	8,90	4,11	2,33	5,89	22,06
Maluku Utara	12,26	9,93	14,58	9,69	12,91	10,40	15,43	9,93	4,23	2,79	5,68	17,38
Papua Barat	12,57	8,52	16,62	16,44	14,91	11,11	18,72	13,01	7,86	4,50	11,22	21,80
Papua Barat Daya	15,30	10,67	19,94	15,44	21,73	16,27	27,18	12,81	6,48	3,62	9,34	22,52
Papua	22,01	18,40	25,61	8,35	13,13	10,09	16,17	11,81	10,44	7,41	13,48	14,82
Papua Selatan	16,22	10,63	21,81	17,58	7,54	3,86	11,22	24,91	3,02	0,48	5,55	42,82
Papua Tengah	13,09	9,17	17,01	15,28	10,91	7,13	14,69	17,67	3,22	1,27	5,17	30,95
Papua Pegunungan	6,58	2,63	10,52	30,61	6,88	3,20	10,57	27,31	NA	NA	NA	53,37
Indonesia	9,86	9,58	10,14	1,43	11,20	10,88	11,52	1,46	6,87	6,61	7,13	1,94

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

**Tabel 3.11 *Sampling Error* Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia
(Tahun) Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2025**

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	8,27	7,90	8,64	2,27	5,95	5,75	6,15	1,71
Sumatera Utara	8,36	8,08	8,65	1,74	6,12	5,91	6,34	1,79
Sumatera Barat	8,39	8,06	8,71	1,98	6,09	5,87	6,32	1,89
Riau	7,93	7,46	8,41	3,05	5,07	4,82	5,32	2,53
Jambi	7,85	7,37	8,33	3,13	4,59	4,33	4,86	2,93
Sumatera Selatan	8,17	7,71	8,63	2,90	4,66	4,47	4,85	2,05
Bengkulu	9,09	8,43	9,75	3,71	5,04	4,77	5,31	2,76
Lampung	6,93	6,54	7,33	2,90	4,58	4,35	4,81	2,57
Kep. Bangka Belitung	6,99	6,58	7,40	2,98	4,07	3,66	4,49	5,14
Kepulauan Riau	7,71	7,15	8,26	3,66	4,27	3,88	4,65	4,62
DKI Jakarta	10,01	9,65	10,37	1,85	—	—	—	—
Jawa Barat	6,88	6,69	7,06	1,39	4,87	4,68	5,06	2,01
Jawa Tengah	5,92	5,77	6,06	1,26	4,21	4,08	4,34	1,58
DI Yogyakarta	7,06	6,69	7,44	2,70	4,06	3,72	4,40	4,27
Jawa Timur	6,51	6,36	6,67	1,22	3,80	3,68	3,92	1,65
Banten	7,31	6,93	7,68	2,60	4,46	4,03	4,88	4,91
Bali	7,08	6,73	7,42	2,48	4,96	4,59	5,33	3,79
Nusa Tenggara Barat	4,89	4,43	5,35	4,76	2,94	2,57	3,31	6,37
Nusa Tenggara Timur	8,06	7,53	8,59	3,34	4,63	4,46	4,80	1,85
Kalimantan Barat	6,45	5,99	6,91	3,62	3,97	3,72	4,22	3,20
Kalimantan Tengah	8,72	8,22	9,23	2,94	6,12	5,84	6,40	2,31
Kalimantan Selatan	8,19	7,78	8,59	2,51	4,86	4,61	5,12	2,64
Kalimantan Timur	7,14	6,78	7,51	2,60	5,06	4,63	5,50	4,39
Kalimantan Utara	7,35	6,72	7,98	4,38	5,63	5,06	6,20	5,15
Sulawesi Utara	8,73	8,43	9,04	1,78	6,43	6,21	6,65	1,73
Sulawesi Tengah	9,29	8,72	9,86	3,10	6,15	5,89	6,40	2,13
Sulawesi Selatan	7,85	7,46	8,24	2,52	4,50	4,31	4,68	2,10
Sulawesi Tenggara	7,94	7,40	8,48	3,47	4,85	4,59	5,10	2,71
Gorontalo	6,54	5,93	7,14	4,73	4,27	3,90	4,63	4,36
Sulawesi Barat	8,01	7,00	9,03	6,46	5,52	5,07	5,97	4,15
Maluku	8,70	8,12	9,28	3,40	5,81	5,55	6,07	2,29
Maluku Utara	9,11	8,52	9,70	3,30	5,45	5,17	5,74	2,69
Papua Barat	9,30	8,50	10,11	4,41	6,44	5,81	7,07	4,99
Papua Barat Daya	9,05	8,23	9,87	4,61	5,31	4,78	5,84	5,10
Papua	8,88	8,24	9,52	3,69	5,25	4,80	5,71	4,43
Papua Selatan	8,34	7,16	9,52	7,21	3,91	3,41	4,41	6,54
Papua Tengah	8,69	7,67	9,71	5,97	3,25	2,76	3,73	7,62
Papua Pegunungan	8,00	4,04	11,95	25,22	1,83	1,28	2,38	15,37
Indonesia	7,14	7,07	7,22	0,51	4,58	4,53	4,62	0,54

Lanjutan Tabel 3.11

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	7,36	7,12	7,60	1,65	6,16	5,93	6,39	1,92	6,73	6,54	6,91	1,41
Sumatera Utara	8,12	7,89	8,35	1,46	6,74	6,53	6,96	1,63	7,38	7,19	7,57	1,32
Sumatera Barat	7,67	7,40	7,94	1,77	6,84	6,60	7,08	1,78	7,23	7,03	7,43	1,42
Riau	6,74	6,44	7,03	2,24	5,60	5,29	5,91	2,80	6,17	5,92	6,42	2,09
Jambi	6,56	6,28	6,84	2,20	4,82	4,52	5,12	3,18	5,68	5,44	5,93	2,24
Sumatera Selatan	6,66	6,40	6,91	1,96	5,30	5,04	5,57	2,54	5,96	5,73	6,19	1,96
Bengkulu	7,18	6,83	7,54	2,50	5,24	4,91	5,57	3,22	6,22	5,93	6,51	2,38
Lampung	6,03	5,78	6,27	2,10	4,66	4,42	4,90	2,65	5,34	5,13	5,55	1,99
Kep. Bangka Belitung	6,50	6,11	6,88	3,02	5,17	4,81	5,52	3,52	5,85	5,54	6,16	2,71
Kepulauan Riau	8,17	7,60	8,74	3,56	6,22	5,63	6,80	4,79	7,22	6,74	7,70	3,40
DKI Jakarta	10,70	10,28	11,12	2,02	9,37	8,96	9,78	2,25	10,01	9,65	10,37	1,85
Jawa Barat	7,08	6,90	7,26	1,31	5,73	5,56	5,90	1,52	6,39	6,24	6,54	1,21
Jawa Tengah	5,97	5,85	6,10	1,07	4,31	4,20	4,43	1,33	5,09	4,99	5,19	0,99
DI Yogyakarta	7,11	6,76	7,46	2,51	5,24	4,92	5,56	3,15	6,10	5,82	6,38	2,34
Jawa Timur	6,12	5,99	6,26	1,09	4,52	4,40	4,64	1,33	5,27	5,16	5,37	1,01
Banten	7,64	7,28	8,00	2,41	5,72	5,37	6,08	3,14	6,68	6,37	6,99	2,37
Bali	7,63	7,29	7,97	2,26	5,27	4,97	5,56	2,87	6,38	6,12	6,65	2,11
Nusa Tenggara Barat	5,22	4,82	5,63	3,98	2,91	2,61	3,21	5,25	3,97	3,67	4,27	3,85
Nusa Tenggara Timur	6,26	6,01	6,51	2,06	4,71	4,51	4,91	2,19	5,43	5,25	5,62	1,76
Kalimantan Barat	5,92	5,62	6,21	2,53	3,98	3,69	4,28	3,77	4,94	4,70	5,18	2,48
Kalimantan Tengah	7,87	7,55	8,19	2,09	6,48	6,11	6,85	2,89	7,24	6,96	7,51	1,95
Kalimantan Selatan	7,35	7,05	7,66	2,13	5,68	5,38	5,98	2,66	6,49	6,24	6,73	1,93
Kalimantan Timur	7,39	7,04	7,74	2,43	5,45	5,10	5,80	3,31	6,46	6,17	6,75	2,28
Kalimantan Utara	7,29	6,79	7,78	3,49	5,83	5,26	6,41	5,03	6,61	6,17	7,06	3,44
Sulawesi Utara	7,92	7,68	8,16	1,55	7,46	7,21	7,70	1,68	7,68	7,48	7,88	1,33
Sulawesi Tengah	7,77	7,45	8,09	2,10	6,43	6,11	6,75	2,54	7,09	6,84	7,35	1,82
Sulawesi Selatan	6,79	6,51	7,06	2,07	5,25	5,03	5,47	2,14	5,94	5,74	6,15	1,78
Sulawesi Tenggara	7,18	6,85	7,52	2,38	4,67	4,38	4,96	3,16	5,87	5,61	6,13	2,23
Gorontalo	4,98	4,54	5,42	4,54	5,61	5,18	6,03	3,84	5,31	4,96	5,65	3,33
Sulawesi Barat	6,63	6,11	7,15	4,00	5,56	5,05	6,07	4,68	6,07	5,65	6,49	3,54
Maluku	7,30	6,95	7,65	2,46	6,83	6,45	7,21	2,85	7,06	6,74	7,37	2,27
Maluku Utara	7,04	6,69	7,38	2,50	5,89	5,54	6,25	3,08	6,46	6,18	6,74	2,23
Papua Barat	8,13	7,46	8,80	4,20	6,41	5,85	6,97	4,46	7,34	6,82	7,85	3,58
Papua Barat Daya	8,05	7,31	8,78	4,64	6,46	5,79	7,13	5,30	7,29	6,73	7,84	3,87
Papua	8,34	7,82	8,85	3,15	6,48	5,96	7,00	4,09	7,43	6,99	7,87	3,03
Papua Selatan	6,47	5,74	7,20	5,76	4,23	3,55	4,91	8,23	5,43	4,88	5,98	5,17
Papua Tengah	5,00	4,42	5,58	5,91	4,45	3,87	5,04	6,71	4,78	4,29	5,27	5,20
Papua Pegunungan	3,13	2,40	3,86	11,95	1,42	0,62	2,22	28,75	2,53	1,87	3,20	13,45
Indonesia	6,84	6,78	6,89	0,43	5,29	5,24	5,34	0,51	6,03	5,98	6,08	0,40

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.12 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	65,78	61,99	69,56	2,94	51,72	48,90	54,54	2,78
Sumatera Utara	74,83	71,89	77,77	2,00	71,82	69,39	74,26	1,73
Sumatera Barat	77,00	74,02	79,98	1,97	69,77	67,10	72,43	1,95
Riau	80,68	76,71	84,64	2,51	65,25	61,63	68,87	2,83
Jambi	64,98	59,93	70,04	3,97	54,00	50,43	57,56	3,37
Sumatera Selatan	66,66	62,60	70,71	3,10	53,77	50,83	56,70	2,78
Bengkulu	70,03	64,15	75,91	4,28	48,04	44,47	51,62	3,79
Lampung	63,63	59,70	67,56	3,15	55,69	52,58	58,80	2,85
Kep. Bangka Belitung	70,06	65,46	74,66	3,35	50,59	44,27	56,91	6,37
Kepulauan Riau	80,83	76,24	85,42	2,90	63,04	57,01	69,07	4,88
DKI Jakarta	79,07	76,17	81,96	1,87	—	—	—	—
Jawa Barat	51,75	49,80	53,70	1,92	44,26	40,99	47,53	3,77
Jawa Tengah	44,26	42,77	45,75	1,72	35,18	33,37	36,98	2,62
DI Yogyakarta	48,65	45,19	52,11	3,63	42,31	37,16	47,45	6,20
Jawa Timur	48,25	46,72	49,78	1,62	35,55	33,93	37,18	2,33
Banten	50,91	46,97	54,85	3,95	25,93	20,81	31,05	10,07
Bali	51,58	48,48	54,67	3,06	38,74	34,97	42,51	4,97
Nusa Tenggara Barat	61,56	57,38	65,74	3,46	55,70	50,34	61,07	4,92
Nusa Tenggara Timur	71,93	67,14	76,72	3,40	57,14	54,95	59,33	1,96
Kalimantan Barat	68,10	63,98	72,23	3,09	37,78	34,60	40,96	4,30
Kalimantan Tengah	73,46	68,91	78,02	3,16	55,56	51,40	59,72	3,82
Kalimantan Selatan	65,05	61,34	68,76	2,91	50,80	47,13	54,47	3,69
Kalimantan Timur	77,09	73,20	80,99	2,58	72,00	66,77	77,22	3,70
Kalimantan Utara	76,29	70,03	82,55	4,19	72,82	65,85	79,80	4,89
Sulawesi Utara	68,52	65,20	71,83	2,47	50,97	47,57	54,38	3,41
Sulawesi Tengah	63,04	57,23	68,84	4,70	48,24	44,85	51,63	3,58
Sulawesi Selatan	70,46	67,32	73,60	2,27	58,33	56,13	60,52	1,92
Sulawesi Tenggara	76,82	71,90	81,74	3,27	67,40	64,34	70,47	2,32
Gorontalo	62,03	55,30	68,77	5,54	57,91	52,68	63,15	4,61
Sulawesi Barat	61,23	52,98	69,48	6,87	59,60	54,45	64,75	4,41
Maluku	81,43	76,26	86,59	3,24	60,90	57,18	64,61	3,11
Maluku Utara	80,07	75,01	85,14	3,23	45,01	40,64	49,38	4,96
Papua Barat	74,25	66,68	81,83	5,20	51,06	42,74	59,38	8,32
Papua Barat Daya	74,48	64,17	84,78	7,06	55,03	49,04	61,02	5,55
Papua	69,42	63,56	75,28	4,31	52,63	47,12	58,14	5,34
Papua Selatan	67,73	54,10	81,36	10,27	34,18	26,23	42,14	11,88
Papua Tengah	90,13	82,97	97,28	4,05	23,88	18,52	29,23	11,44
Papua Pegunungan	68,69	33,61	100,00	26,06	14,91	9,69	20,13	17,86
Indonesia	56,76	56,05	57,47	0,64	46,31	45,63	47,00	0,75

Lanjutan Tabel 3.12

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	66,75	63,84	69,66	2,22	47,23	44,41	50,05	3,05	56,43	54,15	58,70	2,06
Sumatera Utara	80,07	77,78	82,35	1,46	67,82	65,28	70,36	1,91	73,52	71,55	75,49	1,37
Sumatera Barat	77,38	74,90	79,86	1,64	69,82	67,33	72,31	1,82	73,35	71,34	75,35	1,39
Riau	81,66	78,78	84,53	1,80	60,74	57,04	64,44	3,11	71,17	68,44	73,90	1,96
Jambi	69,16	65,82	72,50	2,46	46,32	42,73	49,92	3,96	57,68	54,78	60,59	2,57
Sumatera Selatan	67,58	64,79	70,37	2,11	49,99	46,99	52,98	3,06	58,56	56,14	60,97	2,10
Bengkulu	64,27	60,61	67,92	2,90	44,52	40,77	48,27	4,30	54,44	51,34	57,53	2,90
Lampung	65,98	63,11	68,85	2,22	50,53	47,47	53,59	3,09	58,26	55,79	60,72	2,16
Kep. Bangka Belitung	67,85	63,33	72,36	3,39	56,74	51,96	61,51	4,29	62,43	58,64	66,22	3,10
Kepulauan Riau	83,00	78,36	87,64	2,85	73,37	67,33	79,42	4,21	78,29	74,26	82,32	2,63
DKI Jakarta	82,99	79,58	86,40	2,10	75,42	71,58	79,27	2,60	79,07	76,17	81,96	1,87
Jawa Barat	57,63	55,61	59,64	1,78	42,62	40,60	44,63	2,41	49,94	48,26	51,61	1,71
Jawa Tengah	46,13	44,66	47,61	1,63	34,33	33,00	35,65	1,97	39,88	38,71	41,04	1,49
DI Yogyakarta	53,08	49,41	56,74	3,52	41,12	37,86	44,39	4,05	46,61	43,75	49,48	3,14
Jawa Timur	51,35	49,91	52,79	1,43	34,63	33,35	35,91	1,89	42,41	41,29	43,53	1,35
Banten	54,55	50,67	58,44	3,64	36,31	32,40	40,21	5,49	45,46	42,14	48,78	3,73
Bali	59,63	56,60	62,66	2,59	36,41	33,57	39,25	3,98	47,38	44,96	49,80	2,60
Nusa Tenggara Barat	66,66	62,70	70,63	3,03	52,13	48,22	56,05	3,83	58,80	55,43	62,17	2,92
Nusa Tenggara Timur	67,50	65,11	69,90	1,81	54,52	52,00	57,04	2,36	60,60	58,56	62,63	1,72
Kalimantan Barat	59,67	56,54	62,79	2,67	39,80	36,66	42,94	4,03	49,66	47,06	52,25	2,67
Kalimantan Tengah	71,59	68,16	75,02	2,44	53,32	49,09	57,54	4,04	63,24	60,12	66,35	2,51
Kalimantan Selatan	69,62	66,47	72,77	2,31	46,67	43,37	49,98	3,61	57,77	55,14	60,40	2,32
Kalimantan Timur	84,04	80,80	87,27	1,96	66,04	61,47	70,62	3,53	75,43	72,31	78,55	2,11
Kalimantan Utara	77,01	71,39	82,63	3,72	72,24	65,96	78,52	4,44	74,80	70,14	79,47	3,18
Sulawesi Utara	63,00	60,08	65,91	2,36	58,17	55,24	61,10	2,57	60,51	58,07	62,94	2,05
Sulawesi Tengah	59,74	56,24	63,24	2,99	45,74	42,01	49,46	4,15	52,70	49,76	55,64	2,85
Sulawesi Selatan	68,03	65,72	70,34	1,73	59,87	57,63	62,10	1,91	63,55	61,70	65,40	1,49
Sulawesi Tenggara	76,17	73,07	79,28	2,08	65,34	62,01	68,66	2,60	70,52	67,89	73,15	1,90
Gorontalo	63,51	58,34	68,69	4,16	56,46	51,28	61,64	4,68	59,80	55,61	63,99	3,57
Sulawesi Barat	69,19	64,08	74,29	3,76	51,68	46,15	57,22	5,47	59,96	55,55	64,36	3,75
Maluku	72,33	68,79	75,87	2,50	67,38	63,55	71,22	2,91	69,76	66,64	72,88	2,28
Maluku Utara	62,31	58,01	66,61	3,52	47,14	42,65	51,63	4,86	54,68	51,04	58,33	3,40
Papua Barat	65,60	58,47	72,73	5,54	49,79	41,65	57,93	8,34	58,30	52,03	64,56	5,48
Papua Barat Daya	73,04	66,45	79,64	4,60	56,86	48,44	65,28	7,56	65,32	59,05	71,59	4,89
Papua	71,87	67,38	76,35	3,18	53,06	47,55	58,57	5,30	62,70	58,50	66,89	3,41
Papua Selatan	54,48	46,20	62,76	7,76	35,56	26,51	44,62	12,99	45,67	38,59	52,74	7,91
Papua Tengah	44,51	39,47	49,55	5,78	39,67	32,43	46,92	9,32	42,58	37,39	47,78	6,22
Papua Pegunungan	27,63	20,55	34,72	13,08	8,78	1,24	16,31	43,80	21,07	14,75	27,40	15,32
Indonesia	59,91	59,30	60,52	0,52	45,17	44,57	45,76	0,67	52,23	51,72	52,73	0,49

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.13 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	37,78	33,72	41,85	5,49	15,92	13,92	17,91	6,40
Sumatera Utara	48,99	45,59	52,39	3,54	37,98	35,37	40,58	3,50
Sumatera Barat	49,42	45,89	52,95	3,64	30,06	27,44	32,69	4,45
Riau	54,94	49,54	60,34	5,01	30,29	26,80	33,78	5,88
Jambi	43,83	38,69	48,98	5,99	23,46	20,42	26,49	6,61
Sumatera Selatan	47,54	42,82	52,26	5,06	23,29	20,81	25,77	5,43
Bengkulu	51,21	44,82	57,60	6,37	23,22	20,27	26,17	6,49
Lampung	44,79	40,78	48,80	4,57	31,17	28,27	34,08	4,76
Kep. Bangka Belitung	42,62	37,53	47,71	6,09	21,62	16,44	26,81	12,23
Kepulauan Riau	67,16	61,81	72,52	4,07	32,72	26,37	39,06	9,90
DKI Jakarta	72,73	69,55	75,91	2,23	—	—	—	—
Jawa Barat	40,42	38,54	42,30	2,37	25,91	23,09	28,73	5,56
Jawa Tengah	33,17	31,79	34,56	2,13	22,69	21,12	24,26	3,53
DI Yogyakarta	41,35	38,01	44,69	4,12	24,43	20,05	28,81	9,15
Jawa Timur	35,50	34,02	36,98	2,13	18,67	17,37	19,98	3,58
Banten	45,61	41,69	49,53	4,38	15,33	11,10	19,55	14,08
Bali	37,79	34,81	40,78	4,03	25,39	21,87	28,91	7,07
Nusa Tenggara Barat	27,67	24,14	31,19	6,50	19,71	15,49	23,94	10,93
Nusa Tenggara Timur	47,90	42,32	53,47	5,94	15,64	14,04	17,23	5,20
Kalimantan Barat	53,26	48,69	57,84	4,38	23,38	20,57	26,19	6,13
Kalimantan Tengah	57,94	52,76	63,13	4,57	32,30	28,70	35,89	5,68
Kalimantan Selatan	47,84	43,87	51,82	4,24	26,08	22,80	29,35	6,40
Kalimantan Timur	57,00	52,32	61,68	4,19	34,12	28,07	40,16	9,04
Kalimantan Utara	47,42	39,62	55,23	8,40	37,41	29,79	45,03	10,39
Sulawesi Utara	42,74	39,06	46,41	4,39	19,94	17,42	22,47	6,46
Sulawesi Tengah	39,03	33,23	44,83	7,59	17,54	14,98	20,10	7,45
Sulawesi Selatan	47,90	44,49	51,31	3,63	23,44	21,62	25,26	3,97
Sulawesi Tenggara	35,03	29,79	40,26	7,62	21,17	18,61	23,74	6,18
Gorontalo	31,33	24,97	37,69	10,35	14,38	10,88	17,88	12,41
Sulawesi Barat	38,14	29,56	46,72	11,48	19,85	15,87	23,84	10,23
Maluku	52,02	45,06	58,99	6,83	19,26	16,02	22,49	8,57
Maluku Utara	51,62	44,45	58,79	7,08	12,36	9,81	14,92	10,53
Papua Barat	41,12	31,51	50,72	11,92	32,70	24,57	40,84	12,69
Papua Barat Daya	49,50	38,21	60,79	11,64	19,07	13,80	24,35	14,10
Papua	49,98	43,22	56,74	6,90	20,86	16,53	25,19	10,60
Papua Selatan	54,44	39,40	69,48	14,10	18,32	11,00	25,64	20,38
Papua Tengah	46,58	34,05	59,10	13,72	10,70	6,51	14,89	19,96
Papua Pegunungan	68,69	33,61	100,00	26,06	8,11	4,11	12,11	25,15
Indonesia	42,52	41,82	43,23	0,85	23,18	22,60	23,76	1,28

Lanjutan Tabel 3.13

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	29,43	26,77	32,09	4,61	17,72	15,58	19,86	6,17	23,24	21,28	25,20	4,30
Sumatera Utara	50,50	47,72	53,28	2,81	38,69	36,10	41,28	3,41	44,18	41,94	46,43	2,59
Sumatera Barat	44,70	41,82	47,59	3,29	35,21	32,66	37,76	3,69	39,64	37,40	41,87	2,87
Riau	48,72	45,02	52,42	3,87	30,84	27,34	34,33	5,79	39,75	36,70	42,81	3,92
Jambi	38,48	35,05	41,91	4,55	22,19	19,15	25,23	6,99	30,29	27,61	32,96	4,51
Sumatera Selatan	38,36	35,40	41,32	3,94	26,55	23,75	29,34	5,38	32,30	29,85	34,75	3,87
Bengkulu	38,13	34,43	41,82	4,94	24,53	21,28	27,78	6,75	31,36	28,46	34,25	4,71
Lampung	41,25	38,32	44,17	3,62	29,90	27,16	32,64	4,67	35,57	33,20	37,95	3,41
Kep. Bangka Belitung	38,96	34,32	43,60	6,07	29,59	25,08	34,10	7,78	34,39	30,62	38,17	5,60
Kepulauan Riau	69,55	63,83	75,27	4,20	54,62	47,84	61,40	6,33	62,25	57,47	67,02	3,91
DKI Jakarta	77,55	73,82	81,28	2,46	68,25	64,04	72,45	3,14	72,73	69,55	75,91	2,23
Jawa Barat	43,25	41,25	45,25	2,36	30,88	29,05	32,72	3,03	36,91	35,33	38,50	2,19
Jawa Tengah	34,10	32,72	35,48	2,07	22,80	21,65	23,96	2,58	28,12	27,07	29,16	1,89
DI Yogyakarta	43,56	39,96	47,16	4,22	29,40	26,45	32,35	5,12	35,90	33,24	38,57	3,79
Jawa Timur	35,03	33,68	36,39	1,97	21,43	20,32	22,53	2,62	27,76	26,74	28,78	1,87
Banten	48,13	44,27	52,00	4,10	29,82	26,07	33,57	6,42	39,01	35,74	42,28	4,27
Bali	44,40	41,29	47,51	3,58	24,19	21,60	26,78	5,46	33,74	31,43	36,05	3,49
Nusa Tenggara Barat	28,18	24,72	31,64	6,26	20,31	17,29	23,33	7,58	23,92	21,19	26,65	5,83
Nusa Tenggara Timur	28,35	25,94	30,76	4,34	18,62	16,57	20,67	5,62	23,18	21,32	25,03	4,08
Kalimantan Barat	42,96	39,73	46,19	3,83	27,32	24,32	30,32	5,60	35,09	32,54	37,63	3,70
Kalimantan Tengah	51,23	47,56	54,91	3,66	33,86	29,91	37,81	5,95	43,29	40,16	46,43	3,70
Kalimantan Selatan	46,94	43,54	50,34	3,69	27,15	24,24	30,07	5,47	36,73	34,12	39,33	3,62
Kalimantan Timur	56,00	51,63	60,37	3,98	42,48	37,76	47,20	5,67	49,53	45,76	53,30	3,88
Kalimantan Utara	45,67	39,16	52,19	7,28	40,18	33,27	47,09	8,77	43,14	37,59	48,68	6,56
Sulawesi Utara	33,25	30,27	36,23	4,57	31,47	28,68	34,26	4,53	32,33	29,93	34,73	3,79
Sulawesi Tengah	28,51	25,26	31,76	5,82	19,58	16,68	22,48	7,56	24,02	21,52	26,51	5,30
Sulawesi Selatan	39,10	36,68	41,52	3,16	29,75	27,63	31,87	3,64	33,97	32,12	35,83	2,79
Sulawesi Tenggara	32,02	28,73	35,30	5,23	20,02	17,19	22,85	7,21	25,76	23,31	28,21	4,85
Gorontalo	24,82	20,33	29,31	9,22	19,74	15,73	23,76	10,37	22,15	18,62	25,67	8,12
Sulawesi Barat	28,84	23,96	33,71	8,62	19,41	15,10	23,72	11,32	23,87	20,16	27,57	7,92
Maluku	36,42	32,09	40,74	6,06	30,61	25,74	35,48	8,11	33,40	29,61	37,20	5,80
Maluku Utara	29,38	25,48	33,27	6,77	17,07	13,72	20,42	10,01	23,19	20,24	26,14	6,50
Papua Barat	43,97	36,54	51,41	8,62	25,27	17,90	32,64	14,88	35,33	29,01	41,65	9,13
Papua Barat Daya	37,72	29,84	45,61	10,66	32,39	24,64	40,13	12,20	35,18	28,49	41,86	9,69
Papua	44,54	39,15	49,94	6,18	31,78	26,41	37,15	8,62	38,32	33,73	42,91	6,11
Papua Selatan	40,47	32,16	48,78	10,48	19,46	10,95	27,98	22,32	30,68	23,51	37,85	11,92
Papua Tengah	22,26	16,84	27,68	12,42	18,67	12,40	24,95	17,15	20,83	16,00	25,67	11,84
Papua Pegunungan	19,58	13,50	25,66	15,85	NA	NA	NA	55,76	15,06	9,44	20,67	19,03
Indonesia	40,75	40,14	41,36	0,76	28,06	27,51	28,60	0,99	34,13	33,65	34,61	0,72

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



BAB 4

KESEHATAN

<https://www.bimbel.id>

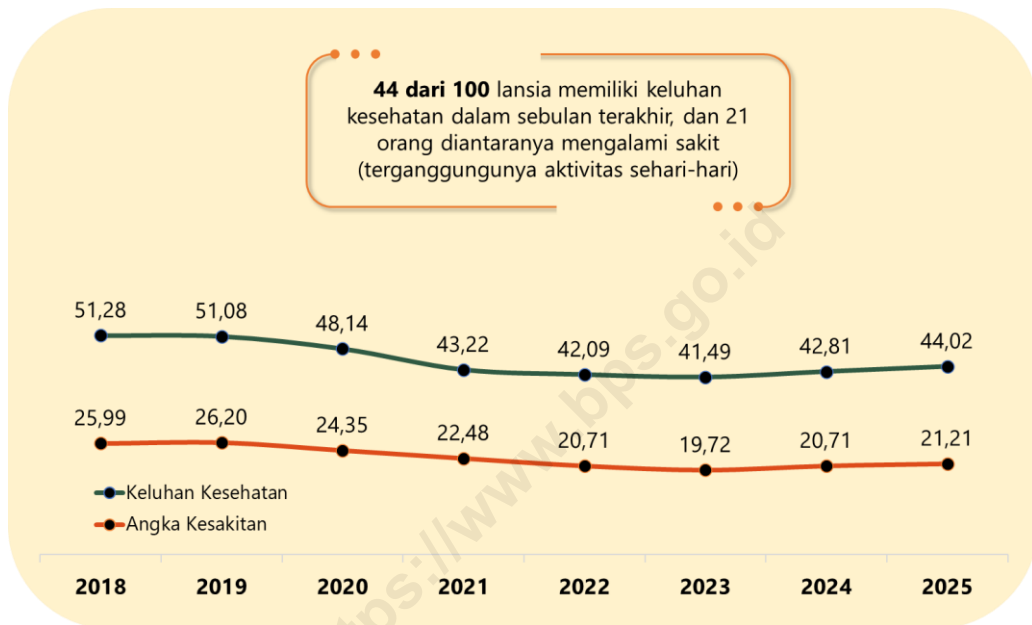
Active Ageing adalah konsep yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membantu individu dan kelompok lansia memperpanjang usia harapan hidup mereka dalam keadaan sehat dan berkualitas. Konsep ini bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dalam keadaan sehat dan berkualitas. *Active Ageing* juga mencakup upaya untuk membentuk lansia yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif, dengan tujuan memperpanjang usia harapan hidup dalam keadaan sehat dan berkualitas.

Konsep ini memungkinkan individu dan kelompok lansia untuk menyadari potensi fisik, sosial, mental, dan kesejahteraan mereka sepanjang hidup, serta untuk berpartisipasi di masyarakat sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kapasitas mereka. Dengan konsep "*Active Ageing*", penduduk yang berusia lanjut masih dapat terus berpartisipasi dalam urusan sosial, ekonomi, budaya, spiritual dan kewarganegaraan, bukan hanya kemampuan untuk beraktivitas fisik atau berpartisipasi dalam angkatan kerja (WHO 2002). Kesehatan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan *Active Ageing*. Pada bab ini akan dibahas berbagai aspek terkait kesehatan lansia, meliputi kondisi fisik mereka, upaya pengobatan yang dilakukan, pemanfaatan layanan jaminan kesehatan, serta kebiasaan merokok yang masih dijalani.

4.1 Kondisi Kesehatan

Indikator kesehatan yang dihasilkan Susenas dalam menggambarkan kesehatan lansia secara umum di Indonesia adalah persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan (morbiditas) lansia. Persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan, yakni keadaan seorang lansia yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit

kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dicatat adalah keluhan fisik maupun psikis yang dialami lansia selama kurun waktu sebulan terakhir. Adapun angka kesakitan lansia, yaitu kondisi ketika seseorang lansia mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Keluhan kesehatan dan angka kesakitan dari Susenas diukur dengan pendekatan pengakuan dari responden.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

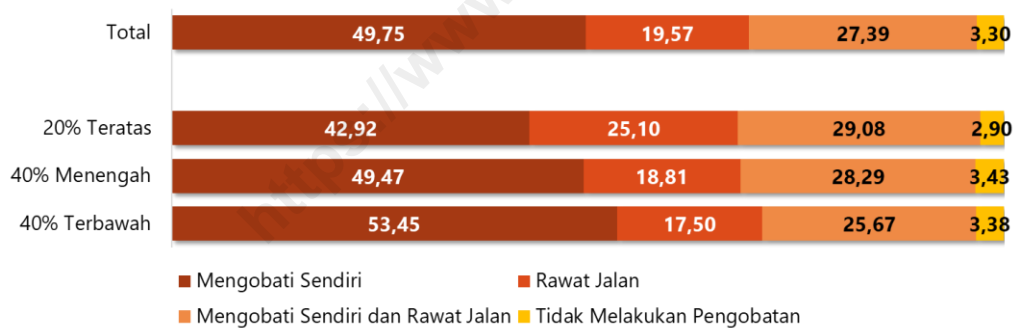
Gambar 4.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Lansia, 2018–2025

Hasil Susenas Maret 2025 pada Gambar 4.1 memperlihatkan secara konsisten, persentase lansia yang memiliki keluhan kesehatan dan angka kesakitan mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2023, sebagai gambaran kondisi kesehatan lansia yang semakin membaik. Namun sebaliknya, sejak tahun 2024, persentase lansia yang memiliki keluhan kesehatan dan angka kesakitan justru menunjukkan kondisi yang meningkat, sebagai indikasi kondisi kesehatan lansia yang semakin tidak baik. Pada tahun 2025, setidaknya 44 dari 100 orang lansia memiliki keluhan kesehatan. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan

angka kesakitan lansia sebesar 21,21 yang menggambarkan ada sekitar 21 orang dari 100 orang lansia yang terganggu aktivitas sehari-harinya karena memiliki keluhan kesehatan. Dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

4.2 Tindakan Pengobatan

Setiap bentuk keluhan kesehatan yang dialami lansia, baik yang mengganggu aktivitas harian maupun yang tidak, seharusnya segera ditangani agar tidak berkepanjangan dan memungkinkan lansia untuk kembali beraktivitas secara normal. Dalam merespons keluhan tersebut, lansia memiliki beberapa opsi pengobatan, seperti melakukan perawatan secara mandiri atau mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk rawat jalan. Meski demikian, masih terdapat lansia yang memilih untuk tidak melakukan pengobatan sama sekali meskipun mengalami keluhan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses, minimnya pengetahuan kesehatan, atau anggapan bahwa keluhan tersebut tidak serius.



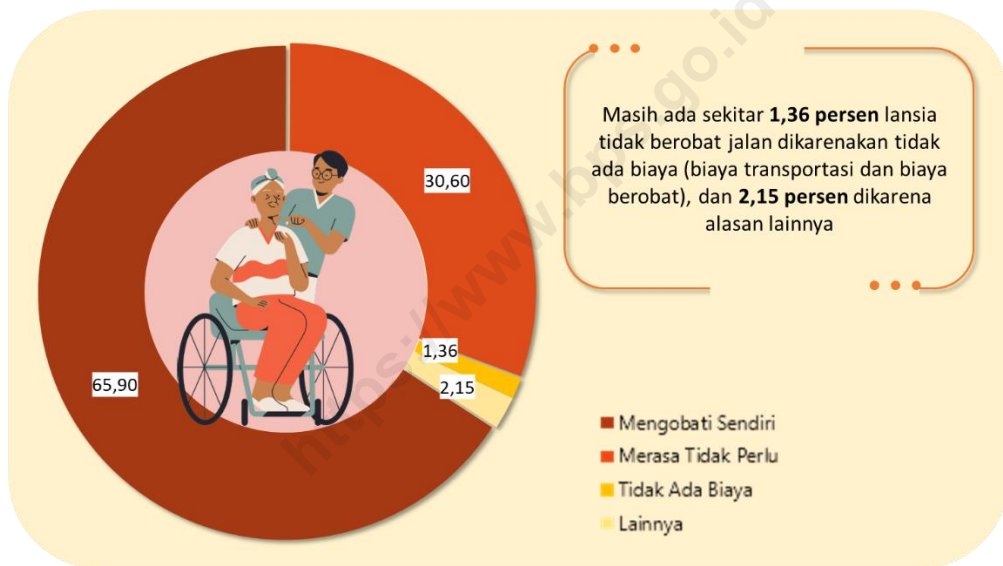
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.2 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tindakan Pengobatan dan Distribusi Pengeluaran, 2025

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, sebagian besar lansia yang mengalami gangguan kesehatan telah melakukan upaya pengobatan, baik secara mandiri maupun melalui layanan rawat jalan. Sekitar 77,14 persen lansia mengobati penyakitnya dengan berobat sendiri, baik dengan mengombinasikannya dengan berobat jalan (27,39 persen) atau

hanya mengobati penyakit nya sendiri (49,75 persen), salah satunya misalnya dengan mengonsumsi obat dari warung atau toko obat tanpa resep dokter atau tenaga kesehatan.

Kondisi tersebut sama jika dilihat pada kelompok lansia berdasarkan pengeluaran. Namun disisi lainnya terlihat bahwa kondisi ekonomi yang kuat menyebabkan lansia lebih memilih untuk rawat inap. Terlihat bahwa persentase lansia dengan tingkat pengeluaran 20 persen teratas lebih tinggi (25,19 persen) dibanding dengan lansia pada kelompok pengeluaran lainnya. Selain itu, terdapat sekitar 3,30 persen lansia yang tidak melakukan pengobatan sama sekali. Meskipun angkanya tidak terlalu mencolok, proporsi ini cenderung meningkat pada kelompok dengan pengeluaran lebih rendah.



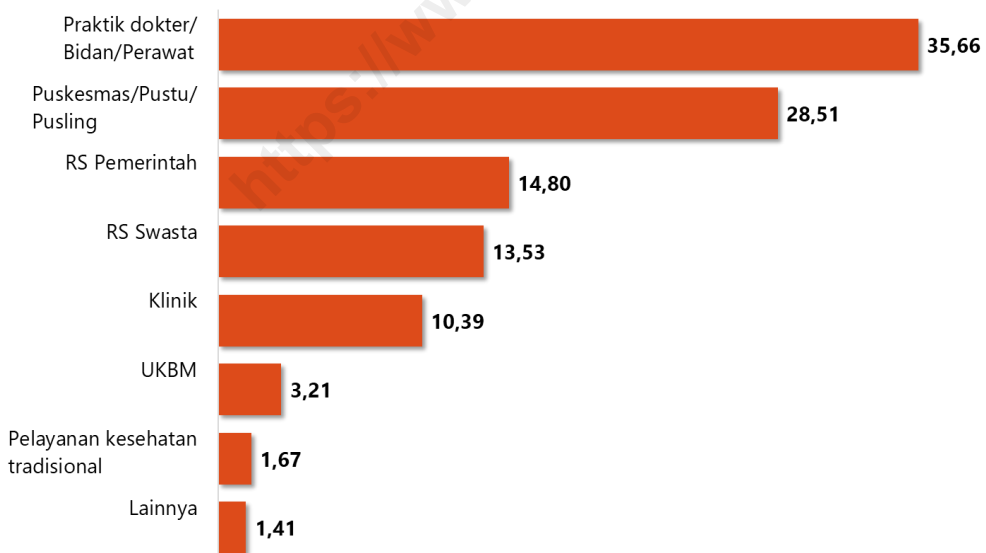
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.3 Persentase Lansia yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

Kondisi tubuh lansia rentan terhadap penyakit, dan kondisi penyakit yang dialami lansia berpotensi penyakit berat yang mengharuskan lansia untuk dirawat oleh tenaga kesehatan (rawat jalan). Namun demikian persentase lansia yang rawat jalan tidak terlalu tinggi (46,96 persen), baik yang dikombinasikan

dengan berobat sendiri (27,39 persen) maupun hanya berobat jalan saja (19,57 persen). Ada lebih dari 50 persen lansia yang tidak rawat jalan. Dari mereka yang tidak menjalani rawat jalan, sekitar 1,36 persen menyatakan alasan utamanya adalah keterbatasan biaya, baik biaya transportasi maupun biaya untuk berobat. Namun, alasan paling umum lansia tidak melakukan rawat jalan adalah karena mengobati sendiri 65,90 persen. Sebanyak 30,60 persen lansia yang tidak melakukan pengobatan menyatakan bahwa keluhan kesehatannya dianggap ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa perlu penanganan medis.

Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai lansia yang menjalani rawat jalan, Susenas turut mencatat jenis fasilitas kesehatan yang mereka datangi. Mayoritas lansia memilih berobat ke layanan kesehatan modern, dengan dua tempat yang paling sering dikunjungi adalah praktik dokter/bidan/perawat serta puskesmas atau pustu. Sebanyak 35,66 persen lansia mendatangi praktik dokter/bidan/perawat, sementara 28,51 persen lainnya memilih berobat ke puskesmas/puskesmas pembantu (pustu)/puskesmas keliling (pusling).

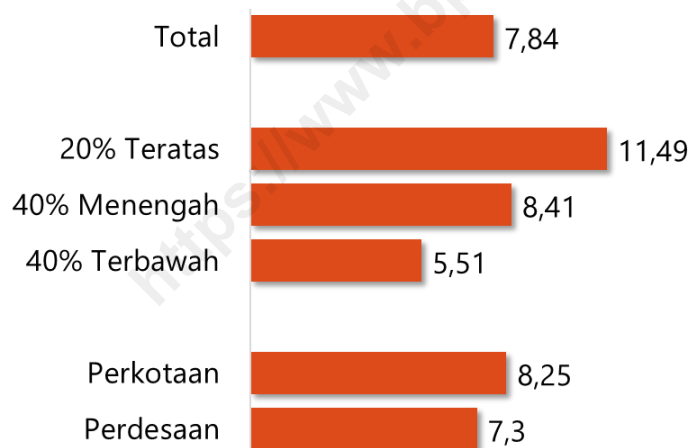


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.4 Persentase Lansia yang Rawat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, 2025

Di antara lansia yang menjalani rawat jalan, sekitar 14,80 persen memilih berobat ke rumah sakit pemerintah. Sementara itu, 13,53 persen mendatangi rumah sakit swasta, dan sekitar 10,39 persen lainnya mengunjungi klinik ketika rawat jalan. Sebagian kecil lansia, yakni 3,21 persen, memanfaatkan layanan dari UKBM seperti poskesdes, polindes, posyandu, dan balai pengobatan. Adapun 1,67 persen lansia memilih berobat ke tempat pengobatan tradisional. Sisanya sekitar 1,41 persen lainnya berobat jalan ke fasilitas kesehatan lainnya.

Selain menjalani rawat jalan, sebagian lansia yang mengalami gangguan kesehatan juga menghadapi kondisi yang memerlukan perawatan inap. Informasi mengenai lansia yang pernah dirawat inap juga tercantum dalam Susenas, namun dengan rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan data keluhan kesehatan, yaitu mencakup satu tahun terakhir. Artinya, pengalaman rawat inap yang tercatat tidak secara langsung berkaitan dengan keluhan kesehatan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

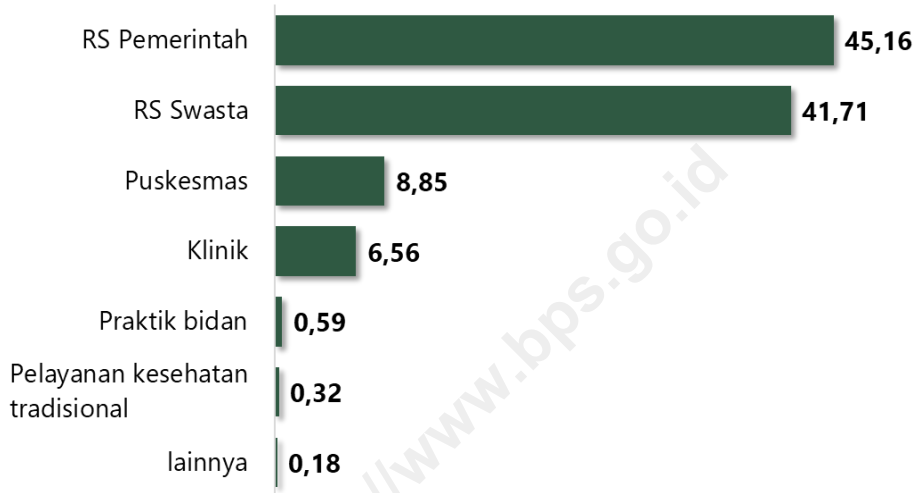


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.5 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2025

Dalam Susenas, rawat inap diartikan sebagai proses pengobatan yang mengharuskan pasien menginap minimal satu malam di fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang bersifat modern maupun tradisional, termasuk perawatan untuk melahirkan. Pada tahun 2025, dari 100 lansia, sekitar 7 hingga 8

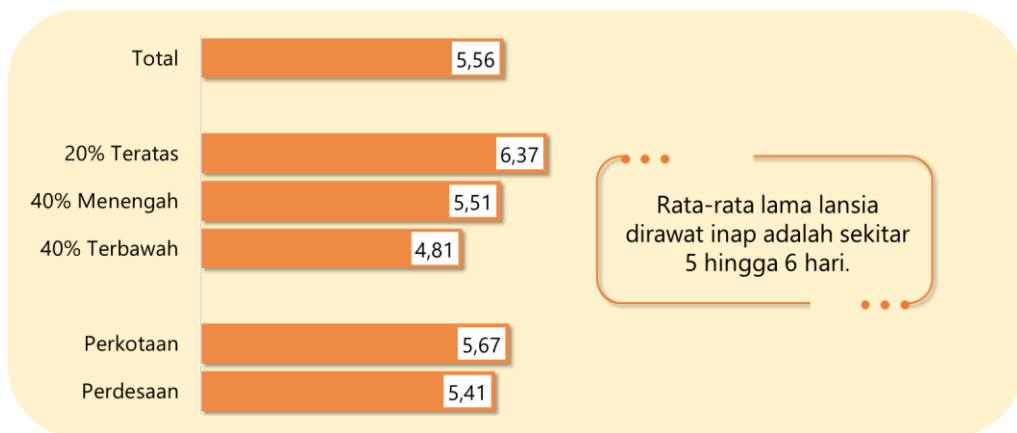
diantaranya tercatat pernah menjalani perawatan inap selama satu tahun terakhir (Gambar 4.5). Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, lansia dari kelompok 20 persen dengan pengeluaran tertinggi memiliki proporsi rawat inap yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Sejalan dengan itu, persentase lansia di perkotaan juga lebih tinggi yang menjalani perawatan inap dibandingkan lansia yang tinggal di perdesaan. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena perawatan inap membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan layanan kesehatan lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.6 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan, 2025

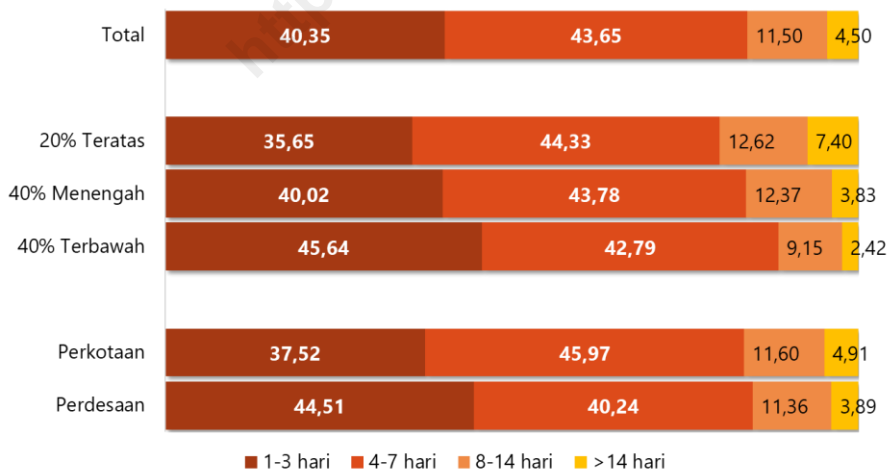
Jika ditinjau lebih mendalam mengenai lokasi perawatan inap lansia (Gambar 4.6), hampir setengah dari lansia yang pernah dirawat memilih rumah sakit pemerintah sebagai tempat perawatan (45,16 persen). Selain itu, rumah sakit swasta juga menjadi salah satu fasilitas yang cukup banyak digunakan oleh lansia untuk rawat inap (41,71 persen). Sementara itu, jumlah lansia yang menjalani rawat inap di pengobatan tradisional sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5 persen. Lansia yang sakit masih kurang memanfaatkan layanan kesehatan puskesmas, klinik dan tempat praktik bidan, diasumsikan karena fasilitas layanan kesehatan yang masih terbatas dan juga masih banyak fasilitas yang belum menyediakan layanan rawat inap.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.7 Rata-Rata Lama Rawat Inap dari Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2025

Masih dalam konteks rawat inap, secara keseluruhan rata-rata lama perawatan lansia berkisar antara 5 hingga 6 hari, dengan angka rata-rata 5,56 hari. Jika dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, maka lama durasi rawat inap lansia. Sedangkan jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa tempat tinggal lansia, tidak terlihat perbedaan yang signifikan terkait lama durasi rawat inap antara lansia yang tinggal diperkotaan dengan di perdesaan.



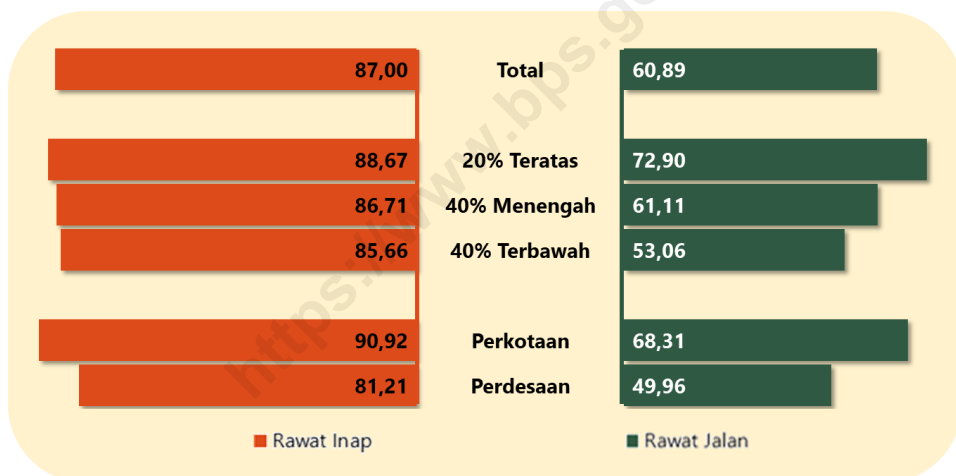
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.8 Persentase Lansia Menurut Durasi Rawat Inap dan Karakteristik, 2025

Jika dilihat dari durasi lama rawat inap lansia, terlihat bahwa durasi lansia yang sakit dan dirawat inap cenderung tidak terlalu lama, sekitar 1 hingga 7 hari. Namun demikian, ada sekitar 4,50 persen lansia yang dirawat inap selama lebih dari 2 minggu. Disisi lain, lansia yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki durasi rawat inap yang lebih lama dibandingkan dengan lansia di perdesaan. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengeluaran, semakin panjang pula rata-rata lama rawat inap yang dijalani oleh lansia (Gambar 4.8).

4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Lansia sakit adalah suatu keniscayaan. Upaya yang bisa dilakukan untuk meringankan beban lansia adalah penjaminan kesehatan. Lansia diberikan kebebasan untuk mendapat pengobatan yang sesuai dan dibekali jaminan kesehatan yang sewaktu-waktu bisa digunakan.



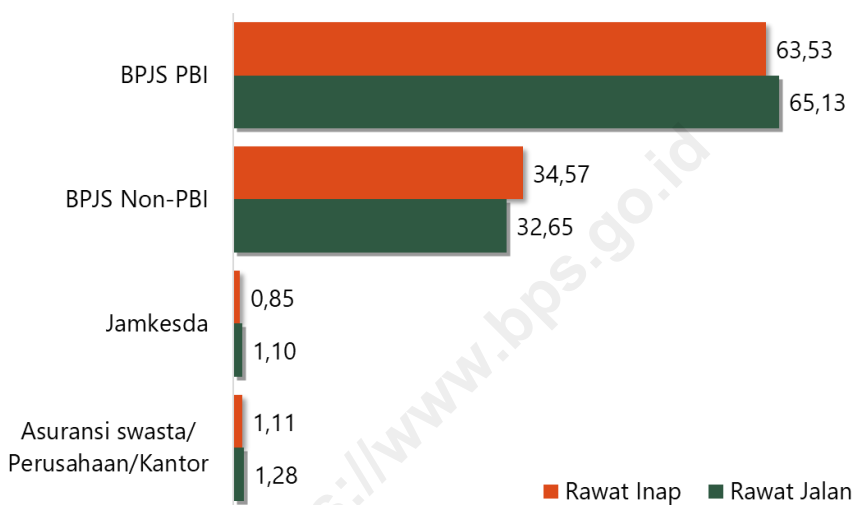
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.9 Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan, 2025

Pemanfaatan jaminan kesehatan tercermin dari perilaku lansia yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap. Dalam sebulan terakhir, sekitar 60,89 persen lansia yang melakukan rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang pernah menjalani rawat inap, di mana sekitar 87,00 persen memanfaatkan jaminan kesehatan

selama perawatan dalam satu tahun terakhir.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran, semakin besar pula penggunaan jaminan kesehatan oleh lansia. Dengan kata lain, lansia dari kelompok pengeluaran tertinggi cenderung lebih banyak memanfaatkan jaminan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Namun, selisih pemanfaatan jaminan kesehatan antar kelompok pengeluaran lebih mencolok pada layanan rawat jalan dibandingkan dengan rawat inap.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.10 Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Dalam hal pemanfaatan jaminan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap, BPJS PBI menjadi jenis yang paling banyak digunakan oleh lansia. Sebanyak 63,53 persen lansia yang menjalani rawat inap dan 65,13 persen lansia dirawat jalan yang memanfaatkan BPJS PBI. Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini merupakan bentuk jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah, di mana iurannya ditanggung sepenuhnya oleh negara, baik yang ditujukan bagi masyarakat miskin serta tidak mampu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau juga melalui

mekanisme pembiayaan premi asuransi oleh pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya.

Selain BPJS PBI, BPJS Kesehatan Non-PBI juga cukup banyak digunakan oleh lansia dalam mengakses layanan rawat jalan maupun rawat inap. Jenis ini diperuntukkan bagi peserta yang melakukan pembayaran premi asuransi BPJS melalui pembayaran mandiri, baik melalui dana pribadi atau pembayaran melalui instansi pemberi kerja.

4.4 Kebiasaan Merokok

Konsep *active ageing* dapat diwujudkan melalui berbagai faktor yang memengaruhinya, sebagaimana dijelaskan oleh WHO pada tahun 2002. Salah satu faktor penting dalam mendukung penuaan yang aktif adalah penerapan pola hidup sehat, seperti melakukan aktivitas fisik atau olahraga, menjaga asupan makanan, dan menghindari kebiasaan merokok. Informasi mengenai perilaku merokok di kalangan lansia tersedia dalam data Susenas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.11 Persentase Lansia Menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2025

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2025, tiga per empat lansia tercatat belum pernah merokok. Sekitar 21,09 persen lansia masih aktif merokok setiap hari, sementara 2,21 persen lansia lainnya masih merokok dalam sebulan terakhir meskipun tidak setiap hari. Perlu dicatat bahwa definisi merokok dalam publikasi ini mencakup rokok tembakau dan rokok elektrik.

Tabel 4.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Keluhan Kesehatan	Angka Kesakitan
(1)	(2)	(3)
Total	44,02	21,21
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	42,41	20,75
Perempuan	45,50	21,63
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60–69 Tahun)	41,51	19,26
Lansia Madya (70–79 Tahun)	48,11	24,04
Lansia Tua (80+ Tahun)	49,08	26,27
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	42,07	18,85
Disabilitas	60,30	40,90
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	43,76	19,43
40% Menengah	45,28	21,87
40% Terbawah	43,02	21,50
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	43,45	19,87
Perdesaan	44,76	22,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.2 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tindakan Pengobatan, 2025

Karakteristik	Tindakan Pengobatan				Jumlah
	Mengobati Sendiri	Rawat Jalan	Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan	Tidak Melakukan Pengobatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	49,75	19,57	27,39	3,30	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	50,21	19,41	27,01	3,37	100,00
Perempuan	49,35	19,70	27,71	3,24	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 Tahun)	50,56	18,97	27,20	3,27	100,00
Lansia Madya (70–79 Tahun)	48,24	20,91	27,82	3,02	100,00
Lansia Tua (80+ Tahun)	49,57	18,90	27,11	4,43	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	50,86	19,27	26,87	2,99	100,00
Disabilitas	43,26	21,28	30,37	5,09	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	42,92	25,10	29,08	2,90	100,00
40% Menengah	49,47	18,81	28,29	3,43	100,00
40% Terbawah	53,45	17,50	25,67	3,38	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	46,97	21,90	28,11	3,01	100,00
Perdesaan	53,27	16,60	26,46	3,67	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.3 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir dan Rata-Rata Lama Rawat Inap Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Pernah Dirawat Inap (%)	Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari)
(1)	(2)	(3)
Total	7,84	5,56
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	8,35	5,64
Perempuan	7,37	5,49
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60–69 Tahun)	7,35	5,67
Lansia Madya (70–79 Tahun)	8,86	5,45
Lansia Tua (80+ Tahun)	8,03	5,28
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	7,03	5,29
Disabilitas	14,60	6,65
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	11,49	6,37
40% Menengah	8,41	5,51
40% Terbawah	5,51	4,81
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	8,25	5,67
Perdesaan	7,30	5,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.4 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Lamanya Rawat Inap, 2025

Karakteristik	Lamanya Dirawat Inap				Jumlah
	1–3 hari	4–7 hari	8–14 hari	> 14 hari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	40,35	43,65	11,50	4,50	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	40,01	42,70	13,03	4,26	100,00
Perempuan	40,70	44,64	9,92	4,74	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 Tahun)	39,24	44,87	11,13	4,76	100,00
Lansia Madya (70–79 Tahun)	40,98	42,59	12,45	3,97	100,00
Lansia Tua (80+ Tahun)	45,54	39,26	10,55	4,65	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	42,08	43,50	10,53	3,88	100,00
Disabilitas	33,36	44,25	15,42	6,96	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	35,65	44,33	12,62	7,40	100,00
40% Menengah	40,02	43,78	12,37	3,83	100,00
40% Terbawah	45,64	42,79	9,15	2,42	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	37,52	45,97	11,60	4,91	100,00
Perdesaan	44,51	40,24	11,36	3,89	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.5 Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Untuk Rawat Jalan atau Rawat Inap Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	
	Rawat Jalan	Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Total	60,89	87,00
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	61,37	86,79
Perempuan	60,48	87,22
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60–69 Tahun)	62,59	87,29
Lansia Madya (70–79 Tahun)	59,97	87,33
Lansia Tua (80+ Tahun)	53,29	83,81
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	60,70	86,39
Disabilitas	61,87	89,44
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	72,90	88,67
40% Menengah	61,11	86,71
40% Terbawah	53,06	85,66
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	68,31	90,92
Perdesaan	49,96	81,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2025

Tabel 4.6 Persentase Lansia yang Pernah Rawat Jalan dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan			
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/ Perusahaan/ Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	65,13	32,65	1,10	1,28
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	63,54	34,26	0,97	1,37
Perempuan	66,48	31,28	1,22	1,20
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 Tahun)	65,96	31,97	1,06	1,13
Lansia Madya (70–79 Tahun)	63,02	34,47	1,00	1,66
Lansia Tua (80+ Tahun)	67,21	30,58	1,86	0,87
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	64,90	32,79	1,18	1,29
Disabilitas	66,31	31,94	0,72	1,20
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	37,85	58,22	0,74	3,23
40% Menengah	68,24	29,94	1,38	0,70
40% Terbawah	85,12	13,66	1,10	0,27
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	58,90	38,79	0,72	1,66
Perdesaan	77,67	20,28	1,88	0,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.7 Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan			
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/ Perusahaan/ Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	63,53	34,57	0,85	1,11
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	63,99	34,24	0,62	1,19
Perempuan	63,07	34,92	1,08	1,02
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 Tahun)	63,38	34,88	0,88	0,89
Lansia Madya (70–79 Tahun)	63,85	34,33	0,61	1,33
Lansia Tua (80+ Tahun)	63,37	33,33	1,52	1,83
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	63,00	35,07	0,94	1,06
Disabilitas	65,62	32,64	0,47	1,32
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	39,98	56,46	1,25	2,37
40% Menengah	67,57	31,19	0,58	0,69
40% Terbawah	83,11	15,86	0,79	0,35
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	55,82	41,89	0,78	1,53
Perdesaan	76,29	22,48	0,95	0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.8 Persentase Lansia menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Merokok		Tidak Merokok Lagi	Tidak Pernah Merokok	Jumlah
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	21,09	2,21	1,68	75,01	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	42,45	4,28	3,12	50,15	100,00
Perempuan	1,47	0,31	0,36	97,86	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 Tahun)	24,09	2,20	1,50	72,21	100,00
Lansia Madya (70–79 Tahun)	17,50	2,31	1,93	78,27	100,00
Lansia Tua (80+ Tahun)	10,80	1,95	2,22	85,03	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	22,40	2,26	1,64	73,70	100,00
Disabilitas	10,21	1,82	1,99	85,98	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	17,60	1,70	1,54	79,16	100,00
40% Menengah	22,93	2,15	1,68	73,24	100,00
40% Terbawah	21,18	2,52	1,75	74,55	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	18,87	2,10	1,66	77,37	100,00
Perdesaan	24,00	2,35	1,70	71,94	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.9 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	45,77	50,17	45,52	51,53	48,70
Sumatera Utara	39,99	46,41	39,80	45,39	42,79
Sumatera Barat	40,30	44,92	42,32	42,91	42,64
Riau	40,76	41,34	38,36	43,86	41,11
Jambi	41,64	39,89	38,56	42,38	40,48
Sumatera Selatan	37,87	46,25	44,05	42,28	43,14
Bengkulu	46,13	45,17	42,52	48,41	45,45
Lampung	42,14	46,56	42,62	47,64	45,13
Kep. Bangka Belitung	51,69	55,10	51,74	54,38	53,03
Kepulauan Riau	37,25	35,33	32,49	41,67	36,98
DKI Jakarta	42,99	–	43,88	42,16	42,99
Jawa Barat	47,81	53,28	47,40	50,79	49,13
Jawa Tengah	45,52	45,75	43,45	47,57	45,63
DI Yogyakarta	44,09	33,36	38,78	42,21	40,63
Jawa Timur	42,11	39,76	39,79	42,11	41,03
Banten	43,77	62,98	45,44	50,49	47,96
Bali	29,48	38,58	32,27	32,62	32,45
Nusa Tenggara Barat	53,52	63,21	55,05	60,66	58,08
Nusa Tenggara Timur	41,07	48,01	43,79	48,67	46,39
Kalimantan Barat	38,09	43,85	40,74	42,43	41,59
Kalimantan Tengah	40,39	39,57	39,56	40,34	39,92
Kalimantan Selatan	41,93	48,57	43,65	46,88	45,32
Kalimantan Timur	35,85	37,40	34,64	38,23	36,36
Kalimantan Utara	35,25	34,09	33,82	35,85	34,76
Sulawesi Utara	35,95	39,56	39,12	36,16	37,60
Sulawesi Tengah	40,33	39,56	39,32	40,26	39,80
Sulawesi Selatan	41,48	42,01	40,27	43,03	41,79
Sulawesi Tenggara	35,15	39,05	35,60	39,75	37,76
Gorontalo	44,34	49,31	45,41	48,50	47,04
Sulawesi Barat	38,79	43,19	41,22	43,13	42,23
Maluku	31,50	35,23	32,07	35,06	33,62
Maluku Utara	28,31	28,81	29,15	28,20	28,67
Papua Barat	25,46	25,88	25,35	26,20	25,75
Papua Barat Daya	25,02	44,05	33,60	34,40	33,98
Papua	30,39	31,67	29,62	32,25	30,90
Papua Selatan	31,31	40,38	36,92	37,69	37,28
Papua Tengah	32,89	20,75	23,95	24,51	24,18
Papua Pegunungan	64,95 ¹	30,68	35,16	33,57	34,61
Indonesia	43,45	44,76	42,41	45,50	44,02

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.10 Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	22,85	33,22	27,31	31,93	29,75
Sumatera Utara	16,31	24,15	18,75	20,58	19,73
Sumatera Barat	17,38	24,35	21,03	20,79	20,90
Riau	17,62	21,34	19,65	20,17	19,91
Jambi	16,01	19,45	19,43	17,17	18,29
Sumatera Selatan	13,17	18,68	17,57	15,75	16,63
Bengkulu	18,32	23,06	20,95	22,43	21,69
Lampung	18,68	22,08	19,77	22,18	20,98
Kep. Bangka Belitung	21,22	19,42	19,09	22,02	20,52
Kepulauan Riau	17,43	20,22	15,89	19,85	17,83
DKI Jakarta	16,09	–	16,78	15,44	16,09
Jawa Barat	25,30	30,70	25,70	27,45	26,60
Jawa Tengah	20,40	23,52	21,27	22,47	21,90
DI Yogyakarta	16,48	19,55	17,13	17,75	17,46
Jawa Timur	18,10	18,61	18,13	18,51	18,33
Banten	19,69	33,29	22,28	23,04	22,66
Bali	14,80	20,86	17,27	16,34	16,78
Nusa Tenggara Barat	25,20	35,08	27,41	31,92	29,85
Nusa Tenggara Timur	20,03	27,63	24,52	27,02	25,85
Kalimantan Barat	18,52	21,01	19,59	20,47	20,03
Kalimantan Tengah	16,70	19,23	18,40	17,85	18,15
Kalimantan Selatan	14,88	19,22	15,90	18,21	17,10
Kalimantan Timur	16,15	19,61	16,40	18,25	17,28
Kalimantan Utara	17,43	20,22	18,87	18,35	18,63
Sulawesi Utara	18,20	21,00	22,07	17,03	19,48
Sulawesi Tengah	19,88	22,52	22,25	21,21	21,73
Sulawesi Selatan	17,24	19,70	18,68	18,60	18,64
Sulawesi Tenggara	16,71	21,29	19,10	20,40	19,78
Gorontalo	24,21	25,20	22,68	26,61	24,75
Sulawesi Barat	17,46	23,63	21,81	22,69	22,27
Maluku	13,61	18,85	15,90	17,24	16,59
Maluku Utara	18,54	18,38	18,40	18,45	18,42
Papua Barat	14,43	17,29	15,78	17,12	16,40
Papua Barat Daya	15,29 ¹	24,57	22,66	16,37	19,66
Papua	18,78	21,91	19,77	20,31	20,03
Papua Selatan	16,20 ¹	27,51	21,20	26,45	23,64
Papua Tengah	21,37 ¹	11,11	15,18	12,23	14,00
Papua Pegunungan	NA	20,37	21,20	23,79	22,10
Indonesia	19,87	22,95	20,75	21,63	21,21

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.11 Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	73,03	73,64	74,09	72,95	73,45
Sumatera Utara	78,79	80,71	79,09	80,17	79,70
Sumatera Barat	60,16	67,56	64,88	63,43	64,10
Riau	77,11	80,50	79,53	78,94	79,21
Jambi	76,37	83,72	81,44	80,95	81,18
Sumatera Selatan	73,82	84,22	80,16	81,48	80,83
Bengkulu	65,23	80,14	76,25	75,29	75,74
Lampung	74,12	81,96	82,12	77,32	79,59
Kep. Bangka Belitung	69,46	86,74	76,48	76,51	76,50
Kepulauan Riau	60,57	72,72	59,51	64,43	62,22
DKI Jakarta	71,48	–	72,14	70,85	71,48
Jawa Barat	78,00	86,57	79,17	81,19	80,24
Jawa Tengah	72,15	74,79	74,02	72,95	73,43
DI Yogyakarta	58,74	61,89	59,95	59,28	59,57
Jawa Timur	77,23	78,26	77,89	77,53	77,69
Banten	78,55	87,30	82,83	79,45	81,05
Bali	57,17	65,42	59,26	61,36	60,37
Nusa Tenggara Barat	82,42	81,96	81,90	82,40	82,19
Nusa Tenggara Timur	73,84	82,61	81,31	80,39	80,80
Kalimantan Barat	80,37	87,76	84,86	85,35	85,11
Kalimantan Tengah	88,53	86,45	87,69	86,96	87,35
Kalimantan Selatan	87,93	87,00	88,51	86,47	87,42
Kalimantan Timur	63,16	76,35	66,95	68,23	67,59
Kalimantan Utara	59,59	71,71	56,76	73,37	64,68
Sulawesi Utara	70,37	72,86	71,58	71,55	71,57
Sulawesi Tengah	88,68	80,83	81,49	84,90	83,23
Sulawesi Selatan	73,11	82,25	77,30	79,14	78,34
Sulawesi Tenggara	71,21	80,53	79,21	76,39	77,66
Gorontalo	76,78	86,68	84,69	80,48	82,40
Sulawesi Barat	78,25	75,98	76,79	76,14	76,44
Maluku	84,46	80,99	84,85	80,31	82,39
Maluku Utara	86,31	86,09	87,61	84,67	86,15
Papua Barat	76,54	67,17	67,37	73,09	70,06
Papua Barat Daya	75,06	67,03	71,50	68,73	70,16
Papua	72,31	70,67	66,46	76,64	71,64
Papua Selatan	41,69 ¹	44,12	41,84	45,20	43,42
Papua Tengah	79,31	70,03	75,29	71,09	73,60
Papua Pegunungan	100,00	94,84	96,08	95,68	95,95
Indonesia	75,09	79,73	77,22	77,06	77,13

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.12 Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	51,08	59,75	57,29	56,80	57,02
Sumatera Utara	42,91	31,74	38,68	36,81	37,62
Sumatera Barat	61,71	56,11	56,29	60,84	58,73
Riau	50,45	39,48	41,28	45,72	43,65
Jambi	47,00	36,69	41,32	39,28	40,25
Sumatera Selatan	40,49	36,25	36,91	38,34	37,63
Bengkulu	54,44	45,53	47,02	49,17	48,16
Lampung	45,93	45,18	44,23	46,46	45,41
Kep. Bangka Belitung	50,31	45,02	47,47	48,85	48,16
Kepulauan Riau	47,66	42,62	49,92	44,57	46,97
DKI Jakarta	55,64	–	53,15	58,05	55,64
Jawa Barat	51,87	41,50	49,50	48,85	49,16
Jawa Tengah	49,29	47,40	47,21	49,33	48,38
DI Yogyakarta	64,67	67,04	64,28	66,09	65,30
Jawa Timur	48,66	44,53	46,55	47,03	46,82
Banten	48,61	43,27	43,63	50,21	47,08
Bali	68,30	61,10	66,59	64,53	65,50
Nusa Tenggara Barat	52,97	53,61	49,67	56,09	53,30
Nusa Tenggara Timur	41,62	38,97	40,82	38,48	39,52
Kalimantan Barat	43,44	30,54	35,45	34,90	35,17
Kalimantan Tengah	36,70	35,03	39,16	31,79	35,76
Kalimantan Selatan	35,83	32,00	28,63	38,19	33,73
Kalimantan Timur	59,17	44,94	54,90	53,90	54,39
Kalimantan Utara	58,35	53,73	56,39	56,43	56,41
Sulawesi Utara	46,85	40,51	45,18	42,41	43,81
Sulawesi Tengah	31,20	35,68	34,20	34,42	34,31
Sulawesi Selatan	40,73	33,48	38,09	35,42	36,58
Sulawesi Tenggara	41,57	32,28	36,51	34,02	35,14
Gorontalo	52,89	35,53	42,05	43,84	43,03
Sulawesi Barat	43,59	31,20	35,89	31,83	33,70
Maluku	20,92	30,01	25,33	27,18	26,33
Maluku Utara	37,34	34,85	34,97	36,09	35,53
Papua Barat	38,11	37,57	41,66	33,31	37,73
Papua Barat Daya	53,18	50,87	44,58	59,46	51,77
Papua	60,14	51,36	54,27	58,73	56,54
Papua Selatan	NA	74,04	60,18	61,03	60,58
Papua Tengah	64,14	26,77	41,67	40,32	41,12
Papua Pegunungan	65,11 ¹	32,75	44,08	31,11	39,71
Indonesia	50,02	43,07	46,42	47,41	46,95

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.13 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,29	12,72	13,50	10,50	11,91
Sumatera Utara	8,37	5,59	6,79	7,47	7,16
Sumatera Barat	7,50	7,60	7,44	7,65	7,55
Riau	9,16	6,79	7,32	8,08	7,70
Jambi	6,46	7,02	6,68	6,98	6,83
Sumatera Selatan	6,61	6,04	7,16	5,39	6,25
Bengkulu	11,12	6,67	8,92	7,01	7,97
Lampung	9,17	8,91	8,28	9,72	9,00
Kep. Bangka Belitung	5,63	7,80	5,57	7,44	6,48
Kepulauan Riau	6,69	4,55 ¹	7,77	4,95 ¹	6,39
DKI Jakarta	8,56	–	8,99	8,17	8,56
Jawa Barat	9,45	9,34	10,20	8,68	9,42
Jawa Tengah	9,64	8,38	9,58	8,54	9,03
DI Yogyakarta	6,82	6,16	7,75	5,64	6,61
Jawa Timur	6,75	6,36	7,44	5,82	6,57
Banten	6,06	3,98 ¹	5,77	5,44	5,61
Bali	5,87	6,31	7,10	5,05	6,02
Nusa Tenggara Barat	9,59	15,65	12,62	12,30	12,45
Nusa Tenggara Timur	10,04	4,27	6,28	5,05	5,62
Kalimantan Barat	7,67	4,86	6,13	5,79	5,96
Kalimantan Tengah	5,19	4,76	6,09	3,59	4,95
Kalimantan Selatan	3,84	4,76	4,15	4,47	4,31
Kalimantan Timur	8,35	4,91 ¹	6,72	7,77	7,22
Kalimantan Utara	9,89	9,80	10,81	8,74	9,85
Sulawesi Utara	10,31	10,73	11,41	9,66	10,51
Sulawesi Tengah	7,89	8,64	9,14	7,70	8,41
Sulawesi Selatan	8,67	6,60	7,41	7,56	7,49
Sulawesi Tenggara	10,61	6,11	7,92	7,31	7,60
Gorontalo	12,93	6,24	11,91	6,96	9,30
Sulawesi Barat	3,84 ¹	7,15	6,78	6,11	6,42
Maluku	4,93 ¹	2,71	4,39	3,00 ¹	3,67
Maluku Utara	9,10	7,43	7,43	8,35	7,89
Papua Barat	9,89 ¹	2,47 ¹	5,39 ¹	4,08 ¹	4,79 ¹
Papua Barat Daya	10,73 ¹	6,99	9,97 ¹	7,87 ¹	8,97
Papua	6,91	2,82 ¹	4,72 ¹	5,85	5,27
Papua Selatan	11,21 ¹	4,37 ¹	6,20 ¹	7,29 ¹	6,71 ¹
Papua Tengah	3,27 ¹	2,23 ¹	3,27 ¹	NA	2,52 ¹
Papua Pegunungan	NA	NA	5,14 ¹	NA	3,37 ¹
Indonesia	8,25	7,30	8,35	7,37	7,84

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.14 Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan, 2025

Provinsi	Pemanfaatan Jaminan Kesehatan	
	Rawat Jalan	Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Aceh	80,33	97,49
Sumatera Utara	55,91	88,68
Sumatera Barat	66,88	91,81
Riau	67,73	87,73
Jambi	55,34	76,06
Sumatera Selatan	50,95	83,93
Bengkulu	50,81	90,52
Lampung	48,44	79,71
Kep. Bangka Belitung	65,08	90,13
Kepulauan Riau	80,02	98,37
DKI Jakarta	89,48	95,51
Jawa Barat	58,87	86,12
Jawa Tengah	60,25	83,96
DI Yogyakarta	71,14	94,14
Jawa Timur	49,84	85,00
Banten	58,55	86,46
Bali	59,08	97,34
Nusa Tenggara Barat	38,98	74,38
Nusa Tenggara Timur	82,74	94,45
Kalimantan Barat	59,91	79,77
Kalimantan Tengah	63,37	86,83
Kalimantan Selatan	70,65	83,92
Kalimantan Timur	90,18	96,47
Kalimantan Utara	90,72	96,71
Sulawesi Utara	75,77	96,21
Sulawesi Tengah	77,41	95,84
Sulawesi Selatan	80,16	96,43
Sulawesi Tenggara	83,46	92,81
Gorontalo	62,79	100,00
Sulawesi Barat	81,67	99,21
Maluku	74,03	91,84
Maluku Utara	87,75	89,41
Papua Barat	65,00	87,80
Papua Barat Daya	88,12	92,81
Papua	82,92	90,44
Papua Selatan	99,20	91,11
Papua Tengah	67,19	NA
Papua Pegunungan	91,78	100,00
Indonesia	60,89	87,00

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.15 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok, 2025

Provinsi	Masih Merokok		Tidak Merokok Lagi	Tidak Pernah Merokok	Jumlah
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16,48	2,82	2,04	78,66	100,00
Sumatera Utara	19,57	1,48	1,87	77,08	100,00
Sumatera Barat	22,32	1,28	3,06	73,34	100,00
Riau	21,83	2,10	1,94	74,13	100,00
Jambi	20,67	2,30	1,58	75,45	100,00
Sumatera Selatan	22,82	1,96	1,18	74,04	100,00
Bengkulu	26,97	1,59	1,73	69,70	100,00
Lampung	27,89	1,64	2,20	68,28	100,00
Kep. Bangka Belitung	17,24	1,75	1,93 ¹	79,08	100,00
Kepulauan Riau	19,24	NA	3,06 ¹	76,57	100,00
DKI Jakarta	12,49	1,76	1,73	84,02	100,00
Jawa Barat	25,71	2,82	1,48	69,99	100,00
Jawa Tengah	21,22	2,21	1,73	74,85	100,00
DI Yogyakarta	15,78	1,54	2,41	80,27	100,00
Jawa Timur	21,62	1,86	1,71	74,81	100,00
Banten	22,48	2,14	0,64 ¹	74,74	100,00
Bali	9,64	0,59	0,76	89,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,68	2,30	1,60	71,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,95	4,93	1,45	77,66	100,00
Kalimantan Barat	19,65	2,20	1,90	76,25	100,00
Kalimantan Tengah	20,32	2,46	0,92 ¹	76,30	100,00
Kalimantan Selatan	15,89	1,67	2,03	80,40	100,00
Kalimantan Timur	15,94	1,53	1,64	80,89	100,00
Kalimantan Utara	16,89	1,31 ¹	2,84 ¹	78,96	100,00
Sulawesi Utara	16,75	3,82	1,84	77,60	100,00
Sulawesi Tengah	20,41	3,82	3,17	72,59	100,00
Sulawesi Selatan	15,93	1,21	1,58	81,28	100,00
Sulawesi Tenggara	18,79	1,91	1,90	77,40	100,00
Gorontalo	23,75	3,91	1,31 ¹	71,03	100,00
Sulawesi Barat	16,29	2,32	1,80 ¹	79,59	100,00
Maluku	17,13	5,22	1,88	75,77	100,00
Maluku Utara	21,91	4,85	1,81	71,43	100,00
Papua Barat	17,42	7,43	2,19 ¹	72,96	100,00
Papua Barat Daya	12,74	3,94	0,48 ¹	82,83	100,00
Papua	10,87	6,26	1,33 ¹	81,53	100,00
Papua Selatan	20,38	6,32	NA	73,23	100,00
Papua Tengah	15,52	6,40	1,94 ¹	76,13	100,00
Papua Pegunungan	23,77	10,26	NA	65,20	100,00
Indonesia	21,09	2,21	1,68	75,01	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.16 Sampling Error Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	45,77	41,65	49,89	4,60	50,17	47,43	52,91	2,79	48,70	46,41	50,99	2,40
Sumatera Utara	39,99	36,82	43,16	4,04	46,41	43,80	49,02	2,87	42,79	40,66	44,92	2,54
Sumatera Barat	40,30	37,01	43,59	4,16	44,92	42,11	47,74	3,20	42,64	40,47	44,80	2,59
Riau	40,76	35,90	45,62	6,08	41,34	37,70	44,97	4,49	41,11	38,20	44,03	3,62
Jambi	41,64	36,50	46,79	6,30	39,89	36,65	43,14	4,15	40,48	37,72	43,24	3,48
Sumatera Selatan	37,87	33,40	42,35	6,03	46,25	43,38	49,12	3,16	43,14	40,67	45,61	2,92
Bengkulu	46,13	40,26	52,00	6,49	45,17	41,64	48,69	3,98	45,45	42,42	48,48	3,40
Lampung	42,14	38,26	46,02	4,70	46,56	43,53	49,60	3,33	45,13	42,72	47,54	2,72
Kep. Bangka Belitung	51,69	46,86	56,52	4,77	55,10	49,18	61,02	5,48	53,03	49,28	56,77	3,61
Kep. Riau	37,25	30,75	43,76	8,91	35,33	29,04	41,62	9,08	36,98	31,33	42,63	7,80
DKI Jakarta	42,99	39,54	46,44	4,09	-	-	-	-	42,99	39,54	46,44	4,09
Jawa Barat	47,81	45,96	49,67	1,98	53,28	50,11	56,46	3,04	49,13	47,53	50,74	1,67
Jawa Tengah	45,52	44,08	46,97	1,62	45,75	43,99	47,52	1,97	45,63	44,50	46,77	1,27
DI Yogyakarta	44,09	40,74	47,43	3,87	33,36	28,90	37,82	6,82	40,63	37,95	43,32	3,37
Jawa Timur	42,11	40,64	43,57	1,78	39,76	38,12	41,40	2,11	41,03	39,94	42,12	1,36
Banten	43,77	40,15	47,39	4,22	62,98	57,45	68,50	4,48	47,96	44,85	51,07	3,31
Bali	29,48	26,78	32,18	4,67	38,58	34,70	42,46	5,13	32,45	30,22	34,68	3,50
Nusa Tenggara Barat	53,52	49,51	57,52	3,82	63,21	58,43	68,00	3,86	58,08	54,97	61,20	2,74
Nusa Tenggara Timur	41,07	36,07	46,08	6,22	48,01	45,86	50,16	2,28	46,39	44,36	48,41	2,23
Kalimantan Barat	38,09	33,97	42,21	5,52	43,85	40,75	46,96	3,61	41,59	39,11	44,08	3,05
Kalimantan Tengah	40,39	35,58	45,21	6,08	39,57	35,51	43,62	5,23	39,92	36,82	43,02	3,96
Kalimantan Selatan	41,93	37,96	45,91	4,84	48,57	44,87	52,26	3,88	45,32	42,60	48,04	3,06
Kalimantan Timur	35,85	31,49	40,21	6,20	37,40	31,48	43,32	8,08	36,36	32,84	39,87	4,93
Kalimantan Utara	35,25	28,39	42,12	9,94	34,09	26,59	41,59	11,22	34,76	29,69	39,83	7,44
Sulawesi Utara	35,95	32,61	39,30	4,75	39,56	36,57	42,55	3,86	37,60	35,32	39,87	3,08
Sulawesi Tengah	40,33	34,37	46,30	7,54	39,56	36,30	42,83	4,21	39,80	36,89	42,70	3,72
Sulawesi Selatan	41,48	38,24	44,72	3,98	42,01	39,93	44,10	2,53	41,79	39,95	43,62	2,24
Sulawesi Tenggara	35,15	29,65	40,66	7,99	39,05	36,14	41,96	3,80	37,76	35,09	40,43	3,61
Gorontalo	44,34	37,86	50,83	7,46	49,31	44,18	54,45	5,32	47,04	42,95	51,13	4,44
Sulawesi Barat	38,79	30,26	47,32	11,22	43,19	38,42	47,97	5,64	42,23	38,06	46,40	5,04
Maluku	31,50	25,82	37,17	9,19	35,23	31,06	39,39	6,03	33,62	30,19	37,04	5,20
Maluku Utara	28,31	21,83	34,80	11,68	28,81	24,95	32,66	6,83	28,67	25,35	31,99	5,90
Papua Barat	25,46	17,55	33,37	15,85	25,88	18,56	33,19	14,43	25,75	20,14	31,35	11,11
Papua Barat Daya	25,02	16,19	33,85	18,00	44,05	38,17	49,93	6,81	33,98	28,38	39,57	8,40
Papua	30,39	24,80	35,97	9,38	31,67	26,26	37,08	8,71	30,90	26,91	34,89	6,59
Papua Selatan	31,31	16,07	46,56	24,84	40,38	31,77	49,00	10,88	37,28	29,57	44,99	10,55
Papua Tengah	32,89	20,59	45,18	19,08	20,75	15,71	25,78	12,38	24,18	19,13	29,22	10,65
Papua Pegunungan	64,95	29,96	99,93	27,49	30,68	23,98	37,39	11,15	34,61	27,38	41,84	10,66
INDONESIA	43,45	42,77	44,14	0,80	44,76	44,09	45,43	0,76	44,02	43,54	44,51	0,56

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.17 Sampling Error Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	22,85	19,49	26,21	7,49	33,22	30,59	35,86	4,04	29,75	27,65	31,85	3,60
Sumatera Utara	16,31	14,09	18,52	6,93	24,15	21,88	26,42	4,80	19,73	18,12	21,34	4,17
Sumatera Barat	17,38	14,97	19,78	7,06	24,35	22,01	26,69	4,90	20,90	19,22	22,58	4,11
Riau	17,62	14,02	21,23	10,43	21,34	18,31	24,36	7,24	19,91	17,58	22,24	5,97
Jambi	16,01	12,67	19,35	10,64	19,45	16,93	21,96	6,59	18,29	16,28	20,31	5,62
Sumatera Selatan	13,17	9,89	16,45	12,71	18,68	16,45	20,91	6,08	16,63	14,78	18,49	5,69
Bengkulu	18,32	14,05	22,60	11,91	23,06	20,15	25,97	6,44	21,69	19,27	24,10	5,68
Lampung	18,68	15,80	21,56	7,87	22,08	19,51	24,64	5,93	20,98	19,00	22,95	4,80
Kep. Bangka Belitung	21,22	17,00	25,44	10,15	19,42	14,76	24,08	12,24	20,52	17,37	23,66	7,83
Kep. Riau	17,43	12,48	22,38	14,48	20,22	14,74	25,69	13,82	17,83	13,51	22,14	12,34
DKI Jakarta	16,09	13,55	18,62	8,05	-	-	-	-	16,09	13,55	18,62	8,05
Jawa Barat	25,30	23,72	26,87	3,18	30,70	27,79	33,60	4,82	26,60	25,21	27,99	2,66
Jawa Tengah	20,40	19,24	21,56	2,89	23,52	22,01	25,03	3,28	21,90	20,96	22,85	2,20
DI Yogyakarta	16,48	14,18	18,77	7,12	19,55	15,75	23,34	9,90	17,46	15,48	19,45	5,79
Jawa Timur	18,10	16,98	19,21	3,14	18,61	17,38	19,84	3,38	18,33	17,50	19,16	2,30
Banten	19,69	16,89	22,49	7,25	33,29	27,57	39,00	8,76	22,66	20,10	25,21	5,75
Bali	14,80	12,82	16,77	6,81	20,86	17,84	23,88	7,38	16,78	15,12	18,44	5,04
Nusa Tenggara Barat	25,20	21,90	28,49	6,67	35,08	30,23	39,92	7,05	29,85	26,96	32,75	4,94
Nusa Tenggara Timur	20,03	15,98	24,07	10,31	27,63	25,70	29,56	3,57	25,85	24,10	27,61	3,47
Kalimantan Barat	18,52	15,09	21,95	9,45	21,01	18,45	23,56	6,20	20,03	17,98	22,09	5,23
Kalimantan Tengah	16,70	13,01	20,40	11,29	19,23	15,92	22,55	8,79	18,15	15,67	20,62	6,95
Kalimantan Selatan	14,88	11,98	17,79	9,96	19,22	16,31	22,12	7,71	17,10	15,04	19,15	6,13
Kalimantan Timur	16,15	12,72	19,59	10,86	19,61	14,43	24,79	13,48	17,28	14,41	20,15	8,47
Kalimantan Utara	17,43	11,88	22,99	16,26	20,22	14,70	25,75	13,93	18,63	14,67	22,59	10,84
Sulawesi Utara	18,20	15,56	20,83	7,39	21,00	18,56	23,43	5,91	19,48	17,66	21,29	4,75
Sulawesi Tengah	19,88	15,45	24,32	11,38	22,52	19,83	25,22	6,10	21,73	19,41	24,04	5,43
Sulawesi Selatan	17,24	14,79	19,68	7,23	19,70	18,03	21,37	4,33	18,64	17,22	20,06	3,89
Sulawesi Tenggara	16,71	12,56	20,87	12,68	21,29	18,89	23,69	5,75	19,78	17,66	21,89	5,46
Gorontalo	24,21	18,83	29,60	11,35	25,20	20,98	29,42	8,55	24,75	21,38	28,12	6,94
Sulawesi Barat	17,46	11,42	23,50	17,64	23,63	19,50	27,75	8,90	22,27	18,78	25,77	8,00
Maluku	13,61	9,72	17,51	14,61	18,85	15,73	21,97	8,44	16,59	14,13	19,05	7,56
Maluku Utara	18,54	12,83	24,24	15,70	18,38	15,03	21,73	9,29	18,42	15,53	21,31	8,00
Papua Barat	14,43	8,82	20,03	19,82	17,29	11,00	23,58	18,55	16,40	11,73	21,06	14,52
Papua Barat Daya	15,29	7,41	23,17	26,29	24,57	19,58	29,57	10,37	19,66	14,85	24,47	12,47
Papua	18,78	13,84	23,72	13,42	21,91	17,01	26,81	11,41	20,03	16,47	23,59	9,06
Papua Selatan	16,20	3,91	28,49	38,70	27,51	19,75	35,27	14,39	23,64	17,02	30,26	14,29
Papua Tengah	21,37	9,97	32,77	27,21	11,11	7,12	15,09	18,29	14,00	9,64	18,37	15,92
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	51,06	20,37	14,21	26,54	15,44	22,10	15,20	28,99	15,92
INDONESIA	19,87	19,33	20,42	1,40	22,95	22,38	23,52	1,26	21,21	20,81	21,60	0,95

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.18 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	73,03	66,71	79,35	4,41	73,64	70,21	77,08	2,38	73,45	70,37	76,54	2,14
Sumatera Utara	78,79	75,05	82,54	2,42	80,71	77,84	83,58	1,82	79,70	77,31	82,09	1,53
Sumatera Barat	60,16	54,99	65,34	4,39	67,56	63,63	71,48	2,96	64,10	60,89	67,31	2,56
Riau	77,11	70,87	83,36	4,13	80,50	75,83	85,17	2,96	79,21	75,48	82,94	2,40
Jambi	76,37	70,17	82,56	4,14	83,72	79,96	87,48	2,29	81,18	77,93	84,43	2,04
Sumatera Selatan	73,82	67,64	80,00	4,27	84,22	81,15	87,29	1,86	80,83	77,92	83,74	1,84
Bengkulu	65,23	56,09	74,36	7,14	80,14	75,68	84,61	2,84	75,74	71,54	79,94	2,83
Lampung	74,12	69,10	79,13	3,45	81,96	78,65	85,26	2,06	79,59	76,82	82,36	1,77
Kep. Bangka Belitung	69,46	62,47	76,44	5,13	86,74	81,21	92,28	3,26	76,50	71,68	81,32	3,21
Kep. Riau	60,57	48,67	72,47	10,02	72,72	63,59	81,86	6,41	62,22	51,78	72,67	8,56
DKI Jakarta	71,48	66,62	76,34	3,47	-	-	-	-	71,48	66,62	76,34	3,47
Jawa Barat	78,00	75,83	80,16	1,42	86,57	83,72	89,43	1,68	80,24	78,47	82,01	1,13
Jawa Tengah	72,15	70,26	74,04	1,34	74,79	72,50	77,08	1,56	73,43	71,95	74,90	1,03
DI Yogyakarta	58,74	54,07	63,41	4,06	61,89	54,65	69,14	5,97	59,57	55,64	63,51	3,37
Jawa Timur	77,23	75,33	79,13	1,26	78,26	76,11	80,41	1,40	77,69	76,27	79,11	0,94
Banten	78,55	73,94	83,16	3,00	87,30	82,22	92,38	2,97	81,05	77,45	84,65	2,27
Bali	57,17	51,71	62,62	4,87	65,42	59,43	71,40	4,67	60,37	56,28	64,46	3,46
Nusa Tenggara Barat	82,42	78,70	86,14	2,30	81,96	76,65	87,27	3,30	82,19	78,91	85,46	2,03
Nusa Tenggara Timur	73,84	65,83	81,84	5,53	82,61	80,29	84,94	1,44	80,80	78,28	83,31	1,59
Kalimantan Barat	80,37	74,66	86,08	3,62	87,76	84,40	91,12	1,95	85,11	82,14	88,08	1,78
Kalimantan Tengah	88,53	83,73	93,33	2,77	86,45	81,36	91,54	3,00	87,35	83,79	90,92	2,08
Kalimantan Selatan	87,93	84,37	91,48	2,06	87,00	83,44	90,57	2,09	87,42	84,89	89,95	1,48
Kalimantan Timur	63,16	55,72	70,61	6,01	76,35	67,71	84,98	5,77	67,59	61,81	73,37	4,36
Kalimantan Utara	59,59	48,07	71,11	9,86	71,71	61,27	82,15	7,43	64,68	56,52	72,84	6,44
Sulawesi Utara	70,37	65,05	75,68	3,85	72,86	68,35	77,37	3,16	71,57	68,06	75,07	2,50
Sulawesi Tengah	88,68	83,17	94,20	3,17	80,83	76,52	85,13	2,72	83,23	79,77	86,68	2,12
Sulawesi Selatan	73,11	68,21	78,01	3,42	82,25	79,92	84,57	1,44	78,34	75,83	80,85	1,64
Sulawesi Tenggara	71,21	62,89	79,54	5,96	80,53	76,64	84,41	2,46	77,66	73,91	81,40	2,46
Gorontalo	76,78	68,88	84,68	5,25	86,68	81,63	91,74	2,97	82,40	77,95	86,86	2,76
Sulawesi Barat	78,25	67,76	88,74	6,84	75,98	69,88	82,09	4,10	76,44	71,12	81,75	3,55
Maluku	84,46	77,60	91,33	4,15	80,99	76,06	85,91	3,10	82,39	78,34	86,44	2,51
Maluku Utara	86,31	77,87	94,76	4,99	86,09	81,34	90,85	2,82	86,15	82,00	90,31	2,46
Papua Barat	76,54	61,92	91,15	9,74	67,17	51,54	82,80	11,87	70,06	58,15	81,97	8,67
Papua Barat Daya	75,06	58,11	92,01	11,52	67,03	58,48	75,58	6,51	70,16	61,72	78,60	6,14
Papua	72,31	61,97	82,66	7,30	70,67	60,38	80,96	7,43	71,64	64,21	79,07	5,29
Papua Selatan	41,69	11,13	72,26	37,41	44,12	30,55	57,69	15,69	43,42	30,35	56,50	15,36
Papua Tengah	79,31	57,54	100,00	14,00	70,03	58,66	81,41	8,29	73,60	62,78	84,41	7,50
Papua Pegunungan	100,00	100,00	100,00	0,00	94,84	90,22	99,46	2,48	95,95	92,33	99,57	1,92
INDONESIA	75,09	74,19	75,98	0,61	79,73	78,93	80,53	0,51	77,13	76,52	77,75	0,40

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.19 Sampling Error Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	51,08	44,49	57,68	6,59	59,75	55,98	63,51	3,21	57,02	53,69	60,35	2,98
Sumatera Utara	42,91	37,84	47,97	6,02	31,74	28,42	35,05	5,33	37,62	34,50	40,74	4,23
Sumatera Barat	61,71	56,72	66,71	4,13	56,11	51,88	60,34	3,84	58,73	55,48	61,99	2,83
Riau	50,45	42,40	58,49	8,13	39,48	33,87	45,08	7,24	43,65	39,04	48,26	5,38
Jambi	47,00	39,38	54,61	8,26	36,69	31,74	41,65	6,89	40,25	36,09	44,40	5,27
Sumatera Selatan	40,49	34,18	46,80	7,95	36,25	32,17	40,33	5,75	37,63	34,20	41,07	4,65
Bengkulu	54,44	46,08	62,80	7,84	45,53	40,21	50,84	5,96	48,16	43,64	52,67	4,78
Lampung	45,93	40,05	51,81	6,53	45,18	40,70	49,66	5,06	45,41	41,81	49,00	4,04
Kep. Bangka Belitung	50,31	43,00	57,62	7,41	45,02	36,11	53,94	10,10	48,16	42,50	53,82	6,00
Kep. Riau	47,66	38,28	57,04	10,04	42,62	31,67	53,57	13,11	46,97	38,74	55,21	8,95
DKI Jakarta	55,64	50,32	60,96	4,88	-	-	-	-	55,64	50,32	60,96	4,88
Jawa Barat	51,87	49,26	54,49	2,57	41,50	37,29	45,72	5,18	49,16	46,93	51,39	2,31
Jawa Tengah	49,29	47,22	51,37	2,15	47,40	44,85	49,96	2,75	48,38	46,74	50,02	1,73
DI Yogyakarta	64,67	60,23	69,11	3,50	67,04	60,32	73,77	5,12	65,30	61,58	69,02	2,91
Jawa Timur	48,66	46,45	50,86	2,32	44,53	42,02	47,04	2,87	46,82	45,16	48,48	1,81
Banten	48,61	42,95	54,27	5,94	43,27	35,81	50,74	8,81	47,08	42,53	51,64	4,93
Bali	68,30	63,18	73,42	3,82	61,10	54,60	67,59	5,42	65,50	61,47	69,53	3,14
Nusa Tenggara Barat	52,97	47,77	58,17	5,01	53,61	46,93	60,28	6,36	53,30	49,04	57,56	4,08
Nusa Tenggara Timur	41,62	33,04	50,19	10,51	38,97	35,97	41,97	3,93	39,52	36,54	42,49	3,84
Kalimantan Barat	43,44	36,63	50,26	8,01	30,54	26,19	34,88	7,26	35,17	31,46	38,87	5,38
Kalimantan Tengah	36,70	29,45	43,96	10,08	35,03	28,47	41,59	9,55	35,76	30,89	40,62	6,94
Kalimantan Selatan	35,83	30,14	41,52	8,11	32,00	27,30	36,70	7,49	33,73	30,09	37,38	5,51
Kalimantan Timur	59,17	51,49	66,86	6,63	44,94	35,46	54,43	10,77	54,39	48,40	60,39	5,62
Kalimantan Utara	58,35	47,15	69,55	9,79	53,73	40,72	66,73	12,35	56,41	47,85	64,96	7,74
Sulawesi Utara	46,85	40,92	52,78	6,46	40,51	35,73	45,30	6,02	43,81	39,97	47,64	4,47
Sulawesi Tengah	31,20	22,92	39,49	13,55	35,68	30,39	40,97	7,57	34,31	29,84	38,79	6,66
Sulawesi Selatan	40,73	35,59	45,88	6,44	33,48	30,55	36,41	4,46	36,58	33,80	39,36	3,88
Sulawesi Tenggara	41,57	33,71	49,43	9,65	32,28	27,84	36,72	7,02	35,14	31,21	39,07	5,71
Gorontalo	52,89	43,82	61,95	8,75	35,53	28,63	42,43	9,91	43,03	37,43	48,62	6,64
Sulawesi Barat	43,59	29,04	58,14	17,03	31,20	24,60	37,81	10,80	33,70	27,59	39,81	9,25
Maluku	20,92	13,04	28,80	19,22	30,01	23,77	36,25	10,61	26,33	21,45	31,22	9,46
Maluku Utara	37,34	23,70	50,97	18,63	34,85	27,61	42,08	10,59	35,53	29,08	41,97	9,25
Papua Barat	38,11	21,73	54,49	21,93	37,57	22,22	52,91	20,84	37,73	25,99	49,47	15,87
Papua Barat Daya	53,18	35,37	70,99	17,09	50,87	41,76	59,98	9,13	51,77	42,84	60,71	8,81
Papua	60,14	49,10	71,19	9,37	51,36	41,19	61,53	10,10	56,54	48,75	64,33	7,03
Papua Selatan	NA	NA	NA	51,15	74,04	63,31	84,76	7,39	60,58	48,67	72,49	10,03
Papua Tengah	64,14	43,53	84,76	16,39	26,77	15,78	37,75	20,94	41,12	29,44	52,81	14,50
Papua Pegunungan	65,11	25,26	100,00	31,22	32,75	21,21	44,28	17,97	39,71	25,96	53,45	17,66
INDONESIA	50,02	48,98	51,06	1,06	43,07	42,08	44,05	1,17	46,95	46,23	47,68	0,79

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.20 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	10,29	7,95	12,64	11,61	12,72	10,94	14,51	7,15	11,91	10,49	13,33	6,10
Sumatera Utara	8,37	6,82	9,92	9,47	5,59	4,50	6,68	9,97	7,16	6,16	8,15	7,11
Sumatera Barat	7,50	5,86	9,14	11,14	7,60	6,23	8,97	9,19	7,55	6,48	8,61	7,20
Riau	9,16	6,36	11,95	15,57	6,79	5,02	8,56	13,30	7,70	6,17	9,23	10,15
Jambi	6,46	4,33	8,59	16,84	7,02	5,35	8,69	12,15	6,83	5,51	8,15	9,87
Sumatera Selatan	6,61	4,70	8,53	14,77	6,04	4,82	7,27	10,35	6,25	5,21	7,30	8,55
Bengkulu	11,12	7,68	14,57	15,80	6,67	5,11	8,24	11,99	7,97	6,47	9,47	9,59
Lampung	9,17	7,33	11,01	10,23	8,91	7,26	10,57	9,45	9,00	7,73	10,26	7,18
Kep. Bangka Belitung	5,63	3,57	7,69	18,67	7,80	4,80	10,81	19,66	6,48	4,76	8,20	13,56
Kep. Riau	6,69	3,98	9,41	20,73	4,55	2,12	6,97	27,19	6,39	4,03	8,74	18,80
DKI Jakarta	8,56	6,78	10,35	10,65	-	-	-	-	8,56	6,78	10,35	10,65
Jawa Barat	9,45	8,45	10,45	5,38	9,34	7,61	11,08	9,47	9,42	8,56	10,29	4,68
Jawa Tengah	9,64	8,86	10,41	4,10	8,38	7,45	9,30	5,63	9,03	8,43	9,63	3,39
DI Yogyakarta	6,82	5,39	8,26	10,72	6,16	4,26	8,05	15,72	6,61	5,46	7,76	8,86
Jawa Timur	6,75	6,05	7,46	5,35	6,36	5,55	7,17	6,47	6,57	6,04	7,11	4,14
Banten	6,06	4,63	7,49	12,05	3,98	1,83	6,12	27,57	5,61	4,39	6,82	11,03
Bali	5,87	4,63	7,11	10,76	6,31	4,77	7,86	12,48	6,02	5,04	6,99	8,27
Nusa Tenggara Barat	9,59	7,54	11,64	10,91	15,65	12,14	19,16	11,44	12,45	10,45	14,44	8,17
Nusa Tenggara Timur	10,04	6,44	13,65	18,33	4,27	3,57	4,98	8,45	5,62	4,61	6,63	9,18
Kalimantan Barat	7,67	5,38	9,95	15,20	4,86	3,48	6,23	14,40	5,96	4,73	7,18	10,49
Kalimantan Tengah	5,19	3,28	7,11	18,78	4,76	3,11	6,41	17,66	4,95	3,70	6,19	12,87
Kalimantan Selatan	3,84	2,59	5,09	16,59	4,76	3,42	6,11	14,36	4,31	3,40	5,23	10,85
Kalimantan Timur	8,35	6,04	10,66	14,13	4,91	2,05	7,77	29,74	7,22	5,41	9,04	12,84
Kalimantan Utara	9,89	6,07	13,71	19,72	9,80	5,87	13,74	20,47	9,85	7,09	12,61	14,29
Sulawesi Utara	10,31	8,43	12,19	9,30	10,73	8,88	12,59	8,82	10,51	9,18	11,83	6,45
Sulawesi Tengah	7,89	5,19	10,59	17,46	8,64	6,98	10,31	9,83	8,41	6,99	9,83	8,61
Sulawesi Selatan	8,67	7,01	10,33	9,78	6,60	5,65	7,54	7,32	7,49	6,59	8,38	6,11
Sulawesi Tenggara	10,61	7,13	14,10	16,76	6,11	4,73	7,48	11,48	7,60	6,12	9,08	9,95
Gorontalo	12,93	8,64	17,21	16,90	6,24	3,96	8,52	18,62	9,30	6,97	11,64	12,78
Sulawesi Barat	3,84	1,27	6,41	34,14	7,15	4,76	9,54	17,03	6,42	4,47	8,38	15,50
Maluku	4,93	2,43	7,42	25,82	2,71	1,58	3,85	21,33	3,67	2,41	4,93	17,53
Maluku Utara	9,10	5,28	12,92	21,41	7,43	5,28	9,58	14,77	7,89	6,01	9,77	12,15
Papua Barat	9,89	3,57	16,21	32,62	2,47	0,54	4,41	39,89	4,79	2,35	7,22	25,99
Papua Barat Daya	10,73	4,59	16,87	29,20	6,99	4,03	9,95	21,60	8,97	5,42	12,51	20,17
Papua	6,91	3,90	9,92	22,26	2,82	1,34	4,29	26,67	5,27	3,37	7,17	18,38
Papua Selatan	11,21	3,23	19,18	36,29	4,37	1,55	7,19	32,96	6,71	3,41	10,01	25,10
Papua Tengah	3,27	0,10	6,44	49,48	2,23	0,43	4,03	41,28	2,52	0,95	4,09	31,72
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	52,49	NA	NA	NA	73,38	3,37	0,29	6,45	46,66
INDONESIA	8,25	7,90	8,60	2,16	7,30	6,96	7,64	2,37	7,84	7,59	8,08	1,60

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.21 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Laki-Laki				Perempuan				Total			
Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
	Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13,50	11,37	15,62	8,03	10,50	8,83	12,16	8,09	11,91	10,49	13,33	6,10
6,79	5,43	8,16	10,23	7,47	6,03	8,92	9,89	7,16	6,16	8,15	7,11
7,44	5,96	8,91	10,10	7,65	6,11	9,18	10,24	7,55	6,48	8,61	7,20
7,32	5,29	9,35	14,17	8,08	5,78	10,37	14,49	7,70	6,17	9,23	10,15
6,68	4,88	8,48	13,74	6,98	5,12	8,85	13,63	6,83	5,51	8,15	9,87
7,16	5,55	8,77	11,47	5,39	4,06	6,73	12,61	6,25	5,21	7,30	8,55
8,92	6,69	11,15	12,74	7,01	5,01	9,00	14,53	7,97	6,47	9,47	9,59
8,28	6,62	9,94	10,24	9,72	7,91	11,52	9,47	9,00	7,73	10,26	7,18
5,57	3,47	7,68	19,27	7,44	4,78	10,10	18,23	6,48	4,76	8,20	13,56
7,77	4,06	11,47	24,34	4,95	2,40	7,49	26,22	6,39	4,03	8,74	18,80
8,99	6,46	11,52	14,37	8,17	5,53	10,81	16,51	8,56	6,78	10,35	10,65
10,20	9,01	11,40	5,96	8,68	7,50	9,86	6,93	9,42	8,56	10,29	4,68
9,58	8,71	10,44	4,61	8,54	7,74	9,35	4,79	9,03	8,43	9,63	3,39
7,75	6,00	9,50	11,53	5,64	4,12	7,15	13,72	6,61	5,46	7,76	8,86
7,44	6,65	8,23	5,41	5,82	5,16	6,48	5,81	6,57	6,04	7,11	4,14
5,77	4,08	7,47	15,00	5,44	3,69	7,18	16,35	5,61	4,39	6,82	11,03
7,10	5,60	8,59	10,75	5,05	3,78	6,31	12,79	6,02	5,04	6,99	8,27
12,62	9,68	15,55	11,89	12,30	9,54	15,07	11,47	12,45	10,45	14,44	8,17
6,28	4,92	7,63	11,01	5,05	3,85	6,25	12,16	5,62	4,61	6,63	9,18
6,13	4,53	7,73	13,32	5,79	4,11	7,46	14,76	5,96	4,73	7,18	10,49
6,09	4,22	7,96	15,68	3,59	2,05	5,13	21,91	4,95	3,70	6,19	12,87
4,15	2,86	5,43	15,80	4,47	3,14	5,80	15,15	4,31	3,40	5,23	10,85
6,72	4,45	8,99	17,21	7,77	5,23	10,31	16,67	7,22	5,41	9,04	12,84
10,81	6,90	14,72	18,44	8,74	4,91	12,56	22,33	9,85	7,09	12,61	14,29
11,41	9,43	13,38	8,83	9,66	7,88	11,43	9,37	10,51	9,18	11,83	6,45
9,14	7,13	11,15	11,22	7,70	5,73	9,66	13,04	8,41	6,99	9,83	8,61
7,41	6,22	8,59	8,17	7,56	6,24	8,87	8,91	7,49	6,59	8,38	6,11
7,92	5,95	9,88	12,66	7,31	5,35	9,27	13,69	7,60	6,12	9,08	9,95
11,91	8,34	15,48	15,28	6,96	4,36	9,56	19,05	9,30	6,97	11,64	12,78
6,78	3,83	9,73	22,22	6,11	3,46	8,75	22,08	6,42	4,47	8,38	15,50
4,39	2,35	6,43	23,74	3,00	1,43	4,58	26,78	3,67	2,41	4,93	17,53
7,43	4,96	9,90	16,98	8,35	5,58	11,11	16,91	7,89	6,01	9,77	12,15
5,39	2,51	8,27	27,23	4,08	1,13	7,03	36,90	4,79	2,35	7,22	25,99
9,97	4,74	15,21	26,79	7,87	2,89	12,84	32,28	8,97	5,42	12,51	20,17
4,72	2,23	7,21	26,96	5,85	3,15	8,55	23,54	5,27	3,37	7,17	18,38
6,20	1,86	10,54	35,71	7,29	2,24	12,35	35,37	6,71	3,41	10,01	25,10
3,27	0,98	5,55	35,66	NA	NA	NA	68,70	2,52	0,95	4,09	31,72
5,14	0,45	9,84	46,56	NA	NA	NA	100,51	3,37	0,29	6,45	46,66
8,35	8,00	8,69	2,13	7,37	7,04	7,70	2,31	7,84	7,59	8,08	1,60

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.22 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Pernah Memanfaatkan Jaminan Kesehatan							
	Rawat Jalan				Rawat Inap			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	80,33	76,94	83,72	2,15	97,49	95,42	99,55	1,08
Sumatera Utara	55,91	50,79	61,02	4,67	88,68	84,31	93,04	2,51
Sumatera Barat	66,88	62,97	70,79	2,98	91,81	87,97	95,65	2,13
Riau	67,73	61,61	73,86	4,61	87,73	81,43	94,04	3,67
Jambi	55,34	49,46	61,22	5,42	76,06	67,92	84,19	5,46
Sumatera Selatan	50,95	45,40	56,51	5,56	83,93	77,81	90,05	3,72
Bengkulu	50,81	44,41	57,21	6,43	90,52	84,43	96,61	3,43
Lampung	48,44	43,14	53,74	5,58	79,71	73,63	85,79	3,89
Kep. Bangka Belitung	65,08	57,06	73,10	6,29	90,13	81,72	98,55	4,76
Kep. Riau	80,02	68,40	91,63	7,40	98,37	96,92	99,81	0,75
DKI Jakarta	89,48	85,37	93,59	2,34	95,51	91,26	99,75	2,27
Jawa Barat	58,87	55,82	61,92	2,64	86,12	83,09	89,15	1,79
Jawa Tengah	60,25	57,96	62,54	1,94	83,96	81,43	86,50	1,54
DI Yogyakarta	71,14	66,79	75,50	3,12	94,14	89,68	98,60	2,42
Jawa Timur	49,84	47,56	52,12	2,33	85,00	82,16	87,85	1,71
Banten	58,55	52,48	64,62	5,29	86,46	77,86	95,06	5,08
Bali	59,08	54,47	63,69	3,98	97,34	94,89	99,79	1,28
Nusa Tenggara Barat	38,98	33,53	44,44	7,14	74,38	66,13	82,64	5,66
Nusa Tenggara Timur	82,74	78,89	86,60	2,38	94,45	91,82	97,08	1,42
Kalimantan Barat	59,91	53,82	66,00	5,19	79,77	71,64	87,89	5,19
Kalimantan Tengah	63,37	54,97	71,77	6,76	86,83	79,67	93,99	4,21
Kalimantan Selatan	70,65	65,31	76,00	3,86	83,92	76,41	91,43	4,56
Kalimantan Timur	90,18	85,55	94,80	2,62	96,47	93,54	99,40	1,55
Kalimantan Utara	90,72	85,28	96,16	3,06	96,71	92,37	100,00	2,29
Sulawesi Utara	75,77	71,21	80,34	3,07	96,21	93,98	98,45	1,18
Sulawesi Tengah	77,41	71,13	83,68	4,14	95,84	92,45	99,23	1,80
Sulawesi Selatan	80,16	76,48	83,84	2,34	96,43	94,29	98,56	1,13
Sulawesi Tenggara	83,46	77,18	89,74	3,84	92,81	86,93	98,69	3,23
Gorontalo	62,79	54,48	71,11	6,76	100,00	100,00	100,00	0,00
Sulawesi Barat	81,67	73,77	89,57	4,94	99,21	97,80	100,00	0,73
Maluku	74,03	64,91	83,15	6,29	91,84	84,55	99,14	4,05
Maluku Utara	87,75	81,62	93,87	3,56	89,41	81,81	97,01	4,34
Papua Barat	65,00	44,64	85,36	15,98	87,80	70,44	100,00	10,09
Papua Barat Daya	88,12	78,56	97,68	5,54	92,81	84,69	100,00	4,47
Papua	82,92	74,73	91,11	5,04	90,44	79,49	100,00	6,17
Papua Selatan	99,20	97,61	100,00	0,81	91,11	74,83	100,00	9,12
Papua Tengah	67,19	48,46	85,92	14,22	NA	NA	NA	55,30
Papua Pegunungan	91,78	89,30	94,25	1,38	100,00	100,00	100,00	0,00
INDONESIA	60,89	59,88	61,89	0,84	87,00	85,93	88,07	0,63

Catatan: Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.23 *Sampling Error* Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2025

Provinsi	Masih Merokok							
	Setiap Hari				Tidak Setiap Hari			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	16,48	14,99	17,96	4,61	2,82	2,13	3,52	12,59
Sumatera Utara	19,57	18,10	21,05	3,85	1,48	1,00	1,95	16,43
Sumatera Barat	22,32	20,76	23,87	3,56	1,28	0,85	1,72	17,40
Riau	21,83	19,72	23,94	4,94	2,10	1,24	2,96	20,80
Jambi	20,67	18,65	22,69	4,98	2,30	1,48	3,12	18,15
Sumatera Selatan	22,82	21,18	24,46	3,67	1,96	1,42	2,50	14,07
Bengkulu	26,97	24,79	29,16	4,13	1,59	0,93	2,25	21,16
Lampung	27,89	26,10	29,68	3,27	1,64	1,18	2,09	14,15
Kep. Bangka Belitung	17,24	14,71	19,77	7,49	1,75	0,98	2,52	22,42
Kep. Riau	19,24	15,26	23,21	10,54	NA	NA	NA	56,14
DKI Jakarta	12,49	10,45	14,54	8,36	1,76	0,93	2,58	23,97
Jawa Barat	25,71	24,52	26,89	2,35	2,82	2,36	3,28	8,33
Jawa Tengah	21,22	20,42	22,01	1,91	2,21	1,91	2,51	6,92
DI Yogyakarta	15,78	14,03	17,53	5,66	1,54	0,98	2,09	18,41
Jawa Timur	21,62	20,85	22,39	1,82	1,86	1,59	2,13	7,52
Banten	22,48	20,23	24,72	5,09	2,14	1,33	2,95	19,37
Bali	9,64	8,44	10,83	6,33	0,59	0,33	0,84	22,14
Nusa Tenggara Barat	24,68	22,47	26,88	4,56	2,30	1,52	3,08	17,25
Nusa Tenggara Timur	15,95	14,72	17,18	3,94	4,93	4,16	5,70	7,97
Kalimantan Barat	19,65	17,87	21,43	4,62	2,20	1,46	2,93	17,15
Kalimantan Tengah	20,32	18,16	22,48	5,43	2,46	1,53	3,39	19,29
Kalimantan Selatan	15,89	14,18	17,60	5,50	1,67	1,02	2,33	20,01
Kalimantan Timur	15,94	13,71	18,17	7,13	1,53	0,91	2,16	20,86
Kalimantan Utara	16,89	13,45	20,33	10,39	1,31	0,21	2,41	42,71
Sulawesi Utara	16,75	15,19	18,31	4,76	3,82	2,99	4,65	11,10
Sulawesi Tengah	20,41	18,39	22,44	5,05	3,82	2,79	4,86	13,81
Sulawesi Selatan	15,93	14,78	17,09	3,70	1,21	0,89	1,53	13,32
Sulawesi Tenggara	18,79	17,00	20,59	4,88	1,91	1,25	2,57	17,61
Gorontalo	23,75	20,81	26,70	6,33	3,91	2,45	5,36	19,04
Sulawesi Barat	16,29	13,55	19,04	8,60	2,32	1,25	3,40	23,57
Maluku	17,13	14,87	19,38	6,72	5,22	3,98	6,46	12,11
Maluku Utara	21,91	19,37	24,45	5,91	4,85	3,46	6,24	14,61
Papua Barat	17,42	13,15	21,69	12,51	7,43	4,67	10,19	18,95
Papua Barat Daya	12,74	8,72	16,76	16,09	3,94	2,62	5,26	17,11
Papua	10,87	8,68	13,06	10,29	6,26	4,59	7,94	13,64
Papua Selatan	20,38	15,75	25,02	11,61	6,32	3,50	9,13	22,71
Papua Tengah	15,52	12,00	19,05	11,57	6,40	3,65	9,15	21,92
Papua Pegunungan	23,77	18,46	29,08	11,40	10,26	6,39	14,12	19,24
INDONESIA	21,09	20,75	21,44	0,83	2,21	2,08	2,34	2,95

Lanjutan Tabel 4.23

Provinsi	Tidak Merokok Lagi				Tidak Pernah Merokok			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	2,04	1,34	2,75	17,49	78,66	76,98	80,33	1,09
Sumatera Utara	1,87	1,29	2,45	15,77	77,08	75,52	78,64	1,03
Sumatera Barat	3,06	2,37	3,75	11,53	73,34	71,71	74,97	1,13
Riau	1,94	1,13	2,74	21,19	74,13	71,89	76,37	1,54
Jambi	1,58	1,00	2,16	18,68	75,45	73,31	77,59	1,45
Sumatera Selatan	1,18	0,74	1,62	18,96	74,04	72,33	75,75	1,18
Bengkulu	1,73	1,10	2,37	18,71	69,70	67,44	71,97	1,66
Lampung	2,20	1,62	2,77	13,34	68,28	66,46	70,10	1,36
Kep. Bangka Belitung	1,93	0,97	2,89	25,46	79,08	76,38	81,78	1,74
Kep. Riau	3,06	1,11	5,01	32,47	76,57	72,28	80,85	2,85
DKI Jakarta	1,73	0,94	2,52	23,20	84,02	81,78	86,26	1,36
Jawa Barat	1,48	1,11	1,86	12,88	69,99	68,73	71,25	0,92
Jawa Tengah	1,73	1,46	1,99	7,83	74,85	74,03	75,67	0,56
DI Yogyakarta	2,41	1,73	3,09	14,47	80,27	78,41	82,14	1,18
Jawa Timur	1,71	1,46	1,96	7,55	74,81	74,00	75,62	0,55
Banten	0,64	0,24	1,04	32,26	74,74	72,42	77,06	1,58
Bali	0,76	0,41	1,11	23,37	89,01	87,75	90,27	0,72
Nusa Tenggara Barat	1,60	0,97	2,24	20,33	71,42	69,18	73,66	1,60
Nusa Tenggara Timur	1,45	1,03	1,87	14,72	77,66	76,28	79,05	0,91
Kalimantan Barat	1,90	1,20	2,59	18,62	76,25	74,33	78,18	1,29
Kalimantan Tengah	0,92	0,34	1,51	32,16	76,30	74,02	78,58	1,52
Kalimantan Selatan	2,03	1,38	2,69	16,40	80,40	78,57	82,24	1,16
Kalimantan Timur	1,64	0,95	2,33	21,48	80,89	78,52	83,26	1,49
Kalimantan Utara	2,84	1,27	4,40	28,17	78,96	75,21	82,71	2,42
Sulawesi Utara	1,84	1,33	2,35	14,17	77,60	75,89	79,30	1,12
Sulawesi Tengah	3,17	2,19	4,15	15,72	72,59	70,38	74,79	1,55
Sulawesi Selatan	1,58	1,11	2,04	15,14	81,28	80,06	82,50	0,77
Sulawesi Tenggara	1,90	1,03	2,76	23,23	77,40	75,46	79,33	1,28
Gorontalo	1,31	0,59	2,03	28,14	71,03	67,98	74,09	2,19
Sulawesi Barat	1,80	0,70	2,89	31,08	79,59	76,61	82,57	1,91
Maluku	1,88	1,06	2,69	22,30	75,77	73,27	78,28	1,69
Maluku Utara	1,81	0,94	2,67	24,42	71,43	68,74	74,12	1,92
Papua Barat	2,19	0,60	3,79	37,09	72,96	68,29	77,63	3,26
Papua Barat Daya	0,48	0,14	0,82	35,93	82,83	78,58	87,08	2,62
Papua	1,33	0,36	2,30	37,34	81,53	78,80	84,27	1,71
Papua Selatan	NA	NA	NA	66,87	73,23	68,40	78,06	3,36
Papua Tengah	1,94	0,46	3,43	38,88	76,13	71,91	80,35	2,83
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	53,34	65,20	59,34	71,07	4,59
INDONESIA	1,68	1,57	1,79	3,40	75,01	74,65	75,38	0,25

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



BAB 5

KETENAGAKERJAAN

<https://id.scribd.com/doc/111111111>

Penduduk lanjut usia selama ini identik dengan penurunan tingkat kesehatan dan tingkat partisipasi di pasar kerja. Namun demikian, masih terdapat banyak lansia potensial yang mampu berdaya guna. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia dikatakan potensial jika masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Di sisi lain, keberadaan lansia dalam pasar kerja, tidak hanya mencerminkan kemampuan lansia untuk tetap bekerja, namun dapat juga dimaknai sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan lansia, sehingga mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan lansia potensial dalam berbagai aktivitas produktif merupakan salah satu upaya untuk menunjang kemandirian lansia, baik dari aspek ekonomi, psikologi, sosial, budaya, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi ketenagakerjaan lansia untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat, sehingga upaya pemberdayaan lansia potensial dapat terlaksana dengan baik.

5.1 Lansia Bekerja

Menurut Ehrenberg dan Smith (2012) pengalokasian waktu untuk memilih bekerja atau waktu luang (*leisure*) dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu biaya kesempatan, tingkat kesejahteraan, dan preferensi. Keputusan seseorang masuk dalam pasar tenaga kerja atau tidak sangat bergantung pada *reservation wage* yang dimiliki (Borjas 2016). Jika tingkat upah yang ditawarkan melebihi tingkat upah minimum yang diharapkan (*reservation wage*), maka seseorang akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya, Becker (1965) mengaitkan keputusan bekerja dengan teori alokasi waktu yakni ketika tenaga kerja memutuskan untuk bekerja, maka harus mengorbankan waktu luangnya untuk bekerja.

Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi lansia untuk tetap bekerja, salah satunya adalah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidaktersediaan non-*labor income* seperti jaminan pensiun, menuntut lansia untuk tetap bekerja (Jamalludin 2021). Lebih jauh, Wirakartakusumah dan Anwar (1994) dalam Junaidi *et al.* (2017) menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi lansia tetap bekerja, antara lain masih kuat secara fisik dan mental, adanya desakan ekonomi, serta motif aktualisasi diri atau emosi.

Menjadi lansia yang sehat dan aktif merupakan dambaan semua orang. Dengan bekerja, seorang lansia dapat dianggap mandiri dan berdaya guna. Dalam beberapa tahun terakhir, persentase lansia bekerja cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2021 hingga tahun 2025. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, persentase lansia yang bekerja naik hampir lima persen poin, dari 49,46 persen di tahun 2021 menjadi 54,21 persen pada tahun 2025 (Gambar 5.1).

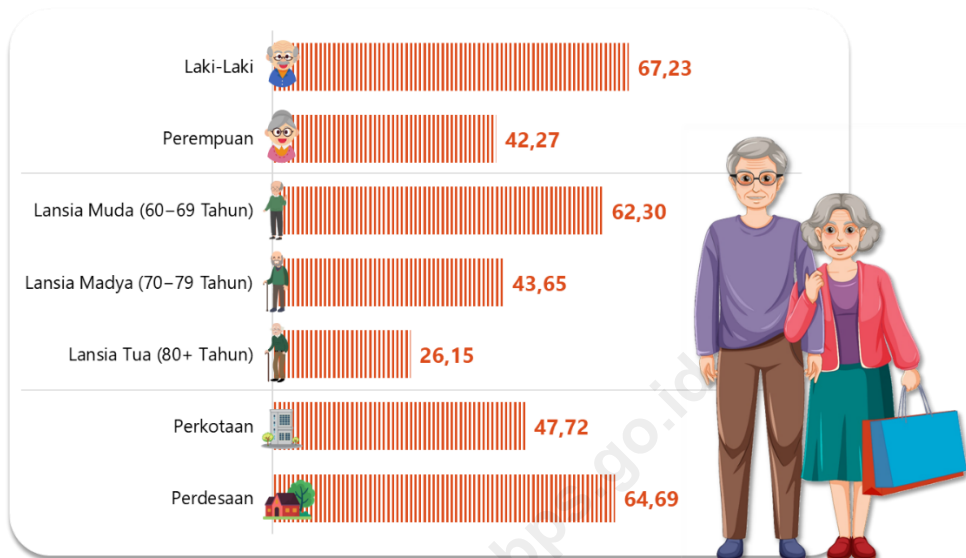


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021–2025

Gambar 5.1 Persentase Lansia Bekerja, 2021–2025

Idealnya, lansia yang bekerja memiliki pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Hal tersebut erat kaitannya dengan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dari semua usia

termasuk salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk usia lanjut. Lansia aktif atau *active ageing* tidak hanya mencakup lansia yang masih bekerja, namun juga termasuk lansia yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Adioetomo dkk. 2018, 298).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik, 2025

Berdasarkan karakteristiknya, Gambar 5.2 menunjukkan bahwa persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih besar daripada lansia perempuan, yaitu 67,23 persen berbanding 42,27 persen. Proses menjadi tua bersifat alami yang pada umumnya antara lain diiringi dengan kemunduran kapasitas fisik (Brown 1996 dalam Adioetomo dkk. 2018). Hal tersebut menyebabkan produktivitas lansia akan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia. Gambar 5.2 menunjukkan persentase lansia bekerja semakin menurun seiring semakin tingginya kelompok umur lansia. Persentase lansia bekerja pada kelompok umur 60-69 tahun hampir tiga kali lebih besar dari persentase lansia bekerja pada kelompok umur 80 tahun ke atas. Selanjutnya, menurut klasifikasi desa, persentase lansia di perdesaan yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan lansia di perkotaan, yaitu 64,69 persen berbanding 47,72 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka persentase lansia yang bekerja cenderung semakin rendah (Gambar 5.3). Terlihat dari Gambar 5.3 bahwa lebih dari separuh lansia dengan pendidikan tamat SD sederajat ke bawah (termasuk juga lansia yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD sederajat) bekerja. Sementara itu, hanya sekitar 1 dari 3 lansia berpendidikan tinggi yang masih bekerja. Lansia berpendidikan tinggi umumnya memiliki pekerjaan yang layak sehingga tidak lagi perlu bekerja di masa tuanya karena memiliki kondisi ekonomi yang memadai dan jaminan hari tua, sedangkan sebagian kecil yang masih bekerja adalah mereka yang masih dibutuhkan keahlian dan pemikirannya. Sebaliknya, lansia yang berpendidikan rendah terpaksa tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini karena tidak memiliki tabungan atau jaminan hari tua (Affandi 2009).



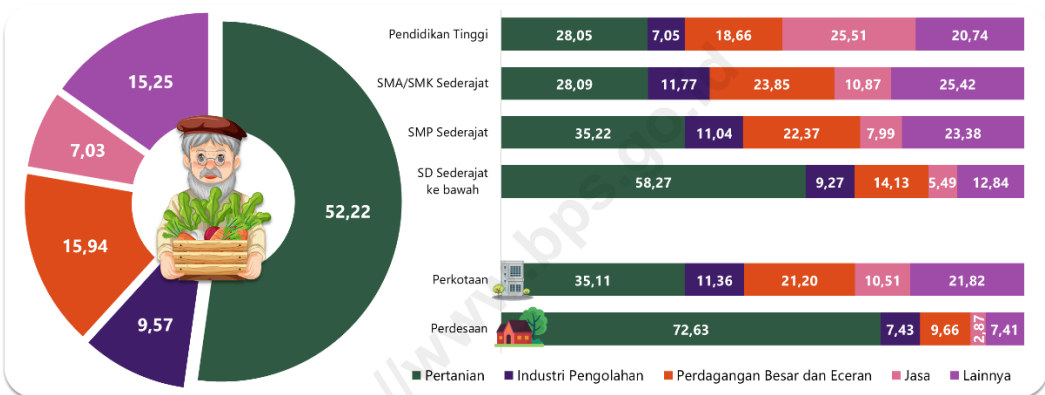
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025

5.2 Karakteristik Pekerja Lansia

Gambar 5.4 menunjukkan pada tahun 2025, lapangan usaha sektor pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 52,22 persen. Sektor tersebut cenderung membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi, serta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan

tertentu, sehingga lebih banyak lansia yang berpendidikan rendah terserap pada lapangan usaha ini. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Jamalludin (2021) yang menyebutkan bahwa lansia yang tetap bekerja cenderung berasal dari pekerja yang sebelumnya bekerja dengan jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi. Persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian jauh lebih besar di perdesaan dibandingkan perkotaan (72,63 persen berbanding 35,11 persen). Lebih lanjut, berdasarkan tingkat pendidikannya, persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian lebih besar pada lansia dengan pendidikan rendah (SD sederajat ke bawah), yakni sebesar 58,27 persen (Gambar 5.4).

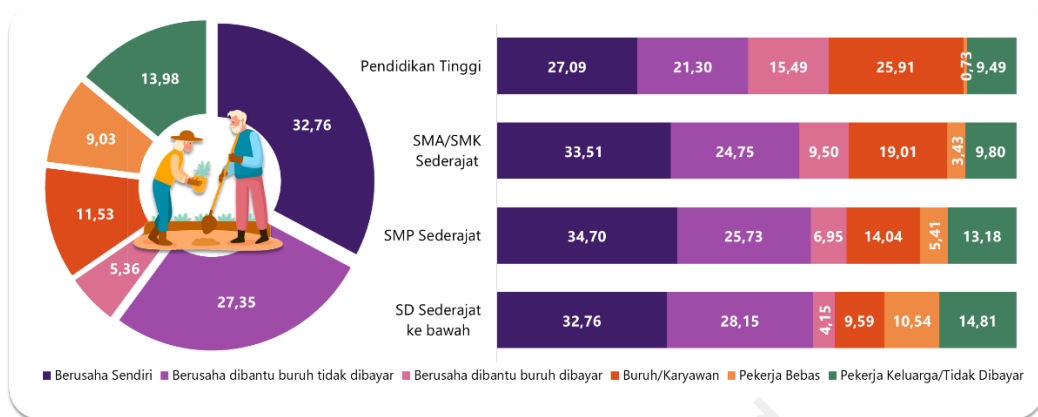


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Karakteristik, 2025

Status pekerjaan dari lansia bekerja memberikan gambaran tentang kedudukan lansia dalam pekerjaan dan seberapa besar peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi. Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa persentase lansia yang bekerja dengan status berusaha sendiri sebesar 32,76 persen, berusaha/bekerja dibantu buruh tidak dibayar sebesar 27,35 persen, dan dibantu buruh dibayar sebesar 5,36 persen (Gambar 5.5). Komposisi status pekerjaan lansia tersebut mencerminkan bahwa sekitar 65 dari 100 lansia memiliki tingkat kemandirian dalam kegiatan ekonomi dengan berusaha baik dengan atau tanpa buruh. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa pekerjaan lansia memiliki risiko yang harus dia tanggung sendiri dalam

posisinya sebagai pengusaha. Di sisi lain, persentase lansia yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar juga tidak sedikit, yaitu sebesar 13,98 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025

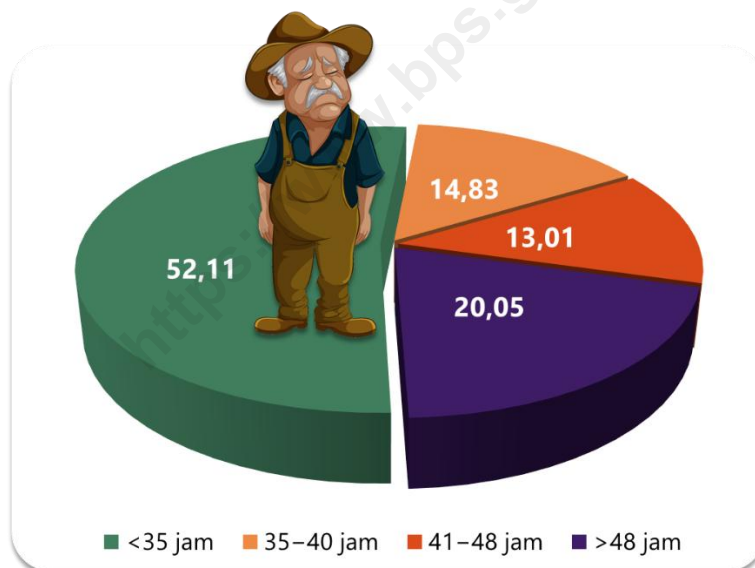
Selanjutnya, Gambar 5.5 juga menunjukkan bahwa lansia yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri memiliki jenjang pendidikan yang cenderung beragam. Sementara itu, pada lapangan pekerjaan dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan lebih banyak menyerap tenaga kerja lansia berpendidikan menengah ke atas, demikian pula untuk pekerjaan dengan status berusaha dibantu buruh dibayar. Sedangkan pekerjaan dengan status berusaha dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak menyerap tenaga kerja lansia berpendidikan SMP ke bawah.

5.3 Jam Kerja Lansia

Selain lapangan usaha dan status pekerjaan, jam kerja juga menjadi aspek penting berikutnya dalam pekerjaan layak (ILO 2013). Namun seiring dengan penurunan kondisi fisik, lansia selayaknya tidak bekerja secara berlebihan dari segi waktu. Jam kerja yang berlebih juga akan menurunkan produktivitas pekerjaan (ILO 2011). Menurut ILO, jumlah jam kerja maksimal dalam seminggu

adalah 48 jam. Apabila melebihi batas tersebut, maka pekerjaan dianggap tidak layak dari segi jam kerja.

Jam kerja berlebih dapat diamati melalui dua pendekatan. Menurut Konvensi *International Labour Organization* (ILO), jam kerja berlebih (*excessive hours*) didefinisikan sebagai bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja maksimum adalah selama 40 jam per minggu. Pada tahun 2025, sebanyak 20,05 persen pekerja lansia bekerja dengan jam kerja berlebih menurut konsep ILO. Adapun persentase pekerja lansia yang bekerja dengan jam kerja berlebih lainnya, yakni menurut konsep 40 jam per minggu adalah sebesar 33,06 persen. Lansia tentu tidak sepatutnya bekerja berlebihan. Selain itu, jam kerja berlebih akan mengancam kondisi fisik dan mental lansia dalam jangka panjang, serta menurunkan produktivitas dalam bekerja (Anker dkk. 2002).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.6 Persentase Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025

Tabel 5.1 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2025

Karakteristik	Jenis Kegiatan Utama				Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	54,21	0,94	30,66	14,20	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	67,23	1,23	13,17	18,37	100,00
Perempuan	42,27	0,67	46,68	10,37	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	62,30	1,02	27,88	8,80	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	43,65	0,83	35,65	19,88	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	26,15	0,67	35,27	37,91	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	58,57	0,99	30,88	9,56	100,00
Disabilitas	12,39	0,48	28,48	58,65	100,00
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan					
Pendidikan Tinggi	33,24	0,84	45,20	20,72	100,00
SMA/SMK Sederajat	44,18	1,23	37,06	17,53	100,00
SMP Sederajat	48,26	0,89	34,72	16,14	100,00
SD Sederajat	62,88	0,76	25,48	10,88	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	54,76	0,99	29,77	14,47	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	47,72	1,00	35,40	15,89	100,00
Perdesaan	64,69	0,85	22,99	11,47	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2025

Karakteristik	Lapangan Usaha Utama				
	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar dan Eceran	Jasa	Lainnya ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	52,22	9,57	15,94	7,03	52,19
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	56,37	7,36	12,89	6,16	17,22
Perempuan	46,17	12,78	20,37	8,29	12,38
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	49,65	9,70	16,09	7,50	17,06
Lansia Madya (70–79 tahun)	58,75	9,23	15,51	5,84	10,67
Lansia Tua (80+ tahun)	62,85	8,98	15,52	4,97	7,69
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	52,23	9,52	15,90	7,04	15,31
Disabilitas	51,54	11,74	17,76	6,46	12,50
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan					
Pendidikan Tinggi	28,05	7,05	18,66	25,51	20,74
SMA/SMK Sederajat	28,09	11,77	23,85	10,87	25,42
SMP Sederajat	35,22	11,04	22,37	7,99	23,38
SD Sederajat	54,53	9,54	15,55	5,89	14,49
Tidak Tamat SD Sederajat	61,78	9,02	12,79	5,11	11,30
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	35,11	11,36	21,20	10,51	21,82
Perdesaan	72,63	7,43	9,66	2,87	7,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2025

Karakteristik	Status Pekerjaan Utama		
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	32,76	27,35	5,36
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	31,53	33,10	6,77
Perempuan	34,55	18,95	3,30
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	31,64	26,17	5,45
Lansia Madya (70–79 tahun)	35,38	30,45	5,18
Lansia Tua (80+ tahun)	38,87	31,43	4,51
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	32,74	27,31	5,39
Disabilitas	33,92	29,03	3,73
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Pendidikan Tinggi	27,09	21,30	15,49
SMA/SMK Sederajat	33,51	24,75	9,50
SMP Sederajat	34,70	25,73	6,95
SD Sederajat	32,38	29,41	4,54
Tidak Tamat SD Sederajat	33,11	26,97	3,78
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	34,95	22,45	5,68
Perdesaan	30,15	33,18	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Lanjutan Tabel 5.3

Karakteristik	Status Pekerjaan Utama			Jumlah
	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas ¹	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	11,53	9,03	13,98	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	13,68	9,26	5,65	100,00
Perempuan	8,40	8,70	26,10	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	13,04	9,69	14,01	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	7,82	7,50	13,67	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	4,57	5,46	15,16	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	11,57	9,07	13,91	100,00
Disabilitas	9,46	7,14	16,72	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Pendidikan Tinggi	25,91	0,73	9,49	100,00
SMA/SMK Sederajat	19,01	3,43	9,80	100,00
SMP Sederajat	14,04	5,41	13,18	100,00
SD Sederajat	10,67	9,33	13,68	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	8,58	11,68	15,87	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	15,56	9,37	12,00	100,00
Perdesaan	6,72	8,63	16,33	100,00

Catatan:

¹ Pekerja Bebas mencakup pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2025

Karakteristik	Status Pekerjaan Utama		Jumlah
	Formal ¹	Informal ²	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	16,88	83,12	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	20,45	79,55	100,00
Perempuan	11,70	88,30	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	18,49	81,51	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	13,00	87,00	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	9,08	90,92	100,00
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	16,97	83,03	100,00
Disabilitas	13,19	86,81	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Pendidikan Tinggi	41,39	58,61	100,00
SMA/SMK Sederajat	28,51	71,49	100,00
SMP Sederajat	20,99	79,01	100,00
SD Sederajat	15,20	84,80	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	12,36	87,64	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	21,23	78,77	100,00
Perdesaan	11,70	88,30	100,00

Catatan:

¹ Pekerja Formal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.

² Pekerja Informal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, serta pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025

Karakteristik	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan				Rata-Rata Jam Kerja
	< 35 Jam	35–40 Jam	41–48 Jam	> 48 Jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	52,11	14,83	13,01	20,05	32,54
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	46,92	15,84	15,48	21,77	34,35
Perempuan	59,67	13,36	9,42	17,54	29,91
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	49,03	15,23	14,18	21,55	33,86
Lansia Madya (70–79 tahun)	59,48	14,00	10,34	16,18	29,32
Lansia Tua (80+ tahun)	67,52	12,00	6,39	14,09	26,28
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	51,85	14,90	13,10	20,16	32,66
Disabilitas	63,72	11,75	9,36	15,17	27,26
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Pendidikan Tinggi	53,75	19,86	11,01	15,37	30,30
SMA/SMK Sederajat	45,40	14,45	14,18	25,96	35,45
SMP Sederajat	46,19	14,39	15,82	23,60	35,25
SD Sederajat	49,75	15,48	13,86	20,91	33,50
Tidak Tamat SD Sederajat	56,99	13,90	11,56	17,56	30,61
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	46,78	15,64	14,32	23,26	34,48
Perdesaan	58,46	13,86	11,46	16,22	30,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.6 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2025

Provinsi	Status Pekerjaan Utama				Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	47,20	1,17 ¹	31,35	20,29	100,00
Sumatera Utara	53,13	0,69	30,36	15,82	100,00
Sumatera Barat	52,22	1,13	32,68	13,96	100,00
Riau	51,03	1,07 ¹	32,95	14,95	100,00
Jambi	52,96	0,54 ¹	30,19	16,31	100,00
Sumatera Selatan	51,99	0,28 ¹	30,13	17,60	100,00
Bengkulu	57,65	0,78 ¹	28,73	12,83	100,00
Lampung	55,16	1,61	29,95	13,28	100,00
Kep. Bangka Belitung	46,59	1,58	39,84	11,99	100,00
Kepulauan Riau	42,46	NA	39,56	17,36	100,00
DKI Jakarta	34,03	1,60 ¹	46,23	18,14	100,00
Jawa Barat	50,08	0,64	34,05	15,23	100,00
Jawa Tengah	59,05	1,46	26,92	12,58	100,00
DI Yogyakarta	63,24	0,80 ¹	26,16	9,80	100,00
Jawa Timur	61,83	0,78	26,52	10,88	100,00
Banten	41,97	1,04 ¹	36,30	20,69	100,00
Bali	57,13	0,40 ¹	31,01	11,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	59,42	NA	27,79	12,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,61	0,55	20,61	17,23	100,00
Kalimantan Barat	49,58	0,75 ¹	31,01	18,67	100,00
Kalimantan Tengah	47,53	1,32 ¹	36,21	14,94	100,00
Kalimantan Selatan	52,81	1,74	33,44	12,01	100,00
Kalimantan Timur	45,45	1,47 ¹	34,64	18,43	100,00
Kalimantan Utara	50,50	0,70 ¹	33,30	15,50	100,00
Sulawesi Utara	51,35	0,69 ¹	34,76	13,20	100,00
Sulawesi Tengah	56,67	0,37 ¹	29,29	13,67	100,00
Sulawesi Selatan	44,96	NA	37,77	16,89	100,00
Sulawesi Tenggara	55,71	1,38 ¹	30,60	12,31	100,00
Gorontalo	53,33	NA	29,03	17,53	100,00
Sulawesi Barat	61,27	0,57 ¹	24,69	13,47	100,00
Maluku	50,74	1,79	28,52	18,95	100,00
Maluku Utara	58,08	1,80 ¹	24,88	15,24	100,00
Papua Barat	56,88	0,73 ¹	26,70	15,69	100,00
Papua Barat Daya	50,65	NA	30,64	17,82	100,00
Papua	45,14	1,97 ¹	31,55	21,34	100,00
Papua Selatan	48,17	NA	31,82	19,82	100,00
Papua Tengah	61,73	1,22 ¹	19,76	17,30	100,00
Papua Pegunungan	90,25	NA	4,86	3,60	100,00
Indonesia	54,21	0,94	30,66	14,20	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.7 Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin	
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	39,91	52,16	64,96	32,10
Sumatera Utara	46,97	63,75	65,33	42,98
Sumatera Barat	46,04	59,97	66,69	40,13
Riau	44,15	56,80	67,39	34,12
Jambi	43,17	59,57	68,74	37,09
Sumatera Selatan	39,73	61,48	65,43	39,15
Bengkulu	46,87	64,13	71,58	43,76
Lampung	43,42	62,75	72,51	37,44
Kep. Bangka Belitung	41,64	56,06	63,84	29,68
Kepulauan Riau	40,80	56,99	54,96	29,35
DKI Jakarta	34,03	–	45,80	23,44
Jawa Barat	46,63	64,07	65,52	35,37
Jawa Tengah	52,26	68,14	70,40	48,94
DI Yogyakarta	58,55	76,16	72,70	55,28
Jawa Timur	55,47	71,22	73,55	51,62
Banten	40,84	46,57	58,82	25,36
Bali	52,70	68,24	64,90	50,16
Nusa Tenggara Barat	56,26	63,51	72,53	47,54
Nusa Tenggara Timur	48,27	67,62	67,28	56,44
Kalimantan Barat	37,41	59,17	61,62	37,76
Kalimantan Tengah	39,04	55,82	61,20	33,00
Kalimantan Selatan	47,71	58,99	65,29	41,40
Kalimantan Timur	42,12	56,32	61,01	28,51
Kalimantan Utara	43,05	66,39	66,87	31,77
Sulawesi Utara	46,42	58,95	67,34	36,37
Sulawesi Tengah	46,83	62,68	72,50	40,72
Sulawesi Selatan	36,12	53,87	59,00	33,46
Sulawesi Tenggara	45,08	63,11	68,35	43,70
Gorontalo	47,95	59,20	68,40	39,79
Sulawesi Barat	52,73	64,40	77,10	46,54
Maluku	41,15	58,34	58,31	43,82
Maluku Utara	47,26	63,30	68,94	47,22
Papua Barat	44,82	63,87	65,52	46,93
Papua Barat Daya	35,39	70,02	59,65	40,84
Papua	36,39	63,60	52,99	36,69
Papua Selatan	40,79	54,37	57,33	38,45
Papua Tengah	44,62	66,63	68,39	52,52
Papua Pegunungan	84,20	91,00	93,71	85,46
Indonesia	47,72	64,69	67,23	42,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.8 Persentase Lansia Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan				
	Tidak Tamat SD Sederajat	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	28,94	41,63	11,77	12,34	5,33
Sumatera Utara	29,18	33,72	15,26	16,79	5,05
Sumatera Barat	41,58	26,41	14,20	13,15	4,67
Riau	34,50	32,96	14,07	13,60	4,87
Jambi	45,30	32,33	8,25	10,68	3,43
Sumatera Selatan	45,81	38,13	6,27	6,97	2,81
Bengkulu	46,35	27,56	9,75	10,32	6,02
Lampung	47,13	36,27	7,43	6,35	2,82
Kep. Bangka Belitung	42,55	31,10	9,47	14,13	2,76
Kepulauan Riau	28,11	38,15	9,36	18,74	5,64
DKI Jakarta	11,48	30,12	14,09	29,66	14,64
Jawa Barat	31,50	49,57	6,54	8,24	4,16
Jawa Tengah	48,86	34,56	7,74	6,50	2,34
DI Yogyakarta	37,66	31,95	9,16	15,46	5,78
Jawa Timur	44,00	40,49	6,53	6,13	2,86
Banten	33,12	38,14	11,70	11,76	5,27
Bali	38,07	36,63	7,41	11,23	6,67
Nusa Tenggara Barat	57,76	26,51	4,24	7,56	3,94
Nusa Tenggara Timur	41,96	34,69	7,02	10,74	5,59
Kalimantan Barat	55,31	25,30	6,65	8,79	3,95
Kalimantan Tengah	35,91	36,75	8,88	14,12	4,34
Kalimantan Selatan	45,14	33,43	8,11	10,27	3,04
Kalimantan Timur	31,85	31,93	11,43	20,22	4,57
Kalimantan Utara	49,14	26,68	7,15	14,01	3,03
Sulawesi Utara	24,81	30,90	18,59	20,06	5,62
Sulawesi Tengah	25,61	43,53	12,53	12,46	5,87
Sulawesi Selatan	41,84	29,45	8,10	13,68	6,94
Sulawesi Tenggara	39,56	32,41	9,79	12,74	5,50
Gorontalo	50,09	29,84	7,69	8,16	4,21
Sulawesi Barat	48,70	29,40	7,18	10,32	4,39
Maluku	25,13	39,47	13,30	18,15	3,96
Maluku Utara	38,08	34,00	12,56	10,36	5,01
Papua Barat	42,77	30,28	11,22	11,19	4,54
Papua Barat Daya	35,13	29,54	13,59	16,98	4,75
Papua	28,86	27,35	16,12	16,76	10,92
Papua Selatan	41,31	30,29	9,82	13,30	5,29
Papua Tengah	51,72	37,36	4,98	4,57	1,37
Papua Pegunungan	45,16	45,82	3,98	2,47	2,56
Indonesia	40,22	37,76	8,37	9,59	4,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.9 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2025

Provinsi	Lapangan Usaha Utama				
	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar dan Eceran	Jasa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,39	9,32	13,26	6,98	12,05
Sumatera Utara	49,36	6,03	18,18	8,86	17,58
Sumatera Barat	61,34	6,10	16,41	3,49	12,66
Riau	51,48	7,70	17,08	6,13	17,61
Jambi	69,14	4,18	10,94	4,17	11,57
Sumatera Selatan	64,09	5,47	12,20	5,92	12,32
Bengkulu	67,45	5,36	12,28	4,43	10,47
Lampung	67,42	5,46	13,20	4,47	9,45
Kep. Bangka Belitung	44,76	12,42	17,45	6,75	18,62
Kepulauan Riau	18,05	13,66	15,37	16,73	36,19
DKI Jakarta	0,53	13,45	24,07	19,63	42,32
Jawa Barat	36,88	10,48	20,83	10,71	21,10
Jawa Tengah	56,63	11,26	14,16	5,40	12,55
DI Yogyakarta	47,41	17,59	15,78	6,44	12,78
Jawa Timur	58,83	8,31	14,46	5,40	13,00
Banten	36,55	9,33	15,32	14,72	24,09
Bali	44,67	18,49	18,18	6,04	12,62
Nusa Tenggara Barat	58,04	9,01	18,09	4,18	10,68
Nusa Tenggara Timur	67,36	14,51	10,44	2,89	4,80
Kalimantan Barat	67,37	4,70	8,98	5,57	13,38
Kalimantan Tengah	58,89	7,43	12,97	6,49	14,23
Kalimantan Selatan	48,18	7,09	16,41	9,09	19,23
Kalimantan Timur	37,73	6,81	19,83	9,53	26,10
Kalimantan Utara	57,35	6,10	17,45	4,76	14,35
Sulawesi Utara	42,04	14,02	17,71	8,19	18,04
Sulawesi Tengah	61,10	10,64	12,41	5,21	10,64
Sulawesi Selatan	60,44	7,09	16,86	5,03	10,57
Sulawesi Tenggara	60,01	8,51	17,18	3,66	10,64
Gorontalo	48,06	10,91	17,17	8,64	15,22
Sulawesi Barat	65,73	10,15	15,71	3,25	5,16
Maluku	45,13	17,31	19,25	4,29	14,01
Maluku Utara	43,71	30,73	11,61	3,45	10,50
Papua Barat	66,34	5,20	14,01	4,96	9,49
Papua Barat Daya	44,00	14,90	15,61	8,61	16,89
Papua	47,63	4,65	21,56	6,71	19,45
Papua Selatan	54,46	2,09	20,50	9,36	13,58
Papua Tengah	85,60	1,77	5,40	2,00	5,23
Papua Pegunungan	91,62	–	8,10	0,06	0,22
Indonesia	52,22	9,57	15,94	7,03	15,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.10 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Status Pekerjaan Utama		
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,52	33,13	7,24
Sumatera Utara	31,20	25,92	9,81
Sumatera Barat	34,22	32,84	6,82
Riau	32,29	16,72	16,46
Jambi	28,94	26,41	14,81
Sumatera Selatan	30,63	28,89	5,58
Bengkulu	28,08	31,91	11,07
Lampung	27,54	34,57	5,90
Kep. Bangka Belitung	40,60	22,49	5,82
Kepulauan Riau	39,45	16,47	5,97
DKI Jakarta	36,47	15,56	8,68
Jawa Barat	34,32	23,47	4,59
Jawa Tengah	32,71	28,60	4,31
DI Yogyakarta	28,19	35,04	4,11
Jawa Timur	30,51	26,91	4,73
Banten	29,59	20,86	5,47
Bali	37,31	23,77	4,54
Nusa Tenggara Barat	37,08	28,95	1,55
Nusa Tenggara Timur	33,41	40,22	1,17
Kalimantan Barat	34,76	27,56	6,75
Kalimantan Tengah	36,96	24,24	7,52
Kalimantan Selatan	42,23	24,26	5,24
Kalimantan Timur	38,99	23,68	7,61
Kalimantan Utara	32,50	27,26	8,57
Sulawesi Utara	39,44	22,18	5,07
Sulawesi Tengah	30,00	35,28	6,98
Sulawesi Selatan	36,72	30,88	4,34
Sulawesi Tenggara	40,18	34,43	3,59
Gorontalo	34,13	30,46	2,05
Sulawesi Barat	32,93	40,21	6,52
Maluku	41,77	29,93	3,29
Maluku Utara	40,61	32,29	4,74
Papua Barat	38,88	29,91	1,09
Papua Barat Daya	33,83	31,12	0,39
Papua	36,91	29,20	2,24
Papua Selatan	44,12	32,39	0,99
Papua Tengah	27,61	41,86	0,95
Papua Pegunungan	18,91	49,50	–
Indonesia	32,76	27,35	5,36

Lanjutan Tabel 5.10

Provinsi	Status Pekerjaan Utama		
	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,64	9,94	8,52
Sumatera Utara	12,97	6,85	13,25
Sumatera Barat	7,32	7,16	11,66
Riau	16,60	6,36	11,57
Jambi	12,38	5,96	11,50
Sumatera Selatan	12,61	7,53	14,75
Bengkulu	8,45	5,96	14,53
Lampung	10,00	7,03	14,95
Kep. Bangka Belitung	16,54	3,10	11,44
Kepulauan Riau	23,83	3,66	10,62
DKI Jakarta	29,89	2,73	6,66
Jawa Barat	13,71	12,81	11,11
Jawa Tengah	9,84	9,26	15,28
DI Yogyakarta	10,55	4,63	17,47
Jawa Timur	9,62	12,45	15,78
Banten	21,85	10,68	11,56
Bali	10,45	6,34	17,59
Nusa Tenggara Barat	7,43	11,01	13,98
Nusa Tenggara Timur	5,46	2,40	17,34
Kalimantan Barat	9,98	4,67	16,28
Kalimantan Tengah	15,35	3,19	12,73
Kalimantan Selatan	13,11	3,18	11,97
Kalimantan Timur	13,65	4,05	12,03
Kalimantan Utara	13,35	5,07	13,24
Sulawesi Utara	14,08	8,71	10,53
Sulawesi Tengah	9,33	5,74	12,67
Sulawesi Selatan	10,34	4,24	13,48
Sulawesi Tenggara	6,65	1,35	13,79
Gorontalo	11,68	11,37	10,32
Sulawesi Barat	5,30	3,53	11,52
Maluku	7,64	2,45	14,92
Maluku Utara	6,96	2,21	13,19
Papua Barat	9,65	1,16	19,31
Papua Barat Daya	15,99	3,49	15,18
Papua	14,61	2,33	14,73
Papua Selatan	10,28	1,95	10,27
Papua Tengah	4,26	0,65	24,67
Papua Pegunungan	0,84	–	30,75
Indonesia	11,53	9,03	13,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.11 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal Menurut Provinsi, dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Sektor Formal
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18,43	13,03	18,06	9,42	14,88
Sumatera Utara	25,71	19,05	29,13	14,75	22,78
Sumatera Barat	16,51	11,85	16,96	10,21	14,13
Riau	31,96	33,78	38,66	21,63	33,06
Jambi	32,16	24,75	29,71	22,47	27,19
Sumatera Selatan	23,41	15,59	22,82	10,81	18,20
Bengkulu	21,29	18,75	23,55	12,96	19,52
Lampung	23,53	12,50	18,02	11,72	15,90
Kep. Bangka Belitung	26,12	17,02	22,74	21,58	22,37
Kepulauan Riau	31,32	20,32	28,06	33,23	29,80
DKI Jakarta	38,58	–	44,52	28,12	38,58
Jawa Barat	20,72	11,15	20,78	13,92	18,30
Jawa Tengah	18,77	9,42	16,49	11,17	14,15
DI Yogyakarta	18,24	7,06	16,74	12,35	14,66
Jawa Timur	17,87	10,31	18,47	9,25	14,35
Banten	28,36	23,59	29,36	22,66	27,32
Bali	18,34	8,48	20,75	8,28	14,98
Nusa Tenggara Barat	12,63	4,80	10,38	7,04	8,98
Nusa Tenggara Timur	13,06	4,56	9,08	3,96	6,63
Kalimantan Barat	23,86	13,18	22,35	7,73	16,73
Kalimantan Tengah	27,70	19,58	26,77	15,18	22,87
Kalimantan Selatan	25,40	11,44	23,05	11,59	18,36
Kalimantan Timur	22,24	18,84	25,97	10,26	21,25
Kalimantan Utara	27,56	14,12	26,83	10,10	21,92
Sulawesi Utara	24,70	12,40	21,60	14,88	19,15
Sulawesi Tengah	23,23	13,15	19,03	11,44	16,31
Sulawesi Selatan	21,92	9,79	17,56	10,52	14,68
Sulawesi Tenggara	16,60	7,07	13,36	5,60	10,24
Gorontalo	19,48	8,64	13,48	14,10	13,72
Sulawesi Barat	17,53	10,11	15,10	6,75	11,82
Maluku	17,62	7,19	14,83	6,19	10,93
Maluku Utara	15,45	10,35	15,08	6,77	11,70
Papua Barat	17,39	8,03	15,02	3,84	10,73
Papua Barat Daya	25,74	10,38	23,59	4,91	16,38
Papua	25,72	6,13	23,99	5,73	16,84
Papua Selatan	8,87	12,78	14,93	5,47	11,27
Papua Tengah	22,25	1,94	6,37	3,12	5,21
Papua Pegunungan	–	0,93	1,14	0,38	0,84
Indonesia	21,23	11,70	20,45	11,70	16,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.12 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025

Provinsi	Jam Kerja dalam Seminggu				Rata-Rata Jam Kerja
	< 35 Jam	35–40 Jam	41–48 Jam	> 48 Jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	59,08	12,67	11,79	16,45	30,04
Sumatera Utara	51,04	15,61	14,62	18,73	32,53
Sumatera Barat	56,04	14,45	11,60	17,91	30,56
Riau	55,87	12,91	13,20	18,02	29,88
Jambi	60,09	13,89	11,00	15,01	29,11
Sumatera Selatan	59,57	12,00	11,55	16,88	30,45
Bengkulu	58,09	13,44	12,89	15,58	29,05
Lampung	62,19	12,00	11,90	13,91	28,71
Kep. Bangka Belitung	50,88	15,93	15,36	17,83	32,56
Kepulauan Riau	43,60	13,28	17,46	25,66	35,80
DKI Jakarta	32,49	26,42	14,93	26,16	38,57
Jawa Barat	47,41	16,10	13,06	23,42	34,88
Jawa Tengah	52,40	14,20	13,28	20,12	32,23
DI Yogyakarta	55,00	10,86	12,77	21,37	31,55
Jawa Timur	50,90	14,84	13,60	20,66	32,91
Banten	42,56	17,90	18,09	21,45	35,76
Bali	53,44	15,95	11,61	18,99	32,18
Nusa Tenggara Barat	52,39	16,19	9,30	22,13	31,68
Nusa Tenggara Timur	65,84	11,89	10,66	11,61	27,65
Kalimantan Barat	65,32	11,54	10,26	12,88	27,66
Kalimantan Tengah	57,73	13,90	11,11	17,25	30,56
Kalimantan Selatan	55,02	12,89	12,11	19,98	31,21
Kalimantan Timur	45,89	15,28	12,09	26,74	35,68
Kalimantan Utara	45,38	11,77	12,29	30,56	37,49
Sulawesi Utara	50,48	14,80	18,00	16,72	33,06
Sulawesi Tengah	54,04	12,23	13,57	20,15	31,66
Sulawesi Selatan	56,43	13,79	10,71	19,07	30,92
Sulawesi Tenggara	51,57	14,05	11,13	23,25	33,23
Gorontalo	44,25	15,78	12,21	27,76	36,72
Sulawesi Barat	64,27	13,47	8,79	13,46	26,38
Maluku	53,76	13,77	10,94	21,52	32,48
Maluku Utara	57,04	9,30	10,65	23,01	32,41
Papua Barat	56,85	19,53	9,48	14,15	31,38
Papua Barat Daya	42,25	15,30	16,51	25,93	37,77
Papua	53,27	16,18	12,08	18,47	31,91
Papua Selatan	41,07	16,13	14,19	28,61	39,70
Papua Tengah	67,94	15,77	7,80	8,49	29,68
Papua Pegunungan	69,14	19,44	8,63	2,79	29,28
Indonesia	52,11	14,83	13,01	20,05	32,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.13 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2025

Provinsi	Bekerja				Pengangguran			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	47,20	44,87	49,53	2,52	1,17	0,68	2,00	27,49
Sumatera Utara	53,13	50,92	55,33	2,12	0,69	0,47	1,02	19,75
Sumatera Barat	52,22	50,07	54,36	2,10	1,13	0,77	1,67	19,72
Riau	51,03	48,07	53,98	2,96	1,07	0,63	1,82	26,95
Jambi	52,96	50,07	55,84	2,78	0,54	0,28	1,02	32,69
Sumatera Selatan	51,99	49,24	54,73	2,70	0,28	0,13	0,58	37,25
Bengkulu	57,65	54,87	60,39	2,44	0,78	0,46	1,33	27,34
Lampung	55,16	52,36	57,93	2,58	1,61	1,04	2,47	22,03
Kep. Bangka Belitung	46,59	42,90	50,31	4,06	1,58	0,98	2,55	24,45
Kepulauan Riau	42,46	36,79	48,34	6,97	NA	NA	NA	64,59
DKI Jakarta	34,03	30,67	37,56	5,16	1,60	0,95	2,70	26,81
Jawa Barat	50,08	48,37	51,79	1,74	0,64	0,45	0,89	17,08
Jawa Tengah	59,05	57,62	60,46	1,23	1,46	1,16	1,83	11,54
DI Yogyakarta	63,24	60,05	66,31	2,53	0,80	0,38	1,69	37,90
Jawa Timur	61,83	60,40	63,24	1,17	0,78	0,59	1,02	14,01
Banten	41,97	38,66	45,35	4,08	1,04	0,57	1,91	31,02
Bali	57,13	54,57	59,65	2,27	0,40	0,19	0,85	38,02
Nusa Tenggara Barat	59,42	55,23	63,48	3,55	NA	NA	NA	51,94
Nusa Tenggara Timur	61,61	59,61	63,57	1,64	0,55	0,35	0,86	22,99
Kalimantan Barat	49,58	46,71	52,45	2,96	0,75	0,38	1,46	34,33
Kalimantan Tengah	47,53	44,07	51,01	3,73	1,32	0,77	2,26	27,35
Kalimantan Selatan	52,81	49,98	55,62	2,73	1,74	1,17	2,57	20,03
Kalimantan Timur	45,45	41,64	49,31	4,31	1,47	0,89	2,44	25,77
Kalimantan Utara	50,50	44,54	56,45	6,05	0,70	0,29	1,68	44,69
Sulawesi Utara	51,35	49,12	53,57	2,21	0,69	0,40	1,20	28,08
Sulawesi Tengah	56,67	53,64	59,65	2,71	0,37	0,21	0,66	29,77
Sulawesi Selatan	44,96	42,97	46,97	2,27	NA	NA	NA	52,26
Sulawesi Tenggara	55,71	53,00	58,38	2,46	1,38	0,76	2,49	30,21
Gorontalo	53,33	49,56	57,07	3,60	NA	NA	NA	99,67
Sulawesi Barat	61,27	57,68	64,74	2,94	0,57	0,27	1,17	37,23
Maluku	50,74	47,76	53,72	3,00	1,79	1,21	2,65	20,13
Maluku Utara	58,08	54,37	61,69	3,22	1,80	0,88	3,65	36,27
Papua Barat	56,88	49,95	63,55	6,14	0,73	0,36	1,50	36,77
Papua Barat Daya	50,65	44,97	56,31	5,74	NA	NA	NA	51,70
Papua	45,14	39,45	50,96	6,53	1,97	1,05	3,68	32,10
Papua Selatan	48,17	42,06	54,34	6,53	NA	NA	NA	71,32
Papua Tengah	61,73	56,01	67,14	4,62	1,22	0,62	2,38	34,40
Papua Pegunungan	90,25	86,52	93,04	1,82	NA	NA	NA	67,61
Indonesia	54,21	53,64	54,77	0,53	0,94	0,85	1,04	5,23

Lanjutan Tabel 5.13

Provinsi	Mengurus Rumah Tangga				Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	31,35	29,32	33,46	3,37	20,29	18,46	22,25	0,05
Sumatera Utara	30,36	28,49	32,30	3,20	15,82	14,28	17,50	0,05
Sumatera Barat	32,68	30,69	34,74	3,16	13,96	12,56	15,50	0,05
Riau	32,95	30,51	35,48	3,85	14,95	12,96	17,19	0,07
Jambi	30,19	27,73	32,77	4,26	16,31	14,37	18,46	0,06
Sumatera Selatan	30,13	27,80	32,58	4,04	17,60	15,80	19,54	0,05
Bengkulu	28,73	26,29	31,31	4,46	12,83	11,28	14,57	0,07
Lampung	29,95	27,71	32,29	3,90	13,28	11,66	15,10	0,07
Kep. Bangka Belitung	39,84	36,42	43,37	4,45	11,99	9,88	14,47	0,10
Kepulauan Riau	39,56	34,01	45,39	7,37	17,36	13,26	22,41	0,13
DKI Jakarta	46,23	42,63	49,87	4,00	18,14	15,55	21,05	0,08
Jawa Barat	34,05	32,59	35,55	2,22	15,23	14,07	16,48	0,04
Jawa Tengah	26,92	25,71	28,17	2,33	12,58	11,71	13,50	0,04
DI Yogyakarta	26,16	23,19	29,36	6,02	9,80	8,21	11,65	0,09
Jawa Timur	26,52	25,25	27,82	2,47	10,88	10,08	11,72	0,04
Banten	36,30	33,21	39,51	4,44	20,69	18,07	23,57	0,07
Bali	31,01	28,69	33,42	3,90	11,46	10,14	12,92	0,06
Nusa Tenggara Barat	27,79	24,38	31,47	6,52	12,01	10,15	14,15	0,08
Nusa Tenggara Timur	20,61	19,05	22,27	3,99	17,23	15,83	18,72	0,04
Kalimantan Barat	31,01	28,77	33,34	3,76	18,67	16,73	20,78	0,06
Kalimantan Tengah	36,21	33,17	39,36	4,36	14,94	12,67	17,53	0,08
Kalimantan Selatan	33,44	30,90	36,08	3,95	12,01	10,34	13,91	0,08
Kalimantan Timur	34,64	31,61	37,81	4,57	18,43	15,51	21,76	0,09
Kalimantan Utara	33,30	28,35	38,64	7,90	15,50	11,71	20,22	0,14
Sulawesi Utara	34,76	32,81	36,76	2,90	13,20	11,82	14,72	0,06
Sulawesi Tengah	29,29	26,71	32,02	4,62	13,67	11,69	15,92	0,08
Sulawesi Selatan	37,77	35,92	39,65	2,52	16,89	15,37	18,54	0,05
Sulawesi Tenggara	30,60	28,24	33,07	4,03	12,31	10,82	13,98	0,07
Gorontalo	29,03	26,02	32,24	5,47	17,53	14,57	20,95	0,09
Sulawesi Barat	24,69	21,78	27,85	6,27	13,47	11,24	16,07	0,09
Maluku	28,52	25,89	31,30	4,84	18,95	16,44	21,74	0,07
Maluku Utara	24,88	22,07	27,93	6,01	15,24	12,81	18,03	0,09
Papua Barat	26,70	21,53	32,60	10,60	15,69	12,12	20,07	0,13
Papua Barat Daya	30,64	26,00	35,72	8,11	17,82	13,42	23,28	0,14
Papua	31,55	26,82	36,69	8,00	21,34	17,08	26,33	0,11
Papua Selatan	31,82	24,58	40,06	12,50	19,82	14,50	26,49	0,15
Papua Tengah	19,76	15,92	24,26	10,75	17,30	13,00	22,64	0,14
Papua Pegunungan	4,86	3,13	7,47	22,21	3,60	2,21	5,83	0,25
Indonesia	30,66	30,16	31,16	0,83	14,20	13,83	14,57	0,01

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.14 *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak Tamat SD Sederajat				SD Sederajat				SMP Sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	28,94	25,63	32,48	6,04	41,63	38,25	45,10	4,20	11,77	9,52	14,46	10,68
Sumatera Utara	29,18	26,67	31,83	4,51	33,72	31,00	36,56	4,20	15,26	13,26	17,49	7,06
Sumatera Barat	41,58	38,54	44,68	3,77	26,41	23,97	29,00	4,86	14,20	12,29	16,35	7,29
Riau	34,50	30,52	38,71	6,07	32,96	28,95	37,24	6,43	14,07	11,41	17,24	10,54
Jambi	45,30	41,01	49,67	4,89	32,33	28,79	36,09	5,77	8,25	6,53	10,37	11,81
Sumatera Selatan	45,81	42,43	49,24	3,80	38,13	34,96	41,41	4,32	6,27	5,08	7,71	10,62
Bengkulu	46,35	42,71	50,04	4,04	27,56	24,28	31,11	6,33	9,75	7,73	12,21	11,67
Lampung	47,13	43,13	51,17	4,36	36,27	32,14	40,62	5,98	7,43	6,01	9,16	10,78
Kep. Bangka Belitung	42,55	37,31	47,95	6,40	31,10	26,11	36,56	8,60	9,47	6,67	13,28	17,60
Kepulauan Riau	28,11	21,81	35,41	12,39	38,15	28,62	48,69	13,59	9,36	5,32	15,93	28,10
DKI Jakarta	11,48	8,32	15,65	16,16	30,12	25,36	35,35	8,48	14,09	10,92	18,01	12,78
Jawa Barat	31,50	29,06	34,04	4,03	49,57	47,03	52,11	2,62	6,54	5,60	7,62	7,84
Jawa Tengah	48,86	46,89	50,83	2,05	34,56	32,83	36,32	2,58	7,74	6,97	8,60	5,38
DI Yogyakarta	37,66	33,53	41,97	5,73	31,95	28,41	35,70	5,83	9,16	7,24	11,51	11,83
Jawa Timur	44,00	42,09	45,93	2,23	40,49	38,70	42,30	2,27	6,53	5,84	7,29	5,66
Banten	33,12	27,88	38,82	8,45	38,14	33,22	43,32	6,78	11,70	8,21	16,41	17,69
Bali	38,07	34,83	41,41	4,42	36,63	33,68	39,68	4,18	7,41	5,94	9,21	11,21
Nusa Tenggara Barat	57,76	52,43	62,91	4,65	26,51	22,36	31,12	8,45	4,24	3,04	5,88	16,88
Nusa Tenggara Timur	41,96	39,39	44,58	3,15	34,69	32,39	37,07	3,44	7,02	5,97	8,23	8,22
Kalimantan Barat	55,31	51,61	58,95	3,39	25,30	22,23	28,64	6,46	6,65	5,26	8,38	11,92
Kalimantan Tengah	35,91	31,37	40,72	6,66	36,75	32,53	41,18	6,02	8,88	7,15	10,98	10,92
Kalimantan Selatan	45,14	41,38	48,95	4,29	33,43	29,87	37,20	5,60	8,11	6,45	10,16	11,60
Kalimantan Timur	31,85	27,55	36,49	7,18	31,93	27,64	36,56	7,14	11,43	8,98	14,44	12,12
Kalimantan Utara	49,14	42,25	56,06	7,21	26,68	21,43	32,67	10,77	7,15	4,75	10,64	20,63
Sulawesi Utara	24,81	21,98	27,88	6,07	30,90	27,99	33,99	4,96	18,59	16,24	21,21	6,82
Sulawesi Tengah	25,61	22,45	29,05	6,58	43,53	39,59	47,56	4,68	12,53	10,34	15,12	9,71
Sulawesi Selatan	41,84	39,28	44,45	3,15	29,45	27,22	31,78	3,95	8,10	6,84	9,56	8,52
Sulawesi Tenggara	39,56	36,02	43,22	4,65	32,41	29,02	35,99	5,49	9,79	8,03	11,89	10,03
Gorontalo	50,09	44,47	55,72	5,75	29,84	24,53	35,74	9,62	7,69	5,48	10,71	17,13
Sulawesi Barat	48,70	43,40	54,04	5,59	29,40	25,22	33,96	7,60	7,18	5,22	9,81	16,13
Maluku	25,13	21,40	29,27	8,00	39,47	35,80	43,26	4,83	13,30	10,83	16,23	10,32
Maluku Utara	38,08	33,57	42,80	6,20	34,00	29,39	38,93	7,18	12,56	10,06	15,57	11,15
Papua Barat	42,77	32,59	53,61	12,72	30,28	23,16	38,49	12,99	11,22	7,48	16,50	20,25
Papua Barat Daya	35,13	28,90	41,92	9,50	29,54	24,58	35,03	9,05	13,59	9,62	18,85	17,21
Papua	28,86	23,44	34,96	10,22	27,35	21,51	34,08	11,76	16,12	12,00	21,32	14,68
Papua Selatan	41,31	31,85	51,45	12,26	30,29	21,12	41,36	17,22	9,82	5,43	17,10	29,42
Papua Tengah	51,72	44,73	58,64	6,91	37,36	30,96	44,24	9,12	4,98	2,85	8,56	28,14
Papua Pegunungan	45,16	39,95	50,49	5,97	45,82	40,54	51,19	5,95	3,98	2,22	7,05	29,51
Indonesia	40,22	39,45	40,99	0,98	37,76	37,02	38,50	1,00	8,37	8,03	8,73	2,14

Lanjutan Tabel 5.14

Provinsi	SMA/SMK Sederajat				Pendidikan Tinggi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	12,34	10,36	14,63	8,80	5,33	4,19	6,76	12,20
Sumatera Utara	16,79	14,58	19,26	7,11	5,05	3,88	6,54	13,28
Sumatera Barat	13,15	11,31	15,23	7,60	4,67	3,67	5,93	12,25
Riau	13,60	11,38	16,17	8,98	4,87	3,26	7,21	20,28
Jambi	10,68	8,69	13,07	10,43	3,43	2,20	5,31	22,47
Sumatera Selatan	6,97	5,71	8,49	10,14	2,81	1,86	4,23	20,93
Bengkulu	10,32	8,61	12,34	9,19	6,02	4,50	8,00	14,66
Lampung	6,35	5,06	7,94	11,49	2,82	1,90	4,16	19,96
Kep. Bangka Belitung	14,13	11,39	17,39	10,81	2,76	1,62	4,66	27,01
Kepulauan Riau	18,74	12,03	28,01	21,68	5,64	2,61	11,76	38,61
DKI Jakarta	29,66	25,03	34,74	8,38	14,64	11,18	18,95	13,48
Jawa Barat	8,24	7,07	9,60	7,80	4,16	3,28	5,25	11,96
Jawa Tengah	6,50	5,79	7,28	5,84	2,34	1,92	2,86	10,27
DI Yogyakarta	15,46	12,78	18,58	9,55	5,78	4,21	7,87	15,95
Jawa Timur	6,13	5,42	6,92	6,24	2,86	2,25	3,63	12,20
Banten	11,76	9,35	14,69	11,54	5,27	3,38	8,14	22,50
Bali	11,23	9,40	13,36	8,98	6,67	5,46	8,12	10,11
Nusa Tenggara Barat	7,56	5,17	10,92	19,13	3,94	2,93	5,29	15,06
Nusa Tenggara Timur	10,74	9,44	12,19	6,51	5,59	4,68	6,66	9,00
Kalimantan Barat	8,79	7,15	10,76	10,45	3,95	2,86	5,45	16,50
Kalimantan Tengah	14,12	11,43	17,31	10,60	4,34	3,19	5,89	15,68
Kalimantan Selatan	10,27	8,23	12,76	11,20	3,04	2,20	4,21	16,59
Kalimantan Timur	20,22	17,01	23,85	8,63	4,57	3,05	6,79	20,44
Kalimantan Utara	14,01	10,02	19,24	16,67	3,03	1,59	5,69	32,58
Sulawesi Utara	20,06	17,67	22,70	6,39	5,62	4,43	7,11	12,07
Sulawesi Tengah	12,46	10,14	15,21	10,35	5,87	4,37	7,84	14,95
Sulawesi Selatan	13,68	11,97	15,59	6,74	6,94	5,72	8,39	9,78
Sulawesi Tenggara	12,74	10,63	15,20	9,14	5,50	3,99	7,53	16,24
Gorontalo	8,16	5,98	11,05	15,68	4,21	2,69	6,55	22,74
Sulawesi Barat	10,32	7,39	14,25	16,79	4,39	2,95	6,49	20,14
Maluku	18,15	15,28	21,41	8,62	3,96	2,78	5,61	17,97
Maluku Utara	10,36	8,09	13,18	12,44	5,01	3,43	7,25	19,12
Papua Barat	11,19	7,64	16,11	19,07	4,54	2,33	8,66	33,62
Papua Barat Daya	16,98	11,76	23,90	18,16	4,75	2,65	8,37	29,38
Papua	16,76	12,96	21,40	12,82	10,92	7,00	16,65	22,19
Papua Selatan	13,30	5,76	27,81	40,73	NA	NA	NA	53,43
Papua Tengah	4,57	2,85	7,25	23,81	1,37	0,55	3,35	46,01
Papua Pegunungan	2,47	1,05	5,70	43,37	2,56	1,01	6,36	47,20
Indonesia	9,59	9,22	9,98	2,04	4,06	3,78	4,35	3,60

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.15 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2025

Provinsi	Pertanian				Industri Pengolahan				Perdagangan Besar dan Eceran			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	58,39	54,85	61,84	3,06	9,32	6,99	12,33	14,50	13,26	11,24	15,57	8,33
Sumatera Utara	49,36	46,56	52,16	2,90	6,03	4,91	7,38	10,39	18,18	15,91	20,69	6,70
Sumatera Barat	61,34	58,65	63,96	2,21	6,10	4,94	7,52	10,72	16,41	14,39	18,64	6,59
Riau	51,48	47,59	55,35	3,85	7,70	5,86	10,04	13,74	17,08	14,30	20,28	8,92
Jambi	69,14	65,68	72,39	2,48	4,18	2,91	5,98	18,39	10,94	8,72	13,64	11,41
Sumatera Selatan	64,09	61,00	67,06	2,42	5,47	3,99	7,45	15,97	12,20	10,19	14,56	9,11
Bengkulu	67,45	63,90	70,81	2,62	5,36	3,88	7,37	16,34	12,28	10,23	14,67	9,20
Lampung	67,42	64,00	70,67	2,53	5,46	4,26	6,97	12,56	13,20	10,90	15,90	9,64
Kep. Bangka Belitung	44,76	39,73	49,89	5,81	12,42	9,44	16,16	13,73	17,45	13,57	22,16	12,53
Kepulauan Riau	18,05	13,81	23,26	13,33	13,66	9,24	19,73	19,42	15,37	10,65	21,67	18,17
DKI Jakarta	NA	NA	NA	65,36	13,45	10,10	17,70	14,32	24,07	19,92	28,77	9,39
Jawa Barat	36,88	34,50	39,33	3,34	10,48	9,07	12,07	7,29	20,83	18,84	22,98	5,07
Jawa Tengah	56,63	54,69	58,56	1,75	11,26	10,12	12,53	5,45	14,16	13,05	15,36	4,16
DI Yogyakarta	47,41	42,56	52,31	5,27	17,59	14,44	21,26	9,88	15,78	13,01	19,01	9,68
Jawa Timur	58,83	56,98	60,66	1,60	8,31	7,42	9,30	5,76	14,46	13,26	15,74	4,38
Banten	36,55	32,16	41,18	6,31	9,33	6,74	12,77	16,34	15,32	11,90	19,51	12,62
Bali	44,67	41,46	47,93	3,70	18,49	16,22	21,01	6,61	18,18	15,77	20,85	7,12
Nusa Tenggara Barat	58,04	53,30	62,65	4,12	9,01	6,53	12,31	16,17	18,09	14,50	22,32	11,02
Nusa Tenggara Timur	67,36	64,97	69,65	1,77	14,51	12,79	16,43	6,41	10,44	9,02	12,04	7,36
Kalimantan Barat	67,37	63,84	70,72	2,61	4,70	3,19	6,88	19,61	8,98	7,35	10,92	10,12
Kalimantan Tengah	58,89	54,50	63,13	3,75	7,43	5,57	9,84	14,53	12,97	10,25	16,27	11,79
Kalimantan Selatan	48,18	44,67	51,71	3,73	7,09	5,43	9,21	13,52	16,41	13,85	19,33	8,51
Kalimantan Timur	37,73	33,36	42,32	6,07	6,81	4,81	9,55	17,51	19,83	16,36	23,83	9,60
Kalimantan Utara	57,35	49,92	64,47	6,52	6,10	3,77	9,72	24,25	17,45	12,66	23,55	15,87
Sulawesi Utara	42,04	38,97	45,17	3,77	14,02	11,81	16,57	8,64	17,71	15,24	20,49	7,55
Sulawesi Tengah	61,10	57,78	64,33	2,74	10,64	8,72	12,92	10,03	12,41	10,35	14,82	9,16
Sulawesi Selatan	60,44	57,85	62,98	2,17	7,09	5,75	8,72	10,65	16,86	14,89	19,03	6,26
Sulawesi Tenggara	60,01	56,80	63,13	2,69	8,51	6,92	10,43	10,47	17,18	14,63	20,07	8,07
Gorontalo	48,06	43,22	52,94	5,17	10,91	8,09	14,56	15,02	17,17	13,57	21,48	11,74
Sulawesi Barat	65,73	60,70	70,43	3,79	10,15	6,54	15,42	21,94	15,71	12,73	19,22	10,51
Maluku	45,13	41,28	49,04	4,39	17,31	14,61	20,39	8,50	19,25	16,01	22,97	9,22
Maluku Utara	43,71	38,94	48,60	5,65	30,73	26,22	35,65	7,85	11,61	9,06	14,75	12,44
Papua Barat	66,34	57,74	73,98	6,29	5,20	2,26	11,52	41,79	14,01	9,51	20,17	19,23
Papua Barat Daya	44,00	37,92	50,26	7,19	14,90	10,56	20,61	17,11	15,61	10,69	22,23	18,73
Papua	47,63	40,55	54,81	7,69	4,65	2,84	7,52	24,94	21,56	16,81	27,22	12,32
Papua Selatan	54,46	45,35	63,29	8,49	NA	NA	NA	68,86	20,50	13,25	30,33	21,23
Papua Tengah	85,60	81,02	89,23	2,44	1,77	0,76	4,06	42,66	5,40	3,15	9,09	27,09
Papua Pegunungan	91,62	89,88	93,09	0,89	-	-	-	NA	8,10	6,66	9,81	9,87
Indonesia	52,22	51,47	52,97	0,74	9,57	9,14	10,01	2,32	15,94	15,39	16,49	1,76

Lanjutan Tabel 5.15

Provinsi	Jasa				Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	6,98	5,41	8,97	12,92	12,05	10,00	14,45	9,39
Sumatera Utara	8,86	7,41	10,56	9,05	17,58	15,51	19,85	6,30
Sumatera Barat	3,49	2,61	4,66	14,78	12,66	11,01	14,51	7,04
Riau	6,13	4,56	8,20	14,97	17,61	14,57	21,12	9,48
Jambi	4,17	2,83	6,11	19,67	11,57	9,11	14,59	12,02
Sumatera Selatan	5,92	4,39	7,94	15,15	12,32	10,30	14,67	9,02
Bengkulu	4,43	3,24	6,04	15,91	10,47	8,59	12,71	10,00
Lampung	4,47	3,29	6,04	15,51	9,45	7,78	11,42	9,78
Kep. Bangka Belitung	6,75	5,05	8,97	14,65	18,62	15,32	22,45	9,76
Kepulauan Riau	16,73	11,12	24,41	20,16	36,19	28,24	44,96	11,89
DKI Jakarta	19,63	15,90	24,00	10,52	42,32	37,42	47,37	6,01
Jawa Barat	10,71	9,36	12,23	6,82	21,10	19,22	23,11	4,71
Jawa Tengah	5,40	4,72	6,15	6,75	12,55	11,41	13,77	4,79
DI Yogyakarta	6,44	5,02	8,22	12,62	12,78	10,47	15,51	10,03
Jawa Timur	5,40	4,73	6,16	6,73	13,00	11,87	14,22	4,60
Banten	14,72	11,58	18,53	12,01	24,09	20,20	28,45	8,74
Bali	6,04	4,70	7,74	12,71	12,62	10,98	14,46	7,02
Nusa Tenggara Barat	4,18	2,84	6,11	19,57	10,68	7,94	14,21	14,87
Nusa Tenggara Timur	2,89	2,23	3,75	13,30	4,80	3,92	5,87	10,27
Kalimantan Barat	5,57	4,28	7,21	13,30	13,38	11,29	15,79	8,56
Kalimantan Tengah	6,49	4,63	9,03	17,04	14,23	11,43	17,58	11,00
Kalimantan Selatan	9,09	7,34	11,20	10,77	19,23	16,56	22,22	7,51
Kalimantan Timur	9,53	6,64	13,50	18,14	26,10	22,05	30,60	8,36
Kalimantan Utara	4,76	2,63	8,46	29,91	14,35	10,15	19,89	17,20
Sulawesi Utara	8,19	6,76	9,90	9,75	18,04	15,74	20,58	6,84
Sulawesi Tengah	5,21	3,83	7,05	15,55	10,64	8,69	12,96	10,20
Sulawesi Selatan	5,03	3,93	6,42	12,50	10,57	9,14	12,19	7,34
Sulawesi Tenggara	3,66	2,43	5,47	20,71	10,64	8,77	12,86	9,76
Gorontalo	8,64	6,41	11,55	15,02	15,22	12,06	19,03	11,64
Sulawesi Barat	3,25	1,88	5,56	27,70	5,16	3,43	7,70	20,64
Maluku	4,29	3,02	6,08	17,88	14,01	11,44	17,05	10,20
Maluku Utara	3,45	2,18	5,40	23,13	10,50	8,38	13,09	11,39
Papua Barat	4,96	2,95	8,21	26,17	9,49	6,91	12,90	15,94
Papua Barat Daya	8,61	5,03	14,36	26,88	16,89	11,82	23,55	17,64
Papua	6,71	3,64	12,04	30,61	19,45	13,51	27,19	17,92
Papua Selatan	9,36	4,79	17,51	33,29	13,58	7,57	23,18	28,75
Papua Tengah	2,00	0,89	4,43	41,10	5,23	3,31	8,16	23,06
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	71,18	0,22	0,08	0,58	49,22
Indonesia	7,03	6,67	7,40	2,63	15,25	14,73	15,79	1,76

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.16 *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Berusaha Sendiri				Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar				Beusaha Dibantu Buruh Dibayar			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	33,52	30,40	36,79	4,87	33,13	30,16	36,23	4,68	7,24	5,79	9,02	11,31
Sumatera Utara	31,20	28,86	33,65	3,91	25,92	23,84	28,12	4,22	9,81	8,10	11,83	9,67
Sumatera Barat	34,22	31,62	36,91	3,95	32,84	30,34	35,44	3,97	6,82	5,51	8,40	10,73
Riau	32,29	28,84	35,95	5,63	16,72	13,98	19,86	8,95	16,46	13,73	19,60	9,08
Jambi	28,94	25,65	32,46	6,01	26,41	23,38	29,69	6,10	14,81	12,20	17,86	9,73
Sumatera Selatan	30,63	27,82	33,60	4,82	28,89	26,33	31,60	4,66	5,58	4,32	7,19	12,97
Bengkulu	28,08	25,17	31,18	5,46	31,91	28,86	35,13	5,02	11,07	8,88	13,73	11,12
Lampung	27,54	24,68	30,61	5,50	34,57	31,64	37,62	4,41	5,90	4,39	7,89	14,95
Kep. Bangka Belitung	40,60	35,88	45,49	6,06	22,49	18,34	27,26	10,12	5,82	3,80	8,82	21,53
Kepulauan Riau	39,45	32,62	46,72	9,18	16,47	11,45	23,10	17,95	5,97	2,89	11,94	36,40
DKI Jakarta	36,47	31,32	41,96	7,47	15,56	12,10	19,78	12,54	8,68	5,77	12,87	20,50
Jawa Barat	34,32	32,23	36,47	3,15	23,47	21,57	25,48	4,25	4,59	3,87	5,44	8,68
Jawa Tengah	32,71	31,00	34,48	2,72	28,60	27,10	30,15	2,72	4,31	3,70	5,01	7,73
DI Yogyakarta	28,19	25,08	31,53	5,84	35,04	31,78	38,45	4,86	4,11	2,71	6,20	21,15
Jawa Timur	30,51	28,92	32,15	2,71	26,91	25,44	28,42	2,83	4,73	4,03	5,55	8,14
Banten	29,59	25,75	33,74	6,90	20,86	17,48	24,69	8,81	5,47	3,44	8,57	23,31
Bali	37,31	34,08	40,66	4,51	23,77	21,53	26,17	4,98	4,54	3,48	5,89	13,45
Nusa Tenggara Barat	37,08	31,54	42,97	7,90	28,95	25,34	32,85	6,63	1,55	0,95	2,54	25,13
Nusa Tenggara Timur	33,41	31,29	35,59	3,29	40,22	38,26	42,21	2,51	1,17	0,82	1,66	17,97
Kalimantan Barat	34,76	31,55	38,13	4,83	27,56	24,81	30,49	5,26	6,75	5,35	8,48	11,75
Kalimantan Tengah	36,96	32,85	41,27	5,82	24,24	20,88	27,94	7,43	7,52	5,56	10,10	15,26
Kalimantan Selatan	42,23	38,83	45,72	4,17	24,26	21,66	27,07	5,69	5,24	4,02	6,81	13,47
Kalimantan Timur	38,99	34,38	43,81	6,19	23,68	20,09	27,69	8,19	7,61	5,72	10,05	14,41
Kalimantan Utara	32,50	26,95	38,60	9,18	27,26	22,49	32,63	9,51	8,57	5,54	13,03	21,89
Sulawesi Utara	39,44	36,53	42,42	3,81	22,18	19,86	24,67	5,54	5,07	3,98	6,45	12,34
Sulawesi Tengah	30,00	27,01	33,16	5,24	35,28	32,12	38,58	4,67	6,98	5,43	8,95	12,77
Sulawesi Selatan	36,72	34,20	39,31	3,56	30,88	28,91	32,92	3,32	4,34	3,44	5,45	11,71
Sulawesi Tenggara	40,18	36,60	43,88	4,63	34,43	31,64	37,33	4,22	3,59	2,56	5,02	17,26
Gorontalo	34,13	29,47	39,11	7,23	30,46	26,21	35,06	7,43	2,05	1,15	3,63	29,38
Sulawesi Barat	32,93	28,14	38,09	7,73	40,21	35,67	44,92	5,88	6,52	4,71	8,95	16,39
Maluku	41,77	37,67	45,98	5,09	29,93	26,55	33,54	5,96	3,29	2,22	4,86	20,03
Maluku Utara	40,61	35,96	45,44	5,97	32,29	28,21	36,65	6,68	4,74	3,13	7,12	21,01
Papua Barat	38,88	31,91	46,34	9,53	29,91	24,27	36,24	10,25	1,09	0,44	2,68	46,38
Papua Barat Daya	33,83	27,22	41,13	10,55	31,12	25,73	37,07	9,33	NA	NA	NA	81,85
Papua	36,91	30,36	43,97	9,46	29,20	23,40	35,77	10,85	2,24	0,94	5,20	43,61
Papua Selatan	44,12	32,73	56,16	13,80	32,39	23,51	42,74	15,30	NA	NA	NA	56,33
Papua Tengah	27,61	21,49	34,71	12,25	41,86	35,84	48,13	7,53	NA	NA	NA	67,58
Papua Pegunungan	18,91	14,79	23,85	12,22	49,50	44,83	54,18	4,83	–	–	–	NA
Indonesia	32,76	32,10	33,43	1,04	27,35	26,75	27,95	1,11	5,36	5,06	5,67	2,87

Lanjutan Tabel 5.16

Provinsi	Buruh/Karyawan				Pekerja Bebas				Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	7,64	6,15	9,47	11,02	9,94	8,00	12,30	10,98	8,52	7,08	10,22	9,38
Sumatera Utara	12,97	11,23	14,94	7,28	6,85	5,54	8,43	10,70	13,25	11,69	14,98	6,31
Sumatera Barat	7,32	6,01	8,89	10,01	7,16	5,97	8,56	9,19	11,66	10,21	13,27	6,69
Riau	16,60	13,68	20,00	9,69	6,36	4,82	8,36	14,08	11,57	9,34	14,24	10,77
Jambi	12,38	10,03	15,17	10,55	5,96	4,50	7,86	14,22	11,50	9,44	13,94	9,97
Sumatera Selatan	12,61	10,51	15,07	9,19	7,53	5,99	9,43	11,60	14,75	12,90	16,81	6,74
Bengkulu	8,45	6,80	10,46	11,01	5,96	4,54	7,79	13,80	14,53	12,58	16,72	7,25
Lampung	10,00	8,29	12,03	9,49	7,03	5,58	8,82	11,68	14,95	12,91	17,25	7,40
Kep. Bangka Belitung	16,54	13,51	20,09	10,13	3,10	1,93	4,93	23,91	11,44	8,98	14,48	12,21
Kepulauan Riau	23,83	17,55	31,50	14,96	3,66	1,59	8,23	42,20	10,62	6,57	16,73	23,92
DKI Jakarta	29,89	24,80	35,54	9,19	2,73	1,39	5,31	34,36	6,66	4,64	9,47	18,20
Jawa Barat	13,71	12,18	15,39	5,98	12,81	11,37	14,39	6,01	11,11	9,85	12,51	6,12
Jawa Tengah	9,84	8,86	10,92	5,32	9,26	8,14	10,50	6,49	15,28	14,16	16,46	3,84
DI Yogyakarta	10,55	8,66	12,78	9,92	4,63	3,16	6,74	19,39	17,47	15,24	19,96	6,89
Jawa Timur	9,62	8,64	10,71	5,49	12,45	11,29	13,71	4,94	15,78	14,65	16,97	3,75
Banten	21,85	17,95	26,34	9,79	10,68	8,10	13,94	13,86	11,56	9,15	14,50	11,77
Bali	10,45	8,80	12,36	8,66	6,34	5,00	8,01	12,01	17,59	15,59	19,80	6,10
Nusa Tenggara Barat	7,43	5,64	9,72	13,89	11,01	8,32	14,45	14,12	13,98	10,91	17,74	12,42
Nusa Tenggara Timur	5,46	4,59	6,48	8,82	2,40	1,80	3,19	14,65	17,34	15,65	19,18	5,18
Kalimantan Barat	9,98	8,26	12,02	9,58	4,67	3,48	6,24	14,93	16,28	13,99	18,87	7,63
Kalimantan Tengah	15,35	12,44	18,80	10,54	3,19	2,12	4,78	20,68	12,73	10,13	15,89	11,49
Kalimantan Selatan	13,11	10,92	15,68	9,24	3,18	2,22	4,54	18,27	11,97	10,17	14,05	8,25
Kalimantan Timur	13,65	10,59	17,42	12,71	4,05	2,73	5,97	19,99	12,03	9,69	14,85	10,91
Kalimantan Utara	13,35	9,37	18,67	17,64	5,07	3,04	8,32	25,70	13,24	8,55	19,96	21,71
Sulawesi Utara	14,08	12,18	16,21	7,30	8,71	7,15	10,58	9,99	10,53	8,98	12,30	8,01
Sulawesi Tengah	9,33	7,54	11,48	10,73	5,74	4,17	7,84	16,08	12,67	10,72	14,92	8,44
Sulawesi Selatan	10,34	8,64	12,34	9,09	4,24	3,28	5,48	13,13	13,48	11,94	15,18	6,12
Sulawesi Tenggara	6,65	5,19	8,47	12,49	1,35	0,76	2,39	29,21	13,79	11,79	16,07	7,90
Gorontalo	11,68	8,74	15,43	14,51	11,37	8,81	14,56	12,85	10,32	7,90	13,37	13,43
Sulawesi Barat	5,30	3,28	8,45	24,20	3,53	2,22	5,57	23,52	11,52	9,01	14,62	12,36
Maluku	7,64	5,87	9,88	13,29	2,45	1,53	3,91	24,03	14,92	12,50	17,71	8,88
Maluku Utara	6,96	5,28	9,12	13,95	2,21	1,33	3,66	25,88	13,19	10,51	16,42	11,40
Papua Barat	9,65	6,95	13,24	16,46	1,16	0,54	2,48	38,70	19,31	13,16	27,42	18,80
Papua Barat Daya	15,99	11,47	21,86	16,51	3,49	2,11	5,72	25,42	15,18	11,05	20,49	15,79
Papua	14,61	9,90	21,02	19,26	NA	NA	NA	51,39	14,73	11,15	19,21	13,91
Papua Selatan	10,28	6,05	16,92	26,34	1,95	0,92	4,11	38,32	10,27	6,98	14,86	19,33
Papua Tengah	4,26	2,61	6,87	24,68	NA	NA	NA	53,21	24,67	19,96	30,08	10,48
Papua Pegunungan	0,84	0,41	1,68	35,75	–	–	–	NA	30,75	26,52	35,34	7,34
Indonesia	11,53	11,07	12,00	2,05	9,03	8,60	9,49	2,52	13,98	13,54	14,42	1,61

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.17 *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025

Provinsi	< 35 Jam				35–40 Jam			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	59,08	55,64	62,44	2,94	12,67	10,61	15,08	8,98
Sumatera Utara	51,04	48,28	53,79	2,75	15,61	13,66	17,78	6,73
Sumatera Barat	56,04	53,18	58,86	2,58	14,45	12,66	16,45	6,69
Riau	55,87	51,99	59,67	3,52	12,91	10,51	15,77	10,37
Jambi	60,09	56,20	63,86	3,26	13,89	11,04	17,33	11,51
Sumatera Selatan	59,57	56,20	62,86	2,86	12,00	10,29	13,95	7,77
Bengkulu	58,09	54,77	61,33	2,88	13,44	11,37	15,83	8,45
Lampung	62,19	58,99	65,29	2,59	12,00	10,29	13,94	7,75
Kep. Bangka Belitung	50,88	45,97	55,77	4,93	15,93	13,14	19,18	9,65
Kepulauan Riau	43,60	33,68	54,06	12,09	13,28	8,89	19,39	19,98
DKI Jakarta	32,49	27,68	37,69	7,88	26,42	22,24	31,07	8,54
Jawa Barat	47,41	45,06	49,78	2,55	16,10	14,51	17,84	5,28
Jawa Tengah	52,40	50,66	54,15	1,70	14,20	13,05	15,43	4,28
DI Yogyakarta	55,00	50,52	59,41	4,14	10,86	8,89	13,21	10,13
Jawa Timur	50,90	49,07	52,72	1,83	14,84	13,70	16,06	4,06
Banten	42,56	37,39	47,90	6,32	17,90	13,84	22,82	12,77
Bali	53,44	50,10	56,76	3,18	15,95	13,91	18,24	6,92
Nusa Tenggara Barat	52,39	47,24	57,49	5,00	16,19	13,41	19,41	9,45
Nusa Tenggara Timur	65,84	63,39	68,20	1,87	11,89	10,56	13,37	6,02
Kalimantan Barat	65,32	61,74	68,73	2,74	11,54	9,64	13,76	9,09
Kalimantan Tengah	57,73	53,25	62,09	3,92	13,90	11,45	16,78	9,76
Kalimantan Selatan	55,02	51,22	58,76	3,50	12,89	10,51	15,71	10,27
Kalimantan Timur	45,89	41,19	50,66	5,28	15,28	11,89	19,42	12,53
Kalimantan Utara	45,38	39,58	51,30	6,62	11,77	8,52	16,04	16,18
Sulawesi Utara	50,48	47,12	53,84	3,40	14,80	12,72	17,14	7,61
Sulawesi Tengah	54,04	50,59	57,45	3,24	12,23	10,31	14,46	8,64
Sulawesi Selatan	56,43	53,68	59,15	2,48	13,79	12,25	15,48	5,97
Sulawesi Tenggara	51,57	48,20	54,93	3,33	14,05	12,14	16,21	7,37
Gorontalo	44,25	38,94	49,69	6,22	15,78	12,63	19,54	11,14
Sulawesi Barat	64,27	59,64	68,65	3,58	13,47	10,49	17,14	12,54
Maluku	53,76	49,56	57,92	3,98	13,77	11,48	16,43	9,14
Maluku Utara	57,04	52,47	61,49	4,04	9,30	7,24	11,86	12,60
Papua Barat	56,85	48,83	64,52	7,10	19,53	13,99	26,57	16,41
Papua Barat Daya	42,25	35,97	48,80	7,79	15,30	11,31	20,38	15,06
Papua	53,27	45,11	61,27	7,81	16,18	11,57	22,16	16,61
Papua Selatan	41,07	33,86	48,69	9,28	16,13	10,37	24,23	21,76
Papua Tengah	67,94	61,07	74,12	4,92	15,77	11,82	20,75	14,39
Papua Pegunungan	69,14	63,27	74,45	4,14	19,44	14,82	25,07	13,44
Indonesia	52,11	51,38	52,84	0,71	14,83	14,34	15,33	1,71

Lanjutan Tabel 5.17

Provinsi	41–48 Jam				> 48 Jam			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	11,79	9,86	14,04	9,01	16,45	14,07	19,14	7,85
Sumatera Utara	14,62	12,93	16,50	6,21	18,73	16,51	21,17	6,35
Sumatera Barat	11,60	9,93	13,51	7,86	17,91	15,86	20,17	6,14
Riau	13,20	10,64	16,27	10,86	18,02	15,21	21,22	8,51
Jambi	11,00	9,00	13,38	10,10	15,01	12,27	18,25	10,14
Sumatera Selatan	11,55	9,65	13,77	9,07	16,88	14,62	19,41	7,22
Bengkulu	12,89	10,61	15,57	9,80	15,58	13,38	18,05	7,64
Lampung	11,90	9,83	14,34	9,64	13,91	11,89	16,21	7,90
Kep. Bangka Belitung	15,36	12,43	18,83	10,61	17,83	14,49	21,74	10,35
Kepulauan Riau	17,46	12,20	24,36	17,71	25,66	17,99	35,20	17,20
DKI Jakarta	14,93	11,40	19,33	13,51	26,16	22,04	30,76	8,51
Jawa Barat	13,06	11,59	14,68	6,03	23,42	21,37	25,61	4,63
Jawa Tengah	13,28	12,23	14,40	4,15	20,12	18,75	21,57	3,58
DI Yogyakarta	12,77	10,61	15,29	9,32	21,37	17,94	25,24	8,72
Jawa Timur	13,60	12,48	14,82	4,39	20,66	19,31	22,08	3,42
Banten	18,09	14,37	22,51	11,47	21,45	17,48	26,05	10,20
Bali	11,61	9,96	13,50	7,76	18,99	16,68	21,54	6,52
Nusa Tenggara Barat	9,30	7,14	12,02	13,30	22,13	18,24	26,58	9,62
Nusa Tenggara Timur	10,66	9,33	12,16	6,77	11,61	10,25	13,13	6,33
Kalimantan Barat	10,26	8,31	12,61	10,64	12,88	10,68	15,45	9,43
Kalimantan Tengah	11,11	8,63	14,20	12,72	17,25	14,10	20,94	10,10
Kalimantan Selatan	12,11	9,97	14,64	9,81	19,98	17,39	22,84	6,95
Kalimantan Timur	12,09	9,45	15,35	12,39	26,74	22,54	31,41	8,48
Kalimantan Utara	12,29	8,93	16,69	15,99	30,56	24,56	37,30	10,68
Sulawesi Utara	18,00	15,63	20,64	7,09	16,72	14,47	19,24	7,27
Sulawesi Tengah	13,57	11,46	16,00	8,52	20,15	17,58	23,00	6,85
Sulawesi Selatan	10,71	9,29	12,32	7,21	19,07	17,04	21,28	5,66
Sulawesi Tenggara	11,13	9,25	13,32	9,30	23,25	20,32	26,46	6,73
Gorontalo	12,21	9,24	15,97	13,99	27,76	23,18	32,85	8,91
Sulawesi Barat	8,79	6,53	11,73	14,96	13,46	10,49	17,11	12,49
Maluku	10,94	8,79	13,55	11,06	21,52	17,94	25,61	9,09
Maluku Utara	10,65	8,10	13,90	13,80	23,01	19,39	27,07	8,52
Papua Barat	9,48	6,72	13,20	17,24	14,15	10,56	18,71	14,62
Papua Barat Daya	16,51	11,95	22,37	16,02	25,93	20,91	31,68	10,62
Papua	12,08	7,38	19,14	24,41	18,47	12,88	25,77	17,75
Papua Selatan	14,19	9,18	21,31	21,57	28,61	19,81	39,39	17,62
Papua Tengah	7,80	5,45	11,04	18,06	8,49	4,48	15,50	31,83
Papua Pegunungan	8,63	6,31	11,70	15,80	2,79	1,24	6,18	41,17
Indonesia	13,01	12,55	13,49	1,83	20,05	19,46	20,65	1,51

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025



BAB 6

SOSIAL EKONOMI

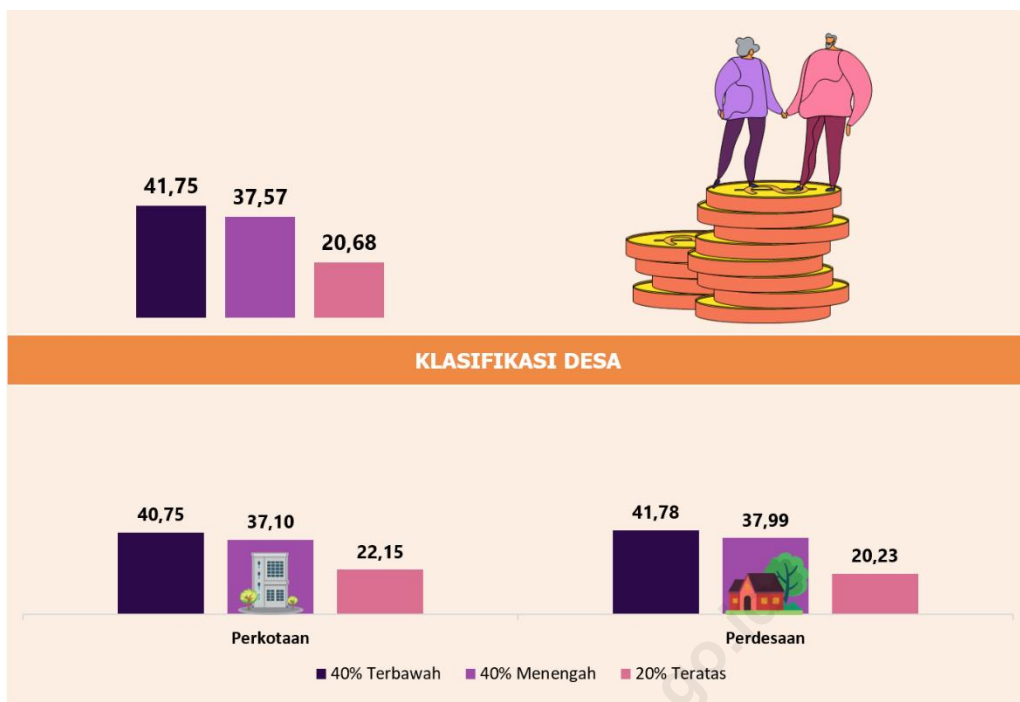


SOSIAL EKONOMI

Menghadapi masa lanjut usia (lansia) bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Perubahan biologis yang terjadi pada lansia memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi mereka (Jumita *et al.* 2012, 86–94). Menurut Anggreni dan Ayuningsasi (2023, 188–196), secara sosial, lansia kerap dipandang negatif atau dianggap tidak memberikan kontribusi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Dari segi ekonomi, lansia cenderung dipersepsikan sebagai beban daripada sebagai sumber daya. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kualitas hidup lansia, dengan tujuan agar mereka tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai aset yang memiliki potensi (Kuntjorowati 2018, 209–222). Salah satu aspek yang digunakan untuk menilai kualitas hidup lansia adalah kesejahteraan. Ketika lansia berada dalam keadaan sejahtera, mereka dapat menikmati masa tua dengan lebih baik (Mulyati *et al.* 2018, 1–8). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lansia sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kesejahteraan.

6.1 Kesejahteraan Lansia

Aspek keamanan ekonomi menjadi salah satu kerentanan yang dialami oleh lansia, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan dukungan finansial dari keluarga (Wulandari dan Irfan 2023, 102–110). Menurunnya kemampuan dan kondisi fisik pada lansia berdampak pada penurunan produktivitas kerja, yang pada gilirannya memengaruhi penghasilan mereka atau bahkan menyebabkan kehilangan pendapatan sepenuhnya. Lansia yang semakin bertambah usia tanpa kemandirian finansial berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini diperparah jika lansia memiliki masalah kesehatan yang meningkatkan biaya layanan kesehatan.



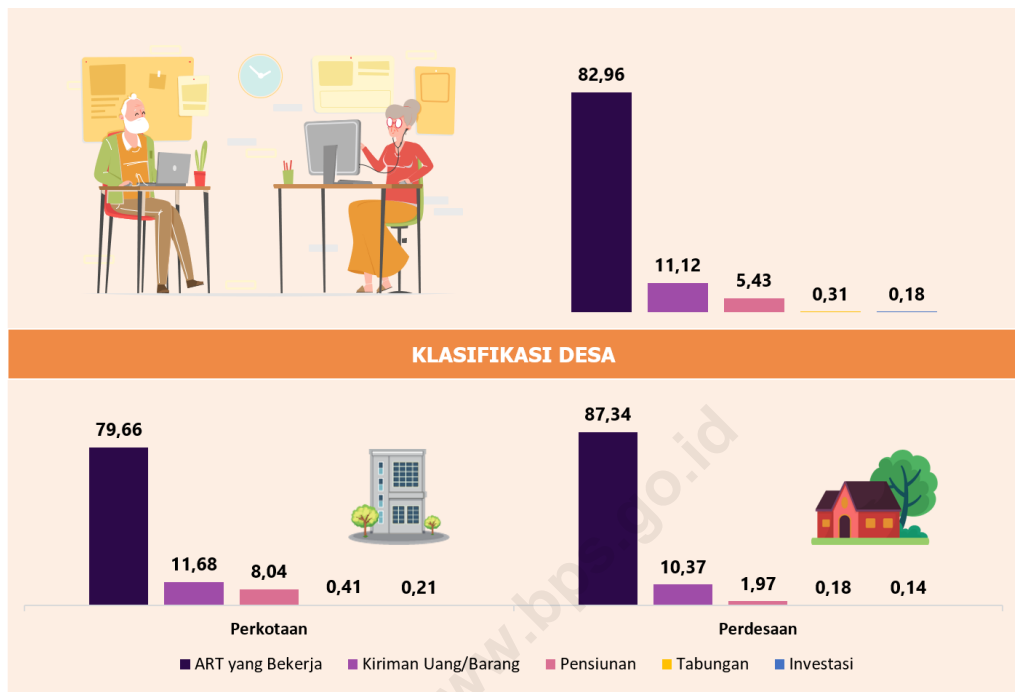
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.1 Persentase Lansia Menurut Distribusi Pengeluaran per Kapita dan Klasifikasi Desa, 2025

Gambar 6.1 menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita dari populasi lansia di Indonesia. Lansia dengan pengeluaran per kapita 40 persen terbawah mencapai 41,75 persen. Sementara itu, lansia dengan pengeluaran per kapita 20 persen teratas hanya sebesar 20,68 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa keberadaan lansia banyak ditemukan seiring semakin rendahnya tingkat kesejahteraan. Pola yang sama terjadi jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Rumah tangga lansia masih sangat bergantung pada anggota rumah tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gambar 6.2 menunjukkan bahwa sumber utama pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja, yaitu mencapai 82,96 persen. Sementara itu, sekitar 11,12 persen rumah tangga lansia mengandalkan kiriman dari pihak lain sebagai sumber pembiayaan utama. Hanya sebagian kecil rumah tangga lansia yang sumber pembiayaan utamanya berasal dari jaminan

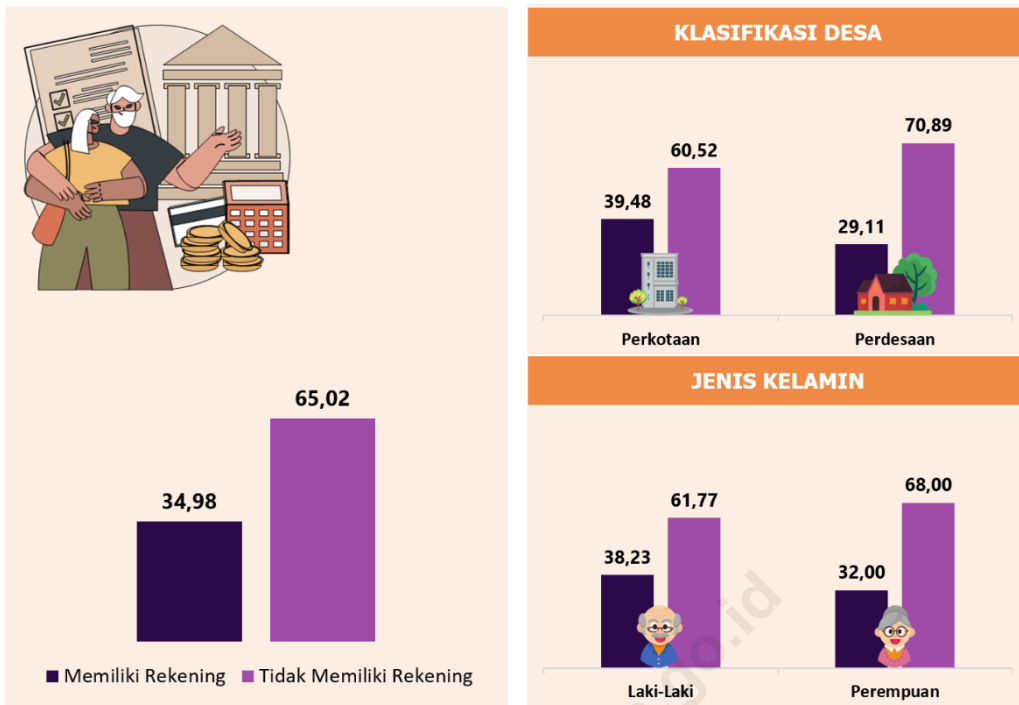
pensiun, yakni 5,43 persen. Kurang dari satu persen rumah tangga lansia mendapatkan sumber pembiayaan utama dari tabungan dan investasi, seperti deposito, royalti, saham, bunga bank, dan sejenisnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa, 2025

Kuntjorowati (2018, 209–220) menyatakan bahwa banyak lansia mengalami ketelantaran karena tidak ada keluarga yang merawat atau keluarga yang ada tidak mampu memberikan perawatan yang layak. Ketelantaran ini juga berkaitan dengan karakter masyarakat, di mana sebagian besar lansia mengandalkan keluarga untuk masa tua mereka tanpa memiliki tabungan hari tua. Padahal, kepemilikan tabungan dapat memberikan perlindungan finansial bagi lansia.



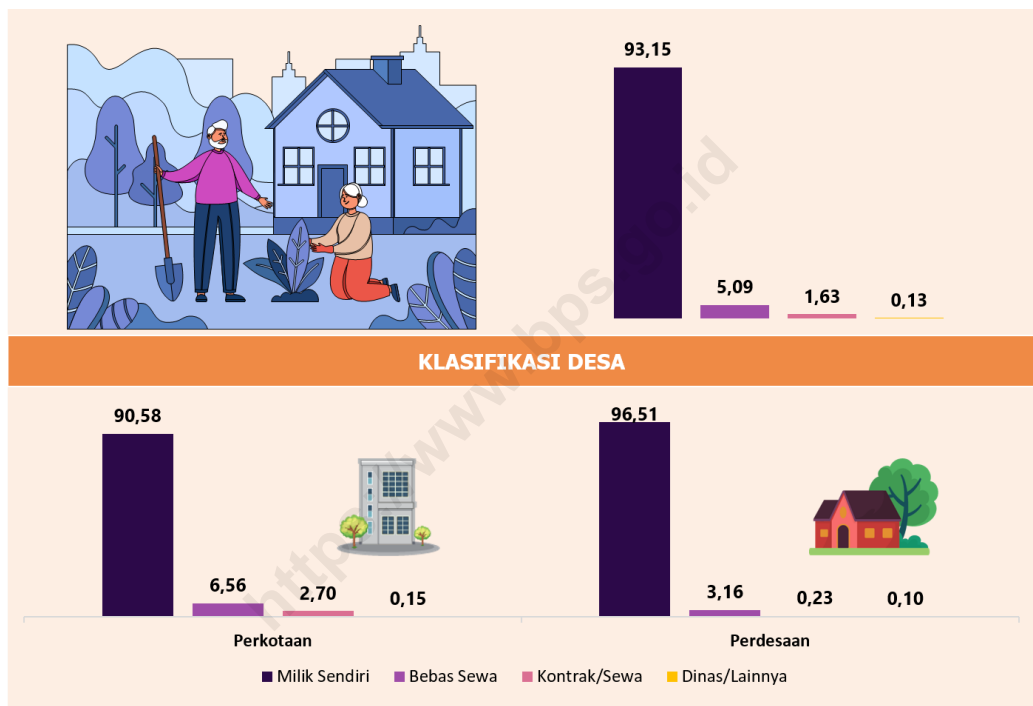
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Berdasarkan Kepemilikan Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Karakteristik, 2025

Hasil pendataan Susenas Maret 2025 menunjukkan, hanya 34,98 persen lansia yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan (Gambar 6.3). Dilihat dari klasifikasi desa, persentase lansia di perkotaan yang memiliki rekening tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia di perdesaan, yaitu 39,48 persen berbanding 29,11 persen. Berdasarkan jenis kelamin, lansia laki-laki memiliki persentase kepemilikan rekening tabungan yang lebih besar dibandingkan perempuan, yakni 38,23 persen dibandingkan 32,00 persen. Kepemilikan rekening tabungan yang lebih tinggi pada lansia laki-laki ini disebabkan oleh pandangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga (Adityandani dan Haryono 2019, 316–326).

6.2 Rumah Layak Bagi Lansia

Bertambahnya usia membuat kondisi fisik lansia semakin menurun, sehingga lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan (Kholifah 2016, 5). Kondisi ini menyebabkan lansia cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Karena itu, lingkungan rumah yang aman, sehat, dan nyaman sangat dibutuhkan bagi lansia. Cicih dan Nugroho (2021, 1–14) menyatakan bahwa menjaga lansia agar merasa aman dan nyaman di rumahnya sendiri dapat membantu mempertahankan kondisi kesehatan mereka.

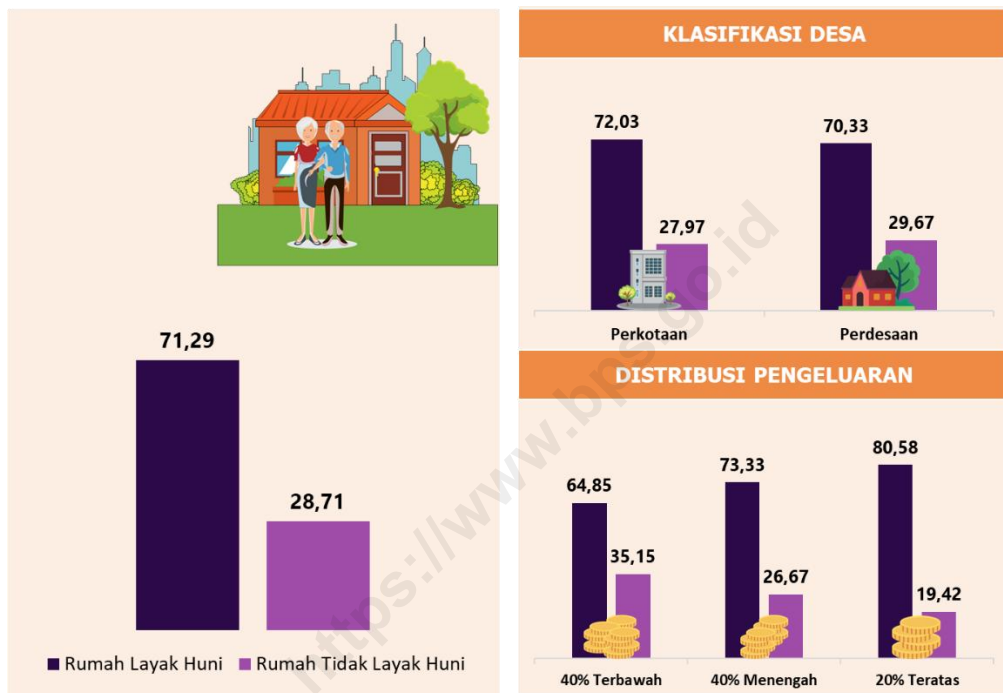


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.4 Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Klasifikasi Desa, 2025

Pada tahun 2025, tercatat bahwa 93,15 persen lansia tinggal di rumah dengan status kepemilikan sendiri (Gambar 6.4). Rumah dikategorikan sebagai milik sendiri jika menjadi hak milik lansia atau anggota rumah tangga lainnya yang tinggal bersama lansia. Selain itu, sebanyak 5,09 persen lansia tinggal di rumah bebas sewa, 1,63 persen menempati rumah kontrak/sewa, dan 0,13 persen tinggal di rumah dengan status dinas atau lainnya.

Status kepemilikan rumah bagi lansia menunjukkan pola yang sedikit berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 90,58 persen, lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan yang mencapai 96,51 persen. Sebaliknya, persentase lansia yang tinggal di rumah bebas sewa, kontrak/sewa, dan dinas/lainnya lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Gambar 6.4).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.5 Persentase Lansia yang Berdasarkan Status Kelayakan Rumah Huni Huni Menurut Karakteristik, 2025

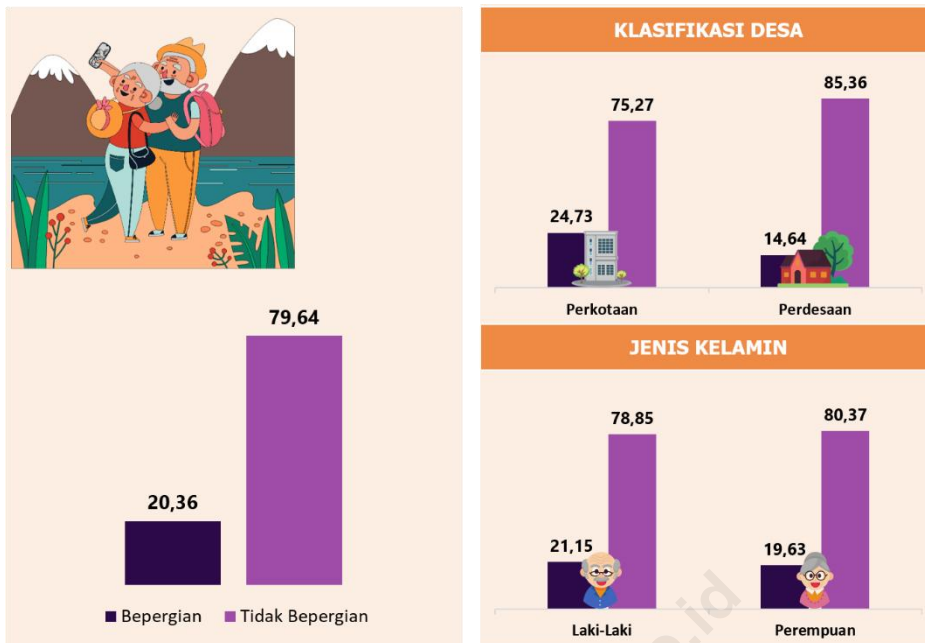
Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23). Lansia umumnya lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, oleh karena itu kondisi rumah sangat berpengaruh terhadap kondisi hidup lansia. Hal ini dikarenakan

kondisi rumah yang layak juga menentukan kelayakan hidup lansia (Djamhari dkk. 2021, 37).

Gambar 6.5 menunjukkan bahwa sekitar 71,29 persen lansia tinggal di rumah layak huni (Gambar 6.5). Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan klasifikasi desa, persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah layak huni lebih tinggi dibandingkan lansia di perdesaan (72,03 persen berbanding 70,33 persen). Semakin sejahtera seseorang, maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Seperti yang terlihat pada Gambar 6.5, sebesar 80,58 persen lansia dengan pengeluaran per kapita 20 persen teratas tinggal di rumah layak huni. Sementara itu, lansia dengan pengeluaran per kapita 40 persen terbawah yang tinggal di rumah layak huni persentasenya hanya sebesar 64,85 persen.

6.3 Kehidupan Sosial Lansia

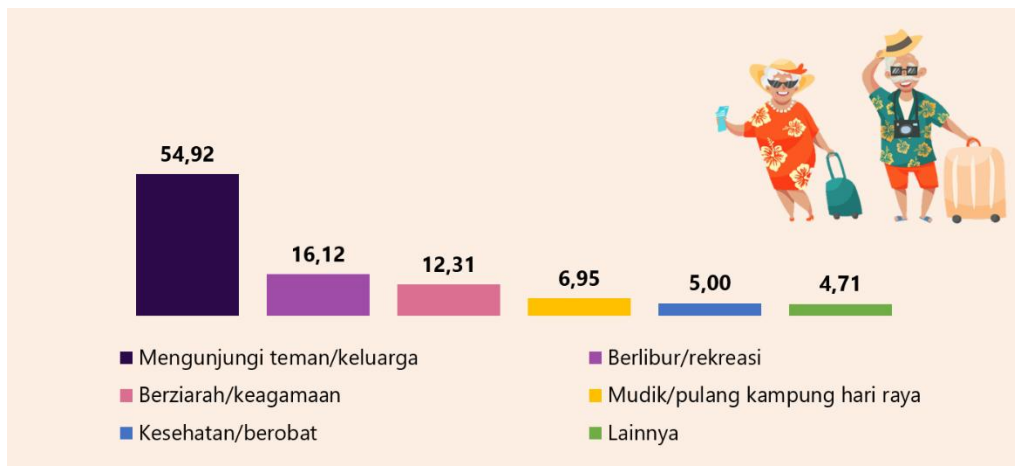
Biasanya seseorang tidak bisa melakukan kegiatan yang dulu diminati, seperti bepergian atau berwisata, jika telah memasuki masa lansia. Keterbatasan kondisi fisik dan finansial menjadi salah satu penyebab mengapa hal tersebut sulit dilakukan oleh lansia. Padahal, melakukan perjalanan wisata memiliki banyak manfaat yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental lansia (Maharani 2018). Utami (2018, 420–427) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa bepergian atau berwisata dapat menjadi solusi untuk menghilangkan kejenuhan bagi lansia karena memberikan efek relaksasi yang akan berdampak terhadap kualitas hidup lansia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.6 Persentase Lansia Berdasarkan Status Bepergian Menurut Karakteristik, 2025

Tahun 2025, hanya sekitar 20,36 persen lansia yang pernah melakukan kegiatan bepergian (Gambar 6.6). Semakin bertambahnya usia seseorang, maka kendala yang ditemui pada saat bepergian juga akan semakin banyak dan terkadang semakin rumit (Isnutomo 2012, 119–138). Kendala tersebut menyebabkan lansia tidak ingin atau belum pernah bepergian ketika sudah menginjak usia lanjut. Apabila dilihat menurut klasifikasi desa, persentase lansia yang bepergian lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (24,73 persen berbanding 14,64 persen). Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang bepergian lebih besar dibanding perempuan (21,15 persen berbanding 19,63 persen).



Catatan: *)Lainnya adalah maksud dan tujuan bepergian untuk profesi/bisnis; misi/pertukaran/kongres/ seminar; training/pendidikan/pelatihan; olahraga/kesenian; belanja/shopping dan alasan-alasan lainnya

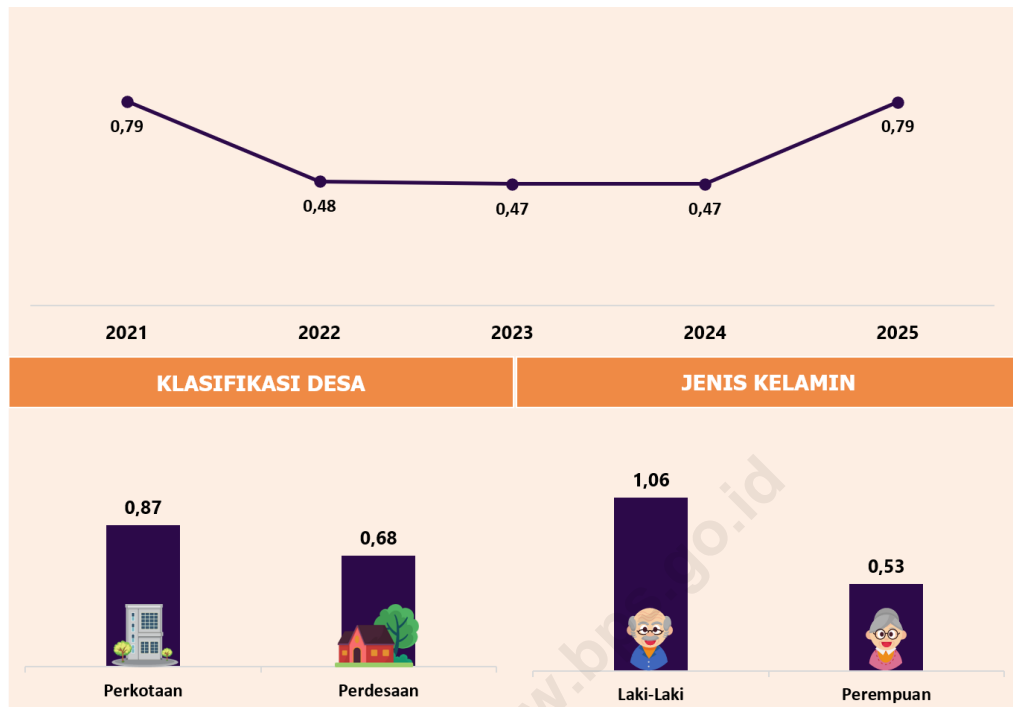
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.7 Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Tujuan Utama Bepergian, 2025

Analisis lebih lanjut berdasarkan tujuan utama bepergian, seperti yang terlihat pada Gambar 6.7, terlihat bahwa sebagian besar lansia yang bepergian memiliki tujuan untuk mengunjungi teman/keluarga (54,92 persen) dan berlibur atau rekreasi (16,12 persen). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ravularparthy, *et al.* dalam Rahmawati (2017, 76) dimana dikemukakan bahwa dengan melakukan kegiatan bepergian penduduk lansia bisa bertemu dengan teman atau keluarga yang dapat meningkatkan hubungan sosial mereka dan bila melakukan bepergian untuk tujuan wisata dapat menghilangkan kejenuhan dan menurunkan tingkat stres pada lansia.

Isu sosial yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama yang terjadi pada lansia, adalah masalah kriminalitas atau tindak kejahatan. Proses penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi fisik dan psikis membuat lansia menjadi lebih rentan terhadap berbagai ancaman. Selain lebih mudah terkena penyakit, lansia juga sering menjadi sasaran pelecehan dan eksploitasi, baik secara fisik maupun emosional (Julianti 2017, 67–79). Kejahatan terhadap lansia, seperti

penipuan atau kekerasan, seringkali terjadi karena mereka dianggap lebih lemah dan mudah dimanipulasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.8 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik, 2025

Lansia yang menjadi korban kejahatan cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (Gambar 6.8). Susenas Maret 2025 mencatat sebesar 0,79 persen lansia pernah menjadi korban kejahatan, meningkat sekitar 0,32 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024. Meskipun lansia lebih jarang mengalami tindak kejahatan dibandingkan kelompok penduduk yang lebih muda (Lindesay 1996, 199—204), akan tetapi setiap tindak kejahatan perlu menjadi perhatian terlebih kejahatan terhadap lansia. Namun demikian, masih ditemukan adanya 0,87 persen lansia di perkotaan yang menjadi korban kejahatan. Selain itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat 1,06 persen lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan.

Tabel 6.1 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025

Karakteristik	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	41,75	37,57	20,68	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	40,76	38,39	20,85	100,00
Perempuan	42,66	36,82	20,52	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	38,60	39,28	22,12	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	45,36	35,76	18,89	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	53,18	30,92	15,89	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	40,73	37,98	21,29	100,00
Disabilitas	50,23	34,18	15,59	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	40,75	37,10	22,15	100,00
Perdesaan	41,78	37,99	20,23	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Karakteristik dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2025

Karakteristik	Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga					Jumlah
	ART yang Bekerja	Kiriman Uang/ Barang	Investasi	Tabungan	Pensiunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	82,96	11,12	0,18	0,31	5,43	100,00
Distribusi Pengeluaran						
20% Teratas	72,26	11,08	0,38	0,55	15,74	100,00
40% Menengah	84,20	11,03	0,17	0,33	4,27	100,00
40% Terbawah	87,34	11,22	0,09	0,17	1,18	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	79,66	11,68	0,21	0,41	8,04	100,00
Perdesaan	87,34	10,37	0,14	0,18	1,97	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.3 Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	39,48	29,11	34,98
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	43,15	31,87	38,23
Perempuan	36,14	26,56	32,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	41,80	30,99	37,17
Lansia Madya (70–79 tahun)	36,46	27,04	32,35
Lansia Tua (80+ tahun)	31,67	22,73	27,50
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	40,83	29,89	36,10
Disabilitas	27,97	22,79	25,66
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	69,05	41,36	61,02
40% Menengah	38,42	29,18	33,12
40% Terbawah	24,38	23,12	23,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.4 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2025

Karakteristik	Sumber Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati				Jumlah
	Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	93,15	1,63	5,09	0,13	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	93,75	1,69	4,40	0,15	100,00
Perempuan	92,60	1,57	5,72	0,11	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	93,15	1,92	4,79	0,14	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	93,26	1,23	5,42	0,10	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	92,84	0,80	6,21	0,14	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	93,36	1,61	4,90	0,13	100,00
Disabilitas	91,43	1,80	6,63	0,14	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	92,89	1,89	4,95	0,27	100,00
40% Menengah	92,52	2,08	5,28	0,12	100,00
40% Terbawah	93,85	1,09	4,98	0,08	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	90,58	2,70	6,56	0,15	100,00
Perdesaan	96,51	0,23	3,16	0,10	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2025

Tabel 6.5 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	72,03	70,33	71,29
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	71,95	70,57	71,35
Perempuan	72,10	70,10	71,24
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	72,14	70,90	71,61
Lansia Madya (70–79 tahun)	71,78	69,40	70,74
Lansia Tua (80+ tahun)	71,99	69,31	70,74
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	72,36	70,56	71,58
Disabilitas	69,14	68,48	68,85
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	82,11	79,37	80,58
40% Menengah	73,36	71,97	73,33
40% Terbawah	65,33	64,46	64,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.6 Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	24,73	14,64	20,36
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	25,47	15,55	21,15
Perempuan	24,06	13,80	19,63
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	28,50	17,11	23,62
Lansia Madya (70–79 tahun)	19,57	12,09	16,31
Lansia Tua (80+ tahun)	12,88	5,76	9,56
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	26,35	15,44	21,63
Disabilitas	10,89	8,20	9,69
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	49,10	27,48	42,20
40% Menengah	24,45	15,16	20,19
40% Terbawah	11,75	7,96	9,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.7 Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Maksud Utama Bepergian, 2025

Karakteristik	Maksud Utama Bepergian		
	Mengunjungi teman/ keluarga	Berlibur/rekreasi	Berziarah/ keagamaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	54,92	16,12	12,31
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	54,82	15,03	11,37
Perempuan	55,01	17,19	13,24
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	53,93	16,42	12,09
Lansia Madya (70–79 tahun)	57,04	15,48	13,55
Lansia Tua (80+ tahun)	60,92	14,11	9,19
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	55,10	16,49	12,50
Disabilitas	51,56	9,18	8,69
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	49,61	20,97	10,16
40% Menengah	57,12	13,64	13,53
40% Terbawah	62,23	10,28	14,65
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	52,97	18,75	11,08
Perdesaan	59,20	10,31	15,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lanjutan Tabel 6.7

Karakteristik	Maksud Utama Bepergian		
	Mudik/pulang kampung hari raya	Kesehatan/berobat	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)
Total	6,95	5,00	4,71
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	7,97	5,18	5,63
Perempuan	5,93	4,82	3,80
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	7,93	4,47	5,15
Lansia Madya (70–79 tahun)	4,21	6,23	3,49
Lansia Tua (80+ tahun)	4,47	7,73	3,58
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	6,96	4,21	4,74
Disabilitas	6,77	19,71	4,10
Distribusi Pengeluaran			
20 Persen Teratas	9,46	4,51	5,28
40 Persen Menengah	6,15	5,30	4,26
40 Persen Terbawah	3,02	5,50	4,32
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	9,38	3,49	4,33
Perdesaan	1,58	8,34	5,54

Catatan: *)Lainnya adalah maksud dan tujuan bepergian untuk profesi/bisnis; misi/pertukaran/kongres/ seminar; training/pendidikan/pelatihan; olahraga/kesenian; belanja/shopping dan alasan-alasan lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.8 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,87	0,68	0,79
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	1,13	0,98	1,06
Perempuan	0,63	0,41	0,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.9 Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,94	40,97	26,09	100,00
Sumatera Utara	31,61	42,62	25,77	100,00
Sumatera Barat	35,67	38,97	25,35	100,00
Riau	29,04	41,86	29,10	100,00
Jambi	37,72	39,11	23,17	100,00
Sumatera Selatan	32,40	42,40	25,20	100,00
Bengkulu	37,94	36,96	25,10	100,00
Lampung	37,45	39,82	22,73	100,00
Kep. Bangka Belitung	36,32	42,66	21,02	100,00
Kepulauan Riau	38,79	39,86	21,34	100,00
DKI Jakarta	24,83	39,51	35,66	100,00
Jawa Barat	41,37	37,19	21,44	100,00
Jawa Tengah	41,79	38,24	19,97	100,00
DI Yogyakarta	44,95	37,64	17,42	100,00
Jawa Timur	45,31	35,97	18,73	100,00
Banten	36,74	37,99	25,27	100,00
Bali	44,72	39,49	15,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,17	39,15	22,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,53	43,11	26,35	100,00
Kalimantan Barat	32,57	43,55	23,88	100,00
Kalimantan Tengah	33,89	36,49	29,62	100,00
Kalimantan Selatan	33,86	41,93	24,21	100,00
Kalimantan Timur	36,23	37,46	26,31	100,00
Kalimantan Utara	37,84	45,41	16,75	100,00
Sulawesi Utara	33,82	41,21	24,97	100,00
Sulawesi Tengah	34,22	39,20	26,58	100,00
Sulawesi Selatan	38,57	39,56	21,87	100,00
Sulawesi Tenggara	37,25	37,92	24,83	100,00
Gorontalo	37,70	37,91	24,39	100,00
Sulawesi Barat	37,96	36,83	25,21	100,00
Maluku	31,69	44,80	23,51	100,00
Maluku Utara	35,38	41,54	23,07	100,00
Papua Barat	37,39	38,79	23,82	100,00
Papua Barat Daya	38,70	43,77	17,53 ¹	100,00
Papua	28,20	40,69	31,10	100,00
Papua Selatan	28,61 ¹	40,60	30,79 ¹	100,00
Papua Tengah	26,37	51,80	21,83	100,00
Papua Pegunungan	–	73,32	26,68 ¹	100,00
Indonesia	40,75	37,10	22,15	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.10 Persentase Lansia di Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	30,45	42,82	26,72	100,00
Sumatera Utara	31,21	38,73	30,06	100,00
Sumatera Barat	35,83	42,08	22,10	100,00
Riau	32,31	40,34	27,35	100,00
Jambi	38,63	38,10	23,27	100,00
Sumatera Selatan	36,07	42,44	21,49	100,00
Bengkulu	39,66	40,41	19,92	100,00
Lampung	41,54	36,94	21,53	100,00
Kep. Bangka Belitung	34,07	44,07	21,86	100,00
Kepulauan Riau	34,73	43,08	22,19	100,00
DKI Jakarta	—	—	—	—
Jawa Barat	41,07	39,43	19,50	100,00
Jawa Tengah	47,16	37,02	15,82	100,00
DI Yogyakarta	47,54	36,08	16,38	100,00
Jawa Timur	43,21	39,28	17,52	100,00
Banten	30,65	45,77	23,58	100,00
Bali	38,47	42,58	18,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,84	38,80	19,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,20	43,31	23,48	100,00
Kalimantan Barat	41,71	36,45	21,84	100,00
Kalimantan Tengah	38,70	38,88	22,42	100,00
Kalimantan Selatan	41,26	39,57	19,17	100,00
Kalimantan Timur	30,87	38,53	30,60	100,00
Kalimantan Utara	29,87	43,40	26,73	100,00
Sulawesi Utara	35,42	38,94	25,64	100,00
Sulawesi Tengah	33,20	43,17	23,63	100,00
Sulawesi Selatan	39,93	39,87	20,21	100,00
Sulawesi Tenggara	35,35	41,07	23,58	100,00
Gorontalo	39,83	41,07	19,10	100,00
Sulawesi Barat	37,56	42,94	19,50	100,00
Maluku	33,81	41,38	24,81	100,00
Maluku Utara	35,97	41,59	22,45	100,00
Papua Barat	27,57	44,87	27,56	100,00
Papua Barat Daya	30,71	40,75	28,53	100,00
Papua	21,52	47,81	30,67	100,00
Papua Selatan	15,59	39,60	44,81	100,00
Papua Tengah	32,33	39,34	28,33	100,00
Papua Pegunungan	37,72	28,80	33,48	100,00
Indonesia	41,78	37,99	20,23	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.11 Persentase Lansia Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	31,10	42,43	26,47	100,00
Sumatera Utara	30,44	42,22	27,34	100,00
Sumatera Barat	36,62	40,00	23,37	100,00
Riau	28,56	44,35	27,09	100,00
Jambi	36,26	37,79	25,95	100,00
Sumatera Selatan	34,99	42,98	22,03	100,00
Bengkulu	37,02	40,17	22,81	100,00
Lampung	39,22	38,81	21,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	33,14	44,11	22,75	100,00
Kepulauan Riau	38,61	41,78	19,61	100,00
DKI Jakarta	26,58	40,46	32,96	100,00
Jawa Barat	41,66	38,61	19,72	100,00
Jawa Tengah	43,64	38,13	18,23	100,00
DI Yogyakarta	46,23	36,66	17,11	100,00
Jawa Timur	43,25	38,29	18,46	100,00
Banten	37,12	37,45	25,43	100,00
Bali	43,57	40,87	15,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,24	37,63	22,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,65	40,53	23,82	100,00
Kalimantan Barat	38,21	39,41	22,38	100,00
Kalimantan Tengah	36,39	37,73	25,88	100,00
Kalimantan Selatan	35,60	41,64	22,75	100,00
Kalimantan Timur	33,62	40,20	26,18	100,00
Kalimantan Utara	37,29	44,66	18,05	100,00
Sulawesi Utara	33,72	41,24	25,04	100,00
Sulawesi Tengah	33,55	41,60	24,85	100,00
Sulawesi Selatan	39,41	40,25	20,34	100,00
Sulawesi Tenggara	36,07	39,68	24,25	100,00
Gorontalo	41,03	36,04	22,93	100,00
Sulawesi Barat	35,26	40,74	24,00	100,00
Maluku	38,24	40,42	21,35	100,00
Maluku Utara	37,01	39,51	23,48	100,00
Papua Barat	29,66	44,92	25,42	100,00
Papua Barat Daya	34,99	42,41	22,60	100,00
Papua	29,55	40,08	30,37	100,00
Papua Selatan	15,83	49,65	34,52	100,00
Papua Tengah	29,20	44,49	26,32	100,00
Papua Pegunungan	35,00	29,53	35,47	100,00
Indonesia	40,76	38,39	20,85	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.12 Persentase Lansia Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,47	42,52	25,01	100,00
Sumatera Utara	32,47	40,09	27,44	100,00
Sumatera Barat	37,56	38,93	23,51	100,00
Riau	32,22	41,24	26,54	100,00
Jambi	39,80	38,84	21,36	100,00
Sumatera Selatan	36,94	40,35	22,72	100,00
Bengkulu	42,31	38,20	19,49	100,00
Lampung	41,08	38,40	20,52	100,00
Kep. Bangka Belitung	35,37	43,49	21,14	100,00
Kepulauan Riau	44,03	34,68	21,28	100,00
DKI Jakarta	23,20	38,63	38,16	100,00
Jawa Barat	41,99	36,93	21,09	100,00
Jawa Tengah	45,46	36,59	17,95	100,00
DI Yogyakarta	47,99	36,66	15,35	100,00
Jawa Timur	45,73	37,26	17,01	100,00
Banten	38,00	37,18	24,83	100,00
Bali	45,01	40,73	14,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,30	38,34	20,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,71	41,36	22,93	100,00
Kalimantan Barat	39,94	37,18	22,88	100,00
Kalimantan Tengah	39,05	37,48	23,47	100,00
Kalimantan Selatan	40,16	39,79	20,05	100,00
Kalimantan Timur	34,96	39,86	25,18	100,00
Kalimantan Utara	31,73	47,82	20,44	100,00
Sulawesi Utara	36,32	39,58	24,11	100,00
Sulawesi Tengah	33,65	43,23	23,11	100,00
Sulawesi Selatan	41,17	37,61	21,22	100,00
Sulawesi Tenggara	37,64	38,47	23,88	100,00
Gorontalo	38,41	38,85	22,74	100,00
Sulawesi Barat	39,59	41,42	18,98	100,00
Maluku	35,35	40,92	23,73	100,00
Maluku Utara	38,54	40,27	21,19	100,00
Papua Barat	26,54	47,22	26,23	100,00
Papua Barat Daya	36,60	38,52	24,89	100,00
Papua	29,72	40,28	30,00	100,00
Papua Selatan	14,76	49,97	35,26	100,00
Papua Tengah	27,98	39,50	32,53	100,00
Papua Pegunungan	34,43	25,13	40,43	100,00
Indonesia	42,66	36,82	20,52	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.13 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	31,82	42,48	25,70	100,00
Sumatera Utara	31,52	41,08	27,39	100,00
Sumatera Barat	37,12	39,43	23,44	100,00
Riau	30,39	42,79	26,82	100,00
Jambi	38,04	38,32	23,64	100,00
Sumatera Selatan	35,99	41,63	22,38	100,00
Bengkulu	39,65	39,19	21,16	100,00
Lampung	40,15	38,61	21,25	100,00
Kep. Bangka Belitung	34,22	43,81	21,97	100,00
Kepulauan Riau	41,26	38,31	20,43	100,00
DKI Jakarta	24,83	39,51	35,66	100,00
Jawa Barat	41,83	37,75	20,42	100,00
Jawa Tengah	44,60	37,31	18,08	100,00
DI Yogyakarta	47,18	36,66	16,16	100,00
Jawa Timur	44,58	37,74	17,68	100,00
Banten	37,56	37,31	25,13	100,00
Bali	44,33	40,80	14,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,81	38,02	21,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,68	40,97	23,35	100,00
Kalimantan Barat	39,08	38,29	22,63	100,00
Kalimantan Tengah	37,61	37,62	24,78	100,00
Kalimantan Selatan	37,96	40,69	21,36	100,00
Kalimantan Timur	34,26	40,04	25,70	100,00
Kalimantan Utara	34,72	46,12	19,16	100,00
Sulawesi Utara	35,06	40,38	24,56	100,00
Sulawesi Tengah	33,60	42,42	23,98	100,00
Sulawesi Selatan	40,37	38,80	20,82	100,00
Sulawesi Tenggara	36,89	39,05	24,06	100,00
Gorontalo	39,65	37,52	22,83	100,00
Sulawesi Barat	37,54	41,10	21,36	100,00
Maluku	36,74	40,68	22,58	100,00
Maluku Utara	37,78	39,89	22,33	100,00
Papua Barat	28,22	45,98	25,80	100,00
Papua Barat Daya	35,76	40,55	23,69	100,00
Papua	29,63	40,18	30,19	100,00
Papua Selatan	15,33	49,80	34,86	100,00
Papua Tengah	28,71	42,50	28,79	100,00
Papua Pegunungan	34,80	28,00	37,20	100,00
Indonesia	41,75	37,57	20,68	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.14 Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	52,55	38,24	42,37	43,63	43,03
Sumatera Utara	39,95	36,15	42,89	34,29	38,29
Sumatera Barat	42,08	30,08	34,01	37,76	36,01
Riau	42,06	30,82	42,37	27,94	35,14
Jambi	41,44	24,49	34,92	25,47	30,17
Sumatera Selatan	36,75	21,74	32,88	22,03	27,32
Bengkulu	48,44	28,37	40,90	27,45	34,20
Lampung	38,19	28,23	33,87	29,03	31,45
Kep. Bangka Belitung	34,90	23,58	34,60	26,11	30,46
Kepulauan Riau	43,53	31,62	48,05	35,33	41,83
DKI Jakarta	61,30	–	66,97	56,03	61,30
Jawa Barat	38,26	34,72	41,51	33,50	37,41
Jawa Tengah	34,50	28,68	33,27	30,29	31,69
DI Yogyakarta	46,39	38,65	42,15	45,39	43,90
Jawa Timur	33,12	24,21	30,16	28,03	29,02
Banten	36,38	22,43	39,01	27,63	33,34
Bali	36,44	25,32	43,07	23,60	32,80
Nusa Tenggara Barat	37,09	29,77	35,52	32,05	33,64
Nusa Tenggara Timur	56,75	35,65	43,73	37,81	40,58
Kalimantan Barat	38,29	28,23	37,76	26,66	32,17
Kalimantan Tengah	49,88	32,48	47,29	31,22	39,94
Kalimantan Selatan	42,10	28,60	39,38	31,30	35,21
Kalimantan Timur	46,49	39,83	57,40	30,05	44,32
Kalimantan Utara	38,64	36,50	40,48	34,51	37,72
Sulawesi Utara	40,77	25,28	35,30	32,19	33,70
Sulawesi Tengah	45,64	28,55	35,14	32,27	33,70
Sulawesi Selatan	44,50	30,28	39,94	33,49	36,40
Sulawesi Tenggara	51,83	38,44	46,68	39,38	42,87
Gorontalo	41,02	34,17	31,78	42,27	37,31
Sulawesi Barat	49,42	32,09	37,36	34,57	35,89
Maluku	52,28	26,46	39,75	35,62	37,61
Maluku Utara	46,28	18,52	31,77	20,64	26,17
Papua Barat	59,68	44,27	54,66	42,59	49,08
Papua Barat Daya	54,86	44,63	58,19	41,13	50,04
Papua	75,33	46,10	72,44	54,37	63,63
Papua Selatan	69,56	19,00	45,33	25,96	36,30
Papua Tengah	66,78	18,30	35,11	27,26	31,99
Papua Pegunungan	52,81 ¹	21,88	35,22	7,06 ¹	25,42
Indonesia	39,48	29,11	38,23	32,00	34,98

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2025

Tabel 6.15 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal			
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas dan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	94,02	0,76 ¹	5,03	NA
Sumatera Utara	86,69	3,62	8,99	0,70 ¹
Sumatera Barat	86,22	2,13	11,53	NA
Riau	91,63	3,82	4,43	NA
Jambi	94,46	1,52 ¹	3,60	NA
Sumatera Selatan	92,85	1,61	5,49	NA
Bengkulu	96,96	1,35 ¹	1,69 ¹	–
Lampung	97,06	0,61 ¹	2,29	NA
Kep. Bangka Belitung	92,20	1,20 ¹	5,83	NA
Kepulauan Riau	89,31	6,16 ¹	4,51 ¹	NA
DKI Jakarta	77,72	8,97	13,23	NA
Jawa Barat	92,69	1,77	5,51	0,03 ¹
Jawa Tengah	94,86	0,52	4,60	NA
DI Yogyakarta	93,67	1,12	5,17	NA
Jawa Timur	94,93	0,95	4,04	NA
Banten	94,97	2,39	2,52	NA
Bali	95,97	2,04	1,99	–
Nusa Tenggara Barat	96,71	0,29 ¹	3,00	–
Nusa Tenggara Timur	97,63	0,53 ¹	1,69	NA
Kalimantan Barat	95,17	0,70 ¹	3,97	NA
Kalimantan Tengah	94,40	2,05	3,12	0,44 ¹
Kalimantan Selatan	91,17	1,70	6,45	0,68 ¹
Kalimantan Timur	92,05	2,10	5,63	NA
Kalimantan Utara	91,29	1,56 ¹	5,97	NA
Sulawesi Utara	89,51	1,28	9,02	NA
Sulawesi Tengah	95,60	NA	3,89	NA
Sulawesi Selatan	93,91	0,67 ¹	5,20	0,23 ¹
Sulawesi Tenggara	97,33	0,26 ¹	2,41	–
Gorontalo	94,96	NA	4,86	–
Sulawesi Barat	98,21	NA	1,45 ¹	NA
Maluku	90,47	1,17 ¹	8,05	NA
Maluku Utara	95,27	NA	4,48	NA
Papua Barat	91,67	2,44 ¹	4,95	0,93 ¹
Papua Barat Daya	91,73	2,08 ¹	4,37 ¹	NA
Papua	85,69	4,55 ¹	7,98	1,78 ¹
Papua Selatan	88,09	3,98 ¹	6,49 ¹	NA
Papua Tengah	92,95	3,39 ¹	3,66 ¹	–
Papua Pegunungan	97,05	NA	NA	–
Indonesia	93,15	1,63	5,09	0,13

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.16 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	79,36	69,96	74,31	72,04	73,11
Sumatera Utara	83,59	73,64	79,01	79,45	79,25
Sumatera Barat	68,94	61,89	64,69	65,97	65,37
Riau	88,06	77,47	81,35	81,72	81,54
Jambi	79,62	66,05	68,63	72,55	70,60
Sumatera Selatan	75,24	69,27	71,13	71,83	71,49
Bengkulu	55,34	57,60	59,10	54,76	56,94
Lampung	65,74	73,05	70,86	70,51	70,69
Kep. Bangka Belitung	42,79	36,82	38,63	42,37	40,45
Kepulauan Riau	57,77	31,93	51,28	57,00	54,08
DKI Jakarta	51,36	–	48,83	53,71	51,36
Jawa Barat	57,98	62,20	59,81	58,22	59,00
Jawa Tengah	75,38	72,04	73,80	73,74	73,77
DI Yogyakarta	91,19	94,75	92,88	91,87	92,34
Jawa Timur	79,46	74,07	77,82	76,25	76,98
Banten	78,34	57,80	75,11	72,59	73,86
Bali	93,38	90,21	93,09	91,67	92,34
Nusa Tenggara Barat	75,10	69,09	74,46	70,41	72,27
Nusa Tenggara Timur	72,64	62,72	65,19	64,90	65,04
Kalimantan Barat	83,78	75,56	78,50	79,05	78,78
Kalimantan Tengah	80,12	55,71	65,82	66,60	66,18
Kalimantan Selatan	77,29	56,03	65,87	66,95	66,43
Kalimantan Timur	80,80	65,40	76,91	74,53	75,77
Kalimantan Utara	78,69	78,31	77,54	79,67	78,53
Sulawesi Utara	81,27	77,30	79,25	79,65	79,46
Sulawesi Tengah	77,25	66,98	70,24	69,90	70,07
Sulawesi Selatan	82,36	78,96	79,25	81,39	80,42
Sulawesi Tenggara	88,62	78,88	83,15	81,15	82,11
Gorontalo	83,77	72,64	75,87	79,41	77,74
Sulawesi Barat	78,20	68,99	69,57	72,31	71,01
Maluku	80,38	64,15	70,48	71,78	71,16
Maluku Utara	91,34	69,72	75,70	75,67	75,68
Papua Barat	72,06	56,70	59,55	63,74	61,49
Papua Barat Daya	66,68	47,92	56,19	59,67	57,85
Papua	62,29	60,04	61,44	61,34	61,39
Papua Selatan	61,13	49,90	55,75	51,45	53,74
Papua Tengah	84,40	27,05	39,82	48,42	43,24
Papua Pegunungan	80,20	7,60 ¹	16,76	14,36 ¹	15,92
Indonesia	72,03	70,33	71,35	71,24	71,29

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.17 Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	23,32	18,31	20,44	19,57	19,98
Sumatera Utara	25,75	22,66	24,73	24,11	24,40
Sumatera Barat	30,03	24,00	24,96	28,75	26,98
Riau	30,03	11,58	19,27	18,05	18,66
Jambi	23,95	17,72	20,18	19,44	19,81
Sumatera Selatan	18,75	15,81	18,37	15,51	16,90
Bengkulu	32,37	23,16	27,49	24,17	25,84
Lampung	23,59	17,06	19,68	18,66	19,17
Kep. Bangka Belitung	29,03	24,21	26,96	27,33	27,14
Kepulauan Riau	20,46	13,15	20,14	18,65	19,41
DKI Jakarta	40,90	–	40,56	41,22	40,90
Jawa Barat	24,27	15,39	22,93	21,37	22,13
Jawa Tengah	21,33	12,99	17,98	16,71	17,31
DI Yogyakarta	25,91	13,38	22,49	21,36	21,88
Jawa Timur	23,71	10,37	19,05	16,28	17,57
Banten	26,45	14,97	24,10	23,79	23,95
Bali	16,78	9,14	16,73	12,09	14,28
Nusa Tenggara Barat	20,47	19,15	21,18	18,71	19,84
Nusa Tenggara Timur	22,28	11,96	17,94	11,24	14,37
Kalimantan Barat	23,64	11,20	15,98	16,16	16,07
Kalimantan Tengah	28,83	15,11	21,51	20,38	20,99
Kalimantan Selatan	24,23	20,87	23,42	21,67	22,51
Kalimantan Timur	21,29	12,23	18,28	18,39	18,33
Kalimantan Utara	19,92	15,98	18,14	18,33	18,23
Sulawesi Utara	26,59	27,90	26,55	27,79	27,19
Sulawesi Tengah	19,46	12,32	14,71	14,23	14,47
Sulawesi Selatan	26,93	15,82	20,65	20,57	20,60
Sulawesi Tenggara	25,96	19,45	22,27	21,00	21,61
Gorontalo	25,26	21,20	23,35	22,79	23,06
Sulawesi Barat	17,78	19,63	22,28	16,49	19,22
Maluku	21,96	14,78	18,19	17,59	17,88
Maluku Utara	18,90	10,30	14,00	11,35	12,67
Papua Barat	15,21	10,10	11,84	11,52	11,69
Papua Barat Daya	11,29 ¹	31,94	21,71	20,26	21,02
Papua	17,51	15,38	18,05	15,19	16,66
Papua Selatan	NA	NA	5,13 ¹	NA	3,73 ¹
Papua Tengah	8,05 ¹	2,86 ¹	3,84 ¹	5,05 ¹	4,32 ¹
Papua Pegunungan	–	17,81	17,34	12,83	15,77
Indonesia	24,73	14,64	21,15	19,63	20,36

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.18 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan
(1)	(2)
Aceh	0,48 ¹
Sumatera Utara	0,91
Sumatera Barat	0,83
Riau	1,11 ¹
Jambi	1,15
Sumatera Selatan	0,94
Bengkulu	1,26
Lampung	1,05
Kep. Bangka Belitung	1,62 ¹
Kepulauan Riau	NA
DKI Jakarta	0,60 ¹
Jawa Barat	1,45
Jawa Tengah	0,49
DI Yogyakarta	0,86 ¹
Jawa Timur	0,43
Banten	0,57 ¹
Bali	NA
Nusa Tenggara Barat	1,52
Nusa Tenggara Timur	0,67
Kalimantan Barat	0,38 ¹
Kalimantan Tengah	0,53 ¹
Kalimantan Selatan	0,53 ¹
Kalimantan Timur	0,20 ¹
Kalimantan Utara	1,75 ¹
Sulawesi Utara	0,93
Sulawesi Tengah	1,07
Sulawesi Selatan	0,74
Sulawesi Tenggara	0,49 ¹
Gorontalo	0,81 ¹
Sulawesi Barat	NA
Maluku	0,99 ¹
Maluku Utara	0,49 ¹
Papua Barat	1,92 ¹
Papua Barat Daya	1,26 ¹
Papua	0,90 ¹
Papua Selatan	2,42 ¹
Papua Tengah	NA
Papua Pegunungan	NA
Indonesia	0,79

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.19 Sampling Error Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025

Provinsi	40% Terbawah				40% Menengah				20% Teratas			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	32,94	28,71	37,16	6,54	40,97	36,59	45,34	5,45	26,09	22,20	29,99	7,62
Sumatera Utara	31,61	28,23	34,99	5,45	42,62	38,92	46,32	4,43	25,77	22,61	28,93	6,26
Sumatera Barat	35,67	32,04	39,30	5,19	38,97	35,22	42,73	4,92	25,35	22,28	28,43	6,19
Riau	29,04	23,92	34,17	9,01	41,86	36,33	47,39	6,74	29,10	23,95	34,25	9,03
Jambi	37,72	32,13	43,30	7,55	39,11	33,67	44,54	7,09	23,17	18,44	27,91	10,42
Sumatera Selatan	32,40	27,82	36,98	7,22	42,40	37,31	47,49	6,12	25,20	20,64	29,77	9,24
Bengkulu	37,94	31,19	44,69	9,07	36,96	30,29	43,63	9,20	25,10	18,84	31,37	12,74
Lampung	37,45	33,29	41,62	5,67	39,82	35,68	43,96	5,30	22,73	19,19	26,26	7,94
Kep. Bangka Belitung	36,32	30,85	41,79	7,68	42,66	37,17	48,14	6,56	21,02	16,91	25,14	9,99
Kepulauan Riau	38,79	32,20	45,38	8,67	39,86	32,59	47,14	9,31	21,34	15,01	27,68	15,14
DKI Jakarta	24,83	21,32	28,34	7,22	39,51	35,61	43,42	5,04	35,66	31,68	39,63	5,69
Jawa Barat	41,37	39,28	43,45	2,57	37,19	35,15	39,23	2,80	21,44	19,70	23,18	4,14
Jawa Tengah	41,79	40,16	43,42	1,99	38,24	36,65	39,83	2,12	19,97	18,71	21,22	3,21
DI Yogyakarta	44,95	41,22	48,67	4,23	37,64	34,02	41,25	4,91	17,42	14,69	20,15	8,00
Jawa Timur	45,31	43,70	46,91	1,81	35,97	34,38	37,55	2,25	18,73	17,46	19,99	3,44
Banten	36,74	32,63	40,85	5,70	37,99	33,87	42,12	5,54	25,27	21,84	28,69	6,92
Bali	44,72	41,44	47,99	3,74	39,49	36,07	42,90	4,41	15,79	13,32	18,26	7,98
Nusa Tenggara Barat	38,17	33,78	42,56	5,86	39,15	34,87	43,43	5,57	22,68	19,17	26,19	7,90
Nusa Tenggara Timur	30,53	25,19	35,87	8,92	43,11	37,31	48,92	6,87	26,35	21,52	31,19	9,36
Kalimantan Barat	32,57	27,91	37,23	7,30	43,55	38,58	48,52	5,83	23,88	19,53	28,23	9,30
Kalimantan Tengah	33,89	28,46	39,32	8,18	36,49	31,15	41,83	7,47	29,62	24,48	34,76	8,86
Kalimantan Selatan	33,86	29,64	38,08	6,36	41,93	37,56	46,31	5,32	24,21	20,73	27,69	7,33
Kalimantan Timur	36,23	31,14	41,33	7,18	37,46	32,57	42,35	6,66	26,31	21,96	30,65	8,43
Kalimantan Utara	37,84	29,41	46,27	11,36	45,41	37,07	53,74	9,37	16,75	11,51	21,99	15,95
Sulawesi Utara	33,82	29,93	37,72	5,88	41,21	37,14	45,27	5,03	24,97	21,43	28,50	7,22
Sulawesi Tengah	34,22	28,09	40,34	9,13	39,20	32,87	45,53	8,24	26,58	21,15	32,01	10,42
Sulawesi Selatan	38,57	34,94	42,20	4,80	39,56	35,93	43,19	4,68	21,87	18,67	25,08	7,48
Sulawesi Tenggara	37,25	31,66	42,84	7,66	37,92	32,10	43,75	7,84	24,83	19,56	30,09	10,83
Gorontalo	37,70	30,33	45,07	9,98	37,91	30,80	45,03	9,58	24,39	18,58	30,20	12,15
Sulawesi Barat	37,96	28,87	47,05	12,22	36,83	27,69	45,97	12,66	25,21	17,56	32,86	15,48
Maluku	31,69	25,35	38,02	10,20	44,80	37,40	52,20	8,43	23,51	16,82	30,21	14,53
Maluku Utara	35,38	28,16	42,60	10,41	41,54	33,41	49,68	9,99	23,07	16,10	30,05	15,42
Papua Barat	37,39	27,50	47,28	13,49	38,79	29,30	48,28	12,49	23,82	15,67	31,97	17,46
Papua Barat Daya	38,70	26,26	51,13	16,39	43,77	31,53	56,01	14,27	17,53	8,65	26,41	25,85
Papua	28,20	22,29	34,11	10,69	40,69	33,56	47,83	8,95	31,10	24,38	37,83	11,04
Papua Selatan	28,61	13,09	44,13	27,68	40,60	24,28	56,92	20,50	30,79	15,40	46,18	25,50
Papua Tengah	26,37	15,09	37,65	21,83	51,80	38,39	65,22	13,21	21,83	11,40	32,25	24,38
Papua Pegunungan	-	-	-	NA	73,32	50,76	95,88	15,70	26,68	4,12	49,24	43,14
Indonesia	40,75	40,00	41,50	0,94	37,10	36,35	37,85	1,04	22,15	21,49	22,80	1,51

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.20 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	52,55	48,75	56,35	3,69	38,24	35,82	40,66	3,23
Sumatera Utara	39,95	36,84	43,06	3,97	36,15	33,97	38,32	3,06
Sumatera Barat	42,08	39,00	45,15	3,73	30,08	27,72	32,43	3,99
Riau	42,06	37,39	46,72	5,66	30,82	27,68	33,97	5,20
Jambi	41,44	36,64	46,25	5,91	24,49	21,83	27,15	5,54
Sumatera Selatan	36,75	32,22	41,28	6,29	21,74	19,71	23,77	4,77
Bengkulu	48,44	42,33	54,54	6,43	28,37	25,59	31,15	5,00
Lampung	38,19	34,43	41,95	5,02	28,23	25,79	30,67	4,41
Kep. Bangka Belitung	34,90	30,45	39,35	6,50	23,58	18,77	28,38	10,39
Kepulauan Riau	43,53	37,38	49,68	7,21	31,62	26,24	37,00	8,68
DKI Jakarta	61,30	57,83	64,78	2,89	–	–	–	–
Jawa Barat	38,26	36,52	40,00	2,33	34,72	32,08	37,36	3,88
Jawa Tengah	34,50	33,22	35,79	1,90	28,68	27,20	30,15	2,63
DI Yogyakarta	46,39	43,28	49,51	3,43	38,65	34,10	43,21	6,01
Jawa Timur	33,12	31,75	34,49	2,11	24,21	22,90	25,52	2,76
Banten	36,38	32,66	40,10	5,21	22,43	17,90	26,97	10,31
Bali	36,44	33,53	39,35	4,08	25,32	22,01	28,62	6,66
Nusa Tenggara Barat	37,09	33,51	40,67	4,93	29,77	25,73	33,81	6,92
Nusa Tenggara Timur	56,75	51,88	61,61	4,37	35,65	33,85	37,45	2,58
Kalimantan Barat	38,29	34,07	42,50	5,61	28,23	25,44	31,03	5,05
Kalimantan Tengah	49,88	45,01	54,74	4,98	32,48	29,08	35,89	5,35
Kalimantan Selatan	42,10	38,36	45,85	4,54	28,60	25,70	31,51	5,19
Kalimantan Timur	46,49	42,03	50,96	4,90	39,83	34,10	45,55	7,33
Kalimantan Utara	38,64	31,20	46,08	9,82	36,50	29,38	43,62	9,95
Sulawesi Utara	40,77	37,35	44,19	4,28	25,28	22,84	27,73	4,94
Sulawesi Tengah	45,64	39,73	51,55	6,61	28,55	25,85	31,24	4,82
Sulawesi Selatan	44,50	41,31	47,68	3,65	30,28	28,54	32,02	2,94
Sulawesi Tenggara	51,83	46,64	57,02	5,11	38,44	35,66	41,22	3,69
Gorontalo	41,02	35,24	46,79	7,19	34,17	29,80	38,53	6,51
Sulawesi Barat	49,42	41,07	57,76	8,62	32,09	27,82	36,35	6,78
Maluku	52,28	45,79	58,77	6,33	26,46	23,27	29,65	6,15
Maluku Utara	46,28	39,63	52,94	7,34	18,52	15,53	21,51	8,24
Papua Barat	59,68	51,10	68,25	7,33	44,27	36,37	52,18	9,11
Papua Barat Daya	54,86	44,45	65,27	9,68	44,63	39,59	49,67	5,76
Papua	75,33	70,28	80,39	3,43	46,10	41,16	51,04	5,46
Papua Selatan	69,56	56,52	82,60	9,57	19,00	13,49	24,50	14,79
Papua Tengah	66,78	55,85	77,70	8,35	18,30	13,83	22,76	12,45
Papua Pegunungan	52,81	24,80	80,82	27,06	21,88	16,69	27,07	12,11
Indonesia	39,48	38,82	40,15	0,86	29,11	28,56	29,66	0,96

Lanjutan Tabel 6.20

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	42,37	39,37	45,36	3,60	43,63	40,82	46,43	3,28	43,03	40,96	45,10	2,45
Sumatera Utara	42,89	40,06	45,72	3,37	34,29	31,81	36,76	3,68	38,29	36,30	40,28	2,65
Sumatera Barat	34,01	31,26	36,76	4,13	37,76	35,20	40,32	3,46	36,01	34,08	37,94	2,74
Riau	42,37	38,67	46,07	4,45	27,94	24,51	31,37	6,26	35,14	32,48	37,79	3,86
Jambi	34,92	31,54	38,31	4,95	25,47	22,31	28,62	6,32	30,17	27,77	32,57	4,06
Sumatera Selatan	32,88	29,96	35,81	4,54	22,03	19,42	24,64	6,04	27,32	25,16	29,48	4,03
Bengkulu	40,90	37,17	44,62	4,65	27,45	24,07	30,83	6,27	34,20	31,48	36,93	4,07
Lampung	33,87	31,04	36,71	4,27	29,03	26,27	31,80	4,86	31,45	29,38	33,53	3,36
Kep. Bangka Belitung	34,60	30,05	39,15	6,71	26,11	21,84	30,38	8,34	30,46	27,16	33,77	5,53
Kepulauan Riau	48,05	40,95	55,15	7,53	35,33	28,59	42,08	9,74	41,83	36,51	47,16	6,50
DKI Jakarta	66,97	62,60	71,33	3,33	56,03	51,54	60,53	4,09	61,30	57,83	64,78	2,89
Jawa Barat	41,51	39,49	43,52	2,48	33,50	31,58	35,42	2,92	37,41	35,94	38,88	2,01
Jawa Tengah	33,27	31,88	34,66	2,13	30,29	29,01	31,57	2,15	31,69	30,72	32,67	1,57
DI Yogyakarta	42,15	38,50	45,81	4,43	45,39	41,98	48,79	3,83	43,90	41,32	46,48	3,00
Jawa Timur	30,16	28,83	31,49	2,25	28,03	26,81	29,26	2,23	29,02	28,06	29,98	1,69
Banten	39,01	35,15	42,87	5,05	27,63	23,85	31,42	6,99	33,34	30,26	36,42	4,72
Bali	43,07	39,99	46,16	3,65	23,60	21,03	26,18	5,56	32,80	30,56	35,04	3,49
Nusa Tenggara Barat	35,52	31,53	39,51	5,74	32,05	28,44	35,66	5,75	33,64	30,96	36,33	4,07
Nusa Tenggara Timur	43,73	41,16	46,30	3,00	37,81	35,38	40,25	3,28	40,58	38,75	42,41	2,30
Kalimantan Barat	37,76	34,64	40,88	4,22	26,66	23,69	29,63	5,69	32,17	29,80	34,54	3,76
Kalimantan Tengah	47,29	43,55	51,03	4,04	31,22	27,30	35,13	6,40	39,94	37,07	42,81	3,67
Kalimantan Selatan	39,38	36,09	42,67	4,26	31,30	28,26	34,34	4,95	35,21	32,83	37,58	3,44
Kalimantan Timur	57,40	52,94	61,86	3,97	30,05	25,74	34,36	7,32	44,32	40,79	47,85	4,07
Kalimantan Utara	40,48	34,09	46,87	8,05	34,51	27,71	41,31	10,05	37,72	32,50	42,95	7,07
Sulawesi Utara	35,30	32,37	38,24	4,24	32,19	29,33	35,06	4,54	33,70	31,50	35,90	3,33
Sulawesi Tengah	35,14	31,69	38,60	5,01	32,27	28,75	35,78	5,55	33,70	31,07	36,32	3,97
Sulawesi Selatan	39,94	37,50	42,38	3,12	33,49	31,34	35,63	3,27	36,40	34,69	38,11	2,39
Sulawesi Tenggara	46,68	43,10	50,25	3,91	39,38	35,98	42,79	4,41	42,87	40,31	45,44	3,05
Gorontalo	31,78	26,84	36,72	7,94	42,27	37,24	47,31	6,08	37,31	33,74	40,87	4,88
Sulawesi Barat	37,36	32,22	42,49	7,01	34,57	29,38	39,76	7,66	35,89	32,03	39,75	5,49
Maluku	39,75	35,28	44,21	5,73	35,62	30,82	40,43	6,89	37,61	34,09	41,13	4,78
Maluku Utara	31,77	27,68	35,86	6,57	20,64	17,02	24,25	8,93	26,17	23,20	29,15	5,80
Papua Barat	54,66	47,17	62,14	6,99	42,59	34,62	50,55	9,54	49,08	43,02	55,14	6,30
Papua Barat Daya	58,19	50,57	65,80	6,68	41,13	33,21	49,04	9,82	50,04	44,01	56,07	6,15
Papua	72,44	68,21	76,67	2,98	54,37	49,01	59,74	5,03	63,63	59,87	67,39	3,01
Papua Selatan	45,33	37,57	53,08	8,73	25,96	17,82	34,09	15,99	36,30	30,07	42,53	8,76
Papua Tengah	35,11	29,44	40,78	8,24	27,26	20,11	34,42	13,39	31,99	27,11	36,86	7,78
Papua Pegunungan	35,22	28,95	41,49	9,08	7,06	1,25	12,86	41,96	25,42	19,97	30,88	10,94
Indonesia	38,23	37,63	38,84	0,81	32,00	31,43	32,57	0,91	34,98	34,54	35,43	0,65

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.21 *Sampling Error* Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025

Provinsi	Milik Sendiri				Kontrak/Sewa			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	94,02	92,84	95,20	0,64	0,76	0,33	1,19	28,94
Sumatera Utara	86,69	85,04	88,34	0,97	3,62	2,64	4,59	13,73
Sumatera Barat	86,22	84,57	87,87	0,98	2,13	1,53	2,73	14,45
Riau	91,63	89,59	93,67	1,13	3,82	2,35	5,30	19,66
Jambi	94,46	92,94	95,99	0,83	1,52	0,63	2,42	30,06
Sumatera Selatan	92,85	91,51	94,20	0,74	1,61	0,95	2,28	20,88
Bengkulu	96,96	95,69	98,24	0,67	1,35	0,45	2,25	33,91
Lampung	97,06	96,21	97,92	0,45	0,61	0,29	0,93	26,52
Kep. Bangka Belitung	92,20	89,65	94,76	1,41	1,20	0,39	2,01	34,35
Kepulauan Riau	89,31	85,12	93,50	2,39	6,16	2,46	9,87	30,66
DKI Jakarta	77,72	74,39	81,04	2,18	8,97	6,70	11,25	12,94
Jawa Barat	92,69	91,80	93,57	0,49	1,77	1,32	2,22	12,91
Jawa Tengah	94,86	94,32	95,41	0,30	0,52	0,37	0,67	14,44
DI Yogyakarta	93,67	92,06	95,28	0,88	1,12	0,59	1,65	24,27
Jawa Timur	94,93	94,37	95,48	0,30	0,95	0,67	1,22	14,72
Banten	94,97	93,47	96,47	0,81	2,39	1,31	3,46	23,04
Bali	95,97	94,89	97,05	0,57	2,04	1,18	2,90	21,50
Nusa Tenggara Barat	96,71	95,70	97,71	0,53	0,29	0,01	0,58	49,86
Nusa Tenggara Timur	97,63	96,97	98,30	0,35	0,53	0,15	0,91	36,62
Kalimantan Barat	95,17	93,95	96,40	0,66	0,70	0,30	1,09	28,79
Kalimantan Tengah	94,40	92,88	95,91	0,82	2,05	1,14	2,95	22,53
Kalimantan Selatan	91,17	89,38	92,96	1,00	1,70	0,93	2,47	23,05
Kalimantan Timur	92,05	89,99	94,11	1,14	2,10	1,20	3,01	21,89
Kalimantan Utara	91,29	88,20	94,39	1,73	1,56	0,08	3,03	48,47
Sulawesi Utara	89,51	87,75	91,28	1,01	1,28	0,67	1,89	24,43
Sulawesi Tengah	95,60	94,26	96,94	0,72	NA	NA	NA	51,80
Sulawesi Selatan	93,91	92,85	94,96	0,57	0,67	0,18	1,15	36,87
Sulawesi Tenggara	97,33	96,42	98,25	0,48	0,26	0,06	0,47	39,57
Gorontalo	94,96	93,13	96,79	0,99	NA	NA	NA	80,56
Sulawesi Barat	98,21	97,32	99,10	0,46	NA	NA	NA	74,75
Maluku	90,47	87,36	93,58	1,75	1,17	0,27	2,07	39,38
Maluku Utara	95,27	93,09	97,45	1,17	NA	NA	NA	85,24
Papua Barat	91,67	88,78	94,57	1,61	2,44	0,68	4,21	36,84
Papua Barat Daya	91,73	87,98	95,47	2,09	2,08	0,67	3,49	34,53
Papua	85,69	81,92	89,45	2,24	4,55	1,98	7,13	28,87
Papua Selatan	88,09	82,70	93,47	3,12	3,98	0,87	7,09	39,85
Papua Tengah	92,95	89,24	96,66	2,04	3,39	0,75	6,03	39,70
Papua Pegunungan	97,05	94,04	100,00	1,58	NA	NA	NA	65,53
Indonesia	93,15	92,87	93,43	0,15	1,63	1,48	1,78	4,72

Lanjutan Tabel 6.21

Provinsi	Bebas Sewa				Dinas/Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	5,03	3,94	6,12	11,09	NA	NA	NA	53,39
Sumatera Utara	8,99	7,63	10,36	7,76	0,70	0,31	1,08	28,03
Sumatera Barat	11,53	9,97	13,08	6,89	NA	NA	NA	59,16
Riau	4,43	2,95	5,92	17,12	NA	NA	NA	58,87
Jambi	3,60	2,48	4,71	15,83	NA	NA	NA	75,01
Sumatera Selatan	5,49	4,29	6,69	11,14	NA	NA	NA	71,00
Bengkulu	1,69	0,76	2,61	27,98	–	–	–	NA
Lampung	2,29	1,49	3,09	17,83	NA	NA	NA	100,01
Kep. Bangka Belitung	5,83	3,58	8,08	19,66	NA	NA	NA	70,51
Kepulauan Riau	4,51	2,27	6,74	25,29	NA	NA	NA	79,88
DKI Jakarta	13,23	10,53	15,93	10,41	NA	NA	NA	70,75
Jawa Barat	5,51	4,73	6,29	7,19	0,03	~0	0,06	46,99
Jawa Tengah	4,60	4,07	5,13	5,90	NA	NA	NA	72,46
DI Yogyakarta	5,17	3,63	6,70	15,17	NA	NA	NA	100,00
Jawa Timur	4,04	3,55	4,52	6,10	NA	NA	NA	53,32
Banten	2,52	1,47	3,57	21,30	NA	NA	NA	80,02
Bali	1,99	1,32	2,66	17,12	–	–	–	NA
Nusa Tenggara Barat	3,00	2,04	3,96	16,31	–	–	–	NA
Nusa Tenggara Timur	1,69	1,16	2,21	15,84	NA	NA	NA	56,12
Kalimantan Barat	3,97	2,82	5,13	14,85	NA	NA	NA	57,36
Kalimantan Tengah	3,12	1,94	4,30	19,32	0,44	0,07	0,81	42,70
Kalimantan Selatan	6,45	4,88	8,02	12,41	0,68	0,13	1,22	41,05
Kalimantan Timur	5,63	3,77	7,50	16,89	NA	NA	NA	57,96
Kalimantan Utara	5,97	3,54	8,41	20,81	NA	NA	NA	60,97
Sulawesi Utara	9,02	7,34	10,69	9,47	NA	NA	NA	55,02
Sulawesi Tengah	3,89	2,64	5,14	16,39	NA	NA	NA	100,05
Sulawesi Selatan	5,20	4,25	6,14	9,28	0,23	0,08	0,38	33,46
Sulawesi Tenggara	2,41	1,51	3,30	18,91	–	–	–	NA
Gorontalo	4,86	3,05	6,68	19,06	–	–	–	NA
Sulawesi Barat	1,45	0,63	2,28	28,91	NA	NA	NA	69,71
Maluku	8,05	5,04	11,06	19,08	NA	NA	NA	65,48
Maluku Utara	4,48	2,31	6,65	24,69	NA	NA	NA	71,51
Papua Barat	4,95	2,72	7,18	22,98	0,93	0,04	1,82	49,04
Papua Barat Daya	4,37	1,35	7,39	35,23	NA	NA	NA	54,58
Papua	7,98	5,23	10,73	17,58	1,78	0,44	3,12	38,32
Papua Selatan	6,49	2,67	10,30	30,02	NA	NA	NA	99,44
Papua Tengah	3,66	0,79	6,53	40,00	–	–	–	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	100,07	–	–	–	NA
Indonesia	5,09	4,85	5,33	2,41	0,13	0,10	0,16	12,66

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.22 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	79,36	75,79	82,92	2,29	69,96	67,11	72,82	2,08
Sumatera Utara	83,59	80,86	86,32	1,67	73,64	71,29	75,99	1,63
Sumatera Barat	68,94	65,27	72,61	2,72	61,89	58,81	64,96	2,53
Riau	88,06	84,48	91,64	2,08	77,47	74,10	80,85	2,22
Jambi	79,62	75,42	83,81	2,69	66,05	62,32	69,78	2,88
Sumatera Selatan	75,24	70,96	79,52	2,90	69,27	66,41	72,12	2,11
Bengkulu	55,34	49,20	61,48	5,66	57,60	53,67	61,53	3,48
Lampung	65,74	61,82	69,66	3,04	73,05	70,08	76,02	2,08
Kep. Bangka Belitung	42,79	37,46	48,13	6,36	36,82	30,33	43,30	8,99
Kepulauan Riau	57,77	51,02	64,52	5,96	31,93	25,23	38,63	10,71
DKI Jakarta	51,36	47,31	55,40	4,02	—	—	—	—
Jawa Barat	57,98	55,88	60,07	1,85	62,20	58,85	65,56	2,75
Jawa Tengah	75,38	73,98	76,78	0,95	72,04	70,20	73,88	1,30
DI Yogyakarta	91,19	89,14	93,24	1,15	94,75	92,67	96,84	1,12
Jawa Timur	79,46	78,07	80,84	0,89	74,07	72,34	75,80	1,19
Banten	78,34	75,09	81,58	2,12	57,80	51,43	64,17	5,62
Bali	93,38	91,67	95,09	0,93	90,21	87,62	92,81	1,47
Nusa Tenggara Barat	75,10	71,16	79,04	2,68	69,09	63,84	74,34	3,88
Nusa Tenggara Timur	72,64	67,64	77,63	3,51	62,72	60,49	64,95	1,81
Kalimantan Barat	83,78	80,44	87,11	2,03	75,56	72,65	78,46	1,96
Kalimantan Tengah	80,12	75,99	84,25	2,63	55,71	51,32	60,10	4,02
Kalimantan Selatan	77,29	73,66	80,91	2,39	56,03	52,08	59,98	3,60
Kalimantan Timur	80,80	76,62	84,97	2,64	65,40	58,73	72,07	5,20
Kalimantan Utara	78,69	71,99	85,38	4,34	78,31	71,52	85,09	4,42
Sulawesi Utara	81,27	78,10	84,44	1,99	77,30	74,00	80,60	2,18
Sulawesi Tengah	77,25	72,06	82,44	3,43	66,98	63,63	70,33	2,55
Sulawesi Selatan	82,36	79,59	85,13	1,72	78,96	77,11	80,80	1,19
Sulawesi Tenggara	88,62	85,14	92,11	2,01	78,88	76,23	81,53	1,72
Gorontalo	83,77	77,69	89,85	3,70	72,64	67,63	77,65	3,52
Sulawesi Barat	78,20	70,69	85,71	4,90	68,99	64,20	73,79	3,55
Maluku	80,38	74,46	86,31	3,76	64,15	59,99	68,30	3,31
Maluku Utara	91,34	87,68	94,99	2,04	69,72	65,34	74,10	3,20
Papua Barat	72,06	62,49	81,62	6,77	56,70	48,50	64,89	7,38
Papua Barat Daya	66,68	54,32	79,05	9,46	47,92	41,54	54,30	6,79
Papua	62,29	55,38	69,19	5,66	60,04	54,14	65,95	5,02
Papua Selatan	61,13	44,77	77,49	13,65	49,90	41,65	58,15	8,43
Papua Tengah	84,40	74,57	94,23	5,94	27,05	21,63	32,47	10,22
Papua Pegunungan	80,20	45,47	100,00	22,09	7,60	2,97	12,23	31,09
Indonesia	72,03	71,30	72,75	0,51	70,33	69,64	71,02	0,50

Lanjutan Tabel 6.22

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	74,31	71,61	77,01	1,86	72,04	69,47	74,61	1,82	73,11	70,86	75,36	1,57
Sumatera Utara	79,01	76,79	81,23	1,43	79,45	77,48	81,43	1,27	79,25	77,40	81,10	1,19
Sumatera Barat	64,69	61,85	67,53	2,24	65,97	63,33	68,61	2,04	65,37	62,99	67,75	1,86
Riau	81,35	78,43	84,27	1,83	81,72	78,81	84,63	1,82	81,54	79,04	84,03	1,56
Jambi	68,63	65,31	71,94	2,46	72,55	69,29	75,80	2,29	70,60	67,72	73,48	2,08
Sumatera Selatan	71,13	68,35	73,90	1,99	71,83	69,12	74,54	1,92	71,49	69,09	73,89	1,71
Bengkulu	59,10	55,50	62,70	3,11	54,76	51,03	58,49	3,47	56,94	53,63	60,25	2,97
Lampung	70,86	68,21	73,52	1,91	70,51	67,78	73,24	1,97	70,69	68,31	73,07	1,72
Kep. Bangka Belitung	38,63	34,16	43,10	5,90	42,37	37,64	47,11	5,70	40,45	36,32	44,58	5,21
Kepulauan Riau	51,28	44,31	58,26	6,94	57,00	49,94	64,07	6,32	54,08	48,17	59,99	5,58
DKI Jakarta	48,83	44,23	53,42	4,80	53,71	49,21	58,21	4,28	51,36	47,31	55,40	4,02
Jawa Barat	59,81	57,82	61,81	1,70	58,22	56,17	60,26	1,79	59,00	57,21	60,78	1,55
Jawa Tengah	73,80	72,47	75,13	0,92	73,74	72,46	75,03	0,89	73,77	72,62	74,91	0,79
DI Yogyakarta	92,88	91,02	94,74	1,02	91,87	90,08	93,67	1,00	92,34	90,79	93,89	0,86
Jawa Timur	77,82	76,57	79,07	0,82	76,25	75,01	77,48	0,83	76,98	75,89	78,07	0,72
Banten	75,11	71,92	78,31	2,17	72,59	68,99	76,19	2,53	73,86	70,92	76,79	2,03
Bali	93,09	91,55	94,64	0,85	91,67	89,87	93,47	1,00	92,34	90,91	93,77	0,79
Nusa Tenggara Barat	74,46	70,76	78,16	2,53	70,41	66,66	74,16	2,72	72,27	69,04	75,50	2,28
Nusa Tenggara Timur	65,19	62,77	67,62	1,90	64,90	62,59	67,22	1,82	65,04	62,97	67,11	1,63
Kalimantan Barat	78,50	75,99	81,01	1,63	79,05	76,48	81,61	1,66	78,78	76,57	80,98	1,43
Kalimantan Tengah	65,82	62,35	69,30	2,69	66,60	62,78	70,42	2,93	66,18	63,01	69,35	2,44
Kalimantan Selatan	65,87	62,70	69,04	2,45	66,95	63,81	70,09	2,39	66,43	63,70	69,16	2,09
Kalimantan Timur	76,91	73,10	80,72	2,53	74,53	70,28	78,78	2,91	75,77	72,20	79,34	2,40
Kalimantan Utara	77,54	72,23	82,86	3,50	79,67	74,10	85,24	3,57	78,53	73,72	83,33	3,12
Sulawesi Utara	79,25	76,73	81,77	1,62	79,65	77,04	82,27	1,68	79,46	77,16	81,75	1,47
Sulawesi Tengah	70,24	66,92	73,57	2,42	69,90	66,48	73,33	2,50	70,07	67,24	72,90	2,06
Sulawesi Selatan	79,25	77,28	81,22	1,27	81,39	79,64	83,15	1,10	80,42	78,83	82,01	1,01
Sulawesi Tenggara	83,15	80,74	85,56	1,48	81,15	78,67	83,63	1,56	82,11	79,99	84,22	1,31
Gorontalo	75,87	71,15	80,60	3,18	79,41	75,19	83,63	2,71	77,74	73,88	81,60	2,53
Sulawesi Barat	69,57	64,72	74,43	3,56	72,31	67,33	77,29	3,51	71,01	66,92	75,11	2,94
Maluku	70,48	66,41	74,55	2,94	71,78	67,86	75,70	2,79	71,16	67,66	74,65	2,51
Maluku Utara	75,70	72,01	79,38	2,48	75,67	71,82	79,51	2,59	75,68	72,30	79,06	2,28
Papua Barat	59,55	52,43	66,67	6,10	63,74	56,16	71,33	6,07	61,49	55,23	67,75	5,19
Papua Barat Daya	56,19	48,46	63,91	7,01	59,67	51,13	68,21	7,30	57,85	50,79	64,91	6,23
Papua	61,44	56,10	66,77	4,43	61,34	55,81	66,87	4,60	61,39	56,62	66,16	3,97
Papua Selatan	55,75	47,42	64,07	7,62	51,45	41,99	60,91	9,38	53,74	45,99	61,49	7,36
Papua Tengah	39,82	34,52	45,11	6,78	48,42	41,64	55,21	7,15	43,24	37,96	48,53	6,24
Papua Pegunungan	16,76	11,50	22,01	16,01	14,36	6,38	22,34	28,35	15,92	10,32	21,52	17,94
Indonesia	71,35	70,77	71,92	0,41	71,24	70,66	71,81	0,41	71,29	70,78	71,80	0,36

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.23 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	23,32	19,46	27,17	8,43	18,31	16,15	20,46	6,00
Sumatera Utara	25,75	22,72	28,78	6,00	22,66	20,24	25,07	5,44
Sumatera Barat	30,03	26,82	33,25	5,46	24,00	21,49	26,50	5,33
Riau	30,03	24,65	35,41	9,14	11,58	9,13	14,02	10,78
Jambi	23,95	19,51	28,40	9,47	17,72	14,94	20,51	8,01
Sumatera Selatan	18,75	15,31	22,19	9,36	15,81	13,68	17,93	6,85
Bengkulu	32,37	26,23	38,52	9,68	23,16	19,83	26,48	7,33
Lampung	23,59	20,02	27,16	7,72	17,06	14,66	19,45	7,17
Kep. Bangka Belitung	29,03	24,16	33,89	8,55	24,21	18,78	29,65	11,45
Kepulauan Riau	20,46	15,27	25,64	12,94	13,15	8,47	17,83	18,17
DKI Jakarta	40,90	37,09	44,72	4,76	–	–	–	–
Jawa Barat	24,27	22,57	25,98	3,59	15,39	12,98	17,80	7,99
Jawa Tengah	21,33	20,06	22,60	3,04	12,99	11,71	14,28	5,04
DI Yogyakarta	25,91	22,96	28,87	5,83	13,38	9,98	16,78	12,96
Jawa Timur	23,71	22,31	25,10	3,00	10,37	9,31	11,43	5,22
Banten	26,45	22,83	30,07	6,98	14,97	10,51	19,44	15,20
Bali	16,78	14,23	19,33	7,75	9,14	7,00	11,28	11,95
Nusa Tenggara Barat	20,47	17,12	23,81	8,33	19,15	14,64	23,66	12,01
Nusa Tenggara Timur	22,28	17,37	27,18	11,24	11,96	10,49	13,44	6,28
Kalimantan Barat	23,64	19,63	27,66	8,66	11,20	9,05	13,35	9,79
Kalimantan Tengah	28,83	23,97	33,70	8,61	15,11	12,02	18,20	10,42
Kalimantan Selatan	24,23	20,88	27,58	7,05	20,87	17,87	23,88	7,35
Kalimantan Timur	21,29	17,45	25,14	9,21	12,23	7,77	16,69	18,61
Kalimantan Utara	19,92	14,02	25,81	15,10	15,98	10,13	21,83	18,67
Sulawesi Utara	26,59	23,27	29,91	6,37	27,90	24,74	31,06	5,78
Sulawesi Tengah	19,46	14,61	24,30	12,71	12,32	10,08	14,57	9,29
Sulawesi Selatan	26,93	23,77	30,09	5,99	15,82	14,19	17,45	5,25
Sulawesi Tenggara	25,96	20,96	30,95	9,82	19,45	16,92	21,99	6,64
Gorontalo	25,26	19,07	31,45	12,50	21,20	16,82	25,57	10,53
Sulawesi Barat	17,78	11,36	24,21	18,43	19,63	15,20	24,06	11,52
Maluku	21,96	16,49	27,42	12,71	14,78	11,58	17,98	11,05
Maluku Utara	18,90	12,51	25,28	17,24	10,30	7,22	13,38	15,24
Papua Barat	15,21	8,73	21,69	21,74	10,10	6,46	13,74	18,39
Papua Barat Daya	11,29	3,85	18,74	33,63	31,94	26,48	37,40	8,72
Papua	17,51	11,82	23,19	16,58	15,38	11,33	19,44	13,44
Papua Selatan	NA	NA	NA	54,22	NA	NA	NA	77,39
Papua Tengah	8,05	2,14	13,96	37,47	2,86	0,72	4,99	38,22
Papua Pegunungan	–	–	–	NA	17,81	12,24	23,38	15,96
Indonesia	24,73	24,08	25,39	1,35	14,64	14,15	15,13	1,72

Lanjutan Tabel 6.23

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	20,44	18,08	22,80	5,89	19,57	17,31	21,84	5,91	19,98	18,05	21,92	4,95
Sumatera Utara	24,73	22,27	27,20	5,09	24,11	21,85	26,36	4,78	24,40	22,40	26,40	4,19
Sumatera Barat	24,96	22,47	27,46	5,10	28,75	26,34	31,15	4,27	26,98	24,95	29,01	3,84
Riau	19,27	16,28	22,27	7,92	18,05	15,01	21,09	8,60	18,66	16,01	21,31	7,24
Jambi	20,18	17,41	22,96	7,01	19,44	16,58	22,31	7,52	19,81	17,43	22,19	6,12
Sumatera Selatan	18,37	16,10	20,63	6,30	15,51	13,38	17,63	6,99	16,90	15,05	18,74	5,57
Bengkulu	27,49	24,04	30,93	6,39	24,17	20,84	27,50	7,03	25,84	22,87	28,80	5,85
Lampung	19,68	17,37	21,98	5,97	18,66	16,29	21,03	6,49	19,17	17,17	21,17	5,32
Kep. Bangka Belitung	26,96	22,72	31,20	8,02	27,33	22,93	31,73	8,22	27,14	23,49	30,80	6,87
Kepulauan Riau	20,14	14,37	25,92	14,63	18,65	12,75	24,55	16,14	19,41	14,91	23,91	11,83
DKI Jakarta	40,56	36,11	45,01	5,59	41,22	36,78	45,66	5,49	40,90	37,09	44,72	4,76
Jawa Barat	22,93	21,25	24,61	3,74	21,37	19,71	23,03	3,96	22,13	20,71	23,55	3,28
Jawa Tengah	17,98	16,86	19,10	3,18	16,71	15,66	17,75	3,19	17,31	16,40	18,21	2,67
DI Yogyakarta	22,49	19,45	25,53	6,90	21,36	18,68	24,05	6,41	21,88	19,59	24,16	5,33
Jawa Timur	19,05	17,94	20,16	2,98	16,28	15,27	17,29	3,16	17,57	16,66	18,48	2,64
Banten	24,10	20,73	27,47	7,13	23,79	20,18	27,40	7,74	23,95	20,95	26,94	6,39
Bali	16,73	14,39	19,07	7,13	12,09	10,13	14,06	8,29	14,28	12,42	16,14	6,64
Nusa Tenggara Barat	21,18	17,73	24,62	8,30	18,71	15,66	21,76	8,31	19,84	17,08	22,61	7,10
Nusa Tenggara Timur	17,94	15,74	20,15	6,27	11,24	9,49	12,98	7,92	14,37	12,75	16,00	5,77
Kalimantan Barat	15,98	13,60	18,37	7,61	16,16	13,64	18,69	7,97	16,07	14,02	18,12	6,50
Kalimantan Tengah	21,51	18,58	24,44	6,95	20,38	17,02	23,75	8,43	20,99	18,25	23,74	6,67
Kalimantan Selatan	23,42	20,66	26,18	6,01	21,67	19,04	24,30	6,19	22,51	20,27	24,76	5,09
Kalimantan Timur	18,28	14,96	21,60	9,26	18,39	14,68	22,11	10,31	18,33	15,36	21,31	8,28
Kalimantan Utara	18,14	13,41	22,87	13,31	18,33	12,78	23,89	15,46	18,23	14,03	22,43	11,75
Sulawesi Utara	26,55	23,87	29,23	5,15	27,79	25,07	30,51	4,99	27,19	24,88	29,50	4,34
Sulawesi Tengah	14,71	12,04	17,38	9,26	14,23	11,60	16,87	9,45	14,47	12,33	16,61	7,55
Sulawesi Selatan	20,65	18,56	22,73	5,15	20,57	18,66	22,47	4,72	20,60	18,96	22,25	4,08
Sulawesi Tenggara	22,27	19,35	25,20	6,70	21,00	18,15	23,84	6,92	21,61	19,24	23,97	5,59
Gorontalo	23,35	18,90	27,80	9,72	22,79	18,52	27,07	9,58	23,06	19,36	26,76	8,19
Sulawesi Barat	22,28	17,41	27,14	11,14	16,49	12,40	20,57	12,64	19,22	15,49	22,96	9,92
Maluku	18,19	14,48	21,91	10,42	17,59	14,13	21,04	10,03	17,88	14,90	20,86	8,51
Maluku Utara	14,00	10,67	17,33	12,13	11,35	8,05	14,66	14,86	12,67	9,82	15,52	11,49
Papua Barat	11,84	7,59	16,08	18,29	11,52	7,34	15,71	18,54	11,69	8,46	14,92	14,09
Papua Barat Daya	21,71	16,19	27,23	12,98	20,26	14,63	25,88	14,17	21,02	16,33	25,70	11,38
Papua	18,05	13,60	22,50	12,58	15,19	11,09	19,30	13,79	16,66	12,87	20,44	11,59
Papua Selatan	5,13	0,86	9,40	42,50	NA	NA	NA	77,30	3,73	0,30	7,15	46,90
Papua Tengah	3,84	1,43	6,25	31,98	5,05	1,35	8,75	37,39	4,32	2,07	6,58	26,61
Papua Pegunungan	17,34	11,69	22,99	16,63	12,83	6,96	18,70	23,33	15,77	10,82	20,72	16,01
Indonesia	21,15	20,64	21,67	1,24	19,63	19,13	20,12	1,28	20,36	19,93	20,79	1,08

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

**Tabel 6.24 Sampling Error Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban
Kejahatan Menurut Provinsi, 2025**

Provinsi	Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,48	0,23	0,73	26,47
Sumatera Utara	0,91	0,62	1,21	16,39
Sumatera Barat	0,83	0,53	1,13	18,37
Riau	1,11	0,56	1,66	25,43
Jambi	1,15	0,66	1,64	21,63
Sumatera Selatan	0,94	0,58	1,31	19,59
Bengkulu	1,26	0,66	1,85	24,11
Lampung	1,05	0,62	1,49	21,10
Kep. Bangka Belitung	1,62	0,76	2,47	27,11
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	72,05
DKI Jakarta	0,60	0,08	1,11	43,96
Jawa Barat	1,45	1,10	1,79	12,22
Jawa Tengah	0,49	0,36	0,61	12,99
DI Yogyakarta	0,86	0,34	1,38	30,74
Jawa Timur	0,43	0,30	0,56	15,08
Banten	0,57	0,13	1,01	39,43
Bali	NA	NA	NA	64,15
Nusa Tenggara Barat	1,52	0,90	2,15	20,88
Nusa Tenggara Timur	0,67	0,41	0,94	20,04
Kalimantan Barat	0,38	0,14	0,63	32,95
Kalimantan Tengah	0,53	0,08	0,97	43,33
Kalimantan Selatan	0,53	0,16	0,91	35,59
Kalimantan Timur	0,20	0,04	0,37	41,54
Kalimantan Utara	1,75	0,27	3,24	43,13
Sulawesi Utara	0,93	0,53	1,33	21,85
Sulawesi Tengah	1,07	0,62	1,51	21,26
Sulawesi Selatan	0,74	0,39	1,08	23,94
Sulawesi Tenggara	0,49	0,14	0,84	36,22
Gorontalo	0,81	0,22	1,40	36,87
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	64,46
Maluku	0,99	0,25	1,73	38,09
Maluku Utara	0,49	0,12	0,87	38,64
Papua Barat	1,92	0,06	3,78	49,55
Papua Barat Daya	1,26	0,27	2,25	39,91
Papua	0,90	0,26	1,54	36,09
Papua Selatan	2,42	0,40	4,44	42,50
Papua Tengah	NA	NA	NA	59,66
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	56,78
Indonesia	0,79	0,71	0,87	5,24

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

BAB 7
PROGRAM
KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA



PROGRAM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Penurunan daya tahan tubuh, keterbatasan mobilitas, serta risiko penyakit kronis menjadikan lansia lebih mudah mengalami permasalahan kesehatan maupun ekonomi. Selain itu, banyak lansia menghadapi keterbatasan dalam akses pekerjaan dan penghasilan, sehingga rentan terhadap kemiskinan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, keberadaan program kesejahteraan lanjut usia menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta pemenuhan hak-hak dasar lansia. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa Program Kesejahteraan Lanjut Usia yang ada di Indonesia.

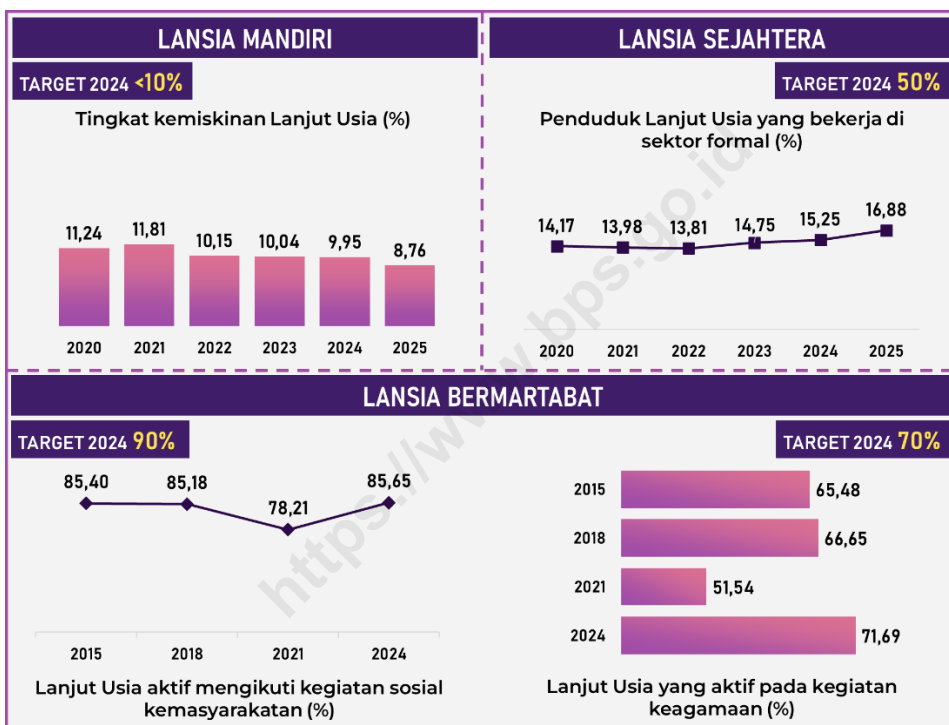
7.1 Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan hadir sebagai landasan penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi dominasi penduduk lansia pasca bonus demografi. Kehadiran Perpres ini menegaskan bahwa isu lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga pembangunan lingkungan yang ramah lansia. Dengan adanya Stranas Kelanjutusiaan, setiap Kementerian/Lembaga memiliki panduan yang jelas dalam merancang program-program yang mendukung kesejahteraan, pemberdayaan, dan perlindungan lansia. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia.

Stranas Kelanjutusiaan memiliki visi "Mewujudkan kehidupan lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat". Dalam stranas ini

tertuang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut:

- peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu
- peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia
- pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia
- penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan
- penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025
Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020–2025
Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2015, 2018, 2021, 2024

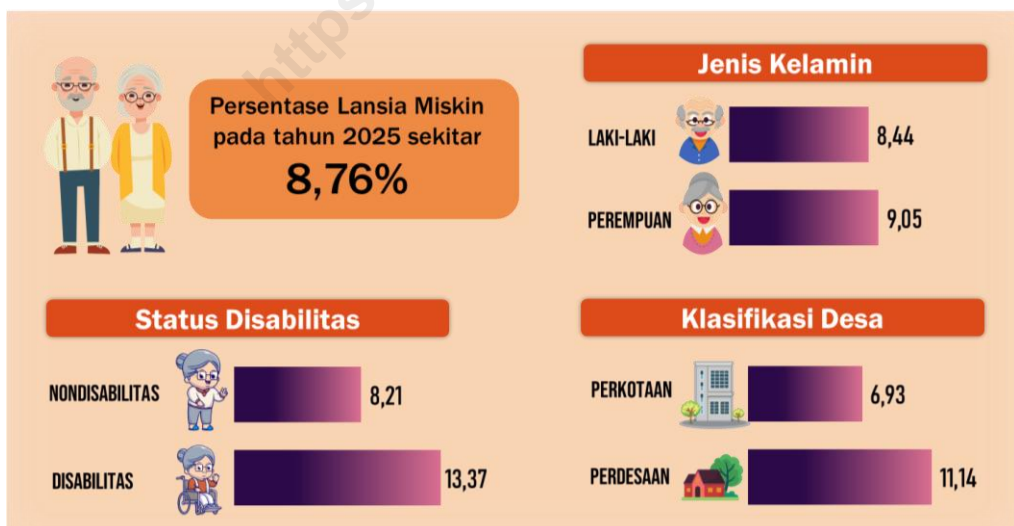
Gambar 7.1 Capaian Indikator Visi Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Dalam mewujudkan Lansia Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat ditetapkan sebelas indikator beserta target di tahun 2024 yang digunakan sebagai arah dalam implementasi Stranas Kelanjutusiaan. Beberapa Indikator yang digunakan diantaranya berasal dari berbagai survei yang dilaksanakan

oleh BPS, seperti Susenas Maret, Susenas MSBP, Sakernas, dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Susenas Maret dapat memotret seberapa banyak lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2025, persentase lansia miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan ada sebanyak 8,76 persen (Gambar 7.1). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 9,95 persen pada tahun 2024, atau dengan kata lain mengalami perbaikan capaian karena tingkat kemiskinan merupakan indikator negatif. Dengan capaian yang sudah di bawah 10 persen, target pemerintah dalam mewujudkan Lansia Mandiri telah tercapai.

Walaupun tingkat kemiskinan lansia secara nasional sudah mencapai target, ketimpangan masih terjadi pada kelompok lansia yang tinggal di wilayah perdesaan dan lansia penyandang disabilitas (Gambar 7.2). Pada kelompok-kelompok tersebut tingkat kemiskinan lansia masih di atas 10 persen. Bahkan pada tahun 2025, tingkat kemiskinan pada lansia penyandang disabilitas mencapai 13,37 persen. Artinya ada sebanyak 13,37 persen lansia yang mengalami tiga kerentanan sekaligus yaitu rentan karena menjadi lansia, rentan karena penyandang disabilitas, dan rentan karena mengalami kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.2 Tingkat Kemiskinan Lansia Menurut Karakteristik, 2025

Target pemerintah untuk mewujudkan Lansia Sejahtera belum dapat tercapai. Dalam lima tahun terakhir, persentase lansia yang bekerja di sektor formal cenderung stagnan. Pada tahun 2025, ada sebanyak 16,88 persen lansia yang bekerja di sektor formal. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 15,25 persen pada tahun 2024 (Gambar 7.1). Meskipun angka tersebut mengalami peningkatan, namun angka ini juga masih jauh di bawah target yang ditetapkan, yakni ditargetkan 50 persen lansia yang bekerja merupakan pekerja di sektor formal. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas lansia bekerja pada sektor nonformal. Apabila dibandingkan dengan persentase tenaga formal pada kelompok umur 15 tahun ke atas pada tahun 2024 yang sebesar 42,05 persen (BPS 2024), kesempatan lansia untuk bekerja pada sektor formal masih rendah.

Dua dari tiga indikator yang digunakan dalam Stranas Kelanjutan untuk menggambarkan Lansia Bermartabat yaitu persentase lansia yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase lansia yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Kedua indikator tersebut dihasilkan oleh BPS dari data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) setiap tiga tahun sekali. Pendataan Susenas MSBP terakhir dilakukan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, persentase lansia yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan mencapai 85,65 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021. Selain kegiatan sosial kemasyarakatan, peningkatan juga terlihat pada kegiatan keagamaan. Persentase lansia yang mengikuti kegiatan keagamaan pada tahun 2024 mencapai 71,69 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berakhirnya status pandemi Covid-19, yang memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas secara lebih leluasa dan produktif.

7.2 Program Kesejahteraan Lanjut Usia

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria tertentu. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan

kualitas hidup keluarga sasaran dan dalam cakupan lebih luas, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer sebagai pelengkap bantuan sosial PKH.

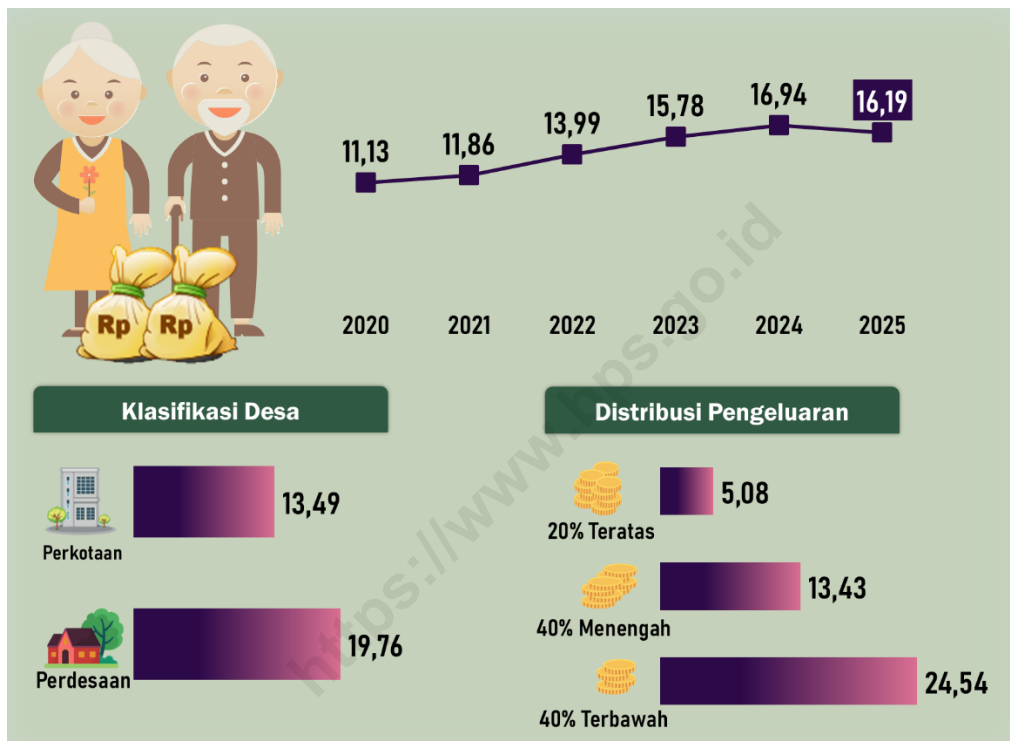
Penduduk lansia sebagai bagian dari salah satu siklus kehidupan manusia tidak terkecuali menjadi salah satu sasaran penerima PKH. Setiap tahun lansia yang terdaftar sebagai penerima PKH akan mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta. Bantuan sosial tersebut diberikan secara nontunai melalui rekening bank bekerja sama dengan Bank Penyalur yang dapat diakses menggunakan kartu debit Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kepesertaan penerima bantuan PKH ditetapkan selama enam tahun. Namun, setelah enam tahun menjadi penerima PKH tingkat kesejahteraan keluarga belum tentu mengalami perbaikan. Oleh karena itu, akan dilakukan evaluasi untuk menilai apakah keluarga tersebut masih layak menjadi KPM PKH. Bagi keluarga yang dinilai telah berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraaannya, mereka tidak lagi mendapat bantuan PKH. Bagi keluarga yang belum berubah tingkat kesejahteraaannya masih akan tetap menerima PKH selama 3 tahun.

Upaya peningkatan kesejahteraan lansia melalui program PKH menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH semakin meningkat. Pada tahun 2025, terdapat 16,19 persen rumah tangga lansia yang tercakup sebagai penerima PKH (Gambar 7.3). Penurunan tingkat kemiskinan lansia sejalan dengan penurunan persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH. Pada tahun 2025 tingkat kemiskinan lansia turun menjadi 8,76 persen dari angka 9,95 persen di tahun 2024.

Di wilayah perkotaan, persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH sebanyak 13,49 persen. Sedangkan di wilayah

perdesaan, angka ini relatif lebih tinggi yaitu sebesar 19,76 persen rumah tangga lansia yang masih tercatat sebagai penerima PKH. Berdasarkan distribusi pengeluaran, semakin sejahtera rumah tangga semakin kecil kejadian rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH. Pada kelompok terkaya, ada 5,08 persen rumah tangga lansia masih menerima PKH. Di sisi lain, sebanyak 24,54 persen rumah tangga lansia dari kelompok keluarga dengan pengeluaran terendah menerima PKH.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima PKH Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2025

Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI)

Kementerian PPN/Bappenas melakukan digitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia atau SILANI dalam bentuk aplikasi berbasis website untuk pemutakhiran data lansia, rujukan layanan, dan manajemen kasus. Uji coba SILANI pertama kali dilakukan pada tahun 2019. Tujuan dari uji coba ini untuk

melakukan pendataan lansia di tingkat desa, sebagai bagian penyusunan sistem informasi yang terintegrasi di tingkat desa berbasis komunitas. Uji coba dilakukan di tujuh kabupaten/kota dari tiga provinsi berbeda yaitu Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Masing-masing kabupaten/kota diambil satu desa/kelurahan. Informasi yang dikumpulkan yaitu informasi dasar, status kesehatan fisik dan kondisi psikologis, keadaan sosial, hingga lokasi rumah, dan fasilitas lansia (Winahyu 2020).

Permakanan Lansia

Program Permakanan adalah bantuan sosial berupa makanan siap saji yang dibagikan kepada penyandang kesejahteraan sosial yang baru diinisiasi pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2023). Kriteria Lansia Penerima Manfaat Program Permakanan, yaitu: miskin atau tidak mampu, berusia 75 tahun atau lebih, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga, diusulkan camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penerima manfaat permakanan. Melalui program permakanan ini, para lansia akan mendapatkan nutrisi makanan 2 kali sehari yang terdiri dari nasi/jenis makanan pokok lainnya, lauk pauk (hewani/nabati), sayur, buah potong, dan air mineral.

Sekolah Lansia Tangguh (Selantang)

Dalam Sekolah Lansia, konsep dasar yang dikembangkan adalah pendidikan sepanjang hayat (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, 2024). Bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi berlanjut sepanjang hidupnya. Visi Sekolah Lansia adalah menjadi pendidikan nonformal untuk mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif) serta Bermartabat dalam 7 Dimensi Lansia Tangguh secara utuh yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

BKKBN membuat program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) yang merupakan pengembangan dari Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Pada awal Tahun 2022, Kota Pasuruan, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang ditunjuk oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebagai daerah ujicoba program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) di Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) terbagi ke dalam 3 tahapan yaitu Standart 1 (S1), Standart 2 (S2) dan Standart 3 (S3). Pada Standart 3 diharapkan lansia dapat menjadi teladan bagi lansia lain atau biasa disebut sebagai Duta Lansia.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia Kementerian Kesehatan

Program kesejahteraan lanjut usia dari Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia, serta meningkatkan pemberdayaan potensi lansia di masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan lansia untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat, atau disingkat dengan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif). Program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan lansia SMART di antaranya:

1. Pengembangan Pelayanan Rujukan, melalui pengembangan rumah sakit yang mempunyai pelayanan Geriatri Terpadu.
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di Posyandu Lansia. Kegiatan dilakukan oleh kader dengan pendampingan dari tenaga kesehatan Puskesmas/sektor terkait. Kegiatan ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif serta deteksi dini.
3. Peningkatan Pemberdayaan Lansia dalam keluarga/masyarakat. Proses pemberian informasi, kemampuan, dan motivasi bagi lansia agar mereka berperilaku sehat, berperan dalam mengembangkan perilaku sehat, dan mampu memberi solusi apabila ada permasalahan kesehatan dalam keluarga dan masyarakat.
4. Peningkatan Pelayanan *Home Care* yang terintegrasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Program ini ditujukan bagi lanjut usia yang tidak mampu secara fungsional untuk mandiri di rumah namun tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit, atau secara teknis sulit untuk berobat jalan.

5. Pengembangan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP, *Long Term Care*). PJP dikembangkan dengan memperhatikan aspek budaya yang masih mempertahankan model keluarga besar.
6. Peningkatan pelayanan integrasi dengan lintas program melalui pendekatan siklus hidup. Lansia sehat, aktif dan mandiri dapat dipersiapkan sejak dini sebagai pendekatan siklus hidup. Pelayanan kepada lanjut usia dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan lintas program.
7. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas), pihak swasta, dan lain-lain. Peningkatan kemitraan disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing dengan prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Di tingkat kecamatan dapat dibentuk kelompok kerja pembinaan lanjut usia yang terdiri dari lintas unsur dan lintas sektor, yang bertujuan untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dalam upaya pembinaan lanjut usia;
 - b. Mendorong terbentuknya kelompok/posyandu lanjut usia di masyarakat;
 - c. Memantau permasalahan lanjut usia di masyarakat dan memberi masukan kepada pelaksana program sektor terkait;Sedangkan di tingkat desa/kelurahan dibentuk tim pelaksana pembinaan lansia.
8. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia tangguh dalam bentuk penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan, serta pelaporan. Lansia tangguh adalah upaya agar lansia tetap produktif. Misalnya dengan memperpanjang usia bekerja bagi lansia di sektor formal, baik perusahaan maupun PNS, di atas usia pensiun yang telah ditetapkan (58 tahun dan atau 60 tahun). Selanjutnya, lansia madya yang berusia 70 sampai 80 tahun diharapkan bisa mandiri atau bisa mengurus dirinya sendiri. Baru di usia 80 tahun ke atas, sebagian besar lansia membutuhkan pendampingan melalui pengembangan *home care* atau pengobatan di lingkungan rumah tempat tinggal.

9. Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Lansia

Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk melayani lansia. Proses pembentukan dan pelaksanaan Posyandu Lansia dilakukan oleh masyarakat bersama LSM, lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial, dan lain-lain dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Di samping pelayanan kesehatan, posyandu lansia juga memberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, keterampilan, olahraga, seni budaya, dan pelayanan lain yang dibutuhkan para lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Posyandu Lansia juga membantu lansia agar dapat beraktivitas dan mengembangkan potensi diri.

7.3 Program Kesejahteraan Lainnya

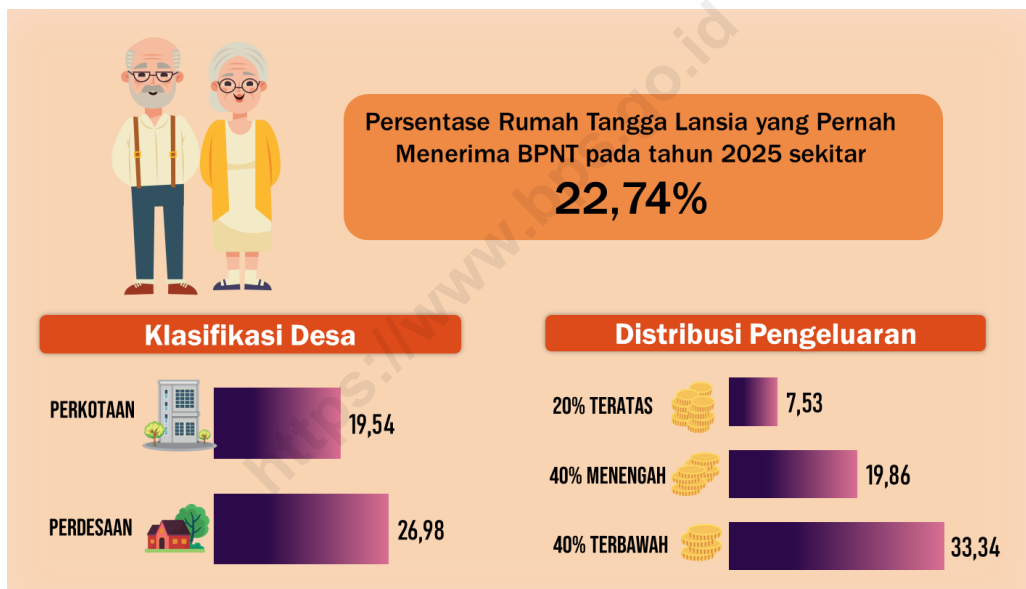
Beberapa program perlindungan sosial yang ada di Indonesia yang mencakup penduduk lanjut usia, meskipun tidak secara khusus ditargetkan untuk lansia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako

Bantuan sosial pangan diberikan dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-tunai 2020). Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Raskin, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non-tunai atau BPNT, dengan sejumlah kabupaten yang memiliki keterbatasan kondisi infrastruktur nontunai menjalankan mekanisme program Sembako untuk wilayah khusus.

BPNT disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk

memperoleh beras dan/atau telur serta komoditi lainnya di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Mulai bulan Maret 2020, indeks bantuan program Sembako kembali dinaikkan menjadi Rp200.000/KPM/bulan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

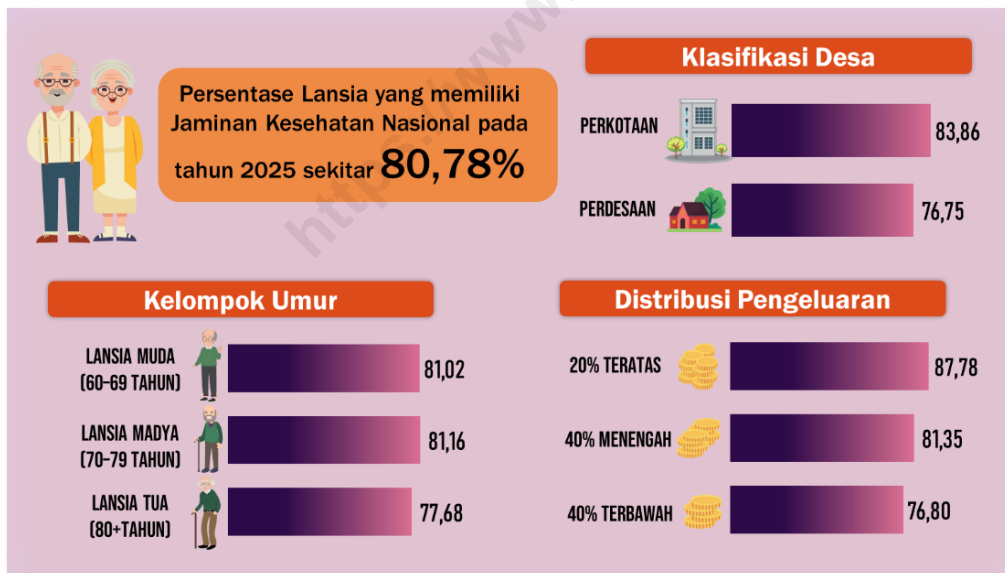
Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BPNT/Program Sembako Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2025

Pada tahun 2025, persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapat program sembako sebesar 22,74 persen. Rumah tangga lansia yang memperoleh program sembako tersebut harapannya dapat terpenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan lansia. Berdasarkan klasifikasi desa, persentase

rumah tangga lansia di wilayah perdesaan yang pernah menerima program sembako lebih besar daripada rumah tangga lansia di wilayah perkotaan (26,98 persen berbanding 19,54 persen). Menurut distribusi pengeluaran, semakin sejahtera rumah tangga lansia semakin kecil kejadian penerimaan program sembako. Pada kelompok terkaya (20 persen teratas), rumah tangga lansia yang pernah menerima program sembako sebesar 7,53 persen. Sedangkan diantara kelompok termiskin (40 persen terbawah), terdapat 33,34 persen rumah tangga lansia yang pernah menerima program sembako.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan kombinasi dari sistem asuransi sosial dan sistem subsidi bersumber dari dana APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Thabrany 2014). Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi. Program JKN memerdekakan rakyat dari beban finansial ketika sakit.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.5 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menurut Kelompok Umur, 2025

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kepesertaan JKN terbagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Susenas Maret 2025 mencatat bahwa 80,78 persen lansia telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar lansia di Indonesia telah memiliki jaminan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ketika lansia tersebut sakit. Di antara kelompok lansia muda, sebesar 81,02 persen lansia telah memiliki JKN. Angka ini semakin menurun seiring bertambahnya umur lansia. Pada kelompok lansia tua, persentase lansia yang memiliki JKN ada sebanyak 77,68 persen. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa semakin bertambah umur seseorang, frekuensi untuk mengalami gangguan kesehatan akan semakin bertambah.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Jenis Bantuan Sosial yang Diterima, 2025

Karakteristik	PKH	BPNT/ Program Sembako
(1)	(2)	(3)
Total	16,19	22,74
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	5,08	7,53
40% Menengah	13,43	19,86
40% Terbawah	24,54	33,34
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	13,49	19,54
Perdesaan	19,76	26,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2025

Tabel 7.2 **Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Jenis Kredit dan Klasifikasi Desa, 2025**

Karakteristik	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	17,73	19,07	18,30
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4,84	7,23	5,87
Kredit dari Bank Umum selain KUR	2,71	2,48	2,61
Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	0,58	0,48	0,54
Kredit dari Koperasi	2,04	2,64	2,30
Kredit Perorangan dengan Bunga	0,63	0,65	0,64
Kredit Pegadaian	0,85	0,67	0,77
Kredit Perusahaan <i>Leasing</i>	2,02	0,83	1,51
Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	0,15	0,31	0,22
Pinjaman <i>Online</i>	0,26	0,13	0,21
Kredit PNM-Mekaar	3,83	4,07	3,94
Lainnya	2,10	2,04	2,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.3 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2025

Karakteristik	Jaminan Kesehatan	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
(1)	(2)	(3)
Total	81,62	80,78
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	81,72	80,77
Perempuan	81,53	80,78
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60–69 Tahun)	81,97	81,02
Lansia Madya (70–79 Tahun)	81,82	81,16
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	78,29	77,68
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	81,63	80,74
Disabilitas	81,57	81,07
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	90,33	87,78
40% Menengah	81,95	81,35
40% Terbawah	77,01	76,80
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	85,13	83,86
Perdesaan	77,03	76,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.4 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis, 2025

Karakteristik	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Jaminan Kesehatan Swasta	
	PBI	Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	57,22	22,43	2,14	0,30	0,76
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	56,64	23,03	2,07	0,29	0,88
Perempuan	57,76	21,87	2,20	0,30	0,65
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 Tahun)	56,63	23,23	2,17	0,34	0,82
Lansia Madya (70–79 Tahun)	58,19	21,92	2,04	0,23	0,68
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	58,35	18,18	2,23	0,21	0,56
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	56,83	22,82	2,11	0,32	0,78
Disabilitas	60,47	19,15	2,37	0,15	0,61
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	34,28	52,52	1,77	1,23	2,19
40% Menengah	58,49	21,54	2,56	0,08	0,59
40% Terbawah	67,44	8,33	1,93	0,03	0,20
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	52,93	30,17	1,59	0,46	1,12
Perdesaan	62,82	12,32	2,85	0,08	0,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,99	19,66	16,79
Sumatera Utara	10,19	14,57	12,08
Sumatera Barat	14,47	16,90	15,69
Riau	6,35	15,29	11,84
Jambi	10,44	11,84	11,36
Sumatera Selatan	10,99	13,96	12,84
Bengkulu	11,02	16,69	15,01
Lampung	16,89	21,08	19,71
Kep. Bangka Belitung	8,15	12,06	9,68
Kepulauan Riau	8,87	20,26	10,46
DKI Jakarta	5,03	–	5,03
Jawa Barat	14,39	18,34	15,32
Jawa Tengah	18,42	22,77	20,50
DI Yogyakarta	22,01	28,37	24,02
Jawa Timur	14,17	19,74	16,70
Banten	11,43	18,53	12,99
Bali	6,80	15,46	9,57
Nusa Tenggara Barat	21,11	24,71	22,80
Nusa Tenggara Timur	15,92	37,97	32,75
Kalimantan Barat	8,07	16,57	13,16
Kalimantan Tengah	4,52	10,66	7,99
Kalimantan Selatan	9,27	12,48	10,89
Kalimantan Timur	5,66	11,40	7,51
Kalimantan Utara	14,08	9,28	12,07
Sulawesi Utara	8,78	12,27	10,36
Sulawesi Tengah	11,97	18,01	16,08
Sulawesi Selatan	13,01	22,31	18,23
Sulawesi Tenggara	15,28	25,44	21,97
Gorontalo	23,32	33,69	28,93
Sulawesi Barat	19,95	23,35	22,64
Maluku	13,30	23,64	19,16
Maluku Utara	5,77 ¹	13,37	11,17
Papua Barat	19,10	27,79	25,05
Papua Barat Daya	28,10	19,24	23,99
Papua	10,30	26,07	16,47
Papua Selatan	NA	5,57 ¹	4,13 ¹
Papua Tengah	7,43 ¹	2,87 ¹	4,16 ¹
Papua Pegunungan	–	10,82	9,51
Indonesia	13,49	19,76	16,19

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima BPNT/Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	26,62	38,32	34,44
Sumatera Utara	13,14	20,23	16,19
Sumatera Barat	15,97	20,15	18,06
Riau	9,24	17,09	14,06
Jambi	11,93	11,52	11,66
Sumatera Selatan	11,57	18,26	15,73
Bengkulu	15,85	22,82	20,75
Lampung	20,01	26,60	24,44
Kep. Bangka Belitung	7,23	8,54	7,74
Kepulauan Riau	11,87	18,50	12,80
DKI Jakarta	4,38	–	4,38
Jawa Barat	27,49	36,37	29,57
Jawa Tengah	24,96	31,84	28,26
DI Yogyakarta	27,82	41,75	32,21
Jawa Timur	21,26	29,44	24,98
Banten	13,77	32,88	17,98
Bali	4,85	9,21	6,24
Nusa Tenggara Barat	21,60	25,85	23,60
Nusa Tenggara Timur	14,67	33,24	28,84
Kalimantan Barat	9,80	17,58	14,46
Kalimantan Tengah	5,47	12,57	9,48
Kalimantan Selatan	8,46	13,07	10,79
Kalimantan Timur	4,70	8,74	6,01
Kalimantan Utara	10,64	5,80 ¹	8,61
Sulawesi Utara	10,88	20,05	15,02
Sulawesi Tengah	22,14	18,38	19,58
Sulawesi Selatan	13,18	24,09	19,30
Sulawesi Tenggara	15,58	23,47	20,77
Gorontalo	27,51	41,64	35,15
Sulawesi Barat	21,88	24,15	23,67
Maluku	10,46	14,29	12,63
Maluku Utara	4,51 ¹	9,84	8,29
Papua Barat	8,77 ¹	27,07	21,29
Papua Barat Daya	12,15 ¹	28,46	19,72
Papua	10,92	33,69	19,83
Papua Selatan	13,86 ¹	31,41	25,63
Papua Tengah	10,96 ¹	9,79	10,12
Papua Pegunungan	–	32,59	28,65
Indonesia	19,54	26,98	22,74

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.7 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,55	99,33	99,22	99,57	99,40
Sumatera Utara	86,38	73,71	82,03	79,83	80,85
Sumatera Barat	87,17	80,30	84,57	82,93	83,70
Riau	85,63	78,82	81,71	81,16	81,43
Jambi	81,53	62,69	69,69	68,33	69,01
Sumatera Selatan	89,57	73,75	79,96	79,31	79,63
Bengkulu	87,81	81,13	83,51	82,63	83,07
Lampung	82,10	74,68	76,00	78,15	77,08
Kep. Bangka Belitung	92,12	88,13	90,01	91,14	90,56
Kepulauan Riau	88,75	92,49	90,34	88,18	89,28
DKI Jakarta	97,96	–	97,84	98,08	97,96
Jawa Barat	81,32	66,83	78,32	77,36	77,82
Jawa Tengah	82,44	75,39	79,05	79,03	79,04
DI Yogyakarta	94,32	92,44	94,07	93,41	93,71
Jawa Timur	81,65	74,27	77,43	78,98	78,26
Banten	85,25	65,96	83,21	78,86	81,04
Bali	96,43	94,51	96,44	95,23	95,80
Nusa Tenggara Barat	81,90	75,31	79,46	78,24	78,80
Nusa Tenggara Timur	89,37	84,33	86,09	85,01	85,51
Kalimantan Barat	84,15	73,04	76,57	78,20	77,39
Kalimantan Tengah	79,72	71,74	74,13	76,38	75,16
Kalimantan Selatan	80,43	80,63	79,45	81,55	80,53
Kalimantan Timur	92,24	88,60	90,67	91,45	91,05
Kalimantan Utara	93,07	92,17	92,42	93,00	92,69
Sulawesi Utara	93,47	86,48	89,74	90,79	90,28
Sulawesi Tengah	91,59	86,50	87,34	88,72	88,03
Sulawesi Selatan	92,00	89,10	91,18	89,67	90,35
Sulawesi Tenggara	94,32	91,20	93,48	91,09	92,24
Gorontalo	95,57	93,51	94,02	94,85	94,46
Sulawesi Barat	93,27	91,83	91,51	92,72	92,15
Maluku	84,94	74,92	80,05	78,50	79,24
Maluku Utara	84,61	77,75	80,12	79,16	79,64
Papua Barat	91,34	80,87	83,09	85,34	84,13
Papua Barat Daya	95,32	95,71	95,15	95,89	95,50
Papua	87,01	90,57	90,46	86,31	88,44
Papua Selatan	88,72	97,45	95,19	93,62	94,46
Papua Tengah	75,31	73,79	76,57	70,65	74,22
Papua Pegunungan	90,28	97,23	95,56	98,08	96,44
Indonesia	85,13	77,03	81,72	81,53	81,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.8 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	28,89	11,00	16,93
Sumatera Utara	18,22	9,05	14,27
Sumatera Barat	28,43	12,49	20,46
Riau	24,87	8,11	14,57
Jambi	23,45	7,77	13,13
Sumatera Selatan	26,87	12,28	17,79
Bengkulu	34,81	8,00	15,95
Lampung	17,41	6,25	9,90
Kep. Bangka Belitung	20,12	9,65	16,03
Kepulauan Riau	35,26	16,71	32,66
DKI Jakarta	22,06	—	22,06
Jawa Barat	18,43	6,51	15,64
Jawa Tengah	22,82	9,68	16,53
DI Yogyakarta	27,74	12,45	22,91
Jawa Timur	16,52	6,23	11,84
Banten	28,06	10,17	24,12
Bali	29,90	15,00	25,14
Nusa Tenggara Barat	18,96	4,88	12,35
Nusa Tenggara Timur	36,81	11,07	17,17
Kalimantan Barat	25,67	6,85	14,40
Kalimantan Tengah	31,46	12,07	20,51
Kalimantan Selatan	24,98	11,08	17,96
Kalimantan Timur	29,19	12,83	23,90
Kalimantan Utara	32,92	14,77	25,32
Sulawesi Utara	28,19	10,06	20,00
Sulawesi Tengah	23,73	9,33	13,91
Sulawesi Selatan	29,44	12,59	19,98
Sulawesi Tenggara	36,83	13,27	21,32
Gorontalo	33,96	11,41	21,77
Sulawesi Barat	28,55	9,45	13,48
Maluku	40,36	10,11	23,21
Maluku Utara	31,05	10,10	16,18
Papua Barat	28,86	10,80	16,50
Papua Barat Daya	22,21	14,14	18,47
Papua	34,14	10,78	25,00
Papua Selatan	20,74 ¹	NA	8,17 ¹
Papua Tengah	22,77 ¹	2,85 ¹	8,48
Papua Pegunungan	—	NA	NA
Indonesia	21,91	8,82	16,28

Catatan: Jaminan Sosial yang dimaksud adalah Jaminan Pensiunan/Veteran, Jaminan Hari Tua, Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan/Asuransi Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.9 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	10,99	8,29	13,69	12,53	19,66	17,17	22,15	6,47	16,79	14,88	18,69	5,78
Sumatera Utara	10,19	8,17	12,22	10,15	14,57	12,78	16,36	6,27	12,08	10,69	13,47	5,87
Sumatera Barat	14,47	11,74	17,19	9,61	16,90	14,66	19,15	6,76	15,69	13,92	17,45	5,73
Riau	6,35	4,03	8,68	18,68	15,29	12,41	18,17	9,60	11,84	9,85	13,84	8,61
Jambi	10,44	7,16	13,71	15,99	11,84	9,59	14,10	9,71	11,36	9,50	13,22	8,34
Sumatera Selatan	10,99	8,22	13,76	12,84	13,96	11,94	15,97	7,36	12,84	11,20	14,47	6,50
Bengkulu	11,02	6,91	15,13	19,04	16,69	13,93	19,46	8,45	15,01	12,71	17,31	7,81
Lampung	16,89	13,88	19,89	9,07	21,08	18,46	23,70	6,34	19,71	17,69	21,72	5,23
Kep. Bangka Belitung	8,15	5,30	11,01	17,87	12,06	8,19	15,93	16,38	9,68	7,37	11,98	12,15
Kepulauan Riau	8,87	5,36	12,37	20,15	20,26	14,91	25,62	13,48	10,46	7,35	13,58	15,19
DKI Jakarta	5,03	3,51	6,56	15,47	–	–	–	–	5,03	3,51	6,56	15,47
Jawa Barat	14,39	13,01	15,78	4,91	18,34	15,78	20,90	7,12	15,32	14,10	16,54	4,06
Jawa Tengah	18,42	17,22	19,62	3,32	22,77	21,13	24,42	3,68	20,50	19,50	21,51	2,50
DI Yogyakarta	22,01	18,92	25,10	7,16	28,37	23,82	32,93	8,19	24,02	21,47	26,57	5,41
Jawa Timur	14,17	13,05	15,29	4,04	19,74	18,32	21,16	3,67	16,70	15,81	17,59	2,72
Banten	11,43	8,73	14,13	12,05	18,53	14,01	23,05	12,44	12,99	10,67	15,32	9,13
Bali	6,80	5,32	8,29	11,14	15,46	12,45	18,47	9,92	9,57	8,17	10,97	7,47
Nusa Tenggara Barat	21,11	17,86	24,37	7,86	24,71	20,06	29,36	9,60	22,80	20,02	25,58	6,23
Nusa Tenggara Timur	15,92	12,18	19,66	11,98	37,97	35,84	40,10	2,86	32,75	30,87	34,63	2,94
Kalimantan Barat	8,07	5,61	10,53	15,56	16,57	14,10	19,04	7,61	13,16	11,37	14,95	6,93
Kalimantan Tengah	4,52	2,51	6,53	22,65	10,66	7,93	13,39	13,07	7,99	6,20	9,77	11,40
Kalimantan Selatan	9,27	6,86	11,68	13,27	12,48	10,07	14,90	9,86	10,89	9,19	12,60	7,99
Kalimantan Timur	5,66	3,39	7,93	20,47	11,40	7,48	15,32	17,54	7,51	5,52	9,51	13,55
Kalimantan Utara	14,08	8,74	19,43	19,35	9,28	4,90	13,65	24,06	12,07	8,46	15,68	15,25
Sulawesi Utara	8,78	6,65	10,92	12,41	12,27	10,13	14,41	8,90	10,36	8,84	11,88	7,48
Sulawesi Tengah	11,97	8,18	15,76	16,16	18,01	15,39	20,62	7,41	16,08	13,93	18,24	6,84
Sulawesi Selatan	13,01	10,77	15,25	8,78	22,31	20,41	24,21	4,34	18,23	16,78	19,69	4,08
Sulawesi Tenggara	15,28	11,00	19,56	14,30	25,44	22,56	28,32	5,78	21,97	19,56	24,37	5,58
Gorontalo	23,32	17,40	29,24	12,95	33,69	28,51	38,87	7,84	28,93	25,02	32,83	6,89
Sulawesi Barat	19,95	13,32	26,57	16,94	23,35	19,01	27,70	9,49	22,64	18,93	26,34	8,35
Maluku	13,30	8,40	18,20	18,80	23,64	20,36	26,92	7,07	19,16	16,35	21,97	7,48
Maluku Utara	5,77	2,54	9,00	28,55	13,37	10,24	16,51	11,96	11,17	8,74	13,59	11,08
Papua Barat	19,10	11,81	26,40	19,49	27,79	20,31	35,28	13,74	25,05	19,41	30,68	11,47
Papua Barat Daya	28,10	18,01	38,19	18,32	19,24	14,10	24,39	13,64	23,99	18,07	29,90	12,59
Papua	10,30	6,53	14,07	18,67	26,07	20,90	31,25	10,13	16,47	13,35	19,59	9,67
Papua Selatan	1,19	~0	3,53	99,72	5,57	2,07	9,06	32,02	4,13	1,66	6,59	30,48
Papua Tengah	7,43	0,71	14,15	46,14	2,87	0,79	4,94	36,99	4,16	1,74	6,58	29,70
Papua Pegunungan	–	–	–	NA	10,82	6,12	15,53	22,19	9,51	5,36	13,67	22,29
Indonesia	13,49	12,99	13,99	1,89	19,76	19,20	20,33	1,47	16,19	15,81	16,56	1,18

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.10 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima BPNT/Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	26,62	22,84	30,40	7,24	38,32	35,50	41,15	3,76	34,44	32,17	36,71	3,37
Sumatera Utara	13,14	11,01	15,26	8,25	20,23	18,15	22,32	5,26	16,19	14,68	17,71	4,78
Sumatera Barat	15,97	13,18	18,76	8,93	20,15	17,84	22,46	5,85	18,06	16,25	19,87	5,11
Riau	9,24	6,49	11,99	15,20	17,09	14,27	19,91	8,43	14,06	12,02	16,11	7,41
Jambi	11,93	8,23	15,62	15,80	11,52	9,31	13,73	9,80	11,66	9,73	13,59	8,44
Sumatera Selatan	11,57	8,65	14,50	12,90	18,26	15,97	20,54	6,39	15,73	13,92	17,54	5,87
Bengkulu	15,85	10,79	20,90	16,27	22,82	19,70	25,94	6,98	20,75	18,09	23,41	6,53
Lampung	20,01	16,86	23,17	8,04	26,60	23,82	29,37	5,32	24,44	22,30	26,58	4,46
Kep. Bangka Belitung	7,23	4,72	9,74	17,69	8,54	5,16	11,93	20,22	7,74	5,72	9,76	13,32
Kepulauan Riau	11,87	7,31	16,44	19,59	18,50	13,78	23,21	13,00	12,80	8,83	16,78	15,84
DKI Jakarta	4,38	3,02	5,73	15,77	–	–	–	–	4,38	3,02	5,73	15,77
Jawa Barat	27,49	25,79	29,19	3,16	36,37	33,22	39,51	4,41	29,57	28,07	31,07	2,59
Jawa Tengah	24,96	23,65	26,28	2,70	31,84	30,05	33,64	2,87	28,26	27,16	29,36	1,99
DI Yogyakarta	27,82	24,62	31,01	5,86	41,75	36,58	46,92	6,31	32,21	29,50	34,93	4,31
Jawa Timur	21,26	20,00	22,53	3,04	29,44	27,82	31,05	2,80	24,98	23,97	25,99	2,06
Banten	13,77	10,93	16,61	10,53	32,88	27,31	38,46	8,65	17,98	15,43	20,52	7,22
Bali	4,85	3,61	6,09	13,02	9,21	6,95	11,46	12,52	6,24	5,13	7,35	9,08
Nusa Tenggara Barat	21,60	18,32	24,87	7,74	25,85	21,07	30,64	9,44	23,60	20,75	26,44	6,15
Nusa Tenggara Timur	14,67	11,11	18,23	12,37	33,24	31,22	35,26	3,10	28,84	27,06	30,63	3,15
Kalimantan Barat	9,80	7,25	12,35	13,27	17,58	15,19	19,98	6,95	14,46	12,69	16,23	6,24
Kalimantan Tengah	5,47	3,05	7,89	22,59	12,57	9,66	15,47	11,80	9,48	7,52	11,44	10,55
Kalimantan Selatan	8,46	6,14	10,79	14,01	13,07	10,64	15,50	9,47	10,79	9,11	12,47	7,95
Kalimantan Timur	4,70	2,78	6,62	20,80	8,74	4,80	12,68	23,02	6,01	4,18	7,83	15,49
Kalimantan Utara	10,64	6,03	15,25	22,11	5,80	2,21	9,40	31,57	8,61	5,54	11,69	18,21
Sulawesi Utara	10,88	8,49	13,27	11,22	20,05	17,14	22,96	7,40	15,02	13,16	16,89	6,34
Sulawesi Tengah	22,14	16,93	27,36	12,01	18,38	15,72	21,04	7,39	19,58	17,12	22,04	6,42
Sulawesi Selatan	13,18	10,97	15,38	8,54	24,09	22,18	26,00	4,04	19,30	17,85	20,76	3,84
Sulawesi Tenggara	15,58	11,63	19,54	12,95	23,47	20,59	26,35	6,25	20,77	18,44	23,11	5,74
Gorontalo	27,51	21,29	33,72	11,53	41,64	36,22	47,07	6,65	35,15	31,05	39,26	5,96
Sulawesi Barat	21,88	14,44	29,32	17,35	24,15	19,71	28,58	9,37	23,67	19,84	27,50	8,26
Maluku	10,46	6,30	14,62	20,29	14,29	11,37	17,20	10,42	12,63	10,18	15,08	9,89
Maluku Utara	4,51	1,34	7,68	35,85	9,84	7,29	12,39	13,23	8,29	6,26	10,32	12,50
Papua Barat	8,77	4,34	13,21	25,78	27,07	19,53	34,61	14,21	21,29	15,87	26,70	12,98
Papua Barat Daya	12,15	5,53	18,77	27,80	28,46	23,19	33,72	9,44	19,72	15,32	24,12	11,38
Papua	10,92	7,01	14,83	18,29	33,69	28,46	38,92	7,92	19,83	16,62	23,04	8,25
Papua Selatan	13,86	3,25	24,46	39,05	31,41	23,85	38,97	12,28	25,63	19,50	31,75	12,19
Papua Tengah	10,96	2,99	18,93	37,09	9,79	6,33	13,25	18,04	10,12	6,77	13,47	16,90
Papua Pegunungan	–	–	–	NA	32,59	26,27	38,92	9,91	28,65	22,98	34,32	10,10
Indonesia	19,54	18,97	20,11	1,49	26,98	26,34	27,63	1,21	22,74	22,31	23,17	0,96

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.11 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	28,89	25,26	32,52	6,41	11,00	9,23	12,78	8,23	16,93	15,22	18,65	5,17
Sumatera Utara	18,22	15,62	20,82	7,27	9,05	7,43	10,67	9,14	14,27	12,63	15,90	5,85
Sumatera Barat	28,43	25,21	31,64	5,77	12,49	10,51	14,47	8,08	20,46	18,55	22,36	4,75
Riau	24,87	20,23	29,52	9,53	8,11	5,83	10,39	14,36	14,57	12,27	16,88	8,08
Jambi	23,45	19,04	27,85	9,58	7,77	5,82	9,73	12,85	13,13	11,14	15,12	7,73
Sumatera Selatan	26,87	22,45	31,29	8,39	12,28	10,58	13,98	7,07	17,79	15,78	19,81	5,78
Bengkulu	34,81	28,51	41,11	9,23	8,00	5,97	10,03	12,97	15,95	13,51	18,39	7,80
Lampung	17,41	14,44	20,38	8,71	6,25	4,52	7,98	14,15	9,90	8,38	11,42	7,85
Kep. Bangka Belitung	20,12	15,96	24,28	10,56	9,65	5,86	13,44	20,04	16,03	13,09	18,98	9,38
Kepulauan Riau	35,26	28,59	41,92	9,64	16,71	11,60	21,81	15,59	32,66	26,86	38,45	9,05
DKI Jakarta	22,06	18,98	25,13	7,11	–	–	–	–	22,06	18,98	25,13	7,11
Jawa Barat	18,43	16,87	20,00	4,33	6,51	4,83	8,19	13,19	15,64	14,37	16,91	4,14
Jawa Tengah	22,82	21,51	24,13	2,93	9,68	8,53	10,83	6,04	16,53	15,65	17,41	2,72
DI Yogyakarta	27,74	24,48	31,00	5,99	12,45	8,57	16,33	15,91	22,91	20,37	25,46	5,66
Jawa Timur	16,52	15,36	17,67	3,57	6,23	5,32	7,15	7,49	11,84	11,08	12,59	3,26
Banten	28,06	24,41	31,70	6,62	10,17	6,13	14,22	20,28	24,12	21,12	27,12	6,34
Bali	29,90	26,75	33,05	5,37	15,00	11,84	18,17	10,76	25,14	22,75	27,52	4,84
Nusa Tenggara Barat	18,96	15,90	22,01	8,22	4,88	2,78	6,97	21,88	12,35	10,44	14,26	7,90
Nusa Tenggara Timur	36,81	31,60	42,03	7,23	11,07	9,60	12,55	6,78	17,17	15,45	18,88	5,09
Kalimantan Barat	25,67	21,61	29,72	8,06	6,85	5,14	8,57	12,77	14,40	12,45	16,35	6,90
Kalimantan Tengah	31,46	26,86	36,07	7,47	12,07	9,24	14,89	11,94	20,51	17,93	23,09	6,42
Kalimantan Selatan	24,98	21,55	28,41	7,01	11,08	8,75	13,41	10,73	17,96	15,88	20,04	5,90
Kalimantan Timur	29,19	24,96	33,42	7,40	12,83	8,04	17,62	19,06	23,90	20,63	27,18	6,99
Kalimantan Utara	32,92	25,67	40,17	11,24	14,77	9,59	19,95	17,89	25,32	20,47	30,16	9,76
Sulawesi Utara	28,19	24,74	31,64	6,25	10,06	7,84	12,29	11,29	20,00	17,84	22,16	5,51
Sulawesi Tengah	23,73	18,76	28,69	10,67	9,33	7,30	11,36	11,11	13,91	11,80	16,02	7,73
Sulawesi Selatan	29,44	26,26	32,62	5,51	12,59	11,09	14,09	6,08	19,98	18,34	21,63	4,20
Sulawesi Tenggara	36,83	31,62	42,03	7,21	13,27	11,00	15,55	8,75	21,32	18,97	23,68	5,63
Gorontalo	33,96	27,63	40,30	9,52	11,41	7,98	14,85	15,36	21,77	18,25	25,28	8,23
Sulawesi Barat	28,55	20,65	36,44	14,12	9,45	6,65	12,25	15,13	13,48	10,68	16,27	10,57
Maluku	40,36	33,87	46,85	8,20	10,11	7,56	12,65	12,85	23,21	19,95	26,48	7,18
Maluku Utara	31,05	23,84	38,26	11,85	10,10	7,30	12,91	14,16	16,18	13,23	19,13	9,29
Papua Barat	28,86	20,54	37,18	14,70	10,80	6,39	15,20	20,82	16,50	12,43	20,58	12,60
Papua Barat Daya	22,21	12,95	31,48	21,28	14,14	9,82	18,46	15,60	18,47	13,08	23,86	14,89
Papua	34,14	27,84	40,44	9,42	10,78	7,21	14,36	16,90	25,00	20,87	29,13	8,42
Papua Selatan	20,74	8,03	33,44	31,26	NA	NA	NA	65,94	8,17	3,59	12,74	28,58
Papua Tengah	22,77	13,28	32,27	21,26	2,85	0,55	5,14	41,11	8,48	5,36	11,60	18,77
Papua Pegunungan	–	–	–	NA	NA	NA	NA	100,43	NA	NA	NA	100,38
Indonesia	21,91	21,31	22,51	1,40	8,82	8,42	9,22	2,31	16,28	15,90	16,67	1,21

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bimbel.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Adityandani, Welldan, and Nadia Asandimitra Haryono. 2019. "Pengaruh demografi, financial attitude, financial knowledge, dan suku bunga terhadap perilaku menabung masyarakat Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Manajemen* (JIM) 7 (2): 316-326. <https://core.ac.uk/download/pdf/230764463.pdf>
- Adioetomo, S. M., & Pardede, E. L. 2018. *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers.
- Affandi, Moch. 2009. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Memilih Untuk Bekerja". *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 2 Oktober 2009, 99-110.
- Amir, Vaisal. 2022. "Lansia dan Masa Depan Indonesia". Kompas, Mei 30. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/29/lansia-dan-masa-depan-indonesia>
- Andini, Ni Kadek, Desak Putu Eka Nilakusmawati, and Made Susilawati. 2013. "Faktor-faktor yang memengaruhi penduduk lanjut usia masih bekerja." *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 9, no. 1: 44-49
- Anggreni, Ni Luh Putu Evi, and Anak Agung Ketut Ayuningsasi. 2023. "Determinan Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Desa Kemenuh Gianyar." *Buletin Studi Ekonomi* 28 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/index>
- Anker dkk. 2002. Measuring Decent Work with Statistical Indicators. *Working Paper* No 2: ILO.
- Astuti, Agnes Dewi. 2019. "Status perkawinan meningkatkan kualitas hidup lansia di pstw sinta rangkang tangkiling Kalimantan Tengah." *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama* 8, no. 1: 1-8. <https://doi.org/10.31596/jcu.v8i1.300>
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Buku 1 Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota Susenas Maret 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2024. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Becker, G. S. (1965). "A Theory of the Allocation of Time". *The Economic Journal*, 75(299), 493. <https://doi.org/10.2307/2228949>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (3rd ed.)*. Chicago: University of Chicago Press.
<http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Borjas, George J. 2016. *Labor Economics 7th Edition*. New York: McGraw-Hill education.
- Cicih, Lilis H. Mis. 2018. "Menjadi Lansia: antara Anugerah dan Tantangan." Dalam Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini, disunting oleh Sri Moertiningsih Adioetomo dan Elda Luciana Pardede. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Cicih, Lilis Heri Mis, and Darojad Nurjono Agung Nugroho. 2021. "Kondisi Lanjut Usia di Indonesia Era Bonus Demografi." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17(1):1-14. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.636>
- Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahutama, and Darmawan Prasetya. 2021. Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia. *Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta*
- Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. 2024. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. May 13. Accessed November 4, 2024. <https://golantang.bkkbn.go.id/selantang-sekolah-lansia-tangguh>.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2021. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021. Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 2023. Kementerian Sosial Republik Indonesia. June 23. Accessed November 4, 2024.

<https://kemensos.go.id/bantuan-permakanan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal>.

- Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia. 2022. Rencana Aksi Kegiatan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia 2022-2025. Kementerian Kesehatan.
- Ehrenberg, Ronald G. & Smith, Robert S. 2012. *Modern Labor Economics 11th Edition*. Boston: Prentice Hall.
- Hakim, Lukman Nul. 2020. "Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11, No. 1 Juni 2020.
- Heryanah. 2015. Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. *Jurnal Populasi* Vol. 23 Nomor 2 Tahun 2015, hal. 1-16.
- Infodatin Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Situasi dan Analisis Lanjut Usia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- International Labour Organization. 2011. Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.
- _____. 2013. Decent Work Indicators: Guidelines For Producers And Users Of Statistical And Legal Framework Indicators. Geneva: ILO.
- Isnutomo, Maulita Dwasti. 2012. "Identifikasi permintaan kelompok usia lanjut terhadap kegiatan rekreasi di Kota Bandung." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 23 (2): 119-138. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2012.23.2.3>
- Jamalludin. 2021. "Keputusan Pekerja Lansia tetap Bekerja Pascapensiun dan Kaitannya dengan Kebahagiaan". *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 89-101. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2450>
- Julianti, Shinta. 2017. "Kekerasan Struktural terhadap Orang Lanjut Usia sebagai Hasil dari Konstruksi Sosial yang Merendahkan tentang Lansia (Studi Pada Penghuni Panti Werdha Di Bekasi)". *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9 (2): 67-79. journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7505
- Jumita, Rina, Azrimaidaliza Azrimaidaliza, and Rizanda Machmud. "Kemandirian Lansia Diwilayah Kerja Puskesmas Lampasi Kota Payakumbuh." *Jurnal*

- Junaidi, Erfit, & Prihanto, Purwaka H. 2017. "Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Keterlibatan Penduduk Lanjut Usia dalam Pasar Kerja di Provinsi Jambi". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 30(2), 197-205. <https://dx.doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.197-205>.
- Kholifah, Siti Nur. 2016. "Keperawatan Gerontik." Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan. Kementerian Kesehatan: Jakarta.
- Kuntjorowati, Elly. 2018. "Nyaman dan Tenang di Rumah Pelayanan Lanjut Usia". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 16 (2):209-222. <https://doi.org/10.31105/jpks.v16i2.1390>
- Lindesay, James. 1996. "Elderly People and Crime." *Reviews in Clinical Gerontology* 6(2): 199-204. <https://doi.org/10.1017/S0959259800004664>
- Maharani, Ayu. 2018. "Manfaat Berwisata untuk Lansia" www.klikdokter.com. Diakses pada 30 Oktober 2024. <https://www.klikdokter.com/info/sehat/kesehatan-lansia/manfaat-berwisata-untuk-lansia>
- Mankiw, N. G., Quah, E. & Wilson, P. 2012. *Principle of Economics: An Asian Edition*. Singapura: Cengage Learning.
- Mulyati, Rasha, dan Kenty Martiatuti. 2018. "Pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan lansia." *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 5 (1):1-8. <https://doi.org/10.21009/JKKP.051.01>
- Nugroho, Adityo. 2019. "Persepsi anak muda terhadap keberadaan lansia di Indonesia." *Journal of Urban Sociology* 2(2):44-55. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v2i2.996>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Rahmawati, Dina Atika. 2017. Kesejahteraan Lansia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 [skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi
https://www.academia.edu/40180264/Skripsi_Dina

Rosadi, A. 2017. "Dampak Pendidikan Keaksaraan Fungsional Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Ekonomi di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima". *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume IX (2).

Syukri, M. 2017. "PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL: KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM". *Jurnal Cakrawala Kependidikan* Vol. 6. No.2. September 2008:112–207.

Thabrany, H. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2020. (Laporan Penelitian) Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder. Jakarta. TNP2K.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. 2020. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020. Kemenko PMK.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Utami, Putu Ayu Sani. 2018. "Pengalaman Berwisata Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia". *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta* 5(3):420-427.
<http://dx.doi.org/10.35842/jkry.v5i3.268>

Wahyudi, Muchamad Zaid. 2019. "Siapkah Menyongsong Era Lansia?".
<https://interaktif.kompas.id/baca/siapkah-menyongsong-era-lansia/>

- Winahyu, Atikah Ishmah. 2020. Media Indonesia. October 1. Accessed November 4, 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/349491/pengembangan-silani-untuk-upaya-pemenuhan-hak-lansia>.
- World Health Organization (WHO). 2002. Active Ageing: A Policy Framework. Diunduh dari <https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/06/WHO-Active-Ageing-Framework.pdf> pada 29 Oktober 2024
- World Health Organization (WHO). 2012. Good Health Adds Life to Years. Global brief for World Health Day 2012. WHO reference number: WHO/DCO/WHO/2012 2.
- _____. 2024. *Ageing and health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- Wulandari, Wulandari and Maulana Irfan. 2023. "Active Aging Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia." *Share: Social Work Journal* 13, no. 1: 102-110. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46851>



LAMPIRAN

<https://www.kemendiknas.go.id>

Lampiran 1 Kuesioner Susenas Maret 2025



REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2025

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

MARET

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

101	Provinsi			
102	Kabupaten/Kota*			
103	Kecamatan			
104	Desa/Kelurahan*			
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan	2. Perdesaan	
106	Nomor Blok Sensus			
107	Nomor Kode Sampel			
108	Nomor Unut Bangunan Tempat Tinggal			
109	Nomor Unut Sampel Rumah Tangga			
110	Nama Kepala Rumah Tangga			
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)			
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga	Latitude (lintang) :	Longitude (bujur) :	

* Corel yang tidak perlu

SELAMAT PAGI/ISIAN/SORE/MALAM, KAMI SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAMAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN, DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU, KAMI SAYA AKAN MEWAWANCARAI BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIGRAHASKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

☐ Ya bersedia → Mulai wawancara

☐ Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → Blok XXII. Catatan

☐ Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXII Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pemeriksa.

BLOK II. KETERANGAN PENDATAAN

Urutan	Nama dan Kode/NIP	Jabatan	Waktu	Tanda Tangan
201. Pendata	 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Staf BPS Provinsi 1 Staf BPS Kab/Kota 2 Mitra 3	Tgl [] [] [] [] Bln [] []	
202. Pemeriksa	 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Staf BPS Provinsi 1 Staf BPS Kab/Kota 2 Mitra 3	Tgl [] [] [] [] Bln [] []	
203. Hasil pendataan rumah tangga	Terisi lengkap 1 Terisi tidak lengkap 2 Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendataan 3 Responden menolak 4 Rumah tangga pindah/bangunan tempat tinggal sudah tidak ada 5			

Blok XXII. Catatan

BLOK III. RINGKASAN

301	Banyaknya anggota rumah tangga		
302	Banyaknya anggota rumah tangga umur 0-4 tahun		
303	Banyaknya anggota rumah tangga umur 5 tahun ke atas		
304	Banyaknya anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas		
305	Banyaknya perempuan umur 10-54 tahun berstatus pernah kawin		

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian kuesioner, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

1. Kuasi Konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
2. Tulis isian selesai-jelasya dengan persiti hiam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
3. Gunakan Blok catatan untuk mencatat 'hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pemeriksa dan pengolah
4. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
5. Pendata harus meneliti/meriksa seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum kuesioner diserahkan ke pemeriksa
6. Perhatikan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada kuesioner.
7. Perhatian atau pilihan jawaban yang dicetak dengan huruf kapital harus dibaca, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kecil tidak perlu dibaca.
8. Kode pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh dilingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh dilingkari salah satu.
9. **Blok I** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
10. **Blok II** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
11. **Blok III** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
12. **Blok IV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
13. **Blok V** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
14. **Blok VI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
15. **Blok VII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
16. **Blok VIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
17. **Blok IX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
18. **Blok X** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
19. **Blok XI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
20. **Blok XII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
21. **Blok XIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
22. **Blok XIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
23. **Blok XV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
24. **Blok XVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
25. **Blok XVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
26. **Blok XVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
27. **Blok XIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
28. **Blok XX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
29. **Blok XXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
30. **Blok XXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
31. **Blok XXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
32. **Blok XXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
33. **Blok XXV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
34. **Blok XXVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
35. **Blok XXVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
36. **Blok XXVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
37. **Blok XXIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
38. **Blok XXX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
39. **Blok XXXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
40. **Blok XXXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
41. **Blok XXXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
42. **Blok XXXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
43. **Blok XXXV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
44. **Blok XXXVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
45. **Blok XXXVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
46. **Blok XXXVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
47. **Blok XXXIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
48. **Blok XL** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
49. **Blok XLI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
50. **Blok XLII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
51. **Blok XLIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
52. **Blok XLIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
53. **Blok XLV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
54. **Blok XLVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
55. **Blok XLVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
56. **Blok XLVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
57. **Blok XLIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
58. **Blok L** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
59. **Blok LI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
60. **Blok LII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
61. **Blok LIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
62. **Blok LIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
63. **Blok LV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
64. **Blok LVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
65. **Blok LVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
66. **Blok LVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
67. **Blok LIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
68. **Blok LX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
69. **Blok LXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
70. **Blok LXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
71. **Blok LXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
72. **Blok LXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
73. **Blok LXV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
74. **Blok LXVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
75. **Blok LXVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
76. **Blok LXVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
77. **Blok LXIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
78. **Blok LXX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
79. **Blok LXXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
80. **Blok LXXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
81. **Blok LXXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
82. **Blok LXXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
83. **Blok LXXV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
84. **Blok LXXVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
85. **Blok LXXVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
86. **Blok LXXVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
87. **Blok LXXIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
88. **Blok LXXX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
89. **Blok LXXXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
90. **Blok LXXXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
91. **Blok LXXXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
92. **Blok LXXXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
93. **Blok LXXXV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
94. **Blok LXXXVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
95. **Blok LXXXVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
96. **Blok LXXXVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
97. **Blok LXXXIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
98. **Blok LXXXX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
99. **Blok LXXXXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
100. **Blok LXXXXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
101. **Blok LXXXXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
102. **Blok LXXXXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
103. **Blok LXXXXV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
104. **Blok LXXXXVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
105. **Blok LXXXXVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
106. **Blok LXXXXVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
107. **Blok LXXXXIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
108. **Blok LXXXXX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
109. **Blok LXXXXXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
110. **Blok LXXXXXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
111. **Blok LXXXXXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
112. **Blok LXXXXXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
113. **Blok LXXXXXV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
114. **Blok LXXXXXVI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
115. **Blok LXXXXXVII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
116. **Blok LXXXXXVIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
117. **Blok LXXXXXIX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
118. **Blok LXXXXXX** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
119. **Blok LXXXXXXI** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
120. **Blok LXXXXXXII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
121. **Blok LXXXXXXIII** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
122. **Blok LXXXXXXIV** (tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**)
123. **Blok LXXXXXX**

Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir

Rs. 300.000,-

1,500,000.-

14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan Februari 2025.

Tahun lahir	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahun lahir	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tahun lahir	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Tahun lahir	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Tahun lahir	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935

Waktu mulai wawancara:

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART)	APAKAH HUBUNGAN DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA?	APAKAH STATUS PER-KAWINAN?	APAKAH LAQ-LAQ ATAU PUAH?	KAPRI (nama) DILAHIRKAN?	BERPAPA-KAH UMUR (nama)?	Jika berstatus kawin (40-42) APAKAH PASANGAN harus disisi <i>Jika>37 tahun, tulis '97'</i>	Jika berstatus kawin (40-42) APAKAH PASANGAN harus disisi <i>Jika>37 tahun, tulis '97'</i>	Jika berstatus kawin (40-42) APAKAH PASANGAN harus disisi <i>Jika>37 tahun, tulis '97'</i>	No. urut ART
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	
1		1			/ /					
2					/ /					
3					/ /					
4					/ /					
5					/ /					
6					/ /					
7					/ /					
8					/ /					
9					/ /					
10					/ /					

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat.

Cek sekali lagi, apakah kepengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.

Jika terdapat ART yang pengurusan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.

Code 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)

9. Lainnya (famili lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)
8. Pembantu/sopir
6. Cucu
4. Anak angkat
3. Anak kandung/tiri
5. Menantu
7. Orang tua/mertua

1. Year	2. Year	3. Year	4. Year	5. Year	6. Year	7. Year	8. Year	9. Year	10. Year	11. Year	12. Year	13. Year	14. Year	15. Year	16. Year	17. Year	18. Year	19. Year	20. Year	21. Year	22. Year	23. Year	24. Year	25. Year	26. Year	27. Year	28. Year	29. Year	30. Year	31. Year	32. Year	33. Year	34. Year	35. Year	36. Year	37. Year	38. Year	39. Year	40. Year	41. Year	42. Year	43. Year	44. Year	45. Year	46. Year	47. Year	48. Year	49. Year	50. Year	51. Year	52. Year	53. Year	54. Year	55. Year	56. Year	57. Year	58. Year	59. Year	60. Year	61. Year	62. Year	63. Year	64. Year	65. Year	66. Year	67. Year	68. Year	69. Year	70. Year	71. Year	72. Year	73. Year	74. Year	75. Year	76. Year	77. Year	78. Year	79. Year	80. Year	81. Year	82. Year	83. Year	84. Year	85. Year	86. Year	87. Year	88. Year	89. Year	90. Year	91. Year	92. Year	93. Year	94. Year	95. Year	96. Year	97. Year	98. Year	99. Year	100. Year											
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

—

Lanjutan Lampiran 1

KONSEP DAN DEFINISI

➤ **Pertanyaan 203: Hasil Pendaftaran Rumah Tangga**

- Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap.
- Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pendataan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota.
- Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendataan, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pendataan.
- Responden menolak, apabila responden menolak untuk diwawancarai.
- Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pendataan. Misalnya, rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain.

➤ **Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga**

Kejala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.

➤ **Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini?**

Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dan responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut.

➤ **Pertanyaan 605: Apakah Seding/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah?**

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

➤ **Pertanyaan 611: Apakah Seding/Pernah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket ABC)?**

Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket ABC) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian lainnya.

➤ **Pertanyaan 613: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Seding/Pernah Didikuti?**

Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki: jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket ABC).

➤ **Pertanyaan 614: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Seding/Pernah Diduduki?**

Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkat/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket ABC) di sekolah negeri maupun swasta. **Tamat sekolah/situation pendidikan** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket ABC) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. **Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/situation pendidikan.**

KONSEP DAN DEFINISI

➤ **Pertanyaan 615: Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki?**

Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

➤ **Pertanyaan 813: Dalam 3 Bulan Terakhir, Seberapa Sering Menggunakan Internet?**

Minimal satu kali dalam sehari, yaitu setiap hari menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong mengakses internet yang tinggi.

Minimal satu kali dalam seminggu, tetapi tidak setiap hari, yaitu tidak setiap hari menggunakan internet, tetapi dalam 1 minggu pernah mengakses minimal 1 kali, artinya orang tersebut tergolong jarang mengakses internet.

Tidak mengakses lebih dari seminggu, yaitu dalam 3 bulan terakhir, pernah lebih dari 1 minggu tidak mengakses internet, artinya orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet.

➤ **Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2024, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Korban Kejahatan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya?**

Korban kejahatan adalah seseorang yang di atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

➤ **Pertanyaan 1304: Jenis Imunisasi**

Jenis Imunisasi	Cara Pemberian	Umur
Hepatitis B (<24 jam)	Disuntikkan di paha.	Diberikan sesaat setelah bayi lahir sampai bayi berumur 7 hari.
BCG	Disuntikkan di pangkal lengan kanan atas dan biasanya menimbulkan bekas luka.	Diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum berumur 1 bulan.
Polio Tetes 1-4	Dileteskan ke dalam mulut.	Diberikan 4 kali pada umur 1, 2, 3, dan 4 bulan.
DPT-HB-Hib 1-3	Disuntikkan di paha, biasa diberikan bersama dengan vaksin polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.
Rota Virus (RV) 1-3	Dileteskan ke dalam mulut.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.
PCV 1-3	Disuntikkan di paha kiri, biasanya diberikan bersama vaksin DPT-HB-Hib dan Polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 12 bulan.
Polio suntik (PV) 1-2	Disuntikkan di paha kiri.	Diberikan mulai umur 2 atau 3 bulan.
Campak-Rubella (MR)	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan satu kali mulai umur 9 bulan.
Japanese Encephalitis (JE)	Disuntikkan di lengan atas.	Diberikan mulai umur 9 bulan di wilayah tertentu sesuai peraturan Kementerian Kesehatan (Bali, Kalimantan Barat, Di Yogyakarta).
DPT- Hib-HB lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kanan.	Diberikan pada umur 18 bulan.
Campak-Rubella (MR) Lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan pada umur 18-24 bulan.

3

3

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN											
Nomor Induk Kependudukan											
(Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART)											
1. Jika ART mempunyai NIK, tetapi tidak sesuai format → pada empat digit terakhir 506 tuliskan 9998, pada 507 tuliskan kode 9, dan pada 508 tuliskan sumber data NIK sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan oleh ART, dan pada 510 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXII Catatan.											
2. Jika ART mempunyai NIK, tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan → pada empat digit terakhir 506 tuliskan 9998 dan pada 507, 508, dan 510 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXII Catatan.											
No. Urut ART	Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4)	No. Urut Keluarga	No. Urut Ibu Kandung	No. Urut Ayah Kandung	APAKAH (nama) MEMILIKI NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN (NIK)?	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL?	Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK	Sumber Data Nomor Induk Kependudukan	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL?	(Dilisi oleh pemeriksa) Apakah isian 507 sama dengan isian 405? (Cek isian 405)	
No. Urut ART	APAKAH (nama) MEMILIKI BUKU AKTA NIKAH DARI KELUARGA KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA?	(Isikan 00 bila ayah kandung tinggal di rumah tangga ini)	(Isikan 00 bila ibu kandung tinggal di rumah tangga ini)	(Isikan 00 bila ayah kandung tinggal di rumah tangga ini)	1. Ya 5. Tidak 509 ←	1. Laki-laki Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3 2. Perempuan Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7 5. Tidak dapat ditentukan Jika tidak termasuk kode 1 atau 2	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	
401	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan.											
Kode 501: Kepemilikan Buku Akta Nikah 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu											
Kode 507: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK 1. Laki-laki Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3 2. Perempuan Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7 5. Tidak dapat ditentukan Jika tidak termasuk kode 1 atau 2											
Kode 508: Sumber Data NIK 1. KK 2. KTP 3. Lainnya											
Kode 509: Kepemilikan Akta Kelahiran 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu											

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASIDAN PENDIDIKAN										
Untuk ART Semua Umur			Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas		Untuk ART Umur 0-10 Tahun		Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas			
No. Urut ART	Di MANAKAH TEMPAT LAHIR (nama)? Tempat lahir adalah tempat tinggal ibu (nama) ketika melahirkan (nama). Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pemeriksa)		Di MANAKAH TEMPAT TINGGAL (nama) 5 TAHUN YANG LALU (FEBRUARI 2020)? Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pemeriksa)		APAKAH (nama) SEDIKANG, PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH?	Jika pernah/ masih (605= 1,2. atau 3), APA JENIS PENDIDIKAN PRASEKOLAH-NYA? (Kode)	Jika tidak/ belum pernah (606= 1,2. atau 3), SEDIKANG/PERNAH MENGIKUTI KEGIATAN KURSUS SEPERTI BIMA, SENI, DLL.? (Kode)	APAKAH (nama) DAPAT MEMBACA DAN MENULIS KALIMA SEDIKANG/ DAPAT BACA SEDIKANG/ DENGAT MENGOUMAHAI:		
	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA, Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA, Jika di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota			HURUF LATIN/ ALFABET? 1.Ya 5.Tidak	HURUF ARAB/ HURUF LAINNYA? (CONTOH: JAWA, KAWI, CINA, DLL.)		
401	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
1							A B X			
2							A B X			
3							A B X			
4							A B X			
5							A B X			
6							A B X			
7							A B X			
8							A B X			
9							A B X			
10							A B X			
Kode 605: Partisipasi Prasekolah Kode 606: Jenis Prasekolah Kode 607: Kegiatan Kursus 1. Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2024/2025) 1. Taman Kanak-kanak 2. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2024/2025) 2. Bustanul Athfal 3. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2024/2025 3. Raudatul Athfal 4. Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah 4. Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) 5. Kelompok Bermain 6. Taman Pentipan Anak A. Ya, kursus pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung B. Ya, kursus bukan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung X. Tidak sedang/ pernah mengikuti kegiatan kursus										

Untuk ART Umur 5-24 Tahun

Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VII. KETERANGAN KEPEMILIKAN TABUNGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN												
Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas												
No Und ART	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIRI REKENING TABUNGAN BANK ATAS NAMA SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA DI LEMBAGA KEUANGAN (PERBANKAN, KOPERASI)?		DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PRODUKSI/AYAHAN JASA KEUANGAN (KONVENSIONAL ATAU SYARIAH) SEPERTI: TABUNGAN, KREDIT, DEPOSITO, SAHAM, REKSADANA, ASURANSI, PEMBAYARAN KENDARAAN, PINJAMAN ONLINE, DLL.?		SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA SAUA KEGIATAN YANG DILAKUKAN (nama)? (Pilihan jawaban harus dibacakan)		Jika tidak bekerja (703 pilihan A tidak diilangkan) SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIRI/PEKERJAAN/USHA, TETAPI SEMENTARA TIDAK BEKERJA?		Jika bekerja atau sementara tidak bekerja 703-pilihan A diilangkan atau 704-1) Tuliskan selengkap-lengkapnyanya (Kode lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama diisi oleh pemeriksa. Kode dapat dilihat pada halaman terakhir VSEN25.K)		Selama SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA (nama) DARI PEKERJAAN UTAMA?	
	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak
401												
1					A B C D X							
2					A B C D X							
3					A B C D X							
4					A B C D X							
5					A B C D X							
6					A B C D X							
7					A B C D X							
8					A B C D X							
9					A B C D X							
10					A B C D X							
Penjelasan 702: Lembaga Jasa Keuangan a. Perbankan: Bank umum (konvensional atau syariah) dan unit usaha syariah, Bank Perkotaan Rakyat (BPR), (konvensional atau syariah). b. Pasar Modal: Manajer investasi (konvensional atau syariah, perusahaan efek, sekuritas, layanan urun dana (konvensional atau syariah). c. Lembaga Pembiayaan: Perusahaan pembiayaan, unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura (konvensional atau syariah). d. Perasuransian: Perusahaan asuransi (konvensional atau syariah), unit syariah perusahaan asuransi. e. Dana Pensiun: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPK) (konvensional atau syariah), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (konvensional atau syariah), unit syariah DPK. f. Lembaga Keuangan Mikro (LKM): LKM (konvensional atau syariah), Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Maaf Waa Tahmil (BMT). g. Pergadaian: Perusahaan gadai (konvensional atau syariah), unit usaha syariah perusahaan gadai. h. Fintech Lending: Fintech lending/finjangan online (konvensional atau syariah).												
Kode 706: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan (Jika 704-1, 706 tidak boleh bertkode 5 atau 6) 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar												

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VIII. KETERANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
No. Unit ART	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN TELEFON SELULER (HP)? 1 Ya 5. Tidak	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN TELEFON SELULER (HP) NIKABEL?	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, BERAPA JUMLAH SIMCARD AKTIF YANG DIGUNAKAN (nama) PADA HP, TABLET, ATAU PERANGKAT LAINNYA, MENURUT PROVIDER/ OPERATOR BERIKUT:	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, X, YOUTUBE, INSTAGRAM, WHATSAPP, DLL)? 1 Ya 5. Tidak → ART berikutnya/ Blok IX			DALAM 3 BULAN TERAKHIR, MEDIA APA SAMA YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, DI MANA SAMA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, UNTUK APA SAMA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, SEBERAPA SERING (nama) MENGGUNAKAN INTERNET?		
				TEKONSEL?	INDOSAT/TIR?	XL AKAYA?					LAINNYA?	
401	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
• Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus memiliki/menggunakan HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir. • Memiliki/menggunakan HP apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/menggunakan HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir. • Menggunakan Internet apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan meskipun hanya tinggal melanjutkan. • Mengakses Internet untuk hiburan misalnya download game, menonton tv, download/monton film/video, mendengarkan radio, download gambar dan musik menggunakan internet. • Pembuatan konten digital misalnya mengunggah konten, menggunakan cloud storage (Google Drive, Dropbox dll), menggunakan software yang diupload melalui internet untuk mengedit dokumen (teks, spreadsheet, presentasi), dll.												
Kode 812: Frekuensi Menggunakan Internet 1. SETAP HARI 2. MINIMAL SATU KALI DALAM SEMINGGU, TETAPI TIDAK SETAP HARI 3. TIDAK MENGAKSES LEBIH DARI SEMINGGU												

Lanjutan Lampiran 1

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN																							
SEJAK 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024, APAKAH (nama) PERAH MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN BERAPA KEJADIAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7, Tulis '7')				SEJAK 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024, BERAPA KALI (nama) MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN BERAPA KEJADIAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7, Tulis '7')																			
Jika pernah bepergian (90/1=1)				SEJAK 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024, APAKAH (nama) PERAH MENJADI KORBAN KEJAHATAN DENGAN PENGURANGAN, PENGURANGAN KEJAHATAN, PELECEHAN SEKSUAL, ATAU LAINNYA? 1 Ya 5 Tidak ART berikutnya ← Blok X				PENGURANGAN				PENGURANGAN				PELECEHAN SEKSUAL				LAINNYA			
BERAPA KALI (nama) BERPERGIAN SELAMA PERIODE: 1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024? (Kali)				PADA KONDISI BERPERGIAN YANG TERBAKUR, APA Maksud utama (nama) MELAKUKAN BERPERGIAN? (Kode)				Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi		Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi		Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi		Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi		Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi		Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi					
1				2				3		4		5		6		7		8					
1				2				3		4		5		6		7		8					
2				3				4		5		6		7		8		9					
3				4				5		6		7		8		9		10					
4				5				6		7		8		9		10		11					
5				6				7		8		9		10		11		12					
6				7				8		9		10		11		12		13					
7				8				9		10		11		12		13		14					
8				9				10		11		12		13		14		15					
9				10				11		12		13		14		15		16					
10				11				12		13		14		15		16		17					
Kode 904: Maksud Utama Bepergian				Kode 904: Maksud Utama Bepergian				Kode 904: Maksud Utama Bepergian				Kode 904: Maksud Utama Bepergian				Kode 904: Maksud Utama Bepergian							
01. Berbur/rekreasi				07. Mengunjungi teman/keluarga				• Bepergian rutin adalah bepergian ke tempat tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.				• Suatu peristiwa kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:				a. Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.							
02. Profesi/bisnis				08. Mudik/pulang kampung hari raya				• Pelaporan kejahatan yang dimaksud adalah jika suatu kejadian kejahatan secara resmi dilaporkan melalui kanal pelaporan/				b. Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.											
03. Misi/perguruan/kongres/seminar				09. Olahraga/kesenian				• Selain Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian.				c. Polisi mengelolanya sendiri atau tertangkap tangan.											
04. Training/pendidikan/pelatihan				10. Belanja/shopping																			
05. Kesehatan/berobat				11. Lainnya																			
06. Berziarah/keagamaan																							

Lanjutan Lampiran 1

BLOK X. KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART UMUR 2 TAHUN KE ATAS)											
Isian kode jika umur ≥ 2 tahun atau kode 0 jika umur < 2 tahun	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN PENCIHATAN?	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN PENDENGARAN?	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN BERJALAN/NAIK TANGGA?	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN MENGGUNAKAN/ MENGGERAKAN TANGAN/ARI?	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN DALAM HAL MENINGAT ATAU BERKONSENTRASI?	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN EMOSIONAL?	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN BERBICARA DAN/ATAU MEMAHAMI BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG LAIN?	APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/ GANGGUAN UNTUK MENJURUS DIRI SENDIRI?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENJERMA BANTUAN SOSIAL DARI PBIERINTAH PUSAT BERUPA ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)?	1. Ya 5. Tidak	1010
No. Urut /ART	1. Ya, sama sekali tidak bisa melihat	5. Ya, sama sekali tidak bisa mendengar	1. Ya, sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga	5. Ya, sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ari	1. Ya, selalu mengalami kesulitan	5. Ya, selalu mengalami gangguan	1. Ya, sama sekali tidak bisa memahami	(SEPERTI MANDI, MAKAN, BERPAKAIAN, BUANG AIR, BESAR, BUANG AIR KECIL)	1. Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri	1. Ya 5. Tidak	1009
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

• Gangguan/keterbatasan fungsi dianda oleh kondisi ketidakmampuan atau kehilangan ataupun kelainan bak dan psikologis, fisiologis, maupun struktur atau fungsi anatomis.

• Petugas tidak dipakenanmen memutuskan bahwa responden tidak mengalami gangguan fungsional tertentu berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata.

• Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain: kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/mengingat/menggunakan jwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan benjan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan tangan/ari.

• Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan.

• Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yaitu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi menial, pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN																					
No. Urut ART	JAMINAN KESEHATAN APA SAMA YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SEBILAN TERAKHIR, APAKAH KESEHATAN KELUHAN MEMPUNYAI KESEHATAN KELUHAN (PAINAS, BATUK, PILEK, DIARE, ASMA, PUSING, PENYAKIT KROMIS, DSB.)?	DALAM SEBILAN TERAKHIR, APAKAH PERAWAT PERAWAT PERAWAT RAWAT JALAN?	DALAM SEBILAN TERAKHIR, APAKAH PERAWAT PERAWAT PERAWAT RAWAT JALAN?	DALAM SEBILAN TERAKHIR, DI MANA SAMA TERJADI (nama) RAWAT JALAN?	DALAM SEBILAN TERAKHIR, BERAPA KALI RAWAT JALAN?	JAMINAN KESEHATAN (nama) YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN?	Jika 1109 pilihan A, B, dan C tidak dilingkari APA SAMA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK RAWAT JALAN?													
								A. Tidak punya biaya (transportasi, dll.) B. Tidak punya biaya (transportasi, dll.) C. Kartu JKN tidak aktif D. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda E. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi F. Tidak ada fasilitas yang mudah diakses dari rumah responden G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan H. Waktu tunggu pelayanan lamanya/re panjang I. Lainnya, tuliskan: X. Tidak memiliki JKN/Jamkesda													
	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110											
1	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
2	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
3	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
4	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
5	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
6	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
7	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
8	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
9	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										
10	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	X										

Kode 1106: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan

1. Tidak punya biaya berobat
2. Tidak punya biaya transportasi
3. Tidak ada yang mendampingi
4. Mengobati sendiri
5. Merasa tidak perlu
6. Tidak ada sarana transportasi
7. Waktu tunggu pelayanan lama
8. Lainnya

Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan, seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti: panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebelum terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan, seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti: panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebelum terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Kode 1109: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan

1. Tidak punya biaya berobat
2. Tidak punya biaya transportasi
3. Tidak ada yang mendampingi
4. Mengobati sendiri
5. Merasa tidak perlu
6. Tidak ada sarana transportasi
7. Waktu tunggu pelayanan lama
8. Lainnya

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK											
Jika 1204 pilihan A.B. dan C tidak dilingkari APA SALAH ALASAN (nama) TIDAK MELAKUKAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK RAWAT INAP? A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan B. Tidak ada biaya (transportasi, dll) C. Kartu JKN tidak aktif D. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda E. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi F. Tidak ada fasilitas yang mudah dijangkau dari rumah/responden G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan H. Waktu tunggu pelayanan lama/lama nite panjang I. Lainnya, tuliskan: X. Tidak memiliki JKN/Jamkesda											
JAMINAN KESEHATAN APA SALAH YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK RAWAT INAP? A. BPJS Kesehatan Penierma B. BPJS Kesehatan Non-PBI C. Mandiri D. Asuransi swasta E. Perusahaan/kantor X. Tidak menggunakan											
DALAM SETAHUN TERAKHIR, BERAPA HARI RAWAT INAP? (Hari)											
DALAM SETAHUN TERAKHIR, DI MANA SALAH TEMPAT (nama) RAWAT INAP? A. RS Pemamintah B. RS Swasta C. Klinik D. Praktik bidan E. Puskesmas F. Pelayanan kesehatan tradisional G. Lainnya											
DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERIAHI MEROKOK RAWAT INAP? 1. Ya 5. Tidak 1206											
Untuk ART Umur 15 Tahun ke Atas SELAMA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK MENGGUNAKAN ROKOK ELEKTRIK/VAPE? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari 5. Tidak 8. Tidak tahu											
SELAMA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK TENGAH? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari 5. Tidak 8. Tidak tahu											
APAKAH DULU, SEBELUM SEBULAN TERAKHIR (nama) PERIAHI MEROKOK TENGAH? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari 5. Tidak 8. Tidak tahu											
No und	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208			
1	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
2	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
3	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
4	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
5	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
6	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
7	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
8	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
9	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			
10	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	☐	☐			

- **Rawat inap** adalah upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap selama satu malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan.
- **Responden yang pernah rawat inap** adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pendataan sedang menjalani rawat inap.
- **Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap** adalah bila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.
- **Jumlah hari** adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir.

- **Rokok elektrik/vape** adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut merupakan campuran zat, seperti nikotin dan propylene glycol. Alat rokok elektrik/vape terdiri atas komponen pengisap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan wadah cairan yang akan diuapkan.
- **Merokok** merupakan aktivitas membuat tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebuah tabir/riser sampai saat pendataan.
- **Rokok tembakau** meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, lisong, pipa cangkling/lingkawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap shisha/waterpipe.

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XIII. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)					
PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3		
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401): Nama & No. Urut Pemberi Informasi	_____	_____	_____		
1301. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)	□□ bulan	□□ bulan	□□ bulan		
IMUNISASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)					
SAYA AKAN MENYAYIKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI					
1302. APAKAH (nama balita) PERNAH DIBERI IMUNISASI?	Ya 1 Tidak 5 → 1307	Ya 1 Tidak 5 → 1307	Ya 1 Tidak 5 → 1307		
1303. APAKAH BAPAK/IBU MEMPUYAI CATATAN IMUNISASI SEPERTI BUKU KIA/KIMS ATAU KARTU BERORAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLEHAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1304 i Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 } 1304 ii Tidak ada kartubuku 5	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1304 i Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 } 1304 ii Tidak ada kartubuku 5	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1304 i Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 } 1304 ii Tidak ada kartubuku 5		
1304. Jenis imunisasi Pada 1304 i isian tanggal, bulan, dan tahun: Tulis 44 jika kamu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada Tulis 66 jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan. Tulis 00 jika imunisasi tidak pernah diberikan.	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal Bulan Tahun (DD/MM/YY) Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberikan imunisasi 5. Tidak pernah diberikan imunisasi	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal Bulan Tahun (DD/MM/YY) Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberikan imunisasi 5. Tidak pernah diberikan imunisasi	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal Bulan Tahun (DD/MM/YY) Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberikan imunisasi 5. Tidak pernah diberikan imunisasi		
A. HEPATITIS B (<24 JAM)	___/___/___	___/___/___	___/___/___		
B. BCG	___/___/___	___/___/___	___/___/___		
C. POLIO TETES 1	___/___/___	___/___/___	___/___/___		
D. DPT-HB-Hib 1	___/___/___	___/___/___	___/___/___		
E. POLIO TETES 2	___/___/___	___/___/___	___/___/___		
F. ROTA VIRUS (RV) 1	___/___/___	___/___/___	___/___/___		
G. PCV 1	___/___/___	___/___/___	___/___/___		

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN		BALITA 1		BALITA 2		BALITA 3			
Nama dan No. Urut Balita (Salin dan Blok IV 402 dan 401): Jenis imunisasi Pada 1304, isian tanggal, bulan, dan tahun: Tulis '44' jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis '66' jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan. Tulis '00' jika imunisasi tidak pernah diberikan.		Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)		Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberikan imunisasi 5. Tidak pernah diberikan imunisasi		Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)		Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberikan imunisasi 5. Tidak pernah diberikan imunisasi	
H. DPT-HB-Hib 2									
I. POLIO TETES 3									
J. Rota Virus (RV) 2									
K. PCV 2									
L. DPT-HB-Hib 3									
M. POLIO TETES 4									
N. POLIO SUNTIK (IPV) 1									
O. Rota Virus (RV) 3									
P. CAMPYLO-BELLER (MR)									
Q. POLIO SUNTIK (IPV) 2									
R. JAPANESE ENCEPHALITIS (JE)									
S. PCV 3									
T. DPT-HB-Hib LANJUTAN									
U. CAMPYLO-BELLER (MR) LANJUTAN									
Pastikan tidak ada pencatatan imunisasi yang terlewat (Periksa kembali Isian 1304)									

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401):			
1305. Di MANA SAMA (nama balita) MENDAPAT IMUNISASI?	RS Pemerintah/RS Swasta A Klinik B Praktik dokter/bidan C Puskesmas/Pustu/Pusling D Polindes/Poskesdes E Posyandu F Lainnya, tuliskan: G	RS Pemerintah/RS Swasta A Klinik B Praktik dokter/bidan C Puskesmas/Pustu/Pusling D Polindes/Poskesdes E Posyandu F Lainnya, tuliskan: G	RS Pemerintah/RS Swasta A Klinik B Praktik dokter/bidan C Puskesmas/Pustu/Pusling D Polindes/Poskesdes E Posyandu F Lainnya, tuliskan: G
1306. SIAPA SAMA YANG MEMBERIKAN IMUNISASI PADA (nama balita)?	Dokter spesialis anak A Dokter umum B Bidan C Perawat D Tenaga kesehatan lainnya E Lainnya, tuliskan: F	Dokter spesialis anak A Dokter umum B Bidan C Perawat D Tenaga kesehatan lainnya E Lainnya, tuliskan: F	Dokter spesialis anak A Dokter umum B Bidan C Perawat D Tenaga kesehatan lainnya E Lainnya, tuliskan: F
1307. Jika balita tidak pernah diberi imunisasi (1302 = 5), APAKAH (nama balita) TIDAK PERHAH IMUNISASI?	A. TIDAK TAHU MANFAAT IMUNISASI B. TIDAK MEMILIKI BIAYA C. TIDAK TAHU PROGRAM IMUNISASI D. KHAWATIR DENGAN EFEK SAMPING VAKSIN E. KHAWATIR DENGAN KANDUNGAN DALAM VAKSIN F. RAGU TERHADAP EFEKTIVITAS IMUNISASI G. LAINNYA, tuliskan:	A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 5 F) 5 G) 5	A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 5 F) 5 G) 5
ASI DAN MP-ASI (UNTUK ART UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1301, berikan tanda centang (✓)	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV		
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV		
1308. A. APAKAH (nama balita) PERNAH DISUSUI/DIBERI ASI SUSU IBU (ASI)?	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV
B. PADA UMUR BERAPA (nama balita) PERTAMA KALI DIBERIKAN MAKANAN/MINUMAN SELAIN ASI? (Isikan 09, jika belum pernah diberikan makanan/minuman selain ASI)	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 } 1310	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 } 1310	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 } 1310

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401):			
1309. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSUI/DIBERI ASI?	Ya1 Tidak8 Tidak tahu5	Ya1 Tidak8 Tidak tahu5	Ya1 Tidak8 Tidak tahu5
1310. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MENEMPA CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKONSUMSI DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
A. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT)? Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta.	A)1 B)1 C)1	A)1 B)1 C)1	A)1 B)1 C)1
B. MINUMAN LAIN TANPA GULA (AIR PUTIH, SUP/KALDU, TEH/KOPI TAWAR, AIR TAJIN, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
C. MINUMAN BERPEMANIS GULA (JUS BUAH, MINUMAN RINGAN, TEH/KOPI MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
1311. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN, BAK BERUPA MAKANAN PADAT, MAKANAN SETENGGAH PADAT, ATAU MAKANAN LUNAK? Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
1312. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
A. BUAH DAN LEMBUHAN (NASI, BUBUR, JAGUNG, PASTA, ROTIPANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL)?	A)1 B)1 C)1 D)1 E)1 F)1 G)1 H)1	A)1 B)1 C)1 D)1 E)1 F)1 G)1 H)1	A)1 B)1 C)1 D)1 E)1 F)1 G)1 H)1
B. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TAJAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
C. PRODUK TURUNAN SUSU (KEJU, YOGURT, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
D. DAGING IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGINGKAN DALAM KALENG, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
E. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
F. BUAH DAN SAYUR TINGKAT TINGKAT A, TERMASUK SAYURAN BERDAUN GELAP (WORTEL, LABU, BAYAM, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
G. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8
H. MAKANAN MANIS, GIBIH, DAN MAKANAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT YANG DIGORENG (BAKWAJ, KENTANG GORENG, SINGKONG GIBIH, DONAT, CAKE, BISKUIT, MAKANAN RINGAN, PERMEN, CONLAT, DLL)?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XIV. KETERANGAN PENOLONG PERSALINAN (UNTUK ART PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):	 tahun tahun	 tahun tahun	 tahun tahun
1401. A. APAKAH (nama) PERUAH HAMIL?	Ya, pernah hamil..... 1 Ya, sedang hamil..... 2 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/ Blok XV	Ya, pernah hamil..... 1 Ya, sedang hamil..... 2 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/ Blok XV	Ya, pernah hamil..... 1 Ya, sedang hamil..... 2 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/ Blok XV
B. PADA UMUR BERAPA (nama) HAMIL PERTAMA KALI?	 tahun	 tahun	 tahun
1402. A. APAKAH (nama) PERUAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP?	Ya..... 1 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/Blok XV	Ya..... 1 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/Blok XV	Ya..... 1 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/Blok XV
B. PADA UMUR BERAPA (nama) MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP PERTAMA KALI?	 tahun	 tahun	 tahun
1403. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu..... 2 PPK berikutnya/Blok XV	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu..... 2 PPK berikutnya/Blok XV	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu..... 2 PPK berikutnya/Blok XV
1404. A. DI MANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Klinik..... 2 Praktik dokter/bidan/perawat... 3 Puskesmas..... 4 Pustu..... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya..... 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Klinik..... 2 Praktik dokter/bidan/perawat... 3 Puskesmas..... 4 Pustu..... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya..... 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Klinik..... 2 Praktik dokter/bidan/perawat... 3 Puskesmas..... 4 Pustu..... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya..... 8

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407):	 tahun	 tahun	 tahun
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8
1405. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XV. AKSES TERHADAP MAKANAN (DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)		BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
Nama dan No. Urut Pemberi Informasi:		1602. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI? Milik sendiri.....1 Kontrak/sewa.....2 Bebas sewa.....3 Dinas.....4 Lainnya, tuliskan:.....5 1604	
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN			
1501. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA? Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Menolak menjawab.....9			
1502. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA? Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Menolak menjawab.....9		1603. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI? Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART.....1 SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis.....2 SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis.....3 Sertifikat selain SHM (SHGB, SHMSRS).....4 Surat bukti lainnya (Gink, Ajb, Letter C, dll).....5 Tidak punya.....6	
1503. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA? Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Menolak menjawab.....9		1604. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL? m ² (Bulatkan dalam meter persegi) Ya.....1 Tidak.....5	
1504. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTENTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK Mendapatkan Makanan? Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Menolak menjawab.....9		1605. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN- NYA/ANAKNYA MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI? Ya.....1 Tidak.....5	
1505. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA? Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Menolak menjawab.....9		1606. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS? Beton.....1 Genteng.....2 Seng.....3 Kayu/sirap.....4 Asbes.....5 Bambu/jerami/juk/daun-daunan/lumbia.....6 Lainnya.....7	
1506. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK Mendapatkan Makanan? Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Menolak menjawab.....9		1607. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS? Tembok.....1 Plesteran anyaman bambu/kawat.....2 Kayu/papan/balang kayu.....3 Bambu/anyaman bambu.....4 Lainnya.....5	
1507. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARIAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA? Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Menolak menjawab.....9		1608. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS? Marmer/granit.....1 Keramik/ubin/tegelleraso.....2 Parket/vinil/karpet.....3 Kayu/papan.....4 Semen/bata merah.....5 Bambu/lantah.....6 Lainnya.....7	
BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN			
Nama dan No. Urut Pemberi Informasi:			
1601. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI? (Isikan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)			

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN		BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1609 A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri 1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 2 Ada, di MCK komunal 3 Ada, di MCK umum/sepapan menggunakan 4 Ada, ART tidak menggunakan 5 } 1610 A Tidak ada fasilitas 6	B. <i>[Jika 1610 A = 3 (leding)]</i> APAMEDA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM?	Perpipaan meteran 1 Hidran umum 2 Keran umum 3 Terminal air 4 } 1611 A Tidak ada 5 Tidak tahu 6 Tidak tahu 8
B. <i>[Jika 1609 A = 1, 2, atau 3]</i> APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Leher angsa 1 Plegsengan dengan tutup 2 Plegsengan tanpa tutup 3 Cemplung/cubluk 4	C. <i>[Jika 1610 A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)]</i> LIMBAH KOTORAN TITIKUA TERDEKAT?	< 10 m 1 ≥ 10 m 2 Tidak tahu 8
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUNGAN AKHIR TITUA?	Tangki septik 1 IPAL 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut 3 } 1610 A Lubang tanah 4 Pantai/tanah lapang/kebun 5 Lainnya 6	1611 A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Di rumah/kawasan dalam pagar rumah 1 → 1612 Di luar kawasan pagar rumah 2 □ □ □ menit Tidak tahu 998
D. SUDAH BERPAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?	Tidak tahu 98 □ □ tahun	B. BERPAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?	Ya 1 Tidak 8 Tidak tahu 998
E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR , BERPAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIKOSONGKAN/ DILAKUKAN PENYEDOTAN?	□ kali (isikan 6, jika 6 kali atau lebih) Tidak pernah 7 Tidak tahu 8	1612. DALAM SETAHUN TERAKHIR , APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENGALAMI KEKURANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?	Ya 1 Tidak 8 Tidak tahu 998
1610 A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasan bermerek 1 } 1611 A Air isi ulang 2 Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tak terlindung 6 } 1610 C Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/lingasi) 9 } 1611 A Air hujan 10 Lainnya 11	1613. BAGAIMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?	Ya Tidak A. KERUH 1 5 B. BERWARNA 1 5 C. BERASA 1 5 D. BERBAU 1 5 E. BERBAU 1 5
1610 A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasan bermerek 1 } 1611 A Air isi ulang 2 Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tak terlindung 6 } 1610 C Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/lingasi) 9 } 1611 A Air hujan 10 Lainnya 11	1614 A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCI/DLL. ?	Air kemasan bermerek 1 } 1615 A Air isi ulang 2 Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tak terlindung 6 Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 } 1615 A Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/lingasi) 9 Air hujan 10 Lainnya 11

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1618. APAKAH RUMAH TANGGA MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DARI BEBERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5
1619. A. DALAM SEBUHAN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENEMPAH LAYANAN PENGUMPULAN SAMPAH DARI RUMAH KE RUMAH?	Ya 1 Tidak 5 → 1620.A
B. APAKAH PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BEBERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5 Tidak tahu 8
C. BERAPA KALI PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari 1 Setiap 2-3 hari sekali 2 Setiap seminggu sekali 3 Tidak rutin 5
1620. A. DALAM SEBUHAN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENGINJAKAN TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	Ya 1 Tidak 5 → 1621
B. BERAPA PERkiraan JARAK DARI RUMAH KE TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	≤ 200 m 1 Lebih dari 200 m 2
C. APAKAH PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL) MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DARI BEBERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5 Tidak tahu 8
D. BERAPA KALI PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL) MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari 1 Setiap 2-3 hari sekali 2 Setiap seminggu sekali 3 Tidak rutin 5 Tidak tahu 8

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. <i>Jika 1614.A = 3 (reding)</i> APAKAH UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MANDI/CUCI/DLL?	Perpustakaan 1 Perpustakaan tanpa meteran 2 Hidran umum 3 Keran umum 4 Terminal air 5 Tidak ada 6 Tidak tahu 8
1615. A. Bolehkah saya melihat tempat di mana anggota rumah tangga anda biasa mencuci tangan?	Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 } 1616.A Tidak diizinkan melihat 4 } Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5
B. Anad ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau bakom, ember, wadah air atau sejenisnya.	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5
C. Apakah ketersediaan sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun/deterjen 1 Tidak tersedia sabun/deterjen 5
1616. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Listrik PLN dengan meteran 1 Listrik PLN tanpa meteran 2 } 1617 Listrik non-PLN 3 } Bukan listrik 4 }
B. BERAPA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI?	Meteran 1 Meteran 2 Meteran 3 1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1.300 Watt atau lebih (Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang)
1617. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Listrik 1 Elpiji 5.5 kg/blue gaz 2 Elpiji 12 kg 3 Elpiji 3 kg 4 Gas kota 5 Bogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 Lainnya 11 Tidak memasak di rumah 0

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN																																																	
1621. DALAM SEBUAH TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAN SAMPAH BERIKUT INI:	<table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. DISETOR KE BANK SAMPAH</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>B. DIDAUUR ULANG/DIBUAT KOMPOS/</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>C. PAKAI TERNAK (TERMASUK BUDI DAYA MAGGOT)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>D. DIBAKAR</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>E. DITIMBUN</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>F. DIBUANG SEMBARANGAN (SUNGAI/SELOKAN/DLL.)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>G. LAINNYA</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>1622. DALAM SETAHUN TERAKHIR, SEBERAPA KHAWATIR ANDA/ART LAINNYA DENGAN KEAMANAN DIRI SAAT BERJALAN KAKI SENDIRIAN PADA MALAM HARI DI LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH (SL.S terkecil)?</td><td><table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>TIDAK KHAWATIR</td><td>.....1</td><td>.....</td></tr><tr><td>CENDERUNG TIDAK KHAWATIR</td><td>.....</td><td>.....2</td></tr><tr><td>CENDERUNG KHAWATIR</td><td>.....</td><td>.....3</td></tr><tr><td>Khawatir</td><td>.....</td><td>.....4</td></tr><tr><td>Tidak relevan</td><td>.....</td><td>.....7</td></tr></tbody></table></td><td>.....</td></tr></tbody></table>		Ya	Tidak	A. DISETOR KE BANK SAMPAH	1	5	B. DIDAUUR ULANG/DIBUAT KOMPOS/	1	5	C. PAKAI TERNAK (TERMASUK BUDI DAYA MAGGOT)	1	5	D. DIBAKAR	1	5	E. DITIMBUN	1	5	F. DIBUANG SEMBARANGAN (SUNGAI/SELOKAN/DLL.)	1	5	G. LAINNYA	1	5	1622. DALAM SETAHUN TERAKHIR, SEBERAPA KHAWATIR ANDA/ART LAINNYA DENGAN KEAMANAN DIRI SAAT BERJALAN KAKI SENDIRIAN PADA MALAM HARI DI LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH (SL.S terkecil)?	<table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>TIDAK KHAWATIR</td><td>.....1</td><td>.....</td></tr><tr><td>CENDERUNG TIDAK KHAWATIR</td><td>.....</td><td>.....2</td></tr><tr><td>CENDERUNG KHAWATIR</td><td>.....</td><td>.....3</td></tr><tr><td>Khawatir</td><td>.....</td><td>.....4</td></tr><tr><td>Tidak relevan</td><td>.....</td><td>.....7</td></tr></tbody></table>		Ya	Tidak	TIDAK KHAWATIR	1		CENDERUNG TIDAK KHAWATIR		2	CENDERUNG KHAWATIR		3	Khawatir		4	Tidak relevan		7				
	Ya	Tidak																																															
A. DISETOR KE BANK SAMPAH	1	5																																															
B. DIDAUUR ULANG/DIBUAT KOMPOS/	1	5																																															
C. PAKAI TERNAK (TERMASUK BUDI DAYA MAGGOT)	1	5																																															
D. DIBAKAR	1	5																																															
E. DITIMBUN	1	5																																															
F. DIBUANG SEMBARANGAN (SUNGAI/SELOKAN/DLL.)	1	5																																															
G. LAINNYA	1	5																																															
1622. DALAM SETAHUN TERAKHIR, SEBERAPA KHAWATIR ANDA/ART LAINNYA DENGAN KEAMANAN DIRI SAAT BERJALAN KAKI SENDIRIAN PADA MALAM HARI DI LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH (SL.S terkecil)?	<table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>TIDAK KHAWATIR</td><td>.....1</td><td>.....</td></tr><tr><td>CENDERUNG TIDAK KHAWATIR</td><td>.....</td><td>.....2</td></tr><tr><td>CENDERUNG KHAWATIR</td><td>.....</td><td>.....3</td></tr><tr><td>Khawatir</td><td>.....</td><td>.....4</td></tr><tr><td>Tidak relevan</td><td>.....</td><td>.....7</td></tr></tbody></table>		Ya	Tidak	TIDAK KHAWATIR	1		CENDERUNG TIDAK KHAWATIR		2	CENDERUNG KHAWATIR		3	Khawatir		4	Tidak relevan		7																														
	Ya	Tidak																																															
TIDAK KHAWATIR	1																																																
CENDERUNG TIDAK KHAWATIR		2																																															
CENDERUNG KHAWATIR		3																																															
Khawatir		4																																															
Tidak relevan		7																																															
BLOK XVII. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN																																																	
1701. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA/MECAIRKAN KREDIT?	<table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>D. KREDIT DARI KOPERASI</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>E. PERORANGAN DENGAN BUNGA</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>F. PEGADAWAN</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>G. PERUSAHAAN LEASING</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMIDES)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>I. PINJAMAN ONLINE</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>J. PINJ. MEKAR</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>K. LAINNYA</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>1702. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI UANG ELEKTRONIK?</td><td><table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/E-WALLET)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/CHIP (E-MONEY)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr></tbody></table></td><td>.....</td></tr></tbody></table>		Ya	Tidak	A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	1	5	B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR	1	5	C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)	1	5	D. KREDIT DARI KOPERASI	1	5	E. PERORANGAN DENGAN BUNGA	1	5	F. PEGADAWAN	1	5	G. PERUSAHAAN LEASING	1	5	H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMIDES)	1	5	I. PINJAMAN ONLINE	1	5	J. PINJ. MEKAR	1	5	K. LAINNYA	1	5	1702. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI UANG ELEKTRONIK?	<table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/E-WALLET)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/CHIP (E-MONEY)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr></tbody></table>		Ya	Tidak	A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/E-WALLET)	1	5	B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/CHIP (E-MONEY)	1	5	
	Ya	Tidak																																															
A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	1	5																																															
B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR	1	5																																															
C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)	1	5																																															
D. KREDIT DARI KOPERASI	1	5																																															
E. PERORANGAN DENGAN BUNGA	1	5																																															
F. PEGADAWAN	1	5																																															
G. PERUSAHAAN LEASING	1	5																																															
H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMIDES)	1	5																																															
I. PINJAMAN ONLINE	1	5																																															
J. PINJ. MEKAR	1	5																																															
K. LAINNYA	1	5																																															
1702. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI UANG ELEKTRONIK?	<table><thead><tr><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/E-WALLET)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr><tr><td>B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/CHIP (E-MONEY)</td><td>.....1</td><td>.....5</td></tr></tbody></table>		Ya	Tidak	A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/E-WALLET)	1	5	B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/CHIP (E-MONEY)	1	5																																							
	Ya	Tidak																																															
A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/E-WALLET)	1	5																																															
B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/CHIP (E-MONEY)	1	5																																															

241

23

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL								
2006. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/ PENGUNAAN PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS:	Bulan Januari 2025		Bulan Desember 2024		Bulan November 2024		Bulan Oktober 2024	
	Ya 1 Tidak 5 → Desember '24	Ya 1 Tidak 5 → Oktober '24	Ya 1 Tidak 5 → November '24	Ya 1 Tidak 5 → Oktober '24	Ya 1 Tidak 5 → 2006	Ya 1 Tidak 5 → 2006	Ya 1 Tidak 5 → 2006	Ya 1 Tidak 5 → 2006
A. APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS PADA 4 BULAN TERAKHIR?	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D
B. APAKAH AUDA MENGETAHUI BERAPA NILAI YANG DITERIMA DARI PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?	 Bulan	 Bulan	 Bulan	 Bulan	 Bulan	 Bulan	 Bulan	 Bulan
D. DI MANA RUMAH TANGGA AUDA MENERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS TERSEBUT?	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5
E. UNTUK APA SAJA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS DIPERGUNAKAN? ADA LAGI?	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G
2007. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN/PROGRAM DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 5 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI (PKT) 1 5 C. BANTUAN PANGAN PEMERINTAH (BERAS DARI BUDAN PANGAN NASIONAL/BAPANAS) 1 5 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 1 5							
2008. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL?	Ya 1 Tuliskan No. Urut ART 1) 2) 3) 4) 5 Tidak 5							
Usaha mikro atau kecil bisa pada sektor apapun, tidak terbatas pada sektor industri atau perdagangan	Penjelasan: 1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. 2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.							

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL			
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:	(i) PELATIHAN TENIS PRODUKSI (ii) PERIZINAN KOMERSIL/SERTIFIKASI (iii) PEMASARAN DIGITAL USAHA (iv) PELAPORAN KEUANGAN (v) FASILITAS PERMODALAN	Ya Tidak	Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
2009. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?		Ya Tidak	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN TIDAK RUTIN?		Ya Tidak	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
		Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir	
		(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN	Rp.
		(ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK	Rp.
		(iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA	Rp.
		(iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	Rp.
		(v) BANTUAN RUTIN LAINNYA	Rp.
		Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir	
		(i) BANTUAN TIDAK RUTIN	Rp.

BLOK XXI. KETERANGAN PENGASUHAN ANAK UMUR 2-4 TAHUN			
PERTANYAAN	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (1)	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (2)	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut Anak Umur 2-4 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):			
2101. BERAPA BANYAK BUKU ANAK-ANAK ATAU BUKU BERGAMBAR YANG ADA DI RUMAH INI UNTUK (nama anak)?	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih
2102. SAYA INGIN MENGETAHUI BENDA-BENDA APA SAJA YANG (nama anak) MAINKAN KETIKA DIA BERMAIN DI RUMAH. APAKAH (nama anak) BERMAIN DENGAN:	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)
A. MAINAN BUATAN SENDIRI, SEPERTI BONEKA, MOBIL-MOBILAN, ATAU MAINAN LAINNYA YANG DIBUAT DI RUMAH?	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)
B. MAINAN YANG DIBELI DARI TOKO ATAU MAINAN BUATAN PABRIK?	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)
C. MAINAN DARI PERALATAN RUMAH TANGGA (SEPERTI MANGKUK, PANGCI) ATAU BENDA YANG DIDAPAT DARI LUAR RUMAH (SEPERTI RANTING POHON, BATU, KULIT KERANG, ATAU LAINNYA)?	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)	Ya Tidak A) B) C)

BLOK XXII. CATATAN					
Kunjungan I	:	Tanggal:			
Kunjungan II	:	Tanggal:			
			Mulai:	:	Selesai:
			Mulai:	:	Selesai:
Kode 705: Lapangan Usaha (dili oleh pemeriksa) 01 Pertanian tanaman padi dan palawija 02 Hortikultura 03 Perkebunan 04 Perikanan 05 Peternakan 06 Kehutanan dan pertanian lainnya 07 Perambangan dan penggalian 08 Industri pengolahan 09 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin 10 Pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi 11 Konstruksi 12 Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 13 Pengangkutan dan pergudangan 14 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 15 Informasi dan komunikasi 16 Aktivitas keuangan dan asuransi 17 Real estat 18 Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis 19 Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya 20 Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 21 Pendidikan 22 Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial 23 Kesenian, hiburan, dan rekreasi 24 Aktivitas jasa lainnya 25 Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja 26 Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya					

Lampiran 2 Metadata

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penduduk lanjut usia	Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas	$\text{Persentase penduduk lansia} = \frac{\text{jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$	Susenas Maret 2025
2	Komposisi penduduk lanjut usia menurut karakteristik	Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas	$\text{Persentase penduduk lansia menurut jenis kelamin}$ Contoh persentase penduduk lansia laki-laki = $\frac{\text{jumlah penduduk lansia laki-laki}}{\text{jumlah penduduk lansia}} \times 100$	Susenas Maret 2025
3	Rasio ketergantungan penduduk lanjut usia	Perbandingan antara penduduk berumur 60 tahun ke atas (lansia) terhadap penduduk berumur 15-59 tahun.	$\text{Rasio ketergantungan Lansia} = \frac{\text{jumlah penduduk lansia}}{\text{jumlah penduduk 15-59 tahun}} \times 100$	Susenas Maret 2025
4	Persentase penduduk lanjut usia menurut status keanggotaan rumah tangga	Status anggota rumah tangga terdiri dari kepala rumah tangga (KRT) dan anggota rumah tangga (ART). Yang dimaksud ART adalah pasangan KRT, mertua/orang tua, dan lainnya	$\text{Persentase penduduk lansia yang menjadi KRT} = \frac{\text{jumlah penduduk lansia yang menjadi KRT}}{\text{jumlah penduduk lansia}} \times 100$	Susenas Maret 2025
5	Persentase penduduk lanjut usia menurut status perkawinan	Status perkawinan yang dicatat mengacu pada status perkawinan pada saat pencacahan. Status perkawinan terdiri dari belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.	$\text{Persentase penduduk lansia yang berstatus kawin} = \frac{\text{jumlah penduduk lansia yang berstatus kawin}}{\text{jumlah penduduk lansia}} \times 100$	Susenas Maret 2025
6	Persentase penduduk lanjut usia menurut status tinggal bersama	Status tinggal bersama adalah status anggota rumah tangga yang tinggal bersama lansia dalam suatu rumah tangga lansia, yang terdiri atas lansia tinggal sendiri, bersama pasangan (suami atau isteri), bersama keluarga (suami/isteri dan anak), tiga generasi (bersama anak dan cucu), dan lainnya.	$\text{Persentase penduduk lansia yang tinggal sendiri} = \frac{\text{jumlah penduduk lansia yang tinggal sendiri}}{\text{jumlah penduduk lansia}} \times 100$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia	Proporsi penduduk lanjut usia yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya	$\frac{\text{Jumlah lansia yang dapat membaca dan menulis huruf latin / huruf lainnya}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
8	Persentase Penduduk penduduk lanjut usia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditematkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah	$\frac{\text{Jumlah lansia yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
9	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Lanjut Usia	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk umur 60 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.	$\frac{1}{\text{Jumlah penduduk 60 tahun ke atas}} \times \sum_{i=1}^n \text{Lama sekolah penduduk ke } -i \text{ yang berusia 60 tahun ke atas}$	Susenas Maret 2025
10	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Penggunaan Telepon Seluler	Perbandingan jumlah penduduk lanjut usia yang menggunakan telepon seluler terhadap seluruh penduduk lanjut usia	$\frac{\text{Jumlah lansia yang menggunakan telepon seluler}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
11	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Penggunaan Komputer	Perbandingan jumlah penduduk lanjut usia yang menggunakan komputer terhadap seluruh penduduk lanjut usia	$\frac{\text{Jumlah lansia yang menggunakan komputer}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
12	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Akses Internet	Perbandingan jumlah penduduk lanjut usia yang mengakses internet terhadap seluruh penduduk lanjut usia	$\frac{\text{Jumlah lansia yang mengakses internet}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dalam sebulan terakhir terhadap total penduduk lanjut usia. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis. Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam waktu yang sudah cukup lama, menahun dan belum sembuh, biasanya digunakan untuk sakit yang sudah cukup lama atau menahun.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
14	Angka kesakitan lansia	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap total penduduk lanjut usia. Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah ketika seseorang tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena keluhan kesehatan.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap dalam setahun terakhir terhadap total penduduk lanjut usia. Rawat inap adalah upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Responden yang pernah rawat inap adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
16	Rata-Rata Lama Rawat Inap dari Penduduk Lanjut Usia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir	Rata-rata lama rawat inap lansia yang pernah dirawat inap dalam setahun terakhir. Lama hari rawat inap adalah jumlah hari menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.	$\frac{\text{Jumlah hari rawat inap penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap}}$	Susenas Maret 2025
17	Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan (BPJS PBI, BPJS Non-PBI/Mandiri, Jamkesmas, Asuransi Swasta, Perusahaan/kantor) untuk rawat jalan terhadap total penduduk lanjut usia yang pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk rawat jalan}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia yang pernah rawat jalan}} \times 100$	Susenas Maret 2025
18	Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan (BPJS PBI, BPJS Non-PBI/Mandiri, Jamkesmas, Asuransi Swasta, Perusahaan/kantor) untuk rawat inap terhadap total penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap dalam sebulan terakhir.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk rawat inap}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia yang pernah rawat inap}} \times 100$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Persentase Lansia Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga	Distribusi pengeluaran adalah share pengeluaran dari masing-masing kelompok distribusi pengeluaran terhadap total pengeluaran. Kelompok distribusi pengeluaran: 1. 40% penduduk dengan pendapatan rendah 2. 40% penduduk dengan pendapatan sedang 3. 20% penduduk dengan pendapatan tinggi Sumber pembiayaan terbesar mengacu pada sumber pembiayaan terbesar yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam setahun terakhir. Sumber terbesar pembiayaan rumah tangga: 1. ART yang bekerja 2. Kiriman Uang/Barang 3. Investasi 4. Pensiunan	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang tinggal di rumah tangga pada masing-masing kelompok distribusi pengeluaran}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
20	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga		$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penduduk lansia pada masing-masing sumber terbesar pembiayaan rumah tangga}}{\text{Jumlah rumah tangga penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
21	Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal/rumah yang ditempati oleh rumah tangga pada waktu pencacahan. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal rumah tangga: 1. Milik sendiri 2. Kontrak/sewa 3. Bebas sewa 4. Dinas 5. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang tinggal pada masing-masing status kepemilikan bangunan tempat tinggal/rumah}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
22	Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni	Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang tinggal di rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Persentase Lansia yang Bepergian	Bepergian adalah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 3 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang bepergian}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
24	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/perobaan tindak kejahatan.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang pernah menjadi korban kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
25	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	Perbandingan antara rumah tangga lansia yang pernah menerima bantuan pangan (BPNT/Program sembako) terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas yang pernah menerima bantuan pangan (BPNT / program sembako)}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
26	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menerima PKH	Perbandingan antara rumah tangga lansia yang masih tercatat/menerima PKH terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas yang masih tercatat/menerima PKH}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
27	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha	Perbandingan antara rumah tangga lansia dalam setahun terakhir yang menerima kredit terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas dalam setahun terakhir yang menerima kredit}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
28	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Perbandingan antara lansia yang memiliki jaminan kesehatan terhadap jumlah lansia.	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang memiliki jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
29	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial	Perbandingan antara rumah tangga lansia dalam setahun terakhir yang memiliki/menerima jaminan sosial terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas dalam setahun terakhir yang memiliki/menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046

Homepage: <https://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-1036



9 772086 103005